

**POLA MIGRASI SUKU BATAK
SUATU TINJAUAN DALAM KAITAN GERAKAN
PEMBANGUNAN DESA TERPADU MARSIPATURE HUTANA BE
(GPDT-MHB)**

Kasus Pada Migran Batak Angkola Mandailing di Kota Bogor

OLEH

**BUDI BAIK SIREGAR
A 25 0711**



**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1994**

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



RINGKASAN

BUDI BAIK SIREGAR. Pola Migrasi Suku Batak, Suatu Tinjauan Dalam Kaitan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* (GPDT-MHB); Kasus Pada Migran Batak Angkola-Mandailing Di Kota Bogor), dibawah bimbingan WINATI WIGNA

Migrasi penduduk internal antar etnis sering menampilkan pola yang khas, baik dari segi intensitas migrasinya maupun dari segi penyesuaian di rantau, derajat permanensi, dan arus balik migrasi. Lelaki pada Orang Minangkabau tidak mendapatkan tempat yang kokoh dalam struktur sosial, sehingga melembaga dalam migrasi sirkulasinya; penduduk Pulau Jawa terikat kuat dalam suasana kosmis desa, sehingga berlaku sirkuler atau komutasi musiman; atau Migrasi Orang Bali cenderung sirkulasi karena prinsip *bilocal population*.

Migrasi Orang Batak sejak lama, seperti studi-studi terdahulu, memperlihatkan berpola migrasi khas pula, sedikit arus remigrasi ke tanah asal. Ciri lain yang ditunjukkan antara lain adalah (1) pola okupasi terbatas pada sektor pekerjaan tertentu saja; (2) Arus barang, uang kembali ke tanah asal lebih kecil ketimbang arus keluar. Pola itu terbentuk karena adanya pandangan kosmologis *Tano ni damang hangoluan*, *Ndang marimbar ndang marimbar tano hamatean* (kampung Ayah tanah kelahiran, tak peduli dimana tanah kematian) dan orientasi nilai budaya 3H *Hamoraon*, *Hagabeon*, *Hasangapon* (kekayaan materi, anak-kerabat, kemuliaan) yang diwujudkan dalam *sahala harajaon* atau kerajaan pribadi. Meskipun demikian bekerjanya nilai-nilai budaya tradisional harus memperhatikan *setting* siapa, dimana, dan pada saat kapan migrasi berlangsung.

Konsekuensi migrasi berpola *hanyut*, menguntungkan segi-segi politis, pembauaran dan komunikasi antar budaya, tetapi kurang menguntungkan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam kaitan ini Pemerintah daerah Tingkat I Sumatera Utara mencanangkan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* (GPDT-MHB), sejak awal Pelita Kelima.

Perencanaan kebijaksanaan kependudukan sebagai penunjang pembangunan nasional, regional, dan pedesaan, penting memperhatikan bentuk perilaku migrasi penduduk.

Telaah migrasi Orang Batak yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara bersifat urgens, karena GPDT-MHB belum menemukan format operasionalisasi yang ideal. Secara khusus telaah dipersempit pada migrasi Orang Batak Angkola Mandailing yang memiliki wilayah kebudayaan Tapanuli bagian Selatan.

Penelitian ini berupaya menjawab empat masalah pokok, yaitu (1) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi migrasi Orang Batak Angkola Mandailing, dan bagaimana pergeserannya; (2) Bagaimana pola adaptasi mereka di daerah tujuan, Kota Bogor; (3) Bagaimana dampak migrasi terhadap daerah asal dan bagaimana partisipasi dan opini mereka terhadap GPDT-MHB.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bogor (5 kecamatan Kodya Bogor, dan 6 kecamatan Kabupaten Bogor) kurang dari 7 bulan (5 Juli 1993-15 Januari 1994). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Proses penentuan responden adalah: (1) Memanfaatkan informan untuk memperoleh sejumlah nama orang-orang Angkola-Mandailing di Kota Bogor (2); Diperoleh nama 200 orang kepala rumahtangga (*puposive* responden menikah) dengan komposisi 25 orang *setting I* (migrasi sebelum Tahun 1966), 59 orang *setting II* (1966-1979), 116 orang *setting III* (1980-1993). Terhadap mereka dilakukan Survei terbatas, menggunakan format sensus BPS termodifikasi (Survei I); (3) Mengambil responden secara acak menurut *setting* sebesar 30 persen atau 60 orang untuk diwawancarai pada Survei kedua (Survei II). Disamping itu dilakukan wawancara mendalam terhadap 3 orang responden, pengamatan berpartisipasi, pencatatan lapang, dan wawancara bebas. Migrasi didekati secara sistematis dan historis.

Orang Batak Angkola-Mandailing tersebar merata di kota Kota Bogor, berasal dari beberapa kecamatan di Tapanuli Selatan, Perpindahan dari Tapanuli Selatan berlangsung sejak Tahun 1941, sebagian besar melakukan migrasi antara 1 sampai 5 kali sebelum ke Bogor lebih dari 30 tahun lalu. Mereka berangkat dari daerah asal kebanyakan memiliki tingkat pendidikan rata-rata lebih tinggi dari dari masyarakat yang ditinggalkan, belum menikah, berangkat seorang sendiri, dan berumur muda, tetapi karakteristik migran mengalami perubahan menurut *setting*.

Migran Batak Angkola Mandailing tinggal merata memungkinkan mereka berinteraksi secara intensif dengan masyarakat lokal dan memperkecil frekuensi interaksi sesama mereka. Tetapi interaksi sosial kolektif sesama migran tetap terwujud dalam kelompok-kelompok atau paguyuban atas dasar desa asal, marga atau keluarga, memperlihatkan orientasi yang kuat ke daerah asal dengan perangkat budayanya. Di sekitar tempat tinggal banyak juga migran yang menjadi anggota perkumpulan setempat yang beranggotakan umumnya masyarakat Sunda, suatu indikasi ke arah pembauran. Tetapi interaksi itu ternyata tidak berimplikasi pada penyempitan jarak sosial migran terhadap masyarakat lokal. Kebanyakan migran masih enggan menerima masyarakat lokal sebagai anggota keluarga, hanya bersedia menerima sebatas tetangga. Hal ini membuat dugaan sikap *lunak* lebih berarti *empati*, ketimbang *simpati* atau *antipati*. Faktor utama pengurangan jarak sosial migran terhadap masyarakat Sunda adalah amalgamasi disamping faktor pendidikan. Hasil lanjutan komunikasi sebagian telah mencapai akulturasi, seperti penggunaan Bahasa Sunda dalam keluarga prokreasi.

Sikap migran untuk kembali ke kampung halaman mengalami penurunan sejalan dengan keberhasilan di rantau. Migran yang berkeinginan untuk pulang pulang ke kampung tidak lebih dari separuh dan sikap ini menurun dengan semakin tertaklukkannya rantau. Hal ini tampaknya masih berada dalam *aturan main* migrasi *hanyut* pada Orang Batak, yaitu migrasi *hanyut*.

Mengirim uang ke kampung halaman tampak bukan kebiasaan migran, meski arus netto uang positif ke daerah asal. Di pihak lain arus manusia ke desa bersifat negatif karena migran terlibat aktif menarik saudara/kerabat dari desa mereka. Kemampuan seorang menarik saudara/kerabat dari daerah asal merupakan fungsi status bagi migran. Sikap migran membantu keluarga di desa tidak selalu berwujud uang atau materi secara langsung dalam bentuk uang atau barang tetapi bisa berwujud menarik salah satu anggota keluarga atau kerabat ke kota.

Hampir semua migran telah mendengar GPDT-MHB, tetapi pemahaman dan definisi mereka tentang program itu masih bervariasi. Informasi program umumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Alasan migrasi hanya ada dua yang kuat dan konsisten mempengaruhi motifasi migrasi, yaitu pandangan terhadap kebiasaan merantau sebagai saluran mobilitas sosial ekonomi dan keengganan bekerja di sektor pertanian. Alasan selebihnya meskipun ada yang berpengaruh kuat tetapi cenderung menguat belakangan. Artinya tekanan migrasi semakin lama terus mengalami perumitan. Motivasi memasuki kota Bogor umumnya sudah tertentu antara lain peluang berusaha dan pendidikan dan ajakan saudara kerabat. Saudara atau kerabat tidak hanya sebagai pelancar migrasi tetapi berperan kuat menarik pendatang baru. Keberanian migran menarik salah seorang saudara merupakan indikasi keberhasilan hidup di kota/rantau. Ada kecenderungan pekerjaan yang diperuntukkan kepada pendatang baru sama seperti migran yang menarik atau menampungnya. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan migran tidak bervariasi. Pekerjaan-pekerjaan yang diminati migran adalah perdagangan khususnya kedai kelontong, angkutan kota, pegawai negeri dan swasta, servis foto studio. Keempat sektor ini tampaknya mencerminkan ciri aristokrasi mereka di daerah asal yang mengutamakan otoritas dan formalitas pekerjaan.

Perdagangan kelontong merupakan sektor utama yang berkembang pesat sejak tahun 1980-an dan mempunyai pola pembiakan yang khas. Perkembangan perdagangan kelontong yang pesat merupakan konsekuensi dari resistensi sikap masyarakat lokal terhadap Orang Batak. Kehadiran migran Batak Angkola Mandailing di tengah pemukiman mereka, khususnya pedagang kelontong, memutarbalikkan anggapan atau etnosentrisme lama *Orang Batak Kasar* menjadi bersahabat. Gejala ini merupakan fungsi kebalikan dari geger budaya (*cultural shocks*) yang berdampak positif terhadap komunikasi antar budaya. Di pihak migran Angkola-Mandailing suasana komunikasi antara budaya ini bermanfaat kepentingan ekonomi, khususnya mereka yang terjun di bidang wirasawata.

Kota Bogor cenderung berciri budaya dominan Sunda dan masyarakatnya terbuka pada pendatang. Faktor ini memungkinkan pendatang Angkola-Mandailing bersikap *lunak* terhadap budaya *out-grup*, dan lebih jauh mengadopsi kebudayaan Sunda. Sikap *lunak* itu kemudian menyusut sejalan dengan penambahan pengalaman dan peningkatan status ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

diperoleh bukan dari sumber utama tetapi dari komunikasi organik dengan orang-orang di desa atau sesama migran kota. Konsekuensinya partisipasi riil migran hanya terfokus pada memberi sumbangan uang untuk membangun fasilitas umum di desa. Artinya partisipasi menurut defenisi migran bersifat *hibah*, parsial, dan tidak berkesinambungan. Khusus pada kalangan berpendidikan, ada juga yang terlibat proses pengkajian seperti seminar atau simposium tentang GPDT-MHB.

Animo migran Batak Angkola Mandailing untuk berpartisipasi dalam GPDT-MHB, cukup besar (88.3 persen) tetapi tidak semua tersalurkan karena karena komunikasi pembangunan GPDT-MHB bersifat irreversibel berupa himbauan psikologis. Himbauan terhadap migran tidak dilengkapi *counter* partisipasi migran dari segala lapisan di rantau.

Migrasi Orang Batak Angkola Mandailing terbentuk dari kombinasi faktor ekonomi dan sosial budaya yang bekerja secara fungsional dan semakin lama semakin rumit. Sebuah pekerjaan di rantau akan terbentuk menjadi okupasi bila pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik budaya aristokratis *raja-raja*, yang memungkinkan migran mewujudkan tujuan Hidup 3H. Keinginan Orang Angkola untuk pulang ke Kampung halaman dan menetap berkurang sesuai dengan perkembangan atau derajat *penaklukan* rantau. Arus Uang netto uang ke desa berlaku positif pada migran produktif.

Partisipasi riil migran Angkola Mandailing dalam GPDT-MHB masih jauh dibawah keinginan mereka untuk berpartisipasi, artinya terdapat potensi partisipasi yang besar, tidak terwujud. Migrasi Orang Batak Angkola-Mandaling khususnya dan Batak umumnya, seyogyanya tidak hanya dipandang dari sudut perannya dalam proses pemiskinan daerah asal, tetapi juga penting untuk memahami migrasi sebagai peristiwa pembebasan dari kemiskinan. Migrasi bukan sekedar penyebab tetapi juga akibat dari suasana tertentu dalam sistem sosial *huta*.

Dalam kaitan GPDT-MHB, seyogyanya itu partisipasi dan potensi partisipasi migran digali dan dikembangkan melalui saluran komunikasi pembangunan terpadu dan saling menguntungkan antara migran dengan masyarakat desa dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penting dibentuk lembaga khusus yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan masing-masing pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

**POLA MIGRASI SUKU BATAK
SUATU TINJAUAN DALAM KAITAN GERAKAN
PEMBANGUNAN DESA TERPADU MARSIPATURE HUTANA BE
(GPDT-MHB)**

Kasus Pada Migran Batak Angkola Mandailing di Kota Bogor

**OLEH :
BUDI BAIK SIREGAR
A25 0711**

KARYA ILMIAH
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian
pada

**JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
1994**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah yang dibuat oleh:

Nama Mahasiswa : Budi Baik Siregar
 Nomor Pokok : A 250711
 Bidang Keahlian : Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian
 Judul Penelitian : Pola Migrasi Suku Batak, Suatu Tinjauan
 Dalam Kaitan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu
 Pembangunan Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB),
 (Kasus Pada Migran Asal Tapanuli Selatan di
 Kota Bogor)

dapat diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dra. Winati Wigna MDS
NIP. 131 284 835

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu
Sosial Ekonomi Pertanian



Dra. H. Binasari Sanim, MSc.
NIP. 130 345 012

Tanggal Pengesahan : Mei, 1994

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Pembangunan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, anak kedelapan (10 bersaudara) dari Bapak G. Siregar dan Ibu B. Daulay.

Pendidikan formal SD dan SMTP ditamatkan penulis masing-masing di SD Negeri No 142746 Siunggam Kecamatan Padang Bolak Tapanuli Selatan dan SMP Negeri 11 Medan. Setelah menyelesaikan pendidikan pada SMA Negeri 8 Medan pada tahun 1988, penulis melanjutkan ke Institut Pertanian Bogor pada tahun yang sama melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Selanjutnya pada tahun ajaran 1990/1991 penulis diterima pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian dengan minat utama Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian. Penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Sosiologi Pedesaan selama satu semester di Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA KARYA ILMIAH INI BENAR
HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI
KARYA ILMIAH PADA SUATU PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA
MANAPUN

BOGOR, MEI 1994

BUDI BAIK SIREGAR

NRP. A25.0711

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai segenap alam. Atas ridho-Nya Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Migrasi intern suku bangsa diantaranya Suku Batak, telah lama berlangsung di Indonesia. Dalam khasanah penelitian migrasi penduduk, dimensi etnis belum banyak disoroti terutama yang berkaitan dengan program pembangunan regional dan pedesaan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil bagian di dalamnya dengan judul **Pola Migrasi Suku Batak, Suatu Tinjauan Dalam Kaitan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* (GDPT-MHB).**

Migrasi etnis Batak dalam kajian terdahulu memperlihatkan pola yang khas. Dengan berbekal teori yang diperoleh selama perkuliahan, penulis mencoba merumuskan kerangka berpikir yang kemudian diuji di lapangan. Karya ilmiah ini lebih merupakan langkah awal untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dari pola migrasi suku bangsa Batak. Namun pun demikian semoga tulisan ini bermafaat bagi kalangan yang membutuhkannya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran senantiasa diharapkan untuk perbaikan dan langkah lebih lanjut dari pesan tulisan ini.

Bogor, 9 Mei 1994

Penulis



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak ;

1. Semua dosen yang telah menambah wawasan dan pengetahuan penulis selama perkuliahan. Penghargaan dan ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Winati Wigna, MDS selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak H. Parlauangan Nasution, SH serta segenap Keluarga Besar Ikapada Jakarta atas bantuan moril dan materil yang diberikan selama melakukan penelitian;
3. Bapak Bapak Drs. Satyawan Sunito dan Ibu Ir. Nuraini, W.P. MS atas kesediaannya menjadi anggota Tim Penguji serta Bapak Drs. Endriatmo S. MS atas kesediaannya menjadi moderator seminar hasil penelitian;
4. Bapak Ir. Akhir Matua Harahap dan rekan Lisma Elita Lubis, Ir. Arfan Tanjung atas bantuan dan rasa persaudaraan yang diberikan.
5. Ir. Farid Siradju, Ir. Ari Bakti, Ir. Irawan, Ir. Egon Rizar, Ir. Asep dan Asep, Ir. Muslim, Bang Deri, Mas Taufiq, atas bantuan yang diberikan;
6. Rekan Susi, Jean, Dudi, serta rekan se-PKP lainnya atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan;
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu mulai dari perumusan konsep sampai pengetikan naskah.
8. Istimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang berjasa pada setiap langkah ananda

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
II. PENDEKATAN TEORITIS	7
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian dan Determinan Migrasi	7
2. Migrasi, Adaptasi dan Komunikasi Antara Budaya	18
3. Pola Adaptasi Migran Batak Di Perantauan	25
4. Tipologi Kebudayaan dan Perubahan Sosial Budaya Batak	27
5. Migrasi Dan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB)	39
B. Kerangka Pemikiran	52
C. Rumusan Hipotesis	58
D. Defenisi Operasional	59
E. Kerangka Analisis	67
III. PENDEKATAN LAPANG	74
A. Penentuan Lokasi Penelitian	74
B. Penentuan Sampel	75
C. Pengumpulan Data	76
D. Pengolahan Data	77
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	78
A. Kota Bogor	78
1. Letak Geografis dan Administrasi	78
2. Kependudukan	79
3. Sosial Ekonomi	82
B. Tapanuli Selatan	86
1. Kondisi Fisik, Geografis dan Administrasi	97
2. Penduduk	93
3. Pendidikan	98
4. Aktivitas dan Struktur Ekonomi	101
V. DIMENSI HISTORIS MIGRASI SUKU BATAK	113
A. Zaman Pra Batak	114
B. Periode Pra Abad 19	117
C. Periode Setelah Abad 19	121

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

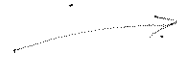
VI. HASIL PENELITIAN	127
A. Sistematika Migrasi	127
1. Migrasi Dari Tapanuli Selatan	128
2. Karakteristik Migran	131
a. Marga dan Marga Huta	132
b. Status atau Bentuk Kepergian	136
c. Keluarga Orientasi	137
d. Umur dan Status Perkawinan	138
e. Tingkat Pendidikan	141
3. Alasan Meninggalkan Tapanuli Selatan	143
a. Alasan Pendidikan	144
b. Alasan Ekonomi	146
c. Alasan Sosial Budaya	149
d. Alasan lain	153
4. Perubahan Alasan Migrasi	154
5. Migrasi Antara	156
6. Migrasi Ke Kota Bogor	157
7. Alasan Memilih Kota Bogor Sebagai Daerah Tujuan	160
8. Karakteristik Migran (Kini)	162
a. Tingkat Pendapatan	163
b. Karakteristik lain	166
B. Pola Adaptasi	167
1. Sikap Terhadap Budaya <i>In-group</i> dan <i>Out-group</i>	169
2. Jarak Sosial	177
3. Sikap dan Tindakan Migran	182
a. Sistem Religi	182
b. Sistem pengetahuan	183
c. Kesenian	185
d. Bahasa	185
e. Sistem kemasyarakatan	191
f. Sistem Mata Pencaharian (Ekonomi)	205
g. Peralatan dan Perlengkapan Hidup	216
4. Out-group lain	220
VII. POLA BERSIKAP DAN BERTINDAK MIGRAN TERHADAP DAERAH ASAL	223
A. Keinginan Untuk Menetap Di Daerah Asal (Sikap)	225
B. Tindakan	245
1. Arus Uang	245
2. Berkunjung ke Kampung Halaman	253
3. Menampung Keluarga Di Kota	255
4. Arus Informasi	256
VIII. MIGRASI DAN GPDT MARSIPATURE HUTANA BE	261
A. Pengenalan Program	262
B. Sikap Migran Terhadap GPDT-MHB	265
1. Kemiskinan sebagai latar belakang GPDT-MHB	265
2. Keinginan Berpartisipasi	268
3. Opini Migran Tentang Bentuk dan Saluran Partisipasi	270
C. Partisipasi Migran Dalam GPDT-MHB	271

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.





IX. KESIMPULAN.....	279
A. Batasan Migrasi Dan Implikasinya.....	279
B. Akar Migrasi Dan Implikasinya.....	281
Migrasi Dan Implikasi Kebijakan GPDT-MHB	287
DAFTAR PUSTAKA	288
LAMPIRAN	297



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Serta Kepadatan Beberapa Kota Besar Di Indonesia Tahun 1990	2
2.	Intensitas Migrasi Bangsa Utama Di Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1930	3
3.	Proyeksi Perkiraan Seluruh Jumlah Orang Batak Pada Tahun 1961, Berdasarkan Atas Angka-Angka Keseluruhan Tahun 1930	4
4.	Faktor-faktor Migrasi	13
5.	Nilai-Nilai Budaya Batak (Toba dan Angkola Mandailing).	29
6.	Model Of, Model For, dan Operasional Pembangunan (GPDT-MHB)	47
7.	Matriks Pengumpulan Data	77
8.	Perkembangan Penduduk Kotamadya Bogor Dan Lima Kecamatan di Kabupaten Bogor, Tahun 1980-1990	80
9.	Banyaknya Desa Menurut Kategori <i>Rural</i> dan <i>Urban</i> di Lima Kecamatan, Kabupaten Bogor Tahun 1991	81
10.	Banyaknya Fasilitas Pendidikan di Kotamadya Bogor dan Enam Kecamatan (Lingkar Kotamadya) Kabupaten Bogor Tahun 1990	83
11.	Persebaran Migran Sirkuler di Kelurahan Kebon Kelapa Menurut Pekerjaan dan Tempat Tinggal dan Tempat Pemandokan, Februari 1988	85
12.	Banyaknya Curah Hujan Menurut Laporan Stasiun Klimatologi Di Tapanuli Selatan 1985 (mm)	92
13.	Perkembangan Kepadatan Penduduk Di Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan Tahun 1980-1990	94
14.	Perkembangan Kepadatan Penduduk Tapanuli Selatan Dan Dati II Lainnya Di Sumatera Utara Menurut Sensus 1961, 1971, dan 1980	95
15.	Banyaknya Penduduk Yang Ditransmigrasikan Ke Tapanuli Selatan Sampai Tahun 1985	96

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Majalah Ilmiah IPB University

IPB University

16.	Jumlah Penduduk Tapanuli Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 1980, 1985, dan 1990 Diperinci per Kecamatan	97
17.	Perkembangan Sarana Pendidikan Di Tapanuli Selatan Pada Pelita IV.....	100
18.	Perkembangan Sarana Pendidikan Madarasah dan Pesanteren Di Tapanuli Selatan Tahun 1980-1990	101
19.	Luas Sawah di Tapanuli Selatan Menurut Jenis Irigasi Tahun 1984-1988.....	103
20.	Jumlah Penduduk Menurut Matapencaharian Utama di Tapanuli Selatan Tahun 1980	103
21.	Luas Lahan, Produktifitas, dan Produksi Padi Kabupaten Tapanuli Selatan Diantara Kabupaten Lainnya Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1990	105
22.	Jumlah Ternak Besar Di Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan Tahun 1980, 1985, dan 1990	106
23.	Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Di Tapanuli Selatan Menurut Jenis, Tahun 1985-1990	109
24.	Banyaknya Desa Di Tapanuli Selatan Menurut Jaraknya Dari Kota Kecamatan Tahun 1986	110
25.	Panjang Jalan Di Tapanuli Selatan Menurut Statusnya Tahun 1984-1988.....	111
26.	Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kotamadya Dan Status Desa Di Sumatera Utara Tahun 1993	112
27.	Perhitungan Orang Batak Tapanuli Dan Pesisir Timur Tahun 1930.....	124
28.	Distribusi Migran Menurut Kecamatan Daerah Asal, Tahun 1993.....	129
29.	Distribusi Migran Menurut Marga.....	132
30.	Hubungan Setting Migrasi Dengan Status Marga Huta	133
31.	Distribusi Bentuk Keberangkatan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Pertamakali Menurut Setting Migrasi.....	136
32.	Distribusi Jumlah Anak Dalam Keluarga Orientasi Migran (termasuk Migran) Tahun 1993 (N-118).....	138
33.	Hubungan Setting Migrasi Dengan Umur Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Pertamakali	139

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



34. Hubungan Setting Migrasi Dengan Status Perkawinan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan	140
35. Hubungan Setting Migrasi Dengan Pendidikan Responden Meninggalkan Daerah Asal Pertamakali	142
36. Alasan-alasan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Dan Tingkat Pengaruh Masing-Masing Alasan (N=60).....	143
37. Hubungan Setting Dengan Alasan-alasan Migrasi dari Tapanuli Selatan (Respon Ganda, N=60)	155
38. Distribusi Migran Menurut Frekuensi Migrasi (termasuk Migrasi ke Bogor) Tahun 1993 (N=60)	156
39. Distribusi Migran Menurut Tempat Tinggal di Kota Bogor Tahun 1993.....	159
40. Hubungan Setting Dengan Alasan-alasan Migran Memilih Kota Bogor Sebagai Daerah Tujuan, dan Faktor Pelancar Migrasi. (Respon Ganda, N=60)	162
41. Distribusi Tingkat Pendapatan Migran Angkola-Mandailing Di Kota Bogor	164
42. Persepsi Migran Angkola-Mandailing tentang Keadaan Ekonominya Sesudah Migrasi	165
43. Karakteristik Migran Batak Angkola-Mandailing Di Kota Bogor	167
48. Distribusi Sikap-Sikap Migran Terhadap Kebudayaan <i>In-group</i> (Batak Angkola-Mandailing) dan Kebudayaan <i>Out-group</i> (Sunda)	170
49. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Sikap Terhadap Budaya Batak Angkola Mandailing (<i>In-group</i>) dan Budaya Sunda (<i>Out-grup</i>)	173
50. Hubungan Karakteritik Migran Dengan Jarak Sosialnya Dengan Masyarakat <i>Out-group</i> Sunda (N=60)	178
51. Hubungan Kepemilikan Rumah Dengan Jarak Sosial Terhadap Masyarakat Sunda (<i>Out-grup</i>)	179
52. Skor Rata-rata Sikap Terhadap Budaya In-Group Dan Out-Group Menurut Unsur Budaya	181
53. Pengetahuan Migran Tentang Cerita-Cerita/Dongeng Rakyat Batak Angkola-Mandailing dan Sunda Serta Sikap dan Tindakan Menceritakan Kepada Keturunannya	184

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



54.	Bahasa Utama Yang Digunakan Migran Menurut Lawan Bicara	186
55.	Keikutsertaan Migran Dalam Organisasi/Kelompok/Perkumpulan Etnis dan Organisasi/Kelompok/Perkumpulan Masyarakat Setempat Serta Status Keanggotaannya (N=60).....	192
56.	Persepsi Migran Tentang Suasana Bergaul Dengan Masyarakat Lokal (out-group)	193
57.	Persepsi Migran Tentang Pengalaman Bergaul Dengan Masyarakat Lokal (out-group)	194
58.	Distribusi Migran Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 1993	207
59.	Karakteristik Pola Okupasi Batak Angkola Mandailing Di Kota Bogor	216
60.	Frekuensi Jawaban Migran Atas Pertanyaan " <i>Dalam Hal Kebiasaan Makan, Apakah Bapak Mengkonsumsi Makanan Khas Masyarakat Setempat (Sunda)</i> "	218
61.	Frekuensi Makan Mahasiswa Asal Tapanuli Selatan, Sebelum Dan Sesudah Bertempat Tinggal Di Bogor	219
62.	Lingkungan Pergaulan Migran Angkola-Mandailing dengan Out-Grup selain Sunda Di Kota Bogor, dan Out-grup Yang Paling Disengani sebagai Teman Bergaul (Respon Ganda).....	221
63.	Hubungan Karakteristik Migran Dengan Keinginan Untuk Pulang Ke Kampung Halaman	226
64.	Hubungan Status Marga Migran Dalam Huta Asal Dengan Keinginan Untuk Pulang Ke Kampung Halaman	233
65.	Tindakan Migran Menerima-Mengirim Uang dari dan ke Desa (Setting Enam Bulan)	246
66.	Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Mengirim Uang Ke Desa Dalam Waktu 6 Bulan	247
67.	Hubungan Karakteristik Individu Dengan Ada-Tidaknya Pengiriman Uang Ke Kampung Halaman (Setting 6 bulan).....	248
68.	Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Pulang Atau Berkunjung Ke Kampung Halaman Dan Jumlah Uang Yang Dikeluarkan (6 Bulan) Dan Tujuan Pulang.....	254

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

69.	Jumlah Pendatang Baru yang Ditampung atau Diterima Oleh Migran Menurut Status Kedatangannya ke Kota Bogor (Enam Bulan) Dan Tujuan Pulang	256
70.	Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Mengirim Dan Menerima Surat Selama Enam Bulan	257
71.	Struktur Informasi GPDT-MHB Yang Diperoleh Oleh Migran.....	264
72.	Alasan-Alasan Migran Tentang Keberadaan Kemiskinan di Daerah Asalnya	268
73.	Aspirasi Migran Tentang Bentuk Bantuan Partisipasinya Dalam GPDT-MHB	270
74.	Pendapat-Pendapat Tentang Cara Memberikan Bantuan Dalam GPDT-MHB	271
75.	Hubungan Karakteristik Migran Dengan Partisipasi Nominalnya Dalam GPDT-MHB	272

Lampiran

1.	Waktu dan Bentuk-Bentuk Gerak Penduduk di Dunia Ketiga.....	296
2.	Skor-Skor Sikap Migran Terhadap Budaya Batak (In-group) Dan Budaya Sunda (Out-group)	298
3.	Hubungan Karakteristik Migran (Individu dan Keluarga) Dengan Penggunaan Bahasa Utama	299
4.	Hubungan Karakteristik Migran Dengan Saluran Partisipasi Yang Diinginkan Dalam GPDT-MHB.....	300

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR GAMBAR

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Perubahan Pola Kebudayaan	19
2.	Kerangka Pemikiran Konseptional Pola Migrasi Suku Batak Suatu Tinjauan Dalam Kaitan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be	57
3.	Bagan Pembiakan Pedagang Kelontong Desa S di Kota Bogor Tahun 1979-1993	240
4.	Transformasi Struktur Sosial Warga Desa S Menjadi Kelompok migran IMS di Kota Bogor	240
5.	Bagan Proses Migrasi <i>Hanyut</i>	286
<u>Lampiran</u>		
1.	Konsepsi Dalihan Natolu Dan Silsilah Kekerabatan Dalihan Natolu	301
2.	Penyebaran Suku Bangsa Di Sumatera Utara	302
3.	Peta Kabupaten Tapanuli Selatan	303
4.	Wilayah Fisiograsi Propinsi Sumatera Utara	304
5.	Peta Curah Hujan Di Tapanuli Selatan	305
6.	Propinsi Sumatera Utara: Peta Perkebunan Besar	306



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kependudukan. Penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umur muda yang berarti angka ketergantungan tinggi, laju pertumbuhan penduduk alami yang tinggi, serta mobilitas penduduk yang tidak terkendali, merupakan masalah yang sulit diatasi. Karakteristik penduduk yang demikian dianggap tidak menguntungkan pembangunan nasional, regional maupun pembangunan pedesaan.

Pulau Jawa yang luasnya hanya empat persen Indonesia harus mengakomodasi sekitar 60 persen penduduk atau lebih dari 100 juta jiwa pada tahun 1988. Menurut standar Eropah atau Amerika Pulau Jawa dewasa ini sudah tergolong Kota Pulau. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir terlihat adanya penurunan konsentrasi relatif, tetapi secara absolut penduduk pulau ini masih terus bertambah. Pada tahun 2000 penduduk pulau Jawa diperkirakan akan berjumlah lebih dari 130 juta jiwa (Wirosardjono, 1988). Penurunan jumlah relatif penduduk pulau jawa dipengaruhi oleh keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) dalam menurunkan pertumbuhan penduduk alami serta Program Transmigrasi yang mengikuti program pemerintah atau spontan, ke luar pulau Jawa. Di samping itu, faktor pengaruh lain tidak terlepas dari munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti pulau Sumatera, sehingga otomatis terjadi perpindahan penduduk ke sana. Keadaan ini membenarkan pernyataan bahwa untuk memere-ratakan penduduk dan pemeratakan pembangunan, perlu dilakukan penebaran "gula-gula" ke kota atau ke daerah lain untuk menahan arus penduduk yang menuju ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Ramto, 1976).

Masalah kependudukan di Indonesia juga muncul dari urbanisasi secara besara-besaran. Catatan dari para peneliti sampai saat ini gerak penduduk desa kota masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Fungsi kota sebagai penerima migran sering disebut sebagai *sang penyelamat*, tetapi ada pula yang menganggapnya sebagai suatu *jebakan*, yang bila diterjemahkan menurut perspektif pem-

@HalipurnihIPBUniversity

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

bangunan kurang menguntungkan terutama di tingkat pedesaan. Berkembangnya kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi membuat penduduk *menyerbu* semua jenis pekerjaan, baik yang formal (pegawai negeri, karyawan swasta atau buruh industri) maupun yang informal, yaitu pekerjaan yang diciptakan sendiri oleh pelakunya, seperti berdagang dan menjual jasa atau tenaga.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Serta Kepadatan Beberapa Kota Besar Di Indonesia Tahun 1990

Kota (Km ²)	Luas(Km ²)	Jumlah Per Km	Kepadatan
Jakarta	664.32	8.222.515	12.777
Surabaya	274.00	2.473.272	9.026
Bandung	160.00	2.056.915	12.856
Semarang	373.60	1.249.230	3.343
Medan	265.00	1.730.052	6.528
Palembang	224.00	1.140.918	5.930
Ujung Pandang	75.77	944.370	5.373

Sumber : Hamid dan Ahmad, 1992

Sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan sudah semakin besar. Dari penduduk sebesar 179.321.641 orang, sebesar 55.460.406 jiwa (30,93 persen) bertempat tinggal di perkotaan, suatu peningkatan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan sensus hasil tahun 1980, sebesar 23 persen. Tahun 2000 diperkirakan proporsi penduduk perkotaan akan melonjak menjadi 40 persen. Kepadatan perkotaan akibat perpindahan penduduk, dengan nilai-nilai sosial budayanya akan membawa implikasi yang berlainan dalam upaya pengelolaan wilayah (Hamid dan Ahmad, 1992).

Aspek lain yang turut mewarnai masalah kependudukan adalah migrasi internal penduduk dari berbagai suku bangsa. Walaupun secara makro fenomena demografis itu tidak begitu penting karena hanya lima persen dari penduduk Indonesia pada tahun 1971 yang dilahirkan di luar tempat asalnya, namun bila mengikuti analisis perbandingan antar sensus ditunjukkan bahwa secara mikro dimensi wilayah atau etnis, menjadi sangat berarti, terutama dikaitkan dengan perpektif sejarah (Titus *dalam* Basri, 1988).

Migrasi penduduk beberapa suku bangsa di Indonesia telah berlangsung lama,

masing-masing suku memperlihatkan kecenderungan yang berbeda dalam berperilaku baik di daerah tujuan maupun dalam kaitannya dengan daerah asalnya. Perbedaan perilaku ini membawa akibat yang berbeda pula terhadap daerah asal maupun daerah tujuan, walaupun umumnya dapat memperbaiki kesejahteraan pelakunya.

Salah satu suku bangsa yang banyak melakukan migrasi adalah suku bangsa Batak, dalam ungkapan mereka lebih dikenal dengan sebutan *mangaranto* (merantau). Pada tahun 1930 jumlah orang Batak yang berada di luar wilayahnya sendiri sebesar 140.776 orang atau sebesar 15,15 persen dari total penduduk suku Batak. Diantara beberapa suku bangsa utama di Indonesia yang melakukan migrasi, suku Batak menempati peringkat kedua di bawah suku bangsa Bawean. Pada saat yang sama suku bangsa lain yang mempunyai intensitas lebih dari 10 persen berturut-turut adalah Banjar, Minangkabau, dan Bugis.

Tabel 2. Intensitas Migrasi Bangsa Utama Di Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1930

Suku Bangsa	Di Wilayah Sendiri		Di Wilayah Luar		Total
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Bawean	29.305	64,1	16.406	35,9	45.711
Batak	778.686	84,7	140.776	15,5	919.462
Banjar	809.842	85,8	134.393	14,2	944.235
Minang	1.717.031	89,0	211.291	11,0	1.928.322
Bugis	1.308.334	89,5	162.701	10,5	1.543.035
Ambon	211.407	90,9	21.126	9,1	232.573
Mandar	175.271	93,0	13.915	7,0	189.186
Palembang	733.210	95,1	37.707	4,9	770.917
Makasar	630.146	98,0	12.574	2,0	642.720
Timor	1.614.738	99,1	14.126	0,9	1.928.322

Sumber : Nain 1973

Kajian pola perilaku migrasi dari berbagai peneliti memberi pemahaman, motivasi utama migrasi penduduk adalah ekonomi, disamping faktor sosiobudaya. Namun demikian penyesuaian hidup di rantau, derajat permanensi, dan dampak yang ditimbulkannya berbeda satu sama lain. Faktor ekonomi dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan pendapatan, oleh karena di daerah atau di pedesaan tidak tersedia peluang berusaha dan berkarya yang mendorong peningkatan taraf hidup. Sementara itu, kota dan

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi banyak memberikan harapan bagi migran untuk turut ambil bagian di dalamnya.

Secara politis migrasi internal suku bangsa dapat mempercepat pembauran, memberi peran dalam memperlerat persaudaraan antar suku bangsa yang coraknya beragam. Migrasi dari berbagai hal dapat diterima sebagai dinamika masyarakat yang berdampak positif bagi pembangunan nasional, sebaliknya, terdapat pula dampak negatif yang timbul.

Batak adalah salah satu suku bangsa yang tergolong mobil, meski perannya dalam pergaulan antar bangsa ketinggalan dibanding suku bangsa lainnya. Berdasarkan data sensus tahun 1930, intensitas migrasi Orang Batak pada Tahun 1961 diproyeksikan menjadi 39,6 persen (Naim, 1979).

Tabel 3. Proyeksi Perkiraan Seluruh Jumlah Orang Batak Pada Tahun 1961, Berdasarkan Atas Angka-Angka Keseluruhan Tahun 1930

P_0 (1930)	r	P_a (1961)	75 Persen Dari Jumlah Penduduk Tapanuli Tahun 1961	Migrasi di Luar Tapanuli	
				Jumlah	Persentase
919.462*	1,5	1.480.640	1.233.103**	257.527	17,4
	1,6	1.528.030		304.327	20,0
	1,7	1.576.899		353.796	22,4
	1,8	1.627.280		404.177	24,8
	1,9	1.679.219		456.116	27,2
	2,0	1.732.762		509.659	29,4
	2,1	1.787.957		564.854	31,6
	2,2	1.844.854		621.751	33,0
	2,3	1.903.503		680.400	35,7
	2,4	2.962.957		740.854	37,7
	2,5	2.026.269		803.166	39,6

Sumber : Naim, 1979

Keterangan : * termasuk jumlah seluruh orang Batak lainnya.

** keseluruhan penduduk Tapanuli pada tahun 1961, sebesar 1.609.346 jiwa.

P_0 Jumlah penduduk tahun awal (ke-0)

P_t Jumlah penduduk tahun ke-t

Migrasi orang Batak masih berlangsung sampai sekarang dengan intensitas dan penyebaran yang tidak diketahui secara pasti. Menurut rentang waktu migrasi diduga jumlah orang Batak yang *merantau* sudah lebih besar dari mereka tinggal di daerah asal. Sejalan dengan gerak pembangunan yang membutuhkan sumberdaya manusia dan dana, kepergian orang Batak ke luar daerah membawa permasalahan tersendiri. Perila-

ku migrasi Orang Batak memiliki ciri khas, perantau umumnya tidak berniat kembali ke daerah asal (*hanyut*) dan arus *remittences* kecil. Gejala ini kurang menguntungkan pembangunan daerah, dan dikhawatirkan akan terjadi proses pengkurusan (*brain drain*) secara berkesinambungan.

Sebagian Daerah Tapanuli yang merupakan wilayah berkembangnya kebudayaan Batak, kini termasuk salah satu kantong kemiskinan di Indonesia (Analisa, 1990). Dalam kaitan ini Pemerintah Daerah Sumatera Utara mencanangkan suatu formal pendekatan pembangunan sosiokultural, yang dikenal dengan nama Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* (GPDT-MHB). Pendekatan pembangunan serupa telah pernah dilaksanakan di daerah lain, misalnya Program Pembangunan Gebu Minang (Gerakan Seribu Minang) di Sumatera Barat atau model pembangunan regional yang tujuannya kurang lebih sama seperti, Gerbang Mapak (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pakidulan) di Jawa Barat Bagian Selatan atau Gersamata di Sulawesi Tenggara. GPDT-MHB dimaksudkan untuk memancing partisipasi semua pihak, termasuk perantau, mengikis keterbelakangan desa miskin di Sumatera Utara.

Dilibatkannya para perantau sebagai salah satu komponen GPDT-MHB tidaklah berlebihan, mengingat kenyataan, hampir setiap kejadian migrasi diikuti dengan kehilangan sumberdaya lokal, dana dan sumberdaya manusia. Orang Batak yang merantau banyak yang berhasil meningkatkan status sosial ekonominya di perantauan, pada awalnya tergantung pada suplai ekonomi daerah. Dalam kaitan inilah upaya untuk mengembalikan sumberdaya tersebut menjadi penting.

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka perencanaan kebijaksanaan di bidang kependudukan sebagai penunjang pembangunan nasional, regional, dan pedesaan, perlu diketahui secara jelas pola dan perilaku migrasi penduduk dari berbagai suku bangsa di Indonesia (Abustam, 1987). Khususnya studi migrasi orang Batak ke luar daerah masih terbatas, walaupun prosesnya telah berlangsung beberapa selama generasi. Oleh sebab itu, studi tentang pola perilaku migrasi orang Batak masih penting dilaksanakan. Studi ini diarahkan pada

telaah spesifik pada salah sub suku Batak, yaitu Angkola-Mandailing.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran pada sub bab latar belakang, maka perlu dipertanyakan beberapa permasalahan berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan orang Batak Angkola-Mandailing melakukan migrasi keluar daerah dan bagaimana pola perubahan faktor penyebab itu ?
2. Bagaimana pola adaptasi migran orang Batak Angkola-Mandailing di perantauan.
3. Apa dampak migrasi orang Angkola Mandailing terhadap daerah asal ?
4. Sejauh mana partisipasi migran dalam GPDT-MHB ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pola dan proses migrasi orang Batak Angkola-Mandailing serta dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah asal.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan wadah melakukan pengkajian secara ilmiah mengenai fenomena-fenomena sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat, melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat untuk kemudian menuangkan hasilnya ke dalam bentuk karya ilmiah.
2. Bagi kalangan umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah pemahaman serta wawasan mereka terhadap migrasi penduduk umumnya, dan migrasi orang Batak Angkola-Mandailing khususnya.
3. Bagi pemerintah Daerah Kotamadya Bogor, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijaksanaan yang berkaitan dengan migrasi penduduk.
4. Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memantapkan perencanaan serta implementasi lebih lanjut dari program pembangunan GPDT-MHB, dimana perantau merupakan salah satu komponennya.



II. PENDEKATAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Determinan Migrasi

Bagaimana memberi definisi tentang migrasi serta apa yang seharusnya termasuk dalam migran sampai sekarang masih tetap menjadi persoalan bagi kalangan ilmuwan (Goldscheider, 1985). Penelaahan migrasi penduduk secara sistematis mulai dilakukan oleh ahli-ahli demografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi sosial pada akhir abad 19. Pada tanggal 17 Maret 1885 seorang kebangsaan Inggris, Revenstein menyajikan suatu pemikiran tentang pokok-pokok hukum migrasi yang disampaikan dalam rangka pertemuan *Royal Statistical Society* (Lee, 1966). Hukum-hukum migrasi yang dikemukakan oleh Revenstein adalah : *migrasi cenderung dilakukan dalam jarak dekat; migrasi berlangsung secara bertahap; setiap migrasi menimbulkan arus balik; penduduk kota kurang berminat melakukan migrasi dibandingkan penduduk pedesaan; wanita lebih suka bermigrasi dalam jarak dekat; perbaikan transportasi, pembangunan industri dan perdagangan menjadi pendorong terjadinya migrasi; alasan ekonomi merupakan dorongan utama melakukan migrasi.*

Pemikiran Revenstein, kemudian menjadi sumber inspirasi dari ilmuwan lain untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam pembentukan teori-teori baru yang lebih akurat untuk digunakan dalam menelaah gerak penduduk secara umum. Pokok-pokok pemikiran Revenstein tidak luput dari kritik-kritik para ahli yang muncul kemudian, namun demikian sampai saat ini teori tersebut masih sering digunakan.

Teori migrasi yang muncul kemudian dan tidak kalah populernya adalah teori dorong-tarik (*pull-push factor theory*) yaitu alasan meninggalkan daerah asal dipandang sebagai faktor pendorong sedangkan alasan memilih daerah tujuan merupakan faktor penarik (Rusli, 1983). Germani (1965) dan Mobougnye (1970) seperti yang dikutip oleh Rusli (1983), memandang teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak memperhitungkan aspek-aspek pribadi, sosial dan budaya.

Untuk menambah khasanah teori-teori migrasi Stouffer mengemukakan pemiki-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ran baru yang disebut teori kesempatan antara (*intervening opportunities theory*). Teori ini menyatakan *jumlah orang yang pergi ke suatu daerah dengan jarak tertentu berbanding langsung dengan jumlah kesempatan-kesempatan pada jarak tersebut dan berbanding terbalik dengan jumlah kesempatan-kesempatan antara*. Menurut Rusli (1983), operasionalisasi teori ini sulit diterapkan, yakni mengukur atau mendefinisikan kesempatan-kesempatan antara yang dimaksud.

Dari tiga komponen perubahan kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi, migrasi merupakan komponen yang paling sulit dirumuskan. Selain merupakan transaksi fisik, migrasi juga menjalani proses transaksi sosial. Kekhasan lain, migrasi dapat berlangsung berulang-ulang sedangkan fertilitas dan mortalitas hanya sekali dalam siklus hidup manusia (Golshceider, 1985).

Migrasi harus memperlihatkan terjadinya perubahan tempat tinggal secara permanen dengan tidak memperhatikan jarak yang ditempuh dalam proses perpindahan itu (Lee, 1966). Rusli (1983) menjelaskan seseorang dikatakan migrasi apabila ia melakukan perpindahan tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu secara parmanen atau relatif parmanen, dengan menempuh jarak minimal tertentu atau wilayah geografis tertentu, biasanya berupa wilayah administratif. Migrasi dalam sensus tahun 1971 dan 1980 secara operasional diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu, dalam pengertian seseorang melakukan migrasi bila melintasi batas wilayah propinsi dan lamanya tinggal di propinsi tujuan minimal 6 bulan (Mantra, 1981).

Penentuan dimensi waktu dalam batasan migrasi lebih rumit daripada dimensi ruang (*spatial*). Prothero dan Chapman (1985), dalam Abustam (1987), menyajikan batasan-batasan migrasi di Dunia Ketiga yang dirangkum dari beberapa hasil penelitian (Lampiran 1). Meskipun demikian batasan ruang perdefenisi migrasi juga sering berbeda antara satu peneliti dengan yang lain. Goldshceider (1985) memandang umumnya penerobosan tapal batas merupakan indikator utama kejadian migrasi. Sedangkan perpindahan penduduk yang terjadi secara internal atau secara sosiologis berarti perpindahan dalam sistem sosial, maka perpindahan itu tergolong mobilitas.

Migrasi memberi konsekuensi terhadap sistem-sistem yang terlibat. Bila konsekuensi ini diperhitungkan maka pendekatan migrasi dapat dipelajari secara sistematis. Migrasi dari satu sistem ke sistem lain dipandang sebagai kejadian tunggal dan migrasi-migrasi berikutnya juga dipandang sebagai kejadian bebas dari migrasi sebelumnya, terlepas dari apakah migrasi itu kembali ke sistem semula atau ke sistem-sistem lain (Goldshceider, 1985).

Di Indonesia ditemukan dua pola migrasi yang khas, yaitu *merantau* dan *bebara* (Hamid dan Ahmad, 1992). Keduanya berlaku pada golongan masyarakat dengan konotasi budaya tersendiri yang sulit diterjemahkan ke dalam terminologi umum. *Merantau* dapat diterangkan melalui pola migrasi suku Minangkabau, dimana seseorang lelaki ke luar dari kampung halaman untuk jangka waktu lama atau sebentar dan dengan maksud menetap atau tidak kembali. Satu aspek penting dari *merantau* pada orang Minangkabau adalah kecenderungan perantau untuk tetap tinggal di koloninya yang baru (Naim, 1973). Secara garis besar kegiatan *merantau* dapat diidentifikasi melalui enam ciri ciri, sebagai berikut : (1) Meninggalkan kampung halaman ; (2) Dengan kemauan sendiri; (3) Untuk jangka waktu lama atau tidak; (4) Dengan tujuan mencari penghidupan, pengalaman atau pendidikan; (5) Bermaksud kembali ke kampung halaman; (6) *Merantau* sifatnya melembaga dan membudaya.

Berbeda dengan *merantau*, *bebara* menunjuk pada kepergian para petani di Jawa ke luar desa untuk mencari pekerjaan pada masa senggang menunggu waktu panen atau musim paceklik. Kaum *bebara* akan melakukan pekerjaan apa saja yang dapat mendatangkan penghasilan dari berjualan makanan, bertukang, atau menjual tenaga di kota-kota. Prioritas pertama dari tujuan mereka adalah kota-kota terdekat. Dengan demikian *bebara* pada dasarnya bersifat sementara, dalam arti bahwa mereka senantiasa berniat akan kembali ke desanya, tetapi pengertian "sementara" dalam konteks *bebara* dewasa ini sudah berbilang puluhan tahun (Hamid dan Ahmad, 1992).

Mengacu pada beberapa definisi di atas perlu ditegaskan bahwa migrasi merupakan peristiwa pelintasan tapal batas dimana pelintasan tersebut membawa

konsekuensi tertentu pada pelakunya dan pada sistem yang terlibat, dalam jangka waktu tertentu. Bila definisi ini ditempatkan pada migrasi etnis maka : (1) konsekuensi yang dimaksud diberi penekanan pada budaya yang kompleks. Artinya perpindahan anggota masyarakat suatu etnis ke sistem budaya lain akan menghadapi konsekuensi dari perbedaan budayanya dengan budaya lain tersebut. Semakin besar perbedaan budaya maka semakin besar pula konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh pelaku migrasi dan sistem yang terlibat; (2) Wilayah kebudayaan menjadi sangat berarti sebagai tapal batas migrasi; (3) Bila terjadi pelintasan batas kebudayaan dan pelaku migrasi bertempat tinggal di wilayah budaya baru dalam jangka waktu tertentu maka meski migran memiliki identitas budaya, identitas itu tidak sepenuhnya sama dengan budaya asal dan tidak sama pula dengan budaya masyarakat yang dituju sebagai konsekuensi dari interaksi migran dengan sistem budaya yang dituju itu.

Migrasi dapat dipelajari melalui tiga tingkatan analisis, yaitu : (1) *kategorisasi* dari hubungan pengaruh dan mempengaruhi migrasi; (2) penyusunan *tipologi-tipologi* yang terutama bertitik berat kepada tipe-tipe perpindahan dan secara tidak langsung menunjukkan sebab dan akibat dari berbagai jenis perpindahan; (3) *pembentukan modal*, biasanya berdasarkan faktor *pendorong* dan *penolak* yang menyebabkan migrasi bersama-sama dengan variabel antara menghambat atau memudahkan migrasi. Ketiga pendekatan ini secara sendiri-sendiri atau kombinasi mempunyai kehandalan untuk mempelajari migrasi. Pada tingkat analisis yang pertama terdapat tiga kategori utama yang menyebabkan atau disebabkan oleh kejadian migrasi, yaitu situasi yang merangsang migrasi penduduk, faktor pemilihan daerah atau tempat tujuan, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi migrasi. Sementara itu pada tingkat analisis yang kedua, tipologi-tipologi migrasi dapat dipandang dari sudut peran pelaku dalam pengambilan keputusan melakukan migrasi, yakni tipe *inovatif* (migrasi berlangsung untuk mengadakan pembaharuan) dan tipe konservatif (Goldscheider, 1985).

Baik di tempat tujuan maupun di tempat asal, seseorang yang berpindah disadari atau tidak disadari, telah mendasarkan pertimbangan pengambilan keputusannya atas

rangkaiannya faktor-faktor sosial, psikologis, ekonomis, kultural, politis atau geografis maupun faktor-faktor lain. Daya penetrasi dari berbagai faktor itu terhadap seseorang berbeda, tergantung dari sikap, persepsi, tingkat kepekaan, kebulatan tekad seseorang. Adapun perbedaan dalam sikap dan persepsi dipengaruhi pula oleh berberapa faktor antara lain, golongan umur, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, status perkawinan, dan suku bangsa. Sebagai akibat dari semua itu timbullah selektifitas dalam migrasi (Lee, 1966).

Hugo (1978) mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan variabel utama yang mempengaruhi terjadinya migrasi penduduk. Faktor-faktor ekonomi ini tercermin dari adanya tekanan-tekanan penduduk di pedesaan serta adanya kesempatan yang lebih baik memperoleh kehidupan di tempat lain. Variabel lain yang mempengaruhi migrasi adalah : (1) Derajat keragu-raguan yang bertalian dengan perpindahan ; (2) Hubungan-hubungan normatif masyarakat desa, dan ; (3) Karakteristik migran perorangan. Derajat keragu-raguan berkaitan dengan sumber dan ketepatan informasi tentang kesempatan kerja di daerah tujuan.

Pada masyarakat padi sawah di Yogyakarta terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi penduduk berpindah atau menetap di desa (Mantra, 1981). *Pertama*, kekuatan sentrifugal (kekuatan-kekuatan yang mendorong seseorang meninggalkan desa) bersumber dari kekurangpuasan terhadap sektor pertanian, kurangnya kesempatan kerja, dan terbatasnya fasilitas pendidikan. *Kedua*, kekuatan sentripetal (kekuatan yang menahan penduduk tetap tinggal di desa yang timbul karena : (1) Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang erat ; (2) Sistem gotong royong yang kuat ; (3) Pemilikan lahan yang memberi status tinggi ; (4) Ikatan batin dengan leluhur mereka, dan ; (5) Ongkos transportasi yang terlalu tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan mereka.

Temuan Abustam (1987) pada komunitas yang sama dengan penelitian Mantra, di Sulawesi Selatan, mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi antara lain : (1) Tingkat pendidikan migran ; (2) Adanya kerabat di daerah tujuan ; (3) Kurang majunya teknologi ; (4) Terbatasnya sumberdaya lingkungan ; (5) Faktor

kelembagaan sosial budaya yang masih kuat, dan ; (6) Mekanisme penguasaan lahan.

Migrasi dapat dipandang dari segi ketenagaan dan profesi. Apabila orang tidak dapat menemukan profesinya di desa atau di daerah, dia tentu akan lari ke kota atau ke daerah lain. Hal ini berkaitan dengan kekurangberhasilan pembangunan struktur perekonomian pedesaan di satu sisi, dan keberhasilan pembangunan pendidikan di sisi lain. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk yang semakin meningkat membawa implikasi sosial dimana tenaga kerja muda di pedesaan enggan dan menganggap tidak layak bagi mereka untuk berusaha di bidang pertanian tradisional. Oleh karenanya terdapat gejala semakin berkurangnya sumber tenaga yang profesional pada kegiatan sektor pertanian pedesaan (Maskun, 1976).

Dalam penelitiannya di Jakarta Temple (1979) membuat daftar alasan migran meninggalkan daerah asalnya. Ia mencatat antara lain alasan-alasan kesulitan ekonomi, ketiadaan pekerjaan di desa, kebersamaan hidup di desa telah mengalami perubahan selanjutnya menjadi determinan migrasi. Lingkungan desa tidak lagi memberi jaminan yang cukup dan suasana kehidupan ini dirasakan sebagai kungkungan. Akibat dari keadaan itu ialah runtuhnya suasana sosial lama, pemboyongan ke kota-kota, keinginan para petani untuk mencoba cara-cara yang baru untuk bertindak sendiri memperbaiki nasibnya dengan turut pada gerombolan-gerombolan sedesa atau sedaerah menuju kota. Perubahan sosial ini sejalan dengan perubahan mentalitas yang terus berlanjut dan kemudian membentuk nilai-nilai baru, seperti pembentukan perilaku *bebara* yang semakin lama semakin permanen.

Beberapa ahli yang mengkaitkan dimensi sosial budaya dalam arti khusus perilaku migrasi seperti Abustam (1987), Forbes (1974), Hamid dan Ahmad (1992), Naim (1973), Tomagola (1985), Temple (1979), sampai batas tertentu membenarkan adanya pengaruh faktor-faktor sosial budaya dalam pola migrasi intern di Indonesia. Nilai budaya dapat menjadi penahan terjadinya migrasi dan sebaliknya dapat pula menjadi pendorong. Disamping faktor sosial budaya Naim (1984) menunjuk beberapa *global variable* lain yang mempengaruhi perilaku migrasi suku bangsa di Indonesia.

Pada dasarnya kebudayaan selalu dinamis dalam mengarahkan setiap individu dan masyarakat untuk bertindak teratur memenuhi kebutuhan secara kolektif serta menuntun mereka kepada suasana hidup yang rukun dalam sistem sosial. Berangkat dari asumsi tersebut Forbes (1974) menekankan bahwa kekuatan-kekuatan tradisional tidaklah sebagai penyebab terjadinya migrasi. Kalaupun kekuatan-kekuatan itu kemudian muncul sebagai determinan maka perlu diperhatikan kondisi masyarakat dalam *setting* tertentu, dimana migrasi itu berlangsung dan dalam suasana yang bagaimana.

Tabel 4. Faktor-faktor Migrasi.

Intensitas migrasi	Suku Bangsa	Faktor-faktor migrasi								Jumlah
		Fisik				Sosial Budaya				
		Eko- logi	Geo- grafi	Demog- rafi	Eko- nomi	Pendi- dikan dan	Daya tarik kota	Keres- han Po- litik	Pelem- bagaan sosial	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Tinggi (+)	Batak	+	+	-	+	+	+	-	6	
	Minangkabau	+	+	-	+	+	+	+	7	
	Banjär	-	+	-	-	-	-	-	1	
	Bugis	-	-	-	-	-	+	-	2	
	Menado	+	+	-	+	+	+	-	6	
	Ambon	+	+	-	+	+	+	-	6	
	Jawa	+	-	+	+	-	+	-	4	
	Sunda	+	-	+	+	-	+	-	5	
	Madura	+	-	+	+	-	+	-	4	
	Bali	+	-	+	+	-	-	-	3	
	Aceh	-	-	-	-	-	+	-	1	
	Melayu	+	-	-	-	-	-	-	1	

Sumber : Nain, 1984.

Pendapat Forbes kemudian dibenarkan oleh Abustam (1987), bahwa konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan (dari Abad XVII sampai sekarang), konsep bekerja menurut pandangan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja, nilai *siri*, sistem pelapisan sosial dan jiwa pelaut serta berwiraswasta merupakan faktor-faktor sosial budaya yang telah melembaga dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kegiatan perantauan penduduk Sulawesi Selatan. Faktor-faktor sosial budaya bersama faktor lain, diantaranya ekonomi dapat menjadi determinan terjadinya migrasi penduduk. Namun demikian faktor-faktor budaya itu bukanlah sebagai alasan utama, melainkan sebagai faktor pelengkap yang mempercepat migrasi. Struktur sosial tradisional yang mencakup segi-

segi sosial budaya yang melekat dalam diri masyarakat Bugis, Toraja, dan Makassar selalu dalam suasana dinamis. Sedangkan konflik sosial berada dalam dua sisi yang silih berganti atau malah tumpang tindih dimana konflik memberi sumbangan bagi meningkatnya migrasi dan sebaliknya konflik tersebut malah menahan gejala migrasi.

Naim (1984) memperlihatkan kecenderungan migrasi suku Minangkabau yang terus meningkat. Dari Tabel 3. Intensitas migrasi Suku minang pada Tahun 1930 masih menempati urutan ketiga dibawah suku Bawean dan Batak, namun pada kesempatan berikutnya posisinya meningkat melewati suku Batak dan bahkan suku Bawean. Mereka yang keluar dari Sumatera Barat hanya dalam porsi kecil yang memutuskan untuk kembali (remigrasi).

Model dan dinamika migrasi dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, seperti migrasi pada fase-fase perkembangan negara-negara di Eropah. Perubahan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi yang disebabkan oleh revolusi industri di Inggris pada abad Ke-18 atau revolusi industri di Jerman, Prancis Utara, dan Belgia pada abad ke-19 memberi pemahaman bahwa perbedaan waktu itu mempengaruhi bentuk migrasi di Eropah (Gee, 1976). Selanjutnya Gee membuat beberapa tahapan migrasi berdasarkan *setting*, yaitu: *Pertama*, berlangsung berabad-abad lamanya, ketika terjadi migrasi besar-besaran para tenaga kerja musiman ke kota-kota besar. Pada tahap permulaan, tenaga kerja biasanya terdiri dari orang yang belum menikah dan yang terbanyak, laki-laki, tidak berkeinginan untuk menetap. *Kedua*, disebut sebagai *periode utama*, adalah masa-masa penerapan teknologi (mesin uap) semakin mengakar sebagai pesaing tenaga kerja manusia, namun tetap memperluas lapangan pekerjaan. Kepindahan penduduk pedesaan bukan karena enggan bertani; melainkan disebabkan oleh daya tarik positif industrialisasi. Ciri Utama dalam periode ini adalah: (1) migrasi keluarga, penduduk pedesaan ke kota-kota yang industrinya mulai berkembang, sedangkan pada kota-kota yang industrinya menurun tetap ditempati oleh migran karena ada harapan kondisinya akan membaik; (2) Karena yang bermigrasi umumnya keluarga-keluarga, maka kurang selektif berdasarkan jenis kelamin berdasarkan umur,

dibandingkan dengan pola migrasi yang berlangsung kemudian ; (3) Migrasi bertahap dan kompleks; (4) Kelompok-kelompok migran atas dasar primordial terbentuk dan ada diantaranya yang menonjol; (5) Krisis ekonomi, menimbulkan perpindahan secara massal. *Ketiga*, periode akhir revolusi industri, mempunyai ciri yang menonjol, yaitu kaum wanita merupakan jumlah terbesar pelaku migrasi.

Migrasi di Asia Tenggara agak berbeda dengan Eropa. Beragamnya kebudayaan, sejarah, dan perkembangan teknologi bangsa-bangsa di Asia Tenggara membuat kecenderungan migrasinya juga berbeda, namun demikian terdapat juga kesamaan yang menyolok di dalamnya, yaitu : *Pertama*, migrasi lebih banyak berlangsung ke kota-kota besar, terlihat dari perkembangan kota-kota kecil yang tidak secepat kota-kota besar. Migrasi tidak hanya berlangsung kuat dalam jarak dekat, dengan suatu syarat makin besar ukuran kota-kota tujuan, makin jauh pula jarak orang yang dapat ditariknya. Dengan demikian selama fase-fase permulaan pembangunan kota-kota di Asia Tenggara, paling tidak sejak masa penjajahan dan sesudahnya hukum migrasi jarak dekat tidak berlaku. *Kedua*, migrasi berlangsung secara bertahap. *Ketiga*, terjadi seleksi nyata dalam migrasi, terutama jenis kelamin, umur, dan status pernikahan; *Keempat*, Kecenderungan migrasi keluarga dan perorangan belum diketahui banyak, tetapi disarankan migrasi keluarga mungkin merupakan pola migrasi yang lazim. *Kelima*, seperti yang ditemukan di Eropah, di Asia Tenggara juga terbentuk kelompok-kelompok migran dengan latar kebudayaan tertentu. Migrasi kelompok-kelompok, yang seringkali datang dari tempat yang sangat jauh tidak dapat diterangkan dari segi ekonomi saja. *Keenam*, penetrasi faktor pendorong lebih kuat dari faktor penarik. Dari perbandingan ini hukum-hukum migrasi yang disusun rapi oleh Revenstein dari pengamatan selama revolusi industri tidak semua cocok untuk perpindahan di Asia Tenggara Gee, 1976).

Di Asia Tenggara, iklim politik dalam fase penjajahan, sampai fase kemerdekaan dirasakan sangat berpengaruh terhadap pembentukan pola migrasi penduduknya Sayangnya, uraian perubahan perilaku migrasi tahun-tahun terakhir, yaitu sejak karya

Gee ini muncul, sangat terbatas informasinya, padahal selama rentang waktu itu, perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik di kawasan Asia Tenggara telah begitu pesat. Di Indonesia, perubahan teknologi dan ekonomi, misalnya revolusi hijau di pedesaan Jawa terbukti mengakibatkan pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke bidang-bidang non pertanian, melalui migrasi ke kota-kota. Sedangkan dari segi politik, pergolakan yang terjadi sebelum Orde Baru, yang berarti terjadi proses restrukturisasi di Indonesia diduga turut mempengaruhi pola migrasi penduduk di Indonesia (Gee, 1976).

Temple (1976) yang mempelajari pola migrasi masyarakat Jawa Tengah berkesimpulan bahwa tingkat migrasi yang rendah dapat diterangkan oleh kuatnya keterikatan orang-orang desa terhadap desa mereka, suatu keterikatan baik kepada anggota-anggota keluarga, kepada kenyamanan suatu lingkungan sosial dan kepada kuatnya perasaan-perasaan rohani yang berhubungan dengan objek-objek fisik di dalam desa. Karenanya orang-orang Jawa lebih menyenangi tempat dimana kekuatan-kekuatan sosial dan kosmis berada dalam keadaan harmoni dari pada suatu pusat kota dimana kekuatan-kekuatan itu mengalami diskoordinasi dan menyebabkan seseorang kacau dan bingung. Akibatnya, sebagian besar dari mereka enggan dan menolak untuk meninggalkan desanya.

Aspek pendidikan dalam analisis migrasi yang dilakukan Tomagola (1985) menunjukkan perbedaan menyolok antara migran asal Jawa Barat dan Sumatera Barat di Jakarta. Hal ini terjadi karena perbedaan pola migrasi masing-masing, yaitu antara *bebara* dan *merantau*. Kaum *bebara* umumnya berasal dari petani lapisan bawah, berkorelasi positif dengan status sosial ekonominya, seperti tingkat pendidikan. Sedangkan kaum perantau lebih heterogen, mereka terdiri dari lapisan terdidik sampai pada lapisan tidak terdidik untuk mengisi peluang berusaha di koloni yang baru. Selain pendidikan, penyebab perbedaan pola migrasi tersebut adalah perbedaan struktur kekerabatan, pemukiman pedesaan, hubungan desa kota, dan reaksi masyarakat desa terhadap gagasan pendidikan dari luar. Motifasi migrasi tidak hanya terbentuk dari kondisi

daerah asal, tetapi juga ditentukan oleh suatu objek yang berlainan di daerah tujuan.

Dampak migrasi berbeda menurut pola migrasi. Arus balik secara langsung atau tidak langsung, berupa uang dan barang biasanya digunakan indikator. Besarnya kiriman uang dan barang ke desa merupakan fungsi dari : (1) bentuk migrasi penduduk apakah permanen atau sementara; (2) Tingkat dan sifat tanggung jawab migran ; (3) Hubungan yang terbina antara migran dan keluarganya ; (4) Tingkat dan kebutuhan migran dengan kerabatnya di desa, dan; (5) Jenis pekerjaan, pendapatan, dan tanggungan hidup di daerah tujuan atau kota (Abustam, 1987).

Prilaku migrasi sirkulasi dan komutasi relatif lebih menguntungkan desa dari pada migrasi permanen karena arus baliknya lebih intensif. Disamping curahan perhatian dan tenaga secara langsung pada kesempatan "mudik", mereka juga turut berpartisipasi dalam penyediaan dana pembangunan di tingkat desa. Ahmad dan Hamid (1992) mencatat peran kaum *bebara* penjual Soto "Taman" di Jakarta dalam penyediaan dana pembangunan mesjid, jalan, dan sarana lainnya di desa asal mereka. Migrasi Sirkuler dan komuter berlangsung sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan baik di daerah tujuan maupun di daerah asal. Oleh karenanya kepergian mereka ke kota-kota atau ke daerah tujuan tidak melepaskan tanggung jawabnya pada kegiatan-kegiatan di desa atau daerah asal.

Berbeda dengan *bebara*, arus balik, migrasi permanen relatif kecil karena mereka kebanyakan tidak berniat kembali ke daerah asal, biasanya kepulangan migran lebih banyak untuk tujuan konsumtif, seperti *mudik* pada hari-hari besar dan kegiatan seremonial lainnya. Alasan-alasan pekerjaan, jarak migrasi dan keterikatan di daerah tujuan menjadi pertimbangan bagi migran permanen untuk kembali ke daerah asal. Dengan demikian keterlibatan perantau dalam pengembangan daerah asal tidak seintensif komuter dan sirkuler (Hamid dan Ahmad, 1992).

Migrasi dengan tegas telah membawa kenaikan sosial bagi mereka yang bersangkutan. Kenaikan sosial dirasakan sekali kalau migran dapat berperan serta pada kegiatan-kegiatan dimana mereka dapat memperlihatkan keberhasilannya di rantau atau

di kota (Heeren, *dalam* Abustam, 1987). Di samping itu migrasi penduduk pedesaan dapat pula mendorong usaha-usaha pembangunan pedesaan dan mempercepat proses penerimaan ide-ide baru. Dengan mengalirnya uang dari kota atau daerah tujuan ke desa atau daerah asal berarti jumlah uang yang beredar di desa semakin besar. Akibatnya perekonomian desa meningkat, serta pada gilirannya berguna bagi pembangunan daerah. Ide-ide, sikap dan motivasi membangun dapat pula disebarluaskan kepada masyarakat desa oleh para migran yang pulang ke desa atau yang ditransfer secara tidak langsung dari perantauan. Arus balik tersebut bukan saja mengenai informasi sekitar teknologi pertanian, tetapi juga mencakup informasi industri dan jasa yang mungkin dikembangkan di desa (Abustam, 1987).

Migrasi menjadi salah satu faktor penyebab perubahan masyarakat desa, mentransfer nilai-nilai luar secara langsung atau tidak langsung. Konsekuensinya pola asimilasi seringkali terlalu jauh melambung melewati batas-batas toleransi kebudayaan pedesaan. Meskipun perubahan-perubahan itu sendiri diinginkan, namun jikalau perubahan itu terlalu jauh perbedaannya dengan adat lama, maka sikap terhadap perubahan itu adalah negatif atau menolak. Dapat dikatakan bertambah padatnya perpaduan suatu kebudayaan, bertambah kuat pula penolakan terhadap perubahan yang demikian itu. Kesiapan suatu kebudayaan akan lebih besar jikalau perubahan itu tanpa menimbulkan kesukaran besar dapat disesuaikan dalam susunan sosial lama. Setiap masyarakat dan setiap kebudayaan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang sudah terjalin dalam suasana kehidupannya dan secara sadar atau tidak dikejar oleh semua anggota masyarakat dan kebudayaan itu (Soedjadmoko, 1980). Penerimaan masyarakat desa terhadap beragam rupa unsur-unsur kebudayaan lain bisa menjadi bumerang atau jebakan yang membuat mereka kehilangan daya untuk membangun karena larut dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya.

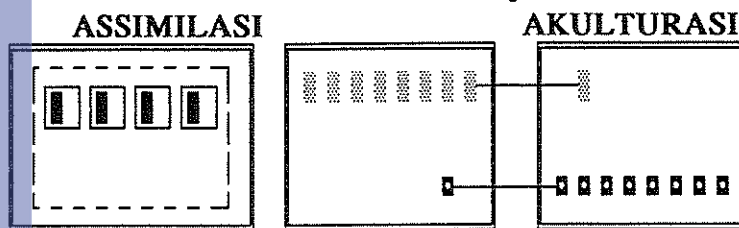
2. Migrasi, Adaptasi dan Komunikasi Antara Budaya

Migrasi adalah peristiwa yang menuntut penyesuaian dari pelakunya agar bisa bertahan di dalam sistem sosial baru. Migrasi akan membawa seseorang pada suasana




susunan sosial-budaya baru karena di dalamnya akan terjadi suatu fenomena-fenomena akibat kontak sosial (Temple, 1976).

Menurut Soekanto (1970) interaksi sosial tidak mungkin akan terjadi jika tidak dipenuhi dua syarat, yaitu: adanya kontak sosial (*social contact*), dan adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung melalui tiga cara: (1) antara orang perorang; (2) antara orang-perorang dengan kelompok manusia tertentu, atau sebaliknya; (3) antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Kontak sosial tidak semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga ditentukan oleh tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Yang dimaksud dengan kontak positif adalah apabila interaksi mengarah kepada suatu bentuk kerjasama, sedangkan kontak negatif adalah sebaliknya, tidak terjadi interaksi sosial. Hasil dari interaksi sosial itu adalah fenomena-fenomena akulturasi dan asimilasi (Gambar 1).

Gambar 1. Perubahan Pola Kebudayaan



Sumber : Soekanto, 1987

Keterangan : **Assimilasi**  adalah unsur kebudayaan baru yang timbul sebagai akibat pergaulan orang-orang dari kelompok-kelompok yang berlainan. Unsur-unsur kebudayaan baru tersebut berbeda dengan kedua kebudayaan yang bertemu.
Akulturasi   adalah unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif.

Komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial dalam berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Seseorang dapat berkomunikasi melalui perilaku verbal dan non verbal, jika orang lain mendapat pesan yang dapat diterjemahkan. Setiap perilaku hanya akan berarti suatu pesan jika perilaku terobservasi dan perilaku itu mengandung makna. Dalam komunikasi antar budaya seseorang tidak hanya terlibat dalam komunikasi yang bersifat dinamis tetapi

juga interaktif. Komunikasi *dinamik* adalah suatu aktifitas yang terus berlangsung selalu berubah-ubah. Pelaku komunikasi secara konstan dipengaruhi oleh pesan orang lain dan sebagai konsekuensinya perubahan kontinu dialami pelaku komunikasi. Perubahan itu akan terjadi seberapapun kecilnya. Komunikasi *interaktif* Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki latar belakang sosial budaya dan pengalaman yang unik berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang yang unik pula. Latar belakang dan pengalaman masing-masing akan mempengaruhi interaksi mereka. Hasil interaksi ditandai oleh situasi timbal balik yang memungkinkan setiap pihak dipengaruhi yang lain. Dalam konteks perbedaan budaya bentuk komunikasi interaktif ditandai oleh pergeseran nilai, sikap, tindakan masing-masing pelaku komunikasi (Porter dan Samovar, 1982).

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, kepercayaan, nilai sikap, makna hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek, dan materi dan milik yang diperoleh sekelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha oleh individu atau kelompok (Bennett, 1979).

Latar belakang budaya pelaku komunikasi budaya diasumsikan unik, tetapi setiap budaya ada yang agak menyerupai bentuk budaya lain. Sedangkan bentuk budaya individu sedikit berbeda dengan bentuk budaya yang dianutnya karena dipengaruhi oleh : *pertama*, ada pengaruh budaya eksternal yang mempengaruhi budaya internal; *kedua*, orang-orang yang berkebudayaan sama memiliki karakteristik individu yang berbeda. Derajat pengaruh budaya lain dalam situasi komunikasi antar budaya merupakan fungsi perbedaan-perbedaan antara budaya-budaya yang bersangkutan. Komunikasi antar budaya terjadi dalam banyak ragam situasi yang berkisar garis kontinum mulai dari orang-orang yang berbeda budaya secara ekstrem sampai interaksi-interaksi antara orang-orang yang mempunyai budaya dominan yang sama, tetapi mempunyai subkultur-subkultur yang berbeda (Porter dan Samovar, 1982).

Kontak Sosial terjadi dalam tiga bentuk yaitu: (1) Antar orang perorang, misal-

nya anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui sosialisasi, suatu proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana dia menjadi anggotanya. Sosialisasi berbeda dengan enkulturasi, yaitu proses dimana orang secara sadar ataupun tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat (Herkovits, 1955, dalam Soekanto, 1987). (2) Antar orang dengan kelompok manusia lainnya atau sebaliknya. Misalnya apabila seorang merasakan tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat. (3) Antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Terjadinya kontak sosial tidak hanya tergantung pada tindakan satu pihak tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Kontak sosial bisa bersifat positif dan negatif (Soekanto, 1987).

Proses interaksi sosial terjadi dalam wujud-wujud kerjasama, persaingan dan konflik. Gillin dan Gillin dalam Soekanto (1987), membedakan dua macam proses yang timbul akibat interaksi sosial, yaitu: (1) *Proses Assosiatif*, yang meliputi akomodasi, akulturasi dan asimilasi; (2) *Proses Dissosiatif*, yang mencakup persaingan dan pertentangan. Sistematis bentuk-bentuk proses sosial lain juga dikemukakan oleh Kimbal Young dalam Soekanto (1987) adalah : (1) Oposisi, mencakup persaingan dan pertikaian. (2) Kerjasama, yang menghasilkan akomodasi; (3) Diferensiasi, merupakan proses dimana orang perorang dalam masyarakat memperoleh hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang lain dalam masyarakat atas faktor pembeda.

Akomodasi merupakan pengertian untuk menggambarkan suatu proses yang sama pengertiannya dengan adaptasi yang sering dipergunakan oleh biolog untuk menjelaskan perilaku makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain sehingga kehilangan kepribadiannya. Tujuan akomodasi berbeda sesuai dengan situasi, antara lain adalah : (1) mengurangi pertentangan orang atau kelompok manusia yang sifatnya sementara. Sintesis kedua pihak yang berbeda biasanya menghasilkan suatu pola baru; (2) akomodasi berlangsung untuk meredakan akibat yang timbul

dari adanya perbedaan dua pihak; (3) akomodasi memungkinkan terjadinya kerjasama antar kelompok; (4) Akomodasi memungkinkan peleburan kelompok-kelompok yang terpisah, misalnya perkawinan campuran (amalgamasi) atau asimilasi dalam arti luas.

Hasil-hasil dari akomodasi biasanya berbentuk: (1) pengurangan jarak sosial (*social distance*); (2) perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan baru atau keadaan yang senantiasa berubah; (3) mengurangi bibit pertentangan untuk integrasi; (4) perubahan-perubahan dalam kedudukan dan status; (5) akomodasi membuka jalan kearah asimilasi dimana pihak-pihak yang berbeda menjadi saling mengenal dan meningkatkan derajat toleransi sesama mereka.

Assimilasi. Asimilasi adalah proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan orang perorang atau kelompok manusia, juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental. Untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Koentjaraningrat (1965), mengatakan asimilasi timbul bila ada: (1) kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan; (2) orang-orang dari kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif; (3) masing-masing kebudayaan saling berubah dan menyesuaikan diri.

Soekanto (1987), mengatakan asimilasi suatu proses sosial yang berlangsung dengan berkelanjutan apabila terpenuhi syarat: (1) interaksi sosial bersifat suatu pendekatan dari satu pihak dan sebaliknya mendapat respon dari yang lain; (2) interaksi tidak mengalami halangan-halangan atau pembatasan; (3) asimilasi berlangsung lebih cepat apabila interaksi berlangsung primer (4) asimilasi menguat apabila frekuensi interaksi tinggi, stimulus dan respon berulang-ulang secara kontinyu mempercepat tercapainya suatu keseimbangan sosial diantara dua pihak yang berbeda. Faktor-faktor yang mempercepat asimilasi adalah: (1) toleransi; (2) kesempatan-kesempatan ekonomi yang seimbang; (3) suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya; (4) sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa; (5) amalgamasi, adanya musuh bersama dari luar, dan; (6) kesamaan dalam unsur budaya.

Sebaliknya faktor yang menyulitkan dan menghambat asimilasi adalah : (1) perbedaan ciri badaniah; (2) *in-group feeling* yang sangat kuat ; (3) kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi ;(4) perasaan takut terhadap kebudayaan-kebudayaan yang dihadapi itu; (5) sikap superior dan sub-ordinasi budaya;(6) bila minoritas mengalami gangguan dari masyarakat mayoritas.

Competition, persaingan adalah proses-proses sosial dimana orang-perorang atau kelompok perkelompok bersaing mencari keuntungan di bidang-bidang kehidupan. Bentuk persaingan meliputi, persaingan ekonomi, kebudayaan, status dan ras, yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai saluran keinginan manusiawi yang bersifat kompetitif, merangkum opini umum, alat seleksi sosial, dan pembagian kerja masyarakat secara fungsional. Hasil dari persaingan adalah : (1) meningkatkan kapasitas sosial individu; (2) pencapaian keinginan bersama; (3) solidaritas kelompok dan disorganisasi.

Cotravention suatu bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan persaingan dan pertentangan ditanadai oleh gejala ketidakpastian perasaan, dan perasaan tersembunyi terhadap kebudayaan tertentu. Leopold dan Becker, 1932 dalam Soekanto, (1987) menyebutkan ada sub proses kontroversi, yaitu : (1) keengganan, perlawanan, perbuatan menghalangi, protes mengacaukan rencana pihak lain; (2) mencari pembuktia kesalahan orang lain langsung maupun tidak langsung; (3) berusaha mengecewakan lawan; (4) kontroversi yang bersifat rahasia, khianat, dan mengumumkan rahasia dan kelemahan orang lain. (5) Mengejutkan dan membingungkan orang lain.

Pertentangan. Kelompok atau individu yang menyadari perbedaannya dengan pihak lain dan oleh karenanya berusaha saling menghancurkan lawan, terjadi antara lain berakar dari : (1) perbedaan kepribadian orang perorang ;(2) perbedaan kebudayaan (3) bentrokan kepentingan ; (4) perubahan-perubahan sosial. Hasil yang mungkin muncul dari perbedaan itu adalah : (1) konflik antar pribadi, rasial, dan pertentangan lainnya. (2) klas-klas sosial, politik lokal-nasional-internasional. Akibat dari pertentangan tersebut adalah meningkatnya solidaritas *in-group feeling*, retaknya persatuan

kelompok, perubahan kepribadian, dan hancurnya peradaban, akomodasi berbentuk dominasi-subordinasi.

Peristiwa migrasi sangat memungkinkan terjadinya proses proses tersebut. Migran melakukan interaksi dengan migran lain yang berkebudayaan sama, dan dipihak lain berinteraksi dengan orang yang memiliki kebudayaan berbeda. Hal ini memungkinkan terbentuknya ingroup dan out-group sebagai akibat proses sosialisai dan pengalaman. In-group adalah kecenderungan individu untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang didasari oleh perasaan yang sama dengan orang-orang dalam kelompok itu. Out-group berarti sebaliknya, kecenderungan individu untuk mengidentifikasikan dirinya di luar kelompok tertentu yang bersifat kondisional (Sumner, dalam Soekanto, 1987). Kajian ini menjadikan identitas kebudayaan sebagai batasan pokok in-group dan out-group. Sikap in-group umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota kelompok. Sifat out-group selalu ditandai oleh kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati yang melahirkan sikap etnosentrisme dan stero tipe. Stero tipe adalah anggapan yang bersifat mengejek kebudayaan lain dan etnosentrisme adalah sikap yang selalu bertitik tolak dari nilai in-group.

Berhubungan dengan adaptasi migran di suatu kota Mantra dan Kasto (1984) membuat postulasinya dalam bentuk proses yang atau fase-fase penyesuaian, yaitu : (1) Pada mulanya para migran memilih daerah atau tempat dimana telah ada teman atau sanak famili yang beretempat tinggal di daerah tersebut. (2) Keputusan terhadap kehidupan di suasana masyarakat baru tergantung kepada fungsi hubungan sosial migran pada masyarakat tersebut; (3) Keputusan terhadap kehidupan kota tergantung kepada kemampuan perseorangan untuk mendapatkan pekerjaan dan adanya kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang; (4) Setelah menyesuaikan diri di tempat baru , maka pemilihan tempat tinggal dipengaruhi oleh tempat kerja; (5) Keinginan untuk kembali ke daerah asal merupakan fungsi dari kepuasan menjalani kehidupan kota; (6) Bersedia bertempat tinggal di daerah yang serba kurang asal memperoleh kesempatan ekonomi yang tinggi.

3. Pola Adaptasi Migran Batak Di Perantauan

Posisi yang egaliter dengan masyarakat dari kebudayaan lain di rantau menjadi media yang subur untuk terbentuknya *sahala harajaon* atau *huta* (Cunningham, 1957) di Sumatera Timur yang menjelaskan perilaku migrasi orang Batak Toba. Orang-orang Toba tidak lagi memperhitungkan kekuasaan ekonomi dan politik Orang Melayu di daerah itu setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mereka merasa tidak perlu melakukan perubahan sistem sosial budaya atau meleburkan diri ke dalam kebudayaan tuan rumah. Adaptasi mereka tidak lebih dari sekedar pemindahan *huta* atau pembentukan *sahala harajaon* seperti apa yang mereka bentuk di daerah asal. Berbeda dengan migran Angkola-Mandailing yang telah menetap sejak zaman kolonial Belanda, cenderung bersikap asimilatif dan lunak dalam mengintegrasikan diri dengan Orang Melayu. Faktor utama proses integrasi ini adalah kesamaan agama (Islam). Di samping itu fenomena-fenomena sosial budaya telah lama berlangsung pada orang Angkola-Mandailing yaitu akibat proses-proses sosial dengan sistem kebudayaan tetangga (Minangkabau dan Melayu Deli/Riau).

Namun demikian tidak berarti perantauan orang Angkola-Mandailing meninggalkan misi budayanya membentuk *sahala harajaon*. Cara yang ditempuh berbeda dengan jalur yang ditempuh orang Toba. Meleburkan diri ke dalam kebudayaan tuan rumah mempunyai maksud tersendiri bagi pencapaian tujuan mereka. Mahadi (1976) dalam Pelly (1990) mengatakan, ada dua keuntungan yang diperoleh Orang Angkola-Mandailing dari asimilasi dengan masyarakat Melayu di Sumatera Timur. *Pertama*, diterima sebagai aparat birokrasi dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintahan pada saat itu membuka peluang untuk membentuk *sahala harajaon* model baru yaitu semacam dinasti dalam jajaran kepegawaian (*white collar dynasty*). Satu demi satu kerabat sederhana direkrut untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam kepegawaian itu sehingga dinastinya semakin mengakar. Oleh karenanya, sampai sekarang sejarah itu masih meninggalkan bekas bahwa pekerjaan kepegawaian (*makan gaji*) mendapat status tinggi pada orang Mandailing, menjadi

semacam cita-cita orang tua kepada anak-anaknya. *Kedua*, peluang untuk mendapat tanah ulayat. Tanah merupakan wadah tradisional untuk membentuk *sahala harajaon* disini pun masih ditemukan. Pendekatan dengan kelompok, kalangan aristokrat Melayu dan pembauran dengan kebudayaan tuan rumah mempermudah orang Angkola-Mandailing mendapatkan tanah ulayat.

Selain jalur birokrasi, Orang Angkola-Mandailing juga menempuh jalan lain untuk mengintegrasikan diri dengan Orang Melayu Deli, diantaranya sebagai guru, mubaligh, dan pedagang (Harahap dan Siahaan, 1987). Berbekal pengetahuan yang lebih tinggi dari pada rata-rata penduduk asli umumnya mereka dengan cepat menjadi tokoh masyarakat di Tanah Deli.

Perantauan Orang Angkola Mandailing di Semenanjung Malaysia menampakkan pola adaptasi yang tidak berbeda. Bidang-bidang pekerjaan birokrasi, ilmuwan, hakim, wartawan, politisi negara juga menjadi tujuan perantauan mereka. Pola perkampungan serta pelestarian kebudayaan Angkola-Mandailing tetap dipertahankan, seperti struktur kekerabatan *dalihan Natolu*, *kesenian tor-tor*, perkumpulan remaja *naposo bulung*, dan lain-lain. Terbentuknya kampung *Mandailing* memberi pemahaman bahwa perantauan mereka ke Malaysia sudah berlangsung lama (Harahap dan Siahaan, 1987).

Seperti uraian sebelumnya, migrasi Orang Batak membawa misi budaya (*cultural mission*), yaitu membangun *sahala harajaon* tanpa memandang faktor geografis sebagai kendala. Keberhasilan dan kegagalan di perantauan ditentukan oleh seberapa jauh misi itu tercapai. Pandangan kosmologis ini memberi implikasi bahwa ada suatu niat untuk memperkaya dan memekarkan kerajaan baru. Media yang menjembatani migran dengan kampung halaman (*Tano Hatubuan*) pada Orang Toba dimanifestasikan dengan membangun tugu di perkuburan nenek moyang mereka dan pada Orang Angkola-Mandailing dilakukan dengan memugar tugu di pusara (Bruner, 1974 *dalam* Pelly, 1990). Perlakuan itu merupakan lambang tertinggi kecintaan mereka kepada kampung halaman.

4. Tipologi Kebudayaan dan Perubahan Sosial Budaya Batak

Dalam memahami tipologi suatu kebudayaan perlu dijelaskan beberapa teori dan pengertian kebudayaan. Pengertian kebudayaan yang dipelajari dari berbagai literatur memperlihatkan beragamnya definisi yang dilontarkan oleh banyak ahli. Oleh karenanya telaaah ini hanya membatasi diri pada beberapa definisi saja. Taylor pada tahun 1871 mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusianya sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 1984). Sementara itu, Soemardjan dan Soemardi (1964) merumuskan kebudayaan sebagai suatu hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. *Karya* masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan manusia yang menguasai alam sekitar untuk keperluannya. *Rasa* meliputi jiwa manusia dalam mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Sedangkan *cipta* meliputi kemampuan untuk berpikir, kemampuan mental dari orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan.

Kebudayaan adalah kesatuan dari pola bersikap, pola bertindak dan berkelakuan serta pola sarana benda-benda yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Pola bersikap memberi pengarahan bagi individu untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai ideal yang dimiliki oleh kebudayaan itu. Pola bertindak adalah wujud kebudayaan berkelakuan dalam kegiatan kemasyarakatan dan pola sarana benda-benda merupakan wujud fisik kebudayaan berupa benda-benda atau teknologi (Redfield, 1953 dalam Sajogyo dan Sajogyo, 1983).

Mengacu pada sejumlah definisi kebudayaan, Kluckhohn menyimpulkan bahwa ada tujuh unsur kebudayaan yang universal (*universal categories of culture*), yaitu: sistem religi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian (sistem ekonomi), dan peralatan. Unsur kebudayaan yang paling kuat dan sulit untuk berubah adalah sistem religi (Koentjaraningrat, 1981)

Suku bangsa Batak memiliki wilayah teritorial di sekitar pegunungan Sumatera Utara mulai dari perbatasan Daerah Istimewa Aceh sampai ke perbatasan Riau dan Sumatera Barat (Lampiran 3). Suku Batak juga mendiami dataran rendah diantara Pegunungan Bukit Barisan dan Pantai Timur Sumatera Utara (Siahaan *et al.*, 1978).

Suku Batak pertama kali diketahui bermukim di sekitar pulau Samosir, yaitu suatu daerah yang bernama *Pusuk Buhit* (Sidjabat, 1983). Ketika populasi meningkat, sebagian penduduk melakukan perpindahan ke wilayah di sekitar Danau Toba. Secara evolusi penduduk yang berpindah mengalami proses adaptasi dengan lingkungannya, sehingga terbentuk ciri-ciri berbeda pada masyarakat yang melakukan perpindahan. Perbedaan karakteristik akibat adaptasi ekologi saat itu menghasilkan beberapa sub suku Batak, yaitu sub-suku Karo dan Dairi ke bagian Barat, Simalungun ke bagian Utara, dan sub Suku Angkola Mandailing ke bagian Selatan. Sedangkan penduduk yang tetap tinggal di Pulau Samosir dan sekitarnya dikenal dengan sub-suku Toba. Pembentukan sub-sub suku itu berlangsung selama berabad-abad. Di sini terlihat faktor wilayah identik dengan nama sub suku yang terbentuk. Ciri lain yang membedakan sub-sub Suku Batak, sampai pada taraf tertentu dapat diamati dari marga-marga yang dominan pada masing-masing sub suku.

Ekosistem Tanah Batak berbentuk perladangan, meskipun tidak seluruhnya demikian. Perladangan dikondisikan oleh alam yang bertopografi pegunungan dan hutan-hutan. Tipe alam pegunungan berhutan berada di alur Bukit Barisan yang memanjang dari utara Sumatera sampai ke bagian selatan. Berdasarkan kondisi alam ini maka sistem perekonomian masyarakat tradisional Batak dicirikan oleh perladangan yang menghasilkan komoditas tanaman keras. Sedangkan ekosistem rerumputan terdapat di bagian selatan (Padang lawas) di antara Bukit Barisan dan Pantai Timur Sumatera. Daerah dataran rendah ini juga memiliki tipe komunitas sawah di sepanjang aliran sungai yang banyak ditemui di Tapanuli Selatan.

Suatu studi hermenetik (pemahaman makna) terhadap 600 umpama-umpama tradisional yang mencerminkan nilai-nilai budaya Batak (Toba dan Angkola-Mandailing

masing-masing 300) yang dilakukan oleh Harahap dan Siahaan (1987) akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa ada 9 (sembilan) komponen nilai Budaya Batak yaitu kekerabatan, religi, *hagabeon*¹, *hasangapon*², hukum, kemajuan, konflik, *hamoraon*³ dan pengayoman. Studi ini belum dilandasi oleh penggunaan konsepsi yang baku sehingga tidak dapat dihindarkan ketumpangtindihan posisi dari sembilan konsepsi di atas. Terlepas dari validitas dan reliabilitas metode hermenetik untuk mengukur kekuatan masing-masing komponen, kedua ahli mencatat bahwa nilai kekerabatan menempati posisi teratas dari yang lain.

Tanpa memperhatikan pergeserannya nilai budaya utama pada Tabel 5. dapat dijadikan sebagai pemahaman awal untuk telaah selanjutnya. Kebudayaan senantiasa mengalami perubahan. Pengaruh-pengaruh eksternal dapat melahirkan fenomena-fenomena disorganisasi dan maladaptasi (Soekanto, 1984), atau bahkan mengakibatkan kemiskinan budaya atau *culture poverty* (Kleden, 1987), sebelum sampai pada suatu keseimbangan sosial budaya baru (*social equilibrium*).

Tabel 5. Nilai-Nilai Utama Budaya Batak (Toba dan Angkola-Mandailing).

No	Toba			Angkola-Mandailing			Toba dan Angkola-Mandailing		
	Nilai Budaya	Frek	%	Nilai Budaya	Frek	%	Nilai Budaya	Frek	%
1.	Kekerabatan	195	34,33	Kekerabatan	201	35,39	Kekerabatan	396	34,86
2.	Religi	98	17,25	Religi	156	27,46	Religi	254	22,36
3.	Hagabeon	70	12,32	Hagabeon	91	16,02	Hagabeon	161	14,17
4.	Hukum	69	12,15	Kemajuan	28	4,93	Hukum	88	7,74
5.	Kemajuan	39	6,87	Hasangapon	26	4,58	Kemajuan	67	5,90
6.	Konflik	30	5,28	Hamoraon	23	4,05	Hamoraon	49	4,31
7.	Hamoraon	26	4,58	Hukum	19	3,35	Hasangapon	47	4,14
8.	Hasangapon	21	3,70	Pengayoman	12	2,11	Konflik	42	3,70
9.	Pengayoman	20	3,52	Konflik	12	2,11	Pengayoman	32	2,82
Jumlah		568	100,00	568		100,00	1136		100,00

Sumber: Harahap dan Siahaan, 1987

2. *Hagabeon*, terjemahan bebasnya adalah banyak keturunan dan panjang umur (Harahap dan Siahaan, 1987).

3. *Komulian*, kewibawaan, kharisma dan kekuasaan, atau kejayaan.

4. *Hamoraon*, banyak harta, kekayaan materi.

Struktur kekerabatan pada masyarakat Batak yang didasarkan kepada konsepsi *Dalihan Natolu*, yang secara harfiah berarti Tungku Nan Tiga (Dalihan=Tungku, Na=Yang, Tolu=tiga). Komponen *Dalihan Natolu* terdiri dari *Kahanggi* atau *Dongan sabutuha*, *Anak Boru* atau *boru*, dan *Mora* atau *hula-hula*. *Kahanggi* berarti barisan orang-orang yang semarga dengan si-ego (laki-laki, patrilineal) atau orang-orang yang sepewarisan dengan si-ego, sedangkan *Anak Boru* berarti marga-marga atau orang lain yang mempersunting anak perempuan atau saudara perempuan si-ego. Sementara *Mora* berarti Barisan marga-marga dari Ayah atau saudara dari istri si-ego (Lampiran 2). Struktur ini masih dapat diturunkan ke dalam tata susunan yang lebih luas dan di dalamnya terdapat tatakrama yang berbeda, tetapi intinya tetap *Dalihan Natolu*. Ketiga komponen tersusun dalam ikatan yang kuat, akrab, serta saling mengisi dan mengingatkan di antara mereka, seperti makna pribahasa berikut :

Songon siala sampagul, rap tu ginjang rap tutoru, malamun saulak lalu, mangampal pade palu-palu, muda magulang rap margulu.

Seia sekata, bantu-membantu sesama keluarga, sama-sama terhormat, sama-sama malu atau rugi, sama-sama menderita, sama-sama terhina, ikatan persatuan bisa menjadi senjata untuk pembela.

Orientasi nilai ini menunjukkan kohesifitas yang tinggi diantara kerabat yang hampir tanpa batas (Hasibuan, 1988). Misalnya, dalam mengontrol perilaku anak atau remaja, tanggung jawab itu merupakan tugas semua orang yang memiliki ikatan dengan si anak, ditandai dengan tutur kata¹ *anakta* (anak kita), *inanta* (ibu kita), atau *angginta* (adek kita). Keadaan ini dapat pula diamati dalam kegiatan-kegiatan kolektif adat, yaitu partisipasi dalam peristiwa *siluluton siriaon*. *Siluluton* adalah kegiatan di sekitar kema-langan keluarga, misalnya kematian, kehilangan, atau kebakaran. Sedangkan *siriaon* adalah kompleks kegiatan bersama yang bersifat bersuka ria, misalnya pernikahan,

5. Tutur kata pada masyarakat Batak Mandailing-Angkola ada 38 tutur, sesuai konfigurasi yang mungkin terbentuk dari konsepsi Dalihan Natolu. Tutur kata, bukan berdasarkan umur, tetapi berdasarkan posisinya dalam jaringan Dalihan Natolu, yaitu *amang, inang, anak, boru, angkang, anggi, iboto, amangtua, inangtua, namboru, uda ianguda, amangboru ompung, angkang mulak, rulang, nanrulang, rungane, eda, lae, bayo, anak boru, boru rulang, boru rulang alalango, ompung bayo, ompung dongan, bujing, nanrulang alalango, amang naposo, rulang naposo, nanrulang mulak, kahanggi, mora, anak boru, pisang rau, mora nimora*.

selamatan rumah baru. Setiap keluarga dituntut bertanggung jawab di dalam setiap kegiatan *siluluton siriaon*. Saat ini masyarakat memandang bahwa sebagian dari kegiatan-kegiatan *siluluton-siriaon* merupakan pemborosan, karena menelan biaya dan waktu yang banyak (Diapari, 1987).

Keluarga Batih pada masyarakat Batak umumnya berbentuk monogami (satu istri, satu suami dan beberapa orang anak) disebut *saripe* (sekeluarga). Keluarga batih ini kemudian berkembang *saamang* (satu ayah), lalu *saompung* (satu kakek). Kesatuan *saamang* dan *saompung* seterusnya disebut sebagai keluarga luas (*extended family*). Keluarga batih masyarakat tergolong *virilokal*, yaitu tempat tinggal seseorang laki-laki menikah berada di wilayah tempat tinggal orang tua atau saudara-saudara seayah. Disamping itu terdapat pula dalam bagian kecil bentuk *uxorilokal* atau tempat seseorang lelaki menikah berada di tempat orang tua atau saudara seayah istrinya. Keluarga *virilokal* lebih banyak tinggal sendiri-sendiri atau satu rumahtangga terdiri dari satu keluarga inti. Bila seseorang lelaki menikah tinggal bersama orang tuanya dan makan dari satu dapur, itu sifatnya sementara dan berstatus "menumpang", sebelum mampu berdiri sendiri. Hal ini membuat lelaki menikah berkeinginan untuk secepatnya *manjae* (memiliki rumah dan mengurus dapurnya sendiri). Untuk mencapai kemandirian, keluarga batih mendapat jatah tanah adat, warisan, atau membuka tanah garapan baru milik bersama.

Stratifikasi sosial masyarakat Batak dalam kehidupan sehari-hari kurang jelas nampak. Dalam konteks adat, tidak ada tingkatan-tingkatan masyarakat baik ia kaya, miskin, raja, kepala kampung, dan sebagainya. Karenanya semuanya tertumpu pada konsepsi *Dalihan Natolu*. Namun bila di perhatikan lebih seksama stratifikasi sosial itu akan terlihat berdasarkan tiga hal (Siahaan, 1978): *Pertama*, perbedaan umur ; *Kedua*, perbedaan pangkat atau jabatan, dan ; *Ketiga*, perbedaan sifat keaslian. Menurut Bangun (1971) terdapat satu lagi faktor stratifikasi sosial, yaitu ; status perkawinan.

Sistem pelapisan sosial berdasarkan perbedaan umur tampak dalam hal hak dan kewajiban seseorang terutama dalam upacara adat dan dalam hal menerima warisan antara *dakdanak* (anak-anak), *naposo bulung* (remaja), *Natua-tua* (orang tua). Yang

berhak memberi saran dan mengambil keputusan dalam upacara adat adalah Orang tua, sedangkan remaja hanya sebagai tenaga pelaksana dan pekerja, dan anak-anak tidak diperhitungkan. Dalam hal warisan anak-anak juga tidak mempunyai hak, selalu diwakili oleh ibunya. Batasan remaja dalam hal ini adalah seseorang yang belum menikah dan konsekuensinya adalah selama seseorang belum menikah, dia tidak akan memperoleh haknya dalam adat, meskipun sudah berusia lanjut atau memiliki jabatan tertentu.

Stratifikasi sosial berdasarkan umur yang berlaku dengan ketat dalam adat dapat dijelaskan sebagai pola paternalisme dimana lapisan terbawah harus selalu menurut kepada keputusan yang diambil oleh lapisan teratas. Sampai pada taraf tertentu masih berlaku pula dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini merupakan belenggu atau kungkungan bagi lapisan terbawah untuk bergerak dalam sistem sosial itu. Oleh sebab itu, dalam proses perubahan selanjutnya terdapat jurang penghayatan nilai budaya antara generasi tua dan generasi muda. Generasi tua yang tersosialisasi pada saat "isolasi" tetap mempertahankan keutuhan nilai-nilai lama, sedangkan generasi muda yang semakin mobil dan tersosialisasi pada masa perubahan tak sepenuhnya mengikuti norma lama. Hidup diantara sistem sosial lama dibutuhkan penyesuaian (pengorbanan) dari generasi muda jika tidak ingin menghadapi benturan-benturan sikap atau memilih keluar dari sistem itu untuk memperoleh kebebasan di tempat lain. Dengan tindakan itu hubungan migran dengan sistem sosial lama tetap terpelihara dalam suasana yang harmonis.

Pelapisan sosial berdasarkan pengkat atau jabatan yang tampak dalam kehidupan sosial sehari-hari yaitu keturunan raja, turunan kepala negara atau kepala *kuria*, kepala kampung dan *tunggane huta* yang masuk dalam lapisan raja-raja. Sedangkan lapisan atas dari rakyat ialah *datu-datu* (dukun), pandai emas, pandai besi, pandai kayu, yang sering dianggap mempunyai kekuatan magis.

Sistem pelapisan sosial berdasarkan sifat keaslian terkait konteks sejarah marga tanah (marga orang yang pertama mendirikan kampung) dan marga pendatang. Orang Batak pernah memiliki lapisan terendah yaitu *hatoban* (budak) yang berasal dari tawanan

perang dan orang yang terbelit hutang. Sistem pelapisan ini sudah terkikis dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih kekal dalam adat (Siahaan *et al.*, 1978).

Gejala perubahan sosial budaya masyarakat Batak sudah tampak, ditunjukkan oleh adanya *lag* antara nilai-nilai kehidupan sehari-hari dengan pelaksanaan nilai-nilai ideal dalam adat. Hal ini merupakan respon terhadap perubahan-perubahan internal (penduduk meningkat, lahan menyempit) dan perubahan-perubahan eksternal yang terdifusi melalui hubungan dengan luar.

Berdasarkan pemahaman sejarah, khususnya suku Batak Angkola Mandailing (yang berdiam di Tapanuli bagian Selatan) perubahan kebudayaannya selama masa kolonialisme paling tidak dipengaruhi oleh tiga hal. Ketiga kekuatan itu adalah pengaruh Perang Padri, masuknya agama Islam, dan pengaruh kebijaksanaan pemerintah Belanda (Diapari, 1987). *Pertama*, perang Padri berlangsung dari tahun 1825 sampai tahun 1838. Perang selama 13 tahun itu dilandasi oleh keinginan menyebarkan agama Islam. Pada tahun-tahun pertama, perang dimenangkan oleh Kaum Padri, tetapi kemudian dengan kedatangan Belanda pada tahun 1934 raja-raja Mandailing mengadakan kerja sama dengan Belanda untuk menghalau Kaum Padri. Dengan demikian pendudukan Kaum Padri di tanah Mandailing-Angkola hanya delapan tahun (Diapari, 1987). Akibatnya terhadap kebudayaan setempat memang tidak dapat diukur secara pasti, akan tetapi penguasaan Kaum Padri selama waktu itu merupakan masa indoktrinasi, menyebarkan nilai baru.

Kedua, jauh sebelum perang Padri berlangsung, masyarakat Mandailing-Angkola telah banyak yang memeluk agama Islam yang disebarkan oleh orang-orang Minangkabau dari Pesisir Selatan¹. Pengaruh penyebaran agama ini nyata terlihat terutama pada tatacara upacara adat, warisan (*hukum faraid*), serta perbaikan hak-hak wanita. Dalam pelaksanaan upacara adat terjadi semacam reorientasi tahap demi tahap dari *ritual religi-*

6. Daerah pantai Natal dan sekitarnya.

us¹ tradisional menjadi upacara yang non ritual atau diisi dengan nilai-nilai yang bersifat Islami (Diapari, 1987).

Ketiga, daerah Mandailing Angkola pertama kali diduduki tentara Belanda adalah pada tahun 1933 bersamaan dengan terjadinya Perang Padri. Masa-masa pertama pendudukannya belum menyentuh sendi-sendi kerukunan masyarakat, tetapi pada kesempatan berikutnya dengan menggunakan kekuasaan, otoritas raja-raja mulai *dikebiri*. Kekuasaan dan wewenang *Raja Panusunan* (pemilik huta) untuk mengadili perkara pidana atau pelanggaran bersanksi, diganti dengan *inlandshce rechtbanken* (kerapatan bumiputra), dan hak mendistribusikan tanah kepada masyarakat dihilangkan. Dari semua rangkaian kejadian, pengaruh ketiga ini dirasakan paling kuat penetrasinya. Masyarakat yang sebelumnya memegang kuat nilai-nilai budayanya, setelah pendudukan Belanda menjadi kehilangan pegangan (*floating mass*).

Perubahan kebudayaan Batak selanjutnya, yaitu setelah kemerdekaan diproklamarikan. Fungsi-fungsi lembaga dan kelembagaan tradisional semakin menciut dialihkan kepada lembaga moderen. Lembaga *kekuriaan* (kesatuan teritorial) diganti dengan Dewan Negeri, Kepala Kuria, Kepala Negeri, Kepala Kampung diganti dengan Ketua-Ketua Dewan atau Ketua Kampung. Tidak lama berselang timbul revolusi sosial di Sumatera Timur, dimana dinasti monarkhis harus turun istana. Banyak diantara keluarga raja yang dibunuh oleh rakyat karena kebencian terhadap sistem feodalisme. Suasana ini berdampak pada kehidupan masyarakat di Mandailing-Angkola. Hampir semua raja-raja panusunan mengundurkan diri karena tidak mau dianggap feodal. Peristiwa inilah awal krisis kepemimpinan yang berlanjut di Angkola-Mandailing (Diapari, 1987). Pemeliharaan adat istiadat yang seyogiannya berada ditangan raja-raja praktis tidak berjalan, secara perlahan-lahan mengalami pendangkalan makna.

Setelah Indonesia merdeka, Raja-Raja yang mengurus tanah adat tidak lagi sepenuhnya berfungsi. Di lain pihak, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-

7. Orang Batak dahulu pernah memiliki beragam kepercayaan (agama), seperti *Mulajadi Na Bolon, Si Raja Batak, Habonaran Do Bona, Parmalim*

Pokok Hukum Agraria masih memberikan tempat bagi hukum adat untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat. Pengganti Ketua Adat adalah Kepala Desa yang tidak memperhitungkan apakah dia berasal dari marga pemilik huta atau tidak. Kepala Desa lebih condong sebagai birokrat formal; sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, daripada sebagai pemimpin yang mencakup segala segi kehidupan masyarakat. Kharisma kepemimpinan desa-desa di Tapanuli sesungguhnya ada pada kalangan marga huta atau *tunggane huta* (Hasibuan, 1988). Keadaannya akan lebih buruk lagi bila yang menjadi Kepala Desa berasal dari kalangan *anak boru* atau *boru*, dimana kedudukannya dalam huta atau dalam adat adalah sebagai "bawahan atau pelayan".

Sampai sekarang *tumbaga holing* yang merupakan hukum tak tertulis tetap berlaku selain mekanisme rasional jual beli atau sistem sewa yang muncul belakangan. Hukum adat tentang pembagian tanah serta kepatuhan masyarakat untuk mentaati peraturan tersebut tidak memungkinkan ekstensifikasi secara besar-besaran.

Berkembangnya jumlah penduduk menuntut penyediaan tanah *manjae* yang luas bagi sejumlah keluarga batih baru. Akibatnya tanah-tanah kosong dan bahkan hutan dirambah sampai ke pedalaman mencari lahan-lahan subur. Tanda-tanda kejenuhan kemudian muncul, pada akhirnya menimbulkan persaingan antar sesama mereka. Sementara itu, hukum adat pertanahan tidak memungkinkan pengambilalihan tanah di luar batas teritorial kampung, sekalipun tanah itu tidak ditanami. Oleh karenanya mereka bergerak ke luar Tapanuli, seperti Sumatera Barat, Riau dan Sumatera Timur. Setelah daerah-daerah "milik orang lain" itu ditempati arus pendatang dari Tapanuli terus mengalir ke sana sehingga tanah itu pun menjadi jenuh.

Kombinasi tuntutan kemandirian terhadap seorang lelaki dan sistem penguasaan lahan berdasarkan hukum adat memberi implikasi sebagai berikut : *Pertama*, Seseorang akan cenderung mencari lahan pertanian yang bisa dikuasai dan diusahakan untuk menghidupi keluarganya di sekitar keluarga orientasi. *Kedua*, Apabila lahan tidak tersedia lagi di sekitar keluarga orientasi, pilihan lain akan beralih ke daerah yang lebih jauh atau dimana lahan dapat ditemukan. *Ketiga*, sejalan dengan tersedianya peluang berusaha

ha yang lebih menguntungkan di sektor non pertanian seseorang tidak lagi mengindahkan pekerjaan bertani serta dimensi spasial pun bukan lagi menjadi kendala yang prinsipil.

Pembentukan *huta-huta baru* biasanya di prakarsai oleh generasi muda yang baru menikah (Siahaan *et al.*, 1978 ; Saragih *et al.*, 1985 ; Hasibuan, 1988). Proses pembentukan kampung baru dapat dipandang sebagai gerak interen penduduk Batak secara bergerombol ke wilayah lain, pada jarak dekat atau jauh di sekitar Tapanuli. Gerombolan migran tersebut lambat laun membentuk suatu sistem sosial yang terlepas dari kontrol kampung asal, tetapi tetap mempertahankan nilai dan strukturnya.

Proses pembentukan *Huta* melalui beberapa tahapan, yaitu: *Pertama*, Pembukaan kebun atau huma yang merupakan lahan perladangan atau perkebunan yang sewaktu-waktu bisa ditinggalkan. *Kedua*, Di sekitar kebun kemudian dibuka mata pencaharian lain yang lebih mengikat, seperti sawah yang diairi dari saluran-saluran khusus yang dibuat secara gotong royong atau pribadi, *Ketiga*, Menentukan batas-batas dengan kampung-kampung tetangga berdasarkan aturan Adat yang ditaati bersama. Batas-batas kampung biasanya ditanami pohon-pohon tahunan, seperti bambu, pinang, *Sikkam*, *Bira*, *Jalu-jalu* dan lain-lain (Hasibuan, 1988).

Hak pemilikan, penguasaan dan penggunaan semuanya diatur oleh hukum Adat (Saragih, *et al.*, 1984). Pada pasca kejenuhan Tanah Tapanuli bila seseorang mengadakan migrasi, hak pemilikannya terhadap tanah tidak lepas dan sebaliknya masyarakat setempat harus menjaga keutuhan tanah-tanah milik orang yang melakukan migrasi. Masyarakat yang tinggal di daerah hanya bisa memanfaatkan lahan sebatas pengusahaan saja atas izin migran sebagai pemilik (Hasibuan, 1988).

Inti kebudayaan pada masyarakat Batak secara ekologi kebudayaan adalah konsep *Harajaon*. Konsep ini secara genealogis dimanifestasikan dalam bentuk *Huta*, sebagaimana penjelasan sebelumnya, merupakan suatu bentuk pengorganisasian seluruh totalitas kehidupan yang mengatur sumberdaya ekonomis, sosial dan politik (Vergouen, dalam Harahap dan Siahaan, 1987). Pembentukan *Huta* dimaksudkan untuk mencapai tujuan hidup 3H, yaitu *Hamoraon*, *Hagabeon*, dan *Hasangapon*. *Hamoraon* berarti mencari

kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya, sedangkan *Hagabeon* adalah memiliki banyak keturunan, dan *Hasangapon* yang berarti mendapat atau menerima banyak kemuliaan dan kehormatan (Harahap dan Siahaan, 1987). Berkaitan dengan tujuan H kedua dalam pesta adat perkawinan disebutkan petuah-petuah sebagai berikut :

Laklak di ginjang pintu sikkoru digolom-golom. Maranak Sampulu pitu marboru sampulu onom...
Memiliki anak laki-laki tujuh belas orang dan memiliki anak perempuan enam belas orang...

Petuah ini memberikan gambaran nilai anak yang tinggi bagi orang Batak, suatu ukuran kebebasan yang diyakini bahwa anak yang lahir membawa rezeki masing-masing (Hasibuan, 1988). Jika keinginan di atas terkabul maka jumlah anak dalam satu keluarga akan berjumlah 33 orang. Mereka menganggap kekayaan yang paling berharga bagi orang Batak adalah keturunan, anak-cucu; *Anakkonki do hamoraon di ahu* (anakku adalah kekayaanku). Konsekuensinya, populasi berkembang sedemikian pesat dan menuntut penyediaan lahan pertanian yang semakin luas.

Involusi pertanian merupakan implikasi dari meningkatnya populasi di Jawa, tidak ditemukan pada masyarakat Batak (Harahap dan Siahaan, 1987). Pembentukan *harajaon* yang diwujudkan dalam pendirian sebuah *huta* baru dapat disebutkan sebagai jiwa *enterpreneurship* orang Batak tradisional yang volusif.

Mengacu pada etika subsistensi yang melahirkan konsep *safety first* oleh Scott yang menimbulkan etika berbagi kemelaratan (*shared proverty*) dan involusi, tidak berlangsung pada masyarakat Batak. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu eksplosif (Harahap dan Siahaan, 1987). Tuntutan subsistensi orang Batak dari sumberdaya pertaniannya yang pra kapitalis dan berada dalam zona bahaya yaitu tingkat krisis subsistensi telah melahirkan etika subsistensi berwujud *Harajaon* atau *Huta-Huta baru*. Mereka cenderung melakukan ekspansi sebelum terjadi krisis atau konflik akibat perebutan lahan antar sesama kerabat dan sekaligus membentuk suatu sistem tersendiri yang memungkinkan untuk pencapaian tujuan 3H serta tujuan-tujuan lain yang lebih luas. *Huta-huta* yang baru merupakan usaha yang dilakukan untuk menghindari kemerosotan sumber-sumber ekonomi akibat pertumbuhan penduduk di *Huta Hatubuan* (kampung

kelahiran).

Dalam sebuah bukunya yang berjudul *Poda-Poda Ni Adat*, seorang pemerhati budaya Batak B.R. Harahap, dapat ditemukan petuah-petuah adat yang mengamankan migrasi sebagai alternatif untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Amang ale Sinuan tunas langka maho amang tu doli manjalahi hangoluan, apalagi ho madung tamat sikola, jala madung martitel sarjana ho ale amang. Dung lalu ho tu doli asa dapotma harejomu di parkobunan. Harana di Sumatera Timur nabahatan nojolo kobun-kobun ni pamarenta asa swasta. Harejo on ninna di parkobunan tobu, ima PTP IX ninna goarna. Hai anakku Sinuan Tunas langkahkanlah kakimu ke Doli, mencari kehidupan (yang lebih baik), terlebih-lebih engkau sudah menyandang gelar sarjana. Setelah engkau sampai ke Doli¹ dan kemudian engkau akan memperoleh pekerjaan. Sebab, di Sumatera Timur dahulu banyak kebun-kebun pemerintah dan swasta. Tempat bekerja itu katanya perkebunan tebu, yaitu PTP IX namanya.

Senandung itu menjelaskan beberapa fenomena budaya masyarakat Batak yaitu : *pertama*, seorang anak lelaki senantiasa diharapkan untuk mencari alternatif pekerjaan di luar sistem orang tuanya. *Kedua*, Tekanan lebih besar kepada mereka yang telah menamatkan sekolah atau sarjana. *Ketiga*, Orang tua mempercayakan sepenuhnya kepada anaknya segala kemungkinan resiko yang ditemui di perantauan.

Setelah wilayah Dataran tinggi Toba, Angkola Mandailing, Simalungun, Tanah Karo, dan Dairi terpenuhi, tanah pendirian *harajaon* tidak lagi tersedia sehingga orang Batak mengadakan migrasi ke luar daerah. Motivasinya tetap sama, yaitu membuka *huta harajaon*. Di dalam umpama Batak diucapkan:

Bulu siambulan Manang langge si halanggean. Huta ni Damang Hatubuan,
Nandang marimbar tano hamatean
Tanah kelahiran di kampung halaman. Tanah kematian tidak harus demikian.

Ungkapan tradisional lain yang sering disebutkan orang tua kepada anaknya adalah *pukkama hutam* atau *carilah kampungmu sendiri*. Ungkapan ini merupakan perintah kultural yang mengikat bagi seorang anak (Harahap dan Siahaan, 1987). Konsep *huta* berbentuk tanah pertanian yang dilingkari oleh batas-batas wilayah dewasa ini tidak berlaku lagi karena orientasi usahanya sudah bergeser ke sektor-sektor non pertanian

8. Doli : Sumatera Timur atau Deli

yang lebih menguntungkan. Akan tetapi nilai-nilai *Pungka Ma Hutamu* sendiri masih tetap dijalankan dalam berbagai macam lapangan kehidupan. Merantau merupakan jalur utama memperoleh pekerjaan-pekerjaan dan untuk mencapai kemajuan.

Kemandirian huta-huta sebagai suatu sistem sosial yang berpegang pada *dalihan natolu* memunculkan sikap immanent bahwa orang Batak merasa dirinya sebagai "raja" atau anak-anak raja. Dalam susunan sosial lama keadaan ini tidak menimbulkan masalah dan akan tetap langgeng karena tuntutan hidup relatif masih terbatas dan tuntutan itu pun masih memungkinkan untuk dipenuhi. Akan tetapi dalam suasana perubahan dimana persaingan mendapatkan sumber-sumber hidup semakin ketat, sikap itu akan memunculkan dilema, yaitu dilema "anak-anak raja". Sesungguhnya sikap meraja itu hanya akan berarti bila status ekonomi mampu menanggulangi segala konsekuensi dari status itu. Sifat-sifat raja, misalnya murah hati dan pengayom hanya akan dapat dilakukan bila ada yang harus diberikan, jika tidak berarti lunturlah makna raja itu.

Di sisi lain, dalam masa-masa transisi nilai sosial budaya meninggalkan semacam *residu* yang kurang menguntungkan. *Pertama*, sikap tergantung pada kerabat, "bahwa dia bagian dari saya" maka "dia akan membantu saya". Selanjutnya sikap ini ditimpali pula oleh sikap sebagai "raja" yang akan memunculkan pandangan remeh pada suatu prestasi atau suatu pekerjaan. *Kedua*, masih berhubungan dengan yang pertama, yaitu sikap dan tindakan dengki (*late, gut-gut, hosom, mantiko*), semacam perilaku yang kurang menghargai hasil kerja orang lain (Harahap dan Siahaan 1987). Secara fungsional sikap-sikap itu menciptakan suatu keadaan dimana iklim berusaha tidak kondusif, dan setiap orang tidak dapat menghindari dari keadaan itu bila ingin hidup dan berusaha di daerah. Hal ini merupakan tekanan sosial budaya yang mendorong seseorang keluar dari sistem itu, migrasi.

5. Migrasi Dan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB)

Gagasan Marsipature Hutana Be dicanangkan sebagai Gerakan Pembangunan Desa Terpadu pada awal Pelita V (lima) merupakan langkah pembangunan desa yang

memadukan potensi masyarakat dan pemerintah. Khusus potensi masyarakat yang selama ini terfokus hanya pada masyarakat setempat, dalam GPDT *Marsipature Hutana Be* diperluas dengan mengikutsertakan para perantau (Siregar, 1990).

Marsipature Hutana Be berasal dari Bahasa Batak, yang bila diartikan secara harfiah berarti *membangun kampung masing-masing*. *Pature* artinya perbaiki, bangun ; *huta* artinya *kampung* atau *desa* ; *mar*, imbuhan menunjuk pada kata kerja yaitu *melakukan*, sedangkan ; *Be* berarti *bersama-sama, masing-masing*. Dengan demikian pengertian ini mempunyai nilai filosofis yang dalam bagi setiap orang yang merasa memiliki kampung halaman, tanpa memperhatikan siapa dan dimana pun seseorang berada. Dalam hal ini perasaan individu baik ia pemilik harta, pengetahuan atau tenaga sebagai bagian dari suatu sistem sosial budaya atau bangsa (*in-group feeling*) dirangsang, untuk berpartisipasi membenahi tanah kelahiran yang berjasa kepadanya.

Marsipature Hutana Be (MHB) sebagai model pembangunan regional bisa menimbulkan perbedaan persepsi antar orang perorangan serta dapat pula mengakibatkan penyimpangan pendekatan dari hakekat yang diinginkan. Oleh sebab itu pelopor GPDT-MHB yang menjabat sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara periode 1988-1993 membuat pokok-pokok pikiran GPDT-MHB, sebagai berikut:

1. *Marsipature Hutana Be* berarti membangun desa dengan motivasi yang digali dari rasa kemanusiaan dimana pada hakekatnya setiap orang mencintai kampung halamannya. Setiap orang akan merasa tergugah dan terpanggil hatinya bila diajak untuk membangun negerinya.
2. Bertitik awal dari rasa cinta kampung halaman sebagai motivasi membangun desa akan melahirkan pola pikir bahwa dengan membangun desa otomatis akan terbangun kecamatan, akan terbangun pula kabupatennya, propinsinya dan negara Indonesia. Pola pikir yang selama ini mencari cara-cara atau pola-pola pembangunan Sumatera Utara dirubah menjadi pola pikir *membangun desa otomatis membangun Indonesia* adalah perwujudan wawasan nusantara, wawasan nasional.



3. *Marsipature Hutana Be* berarti memotivasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih luas yaitu bukan saja masyarakat yang bermukim di pedesaan tetapi masyarakat yang bermukim di perantauan. Upaya ini sesuai dengan kete-tapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana pembangunan nasional harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat lebih banyak.
4. Masyarakat perantauan hendaknya diartikan lebih luas pula, yaitu orang-orang yang tidak bermukim di desa tetapi tergugah dan bersimpati terhadap desa dengan alasan yang berbeda-beda antara lain, desa sebagai tempat lahir, desa sebagai asal-usul nenek moyang, tempat dibesarkan, tempat berjuang, tempat istri dilahirkan. Perantau tidak terbatas pada pemuka-pemuka ternama atau berpangkat tetapi juga anggota masyarakat wiraswastawan tanpa memandang status serta besar kecilnya kemampuan yang dimiliki. Yang paling penting adalah keinginan yang luhur yang dilandaskan pada niat suci dan keikhlasan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
5. Menggerakkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki desa, baik potensi sumberdaya alam maupun manusia. Menggali dan mendinamisasi institusi kelembagaan tradisional dan budaya leluhur yang pernah hidup atau yang masih berkembang dalam masyarakat. Misalnya *dalihan natolu, arisan marsialapari, aron, serayon, rambate rata raya, rambate rata hayo, haroon bolon, ikabina enpabolo, poda na lima, pesikap kuta kemulihenta* dan sebagainya, yang kesemuanya itu dapat dikembangkan dan diorientasikan pada pembangunan desa.

Menurut Pelly (1990) GDPT-MHB mempunyai dua sasaran utama yang disederhanakan dari lima unsur pokok pikiran di atas, yaitu : *Pertama*, memotivasi masyarakat desa setempat untuk membangun desa mereka, dan ; *Kedua*, menghimbau serta mendorong para perantau masyarakat Sumatera Utara untuk membangun desa asal masing-masing. Para perantau yang merupakan sasaran kedua secara tersirat lebih



ditujukan pada perantau yang berasal dari Tapanuli. Tekanan khusus terhadap perantau dari Tapanuli dan wilayah Tapanuli bukanlah suatu kebetulan, berbagai hal data historis menunjukkan bahwa daerah ini merupakan *peta kemiskinan*. Sedangkan daerah lain di Sumatera Utara, seperti daerah Pantai Timur, sejak dulu sudah mapan perekonomiannya. Upaya untuk memacu pembangunan wilayah *peta kemiskinan* tersebut telah pernah dilakukan pada Pelita IV, yaitu Operasi Khusus Maduma (OPSUS MADUMA).

Aliran keluar masuk uang (*money cash flow*) dari dan ke Tapanuli mengalami ketimpangan. Pelly (1990) yang melakukan survei di Kantor-Kantor Pos Padang Sidempuan, Sibolga, dan Tarutung menemukan uang yang keluar ternyata lebih banyak dari pada uang yang masuk. Kebanyakan uang keluar tertuju pada penduduk yang sekolah di luar daerah. Keadaan ini mengakibatkan pengkurusan dana material dan sumber daya manusia (*brain drain*) secara bersamaan. Namun harus pula dipahami, proses pemiskinan yang terjadi tidaklah semata-mata akibat ketimpangan uang masuk dan keluar (Pasaribu, 1993).

Sebagian Desa-desa di Sumatera Utara mengalami ketinggalan. Menurut Siregar (1990) lambatnya perkembangan desa di Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : *Pertama*, kurangnya motivator sebagai penggerak pengembangan desa, karena penduduk yang relatif berpendidikan lebih memilih untuk tinggal di rantau dan tidak berniat untuk memperbaiki apa yang mereka tinggalkan di desa, padahal perantau yang telah memiliki banyak pengalaman sangat diharapkan sebagai pembaharu. *Kedua*, sikap mental masyarakat, terutama generasi muda, untuk memperbaharui lapangan usaha peninggalan pendahulu mereka, seperti peremajaan tanaman pertanian yang sangat lambat. *Ketiga*, berhubungan dengan yang sikap mental, etos kerja masyarakat yang rendah. Untuk mengikis ketiga masalah di atas perlu ditempuh terobosan baru untuk memulai era baru dalam pembangunan desa yang lebih komprehensif di Sumatera Utara melalui GPDT-MHB. Di pihak lain terjadinya penurunan penghayatan terhadap nilai-nilai kekerabatan, meterialisme, monetasi, dan erosi kebersamaan sebagai



gejala transformasi sosial juga merupakan kendala yang akan ditemui dalam GPDT-MHB (Ritonga, 1989).

Organisasi pelaksana GPDT-MHB dipegang oleh Pemerintah Desa dan LKMD Desa, instansi pemerintah di tingkat kecamatan, Tim pembina LKMD di setiap tingkatan pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut merupakan Posko-Posko Operasional untuk jalur perencanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Bantuan dan partisipasi perantau disalurkan melalui organisasi formal yang ada.

Mekanisme kerja dan komunikasi pembangunan GPDT-MHB dan pelembagaan sejak pembentukannya hingga sekarang masih menjadi bahan perdebatan kalangan teoritis pembangunan. Pendapat-pendapat yang muncul umumnya dapat digolongkan ke dalam dua aliran, yaitu aliran *moralis* dan *rasionalis*. Aliran *moralis* memandang GPDT-MHB dapat berhasil mencapai tujuan dengan himbauan yang berdimensi kultural dan khususnya perantau dimungkinkan untuk mewujudkan "partisipasi"-nya sesuai kehendak masing-masing yang dikoordinasi oleh lembaga formal seperti tersebut di atas (Siregar, 1989; Lubis, 1992; Tambunan, 1992).

Kata **Pature** berarti membenahi, mengatur, menertibkan, menata, mengurus atau mengelola. Dalam operasionalnya semua pengertian itu dijabarkan sekaligus secara isi mengisi dan semua itu mengandung makna manajemen dan manajerial (Siregar, 1989). Lebih lanjut Siregar mengatakan :

"Ikatan batiniah, rasa kekeluargaan dan kegotong-royongan antara masyarakat desa dengan masyarakat perantau perlu ditingkatkan melalui hubungan komunikasi maupun kunjungan silaturahmi atau pulang kampung. Dengan demikian masyarakat perantau yang pada umumnya telah berfikiran maju, yang telah menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas hidup yang lumayan akan tergugah dan dapat menghayati berbagai permasalahan" [R.I. Siregar, 1989].

Dimensi politik memboboti GPDT-MHB, khususnya dalam peningkatan otonomi daerah dalam pembangunan dan untuk memecahkan hubungan ketergantungan, pembenahan Daerah Tingkat II dengan pembenahan desa. Lubis (1992) menyatakan:

Dilihat dari sudut pandang kepemimpinan (Leadreship) maka kepemimpinan sosial politik dari aparat pemerintah akan bertemu dengan kepemimpinan non-

formal yakni para informal leaders dari masyarakat, dan melalui perpaduan ini pendekatan-pendekatan kultural (**Cultural Approach**) akan terjalin secara harmonis dengan pendekatan-pendekatan politis (**Political Approach**). Hal tersebut merupakan salah satu kunci validitas (kesahihan) konsep Marsipature Hutana Be dilihat dari sudut pandang sosiopolitik [Lubis, 1992: 1].

GPDT-MHB juga diinginkan oleh sebagian pihak hanya himbuan bukan lembaga formal.

Konsep itu sebagai salah satu pranata sosial dan konsep idealis yang bernilai kultur, memang fungsi konsep idealis yang bernilai kultur. ... sekedar *philosophical sustaining force* (kekuatan pendukung yang sifatnya filosofis) untuk menunjang upaya pemerintah dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang punya kaitan dengan desa dan pembangunannya [Lubis, 1993 :3].

Kalangan *moralis* lain yang mendukung Lubis dikemukakan oleh Tambunan, sebagai berikut :

Nilai filosofis demikian tidak perlu dilembagakan. Biarkan berkembang antara perantau dengan kampung halamannya [Tambunan, 1993 : 1]

Di pihak lain *aliran rasionalis* menyangsikan kehandalan pendekatan aliran *moralis* yang menjadi landasan berpijak GPDT-MHB hingga sekarang (Nasution, 1993; Pelly, 1993; Usman, 1993; Silalahi, 1993; Marzuki, 1992; Pasaribu, 1992).

GPDT-MHB akan menemui nasib yang sama dengan isu peta kemiskinan pada momentum pembangunan Operasi Khusus Maduma, yaitu yang diumumkan, diulas kemudian dilupakan (Pasaribu, 1992). Studi-studi antropologis membuktikan pembangunan ekonomi modern dapat hidup berdampingan dengan struktur-struktur dan pola-pola kebudayaan non ekonomis (Pelly, 1993). Keterpaduan pembangunan ekonomi modern dan pola kebudayaan non ekonomi perlu didukung oleh keterampilan administrasi dan organisasi. Kepada masyarakat agar memiliki kemampuan mengelola sumberdaya sosial.

Arti penting pelembagaan GPDT-MHB menurut Pelly (1993) adalah: (1) Untuk memperoleh kesamaan pandangan dan wawasan dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan program. (2) GPDT-MHB memiliki tantangan pandangan kosmologis masyarakat, sehingga perlu rekonstruksi terhadap pola hubungan kampung halaman dari rantau. (3) Partisipasi dapat dicapai apabila ada keserasian antara bentuk usaha pembangunan dan teknologi, disatu pihak dan dengan sistem orientasi nilai budaya

masyarakat di pihak. (4) Etos kerja masyarakat yang belum mampu mengikuti perubahan ekonomi agraris-industri. GPDT-MHB yang telah mampu menghimpun dana hampir Rp 90 miliar ternyata belum mengikti rujukan $p = f$ (sumberdaya manusia, alam dan modal).

Mengacu kepada model operasional pembangunan Geertz (1961), yaitu model of (model dari) dan model for (model untuk), Pelly mengidentifikasi model GPDT-MHB yang berlangsung saat ini. Model of digunakan untuk melihat wujud kenyataan empiris dari kegiatan yang sedang dilakukan agar dapat dipahami secara holistik dan sistematis. Sedangkan model for digunakan untuk mengembangkan suatu kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Keduanya tidak bersifat kontradiktif walaupun terdapat perbedaan antara masing-masing model. Kajian Pelly terhadap kedua model akhirnya sampai pada penemuan model operasional.

Menurut Pelly (1993), manfaat yang diperoleh dari pelembagaan GPDT-MHB antara lain adalah : (1) Memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat; (2) Aksesibilitas pada lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi, BPR, Bank, dan lainnya; (3) Memberi tempat secara legal kepada pihak-pihak lain terutama perantau sebagai penyandang dana; (4) Memudahkan kontrol, evaluasi, dan pertanggungjawaban secara administratif.

Di Asia terdapat 72 buah tipologi program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, umumnya menunjukkan kinerja yang baik karena: (1) Swadaya masyarakat sampai batas tertentu dapat melonggarkan keterbatasan dana; (2) Swadaya masyarakat dapat mengurangi dampak negatif dan kekakuan birokrasi; (3) Partisipasi masyarakat dapat menjamin kesinambungan program (Nasution, 1993). Selanjutnya Nasution mengatakan, kunci keberhasilan program terletak pada : (1) Rencana yang baik menurut perhitungan potensi, masalah, peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat; (2) Selain terlibat dalam perencanaan, masyarakat harus berpartisipasi pada proses pembangunan dan sekurang-kurangnya dalam bentuk tenaga kerja sukarela; (3) Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari

program dalam waktu yang relatif pendek untuk meyakinkan partisipasi dalam jangka panjang; (4) Kepemimpinan yang kokoh dan bersih merupakan syarat pokok dan kaderisasi sistematis berkesinambungan sangat dibutuhkan; (5) Tidak satu pun perubahan yang dipakasakan, norma, dan nilai masyarakat penting dipahami; (6) Program pembangunan harus *accountable*, baik dalam aspek finansial maupun dampaknya; (7) Masyarakat seharusnya tidak menerima apapun secara cuma-cuma jika masyarakat menerima dana hibah, maka tetap mengembalikannya menjadi dana bersama yang dapat digunakan untuk kelanjutan program. Istilah lain yang digunakan dalam hal ini adalah *memberikan ikan kepada seseorang adalah baik, tetapi jauh lebih baik jika diberikan adalah kail atau jala* (Giatmo, 1993). Dalam menyamakan persepsi masyarakat hendaknya dibuat suatu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Marzuki, 1993).

Faktor lain pendukung GPDT-MHB adalah: (1) Data dan informasi dalam *System Informasi Management* (SIM); (2) Kelembagaan formal dan non-formal untuk memobilisasi sumberdaya lokal, mengetahui aspirasi dan cita-cita masyarakat. Penelitian terbaru di Kabupaten Dairi menunjukkan, sistem manajemen informasi potensi wilayah belum tersedia memadai untuk memperlancar penetapan kebijakan bisnis lokal. Adapun data-data yang diperoleh pada publikasi kecamatan diragukan keabsahannya dan tidak mungkin dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan (Silalahi, 1993).

Antisipasi dari dalam (internal) terhadap kemungkinan arus keluar sumberdaya berkualitas tinggi dapat ditempuh melalui: (1) mendirikan lembaga pendidikan unggulan dan diversifikasi usaha untuk menciptakan kesempatan kerja; (2) Mengundang tenaga kerja kerah putih (*white collar laborers*), misalnya sarjana-sarjana dengan insentif tinggi (Nasution, 1993).

Tabel 6. Model Of, Model For dan Model Operasional Pembangunan (GPDT-MHB).

Model Of (Model yang ada)	Model For (Model ideal)	Model Operasional
1. Bentuk-bentuk kegiatan belum dilembagakan	1. Bentuk-bentuk kegiatan, terutama unit usaha bisnis telah dilembagakan	1. Beberapa bentuk atau unit kegiatan telah dilembagakan dalam bentuk Firma, Individual dan Koperasi
2. Kegiatan belum berpola $P = f(SDM, SDA, Modal)$	2. Seluruh kegiatan berpola $P = F(SDM, SDA, Modal)$	2. Setiap unit kegiatan dikembangkan dengan pola $P = f(SDM, SDA, Modal)$
3. Kegiatan dilakukan masih bersifat sporadis, seremonial, tidak berencana dan tidak teratur	3. Kegiatan terencana dan teratur	3. Perencanaan pengembangan unit didasarkan pada identifikasi SDA yang terdapat di sekitar lokasi, dan pengembangan tingkat SDA dan modal yang diperoleh
4. Wujud partisipasi masyarakat desa setempat dan perantau belum jelas	4. Partisipasi masyarakat dan perantau cukup tinggi	4. Unit-unit usaha dikembangkan oleh keluarga, individu, bersama-sama dengan dengan organisasi dan administrasi dengan baik
5. Pola hubungan rantau dan kampung halaman belum mantap	5. Pola hubungan rantau dan desa asal mantap	5. Perantau berfungsi sebagai bapak angkat, pemodal, dan pengawas usaha
6. Kualitas SDM (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan) untuk mengelola unit usaha masih sangat rendah	6. Kualitas SDM (pengetahuan, pengalaman, ketrampilan) yang diperlukan relevan dengan usaha yang akan dikembangkan	6. Ketrampilan manajemen disesuaikan dengan tingkat pengembangan unit-unit usaha
7. Belum banyak unit-unit usaha baru yang direncanakan untuk dikembangkan	7. Terdapat perencanaan pengembangan unit-unit usaha baru dengan modal GPDT-MHB	7. Unit-unit usaha baru dikembangkan atas dasar $P = f(SDM, SDA, Modal)$ dan permintaan pasar
8. Lembaga keuangan belum terlibat	8. Lembaga keuangan (Bank BPR) dan Koperasi mendukung dan terlibat dalam mensukseskan GPDT-MHB	8. Pengembangan usaha-usaha didukung oleh lembaga-lembaga keuangan /terutama BPR
9. Koordinasi pemerintah daerah setempat masih kurang	9. Terdapat koordinasi pemerintah daerah setempat	9. Terdapat koordinasi pemerintah daerah setempat

Sumber : Pelly (1993).

GPDT-MHB berpotensi menjadi sarana pemerataan pembangunan yang mengacu kepada *trickle down effect*. Akan tetapi potensi tidak akan berarti apabila tidak dipenuhi syarat-syarat: (1) GPDT-MHB tidak sekedar himbauan politis, tetapi sebaliknya dia harus dioperasionalkan dengan niat tulus untuk pemerataan pembangunan di pedesaan; (2) GPDT-MHB harus dilembagakan secara formal. Arti penting pelembagaan ini adalah memebentuk jaringan kerja (*net work*) yang terpisah dari badan-

badan pemerintah operasional, tetapi harus tetap berada di bawah struktur eksekutif pemerintah daerah (Usman, 1993). Model yang dimaksud kurang lebih sama dengan kelembagaan Gerbang Mapak atau Gerakan Pembangunan Mandiri Pakidulan di Jawa Barat bagian selatan (Rakhmat, 1994).

Berkaitan dengan partisipasi migran dalam GPDT-MHB akan diuraikan konsep-konsep umum dari beberapa ahli. Penulis umumnya mengartikan partisipasi (peranserta) sebagai keterlibatan fungsional individu atau kelompok dalam suatu kegiatan objek tertentu (Adjid, 1985; Tjokroamidjojo, 1979; Ndraha, 1990; Cohen dan Uphoff, 1977).

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai kemampuan dari anggota masyarakat untuk bertindak dalam suatu kebersamaan yang teratur untuk menanggapi kondisi lingkungan, sehingga mereka bertindak sesuai dengan logika dari nilai yang terkandung di dalam kondisi lingkungan tersebut (Ajid, 1985). Partisipasi juga berarti suatu prakarsa masyarakat dimana masyarakat itu ikut serta berperan dalam proses kegiatan usaha bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan (Bonaventura, 1991). Partisipasi dicirikan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam program yang dilaksanakan oleh pihak lain atau keterlibatan masyarakat untuk berprakarsa baik dalam usaha bersama maupun melakukan kegiatan dengan pihak lain (Ndraha, 1990).

Partisipasi menurut Tjokroamidjojo (1979) adalah insentif sumbangan masyarakat pada program-program pembangunan baik dalam proses penentuan arah strategi dan kebijakan pembangunan, memikul beban pembangunan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan, untuk memetik hasil dari manfaat pembangunan secara berkeadilan sosial.

Lebih jelas lagi, pengertian partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1977) adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya; keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam suatu organisasi; keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.

Partisipasi mengacu pada beberapa subjek yang berinteraksi yaitu individu yang

berada dalam suatu unit masyarakat organisasi, perekonomian, pemerintah, bangsa yang terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu tapi masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Partisipasi berkonotasi keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan suatu kegiatan dan kelompok sasaran partisipasi adalah masyarakat itu sendiri (Ajid, 1985).

Partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan menurut empat aspek (Goulet, 1991), yaitu : (1) Partisipasi menurut wilayah operasinya, sektoral atau lintas sektoral; (2) Partisipasi menurut asal-usulnya, yaitu dari atas (penguasa), dari bawah, atau dari luar sistem; (3) Partisipasi menurut sarana dan tujuan, klasifikasi ini memperhatikan apakah peran serta itu dominan pada ciri tujuan atau sarana; (4) Partisipasi menurut saat diwujudkannya, dapat diamati pada penentuan pokok permasalahan, pemilihan suatu rangkaian tindakan dan pelaksanaan tindakan yang dipilih.

Menurut Ajid (1985), pengertian baku dari partisipasi adalah: (1) Partisipasi mengacu pada beberapa subjek yang berinteraksi yaitu individu, yang berada dalam suatu unit masyarakat, organisasi, perekonomian, pemerintah, bangsa yang terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu tapi masing-masing mempunyai keleluasaan untuk mengambil keputusannya sendiri-sendiri. (2) Terdapat kesukarelaan dan kesadaran dari individu untuk menjalankan peranan yang diberikan oleh organisasinya secara sukarela. (3) Partisipasi berkonotasi pada keterlibatan anggota perorangan dalam proses pengelolaan suatu kegiatan. (4) Kelompok sasaran dari partisipasi adalah rakyat banyak.

Jenis partisipasi masyarakat menurut Goulet (1990) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, partisipasi menurut wilayah operasionalnya, sedangkan lingkup partisipasi dapat dibagi secara sektoral tergantung pada wilayah atau bidang dimana partisipasi dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada pelaksanaan pembangunan. *Kedua*, partisipasi menurut asal-usul, partisipasi dapat berasal dari tiga sumber yaitu: berasal dari *atas* yaitu dari penguasa, berasal dari *bawah* yaitu dari masyarakat lokal atau berasal dari pihak luar. *Ketiga*, partisipasi sebagai sarana dan tujuan, keadaan seperti ini tergantung pada penekanan partisipasi itu sendiri dominan

pada ciri tujuan atau sarana. Namun pada kenyataannya partisipasi tidak pernah dinyatakan secara implisit sebagai tujuan atau sebagai sarana. *Keempat*, partisipasi menurut saat dilakukannya, berdasarkan klasifikasi ini kegiatan partisipasi dapat dibedakan pada saat penentuan pokok permasalahan, pemilihan suatu rangkaian tindakan dan pelaksanaan tindakan yang dipilih.

Cohen dan Uphoff (1977) melihat partisipasi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan dimensi partisipasi yang mencakup bentuk partisipasi apa yang dilakukan, siapa yang terlibat dalam kegiatan partisipasi dan bagaimana proses partisipasi berlangsung. Partisipasi yang diharapkan mencakup: *Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang dibedakan berdasarkan tahapan: (1), pada saat penentuan keputusan awal mengenai proyek dengan memperhatikan keperluan dan prioritas proyek atau kegiatan apa yang akan dikerjakan; (2) ikut serta secara terus menerus dalam setiap proses pengambilan keputusan; serta (3) ikut serta dalam merumuskan keputusan mengenai rencana kerja. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan proyek, dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu : (1) sumbangan tenaga ikut bekerja dalam proyek, sumbangan materi atau pemberian informasi; (2) terlibat dalam kegiatan administrasi dan koordinasi; serta (3) ikut serta sebagai peserta dari proyek yang dilaksanakan. *Ketiga*, partisipasi menerima hasil pelaksanaan proyek. Hasil yang dapat dilihat sebagai dampak pelaksanaan suatu proyek mencakup: (1) keuntungan material berupa pendapatan dan pemerataannya; (2) keuntungan sosial, seperti peningkatan pendidikan atau terberantasnya buta huruf; serta (3) keuntungan perorangan, antara lain berupa kemantapan status sosial seseorang serta meningkatnya kekuasaan politik. *Keempat*, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. Bentuk partisipasi seperti ini penting bagi para pengambil keputusan untuk memperoleh masukan mengenai pelaksanaan proyek baik yang sudah maupun yang sedang berjalan. Evaluasi merupakan analisis secara terus menerus terhadap suatu proyek baik berdasarkan hasil dan manfaat yang diperoleh berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Partisipasi dibedakan dalam dua bentuk yaitu : (1) Partisipasi profesional, yaitu partisipasi yang dilakukan sepanjang proses pembangunan mulai dari bentuknya sebagai

gagasan sampai pada bentuknya sebagai suatu kegiatan nyata; (2) Partisipasi parsial, partisipasi yang dilakukan pada satu atau beberapa fase saja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan (Ndraha, 1990).

Tjokroamidjojo (1979) mengatakan ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi masyarakat yaitu: (1) Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang akan ditempuh; (2) Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang hendak dicapai tersebut sebaiknya. Peningkatan kemampuan masyarakat tersebut dirasakan penting dan mendesak mengingat proses pembangunan senantiasa menuntut pembaharuan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat; (3) Partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan; (4) Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana. Program partisipatif ini pada tingkat tertentu dapat memberikan kesempatan secara langsung pada masyarakat untuk berperanserta dalam rencana-rencana yang menyangkut upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka, dan secara langsung melaksanakan sendiri dan memetik hasil program tersebut.

Partisipasi masyarakat adalah bagian sentral dalam suatu strategi pembangunan masyarakat yang terpadu. Bila masyarakat sudah berpartisipasi dalam seluruh aspek proses pembangunan yaitu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta penerimaan hasil-hasil pembangunan maka tujuan pembangunan akan lebih mudah tercapai (Rakhmat, 1994).

Goulet (1990) melihat pentingnya partisipasi berdasarkan fungsi yang partisipasi itu sendiri dalam pembangunan yaitu: (1) Partisipasi menjamin perlakuan pemerintah untuk tidak memperlak rakyat dengan menempatkan mereka pada kedudukan yang terhormat; (2) Partisipasi berlaku sebagai instrumen berharga untuk kegiatan memobilisasi, mengorganisasikan dan mengembangkan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pemecah masalah utama di lingkungan sosial mereka; (3) Partisipasi

berfungsi sebagai saluran tempat kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan lokal memperoleh jalan masuk ke bidang-bidang makro pembuatan keputusan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan dikaitkan dengan peranan migran atau perantau dalam GPDT-MHB dapat disebutkan bahwa: (1) Bila partisipasi perantau sekedar menyumbang dana, partisipasi itu berarti bersifat parsial dan tidak kontinu; (2) Bila partisipasi dipandang sebagai keterlibatan menyumbang dana atau pikiran ke desa maka bantuan uang yang bersifat rutin atau tidak rutin juga termasuk dalam konteks partisipasi parsial; (3) Berkaitan dengan point kedua, maka defenisi partisipasi maksimal yang dapat digunakan adalah defenisi migran tentang tindakannya yang berkaitan dengan GPDT-MHB.

B. Kerangka Pemikiran

Perpindahan penduduk dalam konteks kebudayaan Batak sejak awal peradabannya sampai saat ini dipandang sebagai suatu proses pemindahan *Huta* dengan segala bentuk misi budayanya (Harahap dan Siahaan, 1987 ; Pelly, 1992). *Huta* merupakan wadah untuk memmanifestasikan tujuan hidup secara totalitas, yaitu membentuk *harajaon* atau *sahala harajaon*. Meskipun lapangan kehidupan telah berubah sedemikian besar tetapi nilai budaya tersebut tetap bertahan (*immanent*). Oleh sebab itu penelaahan ini dilandaskan pada orientasi nilai budaya tersebut. Asumsi kedua yang digunakan adalah "migrasi tidak akan terjadi bila seseorang masih mendapat ruang atau wadah untuk mencapai tujuan-tujuan hidup di suatu tempat". Pendefinisian ruang atau wadah dalam hal ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, melainkan harus pula memperhitungkan aspek-aspek sosial dan budaya.

Memahami migrasi sebagai suatu proses tidak terlepas dari adanya konsepsi-konsepsi faktor pendorong, penarik, faktor pelancar, serta karakteristik individu. Penetrasi faktor-faktor tersebut akan selalu berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan kondisi atau *setting* tertentu dimana migrasi itu berlangsung, dan pada saat kapan. Perubahan kondisi ekonomi, politik dan sosial-budaya berlaku baik di daerah asal dan daerah tujuan.

Dari sejarah migrasi orang Batak dapat diketahui bahwa penduduk yang berpindah telah berlangsung beberapa generasi. Motivasi migrasi yang terbentuk pada masing-masing generasi akan berbeda sesuai dengan situasi kontemporal yang berlangsung saat itu. Oleh sebab itu, migrasi Orang Batak harus dibedakan berdasarkan *setting* perpindahan. Motivasi migrasi Orang Batak yang bermigrasi sebelum Orde Baru sudah tentu akan berbeda dengan motivasi migran yang pindah pada kesempatan berikutnya karena kondisi yang melandasinya juga berbeda. Perbedaan *setting* tersebut juga akan memperlihatkan penduduk dari golongan atau lapisan mana yang melakukan migrasi.

Struktur perekonomian di pedesaan yang timpang ke sektor pertanian menganjurkan masyarakat khususnya lapisan muda kepada keadaan tidak banyak pilihan. Pekerjaan-pekerjaan di bidang industri dan jasa sangat terbatas. Dari segi ketersediaan lahan, daerah Tapanuli tergolong luas dan masih memungkinkan untuk mengupayakan ekstensifikasi. Akan tetapi pada saat yang sama pandangan masyarakat terhadap kegiatan pertanian itu rendah, dan tidak memberi status tinggi pada pelakunya.

Pranata-pranata sosial yang berbentuk upacara-upacara adat (*siluluton-siriaon*), khususnya *siriaon* dapat menjadi beban bagi individu karena frekuensinya yang tinggi serta memakan waktu yang banyak dan pengeluaran yang besar, pada akhirnya akan mengurangi proporsi waktu seseorang untuk berusaha menghasilkan pendapatan. Demikian pula adanya sifat negatif pada orang desa, yaitu *gut-gut*, *hosom*, *mentiko*, etos kerja secara kolektif yang rendah, serta nilai resiprositas yang tinggi, akan melahirkan suatu keadaan dimana iklim berusaha tidak kondusif. Setiap orang sulit untuk keluar dari sistem itu dan akan tetap terbelenggu selama menetap di desa.

Salah satu efek kegiatan merantau yang berlangsung sejak lama adalah terbentuknya "nilai" pada masyarakat bahwa jika ingin berhasil mencapai tujuan hidup maka perlu ditempuh melalui migrasi atau membentuk *sahala harajaon* (kerajaan pribadi). Bersama dengan faktor-faktor lain, nilai-nilai ini menjadi semacam pendorong bagi individu untuk menempuh migrasi, jika tidak mendapat tempat yang layak untuk meningkatkan status sosial di daerah.

Peristiwa konflik antar sesama kerabat pada era pergolakan politik zaman penjajahan sampai pada masa-masa Orde Baru, atau pun konflik skala kecil akibat masalah-masalah keluarga dan kerabat juga turut mendorong terjadinya migrasi. Pihak-pihak yang kalah atau yang mengalah akan memilih migrasi dari pada tetap bertahan dalam suasana disharmoni kekerabatan. Bermigrasi tidak berarti memutuskan semua bentuk ikatan dengan kerabat itu, melainkan suatu cara yang ditempuh untuk mengeratkan kembali ikatan emosional yang retak.

Tingginya kesadaran masyarakat akan arti pendidikan sebagai jalur untuk peningkatan kesejahteraan atau status sosial ekonomi membentuk semacam nilai dan cita-cita bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan. Pada Orang Batak minat terhadap pendidikan ini telah mengakar sejak seorang tokoh pelopor pendidikan, Willem Iskandar menghembuskan ide-ide pendidikan di Tanah Batak pada akhir abad ke-19. Kebutuhan pendidikan dalam masyarakat jika tidak dimbangi ketersediaan fasilitas yang memadai di daerah, terutama untuk pendidikan menengah atas sampai tinggi akan mendorong migrasi penduduk ke ke pusat-pusat pendidikan. Sampai saat ini kota-kota di Pulau Jawa masih dipandang sebagai pusat-pusat pendidikan terkemuka di Indonesia. Disamping status kota sebagai pusat pendidikan, daya tarik lain dari kota atau daerah tujuan adalah faktor ekonomi. Struktur ekonomi daerah menyediakan kesempatan berusaha yang bervariasi terutama di luar sektor pertanian, formal atau informal bagi migran.

Adanya faktor pelancar (*agent of modernization*), seperti kerabat, anggota keluarga, dan teman yang terlebih dahulu menjalani hidup di perantauan akan mempercepat proses migrasi. Kecenderungan umum yang terlihat dari berbagai penelitian migrasi, peran agen ini tidak hanya sebagai penampung sementara atau memberi informasi tentang daerah tujuan saja, tetapi sering pula membantu untuk mencarikan pekerjaan atau tempat pendidikan bagi migran baru. Bagi Orang Batak penerimaan terhadap pendatang baru, bermakna lebih dalam lagi, yaitu memperkuat dan memperkaya *sahala harajaon* yang sudah terlebih dahulu dirintisnya.



Status marga dalam *hutapun* diduga akan terlihat, yaitu berada di tangan orang-orang yang pertama menginjakkan kaki di daerah tujuan dan berfungsi sebagai agen, dalam hal ini tidak lagi dipandang sebagai pemilik huta tetapi sebagai orang yang memiliki status tinggi dalam setiap interaksi mereka (migran dan agen).

Dalam konteks tradisional, *huta*, memberikan identitas marga *huta* atau *tung-gane huta* yaitu, orang yang pertama membuka suatu pemukiman dalam wilayah teritorial tertentu, biasanya terdiri dari satu marga atau kelompok marga. Walaupun masih dalam taraf penjajagan, perbedaan keaslian marga huta ini diduga berkaitan dengan terjadinya migrasi. Orang-orang dari kalangan marga huta tidak akan terhalang untuk berpindah karena takut kehilangan tanah adatnya, sementara keluarga *parripe* (pendatang) justru berbeda, meninggalkan huta berarti kehilangan tanah. Akan tetapi bisa juga sebaliknya karena *parripe* merasa bukan sebagai pemilik *huta* maka dia memilih untuk berpindah membentuk *huta* atau *sahala harajaan*.

Migrasi, secara langsung akan mempengaruhi pola bersikap dan pola bertindak dari migran ketika menjalani kehidupan baru, berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Sebagai pemilik kebudayaan, di daerah baru seorang migran dihadapkan pada dua kebudayaan yang berbeda yaitu, kebudayaan sendiri (*In-grup*) dan kebudayaan masyarakat daerah tujuan (*Out-grup*). Dalam hal ini komunikasi antar budaya akan membentuk pola sikap dan tindakan migran terhadap kedua bentuk budaya tersebut. Pola adaptasi semacam ini akan dipelajari berdasarkan kerangka berpikir Redfield melalui konsepsi tujuh unsur kebudayaan universal dari Kluckhohn. Fenomena akulturasi atau asimilasi akan muncul sebagai hasil atau kondisi dari interaksi dua kebudayaan. Interaksi individu dalam kelompok-kelompok ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pola bersikap dan bertindak migran, disamping karakteristik migran, seperti jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, suku bangsa istri, umur, masa domisili, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan.

Setelah kehidupan migran terintegrasi dengan masyarakat daerah tujuan secara luas, dan dengan kerabat sederaah terbentuk suatu sikap pada migran tentang eksisten-

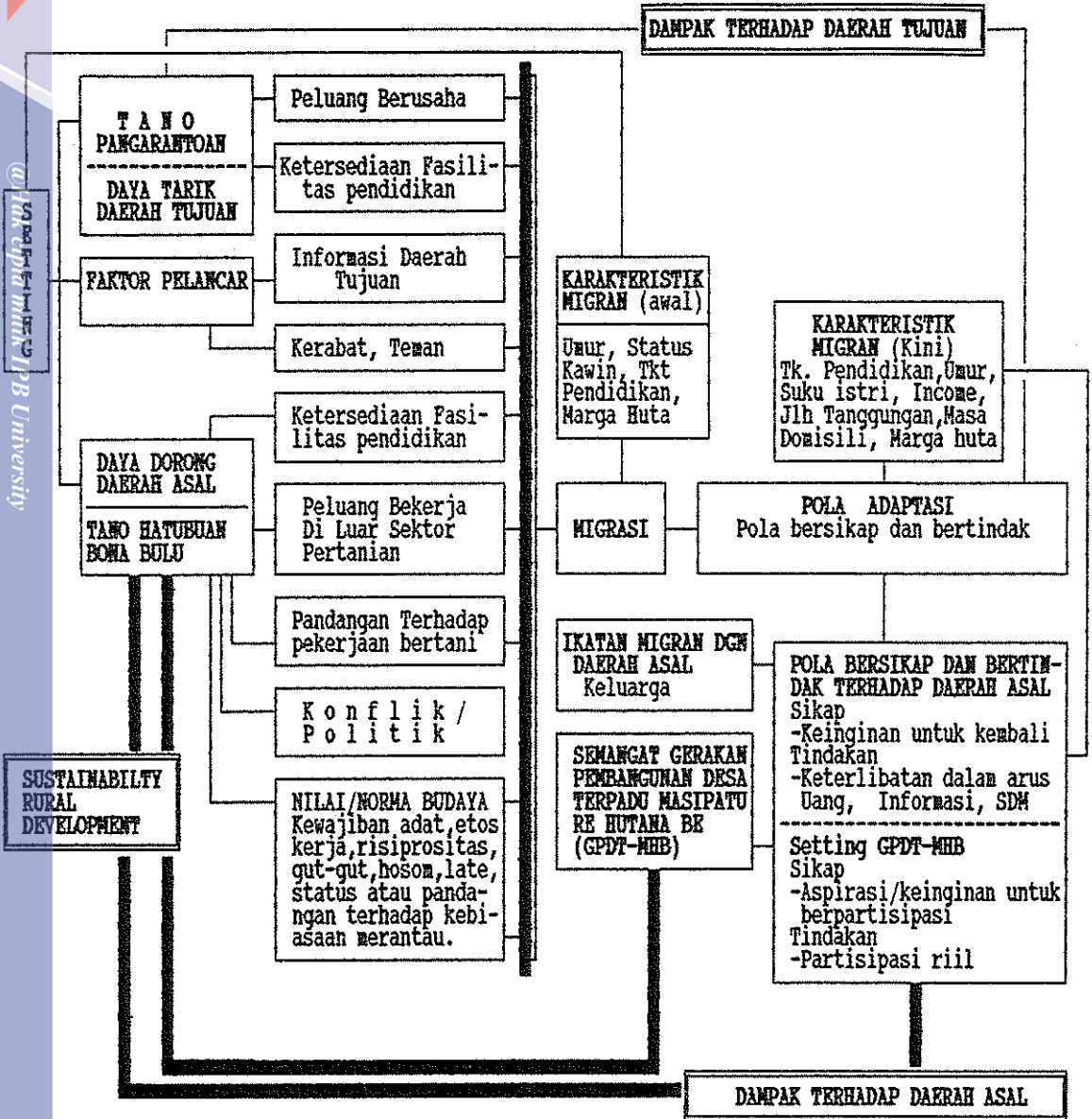
sinya diantara dua *huta*, yaitu *tano hatubuan* (tanah kelahiran, kampung halaman) dan *tano pangarantoan* (tanah perantauan). Status sosial ekonomi migran di *tano pangarantoan* akan mempengaruhi pola bersikap dan bertindak individu terhadap desa atau daerah asalnya. Dengan kata lain, terbentuknya *sahala harajaon* di *tano pangarantoan* akan mempengaruhi arus keinginan migran ke daerah asalnya. Disamping itu arus balik ke daerah asal, tidak terlepas dari status sosial ekonomi migran di rantau serta ada tidaknya keluarga migran yang masih berdomisili di daerah. Bobot arus balik ini juga terkait dengan ikatan-ikatan yang bersifat ekonomi dengan daerah asal. Sikap dan tindakan migran terhadap daerah asal dapat dijadikan sebagai indikator untuk memperlihatkan segi-segi negatif dan positif serta aspirasi mereka terhadap daerah asal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Konseptual Pola Migrasi Suku Batak, Suatu Tinjauan Dalam Kaitan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB).

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu *Marsipature Hutana Be* secara langsung atau tidak langsung akan sampai kepada para migran, dan semangat GDPT-MHB itu sendiri akan mempengaruhi pola sikap dan tindakan migran terhadap daerah asalnya. Sikap migran terhadap GPDT-MHB dipandang sebagai potensi partisipasi migran, sedangkan tindakan merupakan partisipasi riil yang diberikan dalam waktu tertentu. Respon timbal balik ini penting artinya untuk Pembangunan Kampung Halaman atau *Bona Pasogit* yang berkelanjutan (*Sustainability Rural Development*) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

C. Rumusan Hipotesis

Hipotesis-hipotesis yang akan dirumuskan berikut ini didasarkan pada uraian-uraian terdahulu mengenai teori-teori migrasi, hasil-hasil penelitian, telaah orientasi nilai budaya Batak, khususnya sub suku Mandailing/Angkola (Tapanuli Selatan). Dalam kerangka pemikiran diperlihatkan banyak hubungan antar variabel, namun dalam perumusan ini hubungan tersebut tidak semua dihipotesiskan untuk diuji kemudian. Disamping itu perumusan hipotesis ini masih terbatas pada bentuk hipotesis deskriptif.

1. Diduga ada hubungan karakteristik individu dengan terjadinya migrasi.
2. Diduga ada hubungan antara keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah asal dengan terjadinya migrasi.
3. Diduga ada hubungan antara keterbatasan peluang berusaha di luar sektor pertanian dengan terjadinya migrasi.
4. Diduga ada hubungan antara pandangan atau status pekerjaan bertani di daerah asal dengan terjadinya migrasi.
5. Diduga ada hubungan antara konflik atau politik dengan terjadinya migrasi.
6. Diduga ada hubungan antara iklim sosial budaya (*kewajiban dalam adat, etos kerja, resiprositas, gut-gut, hosom, late, status atau pandangan terhadap kegiatan merantau*) di daerah asal dengan terjadinya migrasi.
7. Diduga ada hubungan antara tersedianya peluang berusaha di daerah tujuan

dengan terjadinya migrasi.

8. Diduga ada hubungan antara ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah tujuan dengan terjadinya migrasi.
9. Diduga ada hubungan antara tersedianya informasi tentang keadaan daerah tujuan dengan terjadinya migrasi.
10. Diduga ada hubungan antara tersedianya kerabat atau teman se daerah dengan terjadinya migrasi.
11. Diduga ada hubungan *setting* migrasi dengan faktor pendorong, faktor pelancar, faktor penarik serta karakteristik individu pelaku migrasi.
12. Diduga ada hubungan antara karakteristik individu (kini) migran dengan pola bersikap dan bertindak di daerah tujuan.
13. Diduga ada hubungan antara pola bersikap dan bertindak migran di daerah tujuan dengan pola bersikap dan bertindaknya terhadap daerah asal.
14. Diduga ada hubungan ikatan keluarga migran (keberadaan orang tua) di daerah asal dengan pola bersikap dan bertindak migran terhadap daerah asal.
15. Diduga ada hubungan antara karakteristik individu (kini) dengan pola bersikap dan bertindaknya terhadap daerah asal.
16. Diduga ada hubungan karakteristik individu migran dengan pola bersikap dan bertindaknya dalam GPPDT-MHB.

D. Defenisi Operasional

1. **Migrasi** adalah perpindahan penduduk (*teritorial mobility*), yaitu orang dari suatu wilayah administratif tertentu, dalam hal ini Kabupaten, ke wilayah adminisitrasi yang lain dengan tujuan untuk untuk tinggal menetap atau tidak dalam selang waktu tertentu. Dimensi waktu yang digunakan didasarkan pada ketegori sensus tahun 1971 dan tahun 1980, yaitu enam bulan atau lebih berdomisili di daerah tujuan tertentu. Peristiwa antara diperhitungkan menurut konsep migrasi sistematis dan historis, yaitu seseorang tetap dikatakan melakukan migrasi meski migrasi berlangsung kembali ke daerah asal setelah melewati masa dimensi waktu 6 bulan

dan dimensi ruang administratif kabupaten waktu terlewat.

2. **Setting migrasi** adalah masa atau seperangkat waktu terjadinya migrasi, terkait dengan daerah asal dan daerah tujuan. Dalam penelitian ini digunakan tiga batasan **setting**, yaitu :

- (1) **Setting Pertama (I)** apabila migran meninggalkan daerah asal sebelum tahun 1966 atau migran memasuki kota Bogor pada selang waktu yang sama;
- (2) **Setting Kedua (II)**, apabila migran meninggalkan daerah asal antara Tahun 1966 sampai Tahun 1979 atau migran memasuki Kota Bogor pada selang waktu yang sama.
- (3) **Setting Ketiga (III)**, apabila migran meninggalkan daerah asal antara Tahun 1980 sampai Tahun 1993 atau migran memasuki Kota Bogor pada selang waktu yang sama.

3. **Tano hatubuan, bona pasogit, bona bulu** adalah asal atau kampung halaman.
4. **Tano Pangarantoan** adalah tanah perantauan atau daerah tujuan
5. **Siluluton-siriaon** adalah komplek dari kegiatan-kegiatan bersama-sama antar sesama anggota masyarakat baik dalam momen kegembiraan atau kesedihan (kemalangan).
6. **Akulturasi , Assilimilasi** adalah fenomena-fenomena yang muncul akibat proses sosial yang terjadi antar dua kebudayaan yang berbeda. Akulturasi terjadi apabila masing-masing kelompok yang berbeda kebudayaanya itu saling *mengkopi* unsur kebudayaan lawan kontaknya, tetapi tidak mengurangi unsur kebudayaan masing-masing. Assilimilasi terjadi apabila unsur kebudayaan yang timbul sebagai akibat pergaulan dengan orang-orang dari kebudayaan yang berlainan, dimana unsur-unsur kebudayaan baru tersebut berbeda dengan kebudayaan yang berinteraksi. Dalam hal ini fenomena akulturasi dan assimilasi diperhatikan secara sepihak, yaitu di pihak migran individu, keluarga, maupun kelompok migran.

7. Variabel-variabel Faktor Penarik Dan Perantara Migrasi

- a. **Peluang berusaha** adalah kesempatan yang tersedia bagi seorang migran

untuk bekerja atau berusaha pada sektor perekonomian tertentu didaerah tujuan. Dalam penelitian ini peluang berusaha diukur berdasarkan subjektifitas migran tentang ada tidaknya peluang berusaha dirasakan sebagai alasan memilih daerah tujuan.

- b. **Ketersediaan fasilitas pendidikan** adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan bagi anggota masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam penelitian ini ketersediaan fasilitas pendidikan diukur berdasarkan ada tidaknya fasilitas pendidikan yang dirasakan migran sebagai alasan mencapai daerah tujuan.
- c. **Informasi daerah tujuan** adalah ada tidaknya migran memperoleh informasi tentang keadaan umum kota tujuan sebelum mencapai daerah tujuan.
- d. **Kerabat atau teman** adalah ada tidaknya seorang atau lebih kerabat/saudara yang ditemui di daerah tujuan.

8. Variabel-variabel Faktor Pendorong Migrasi

- a. **Ketersediaan fasilitas pendidikan** adalah keberadaan sarana dan prasarana pendidikan bagi anggota masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam konteks faktor pendorong ketersediaan fasilitas pendidikan diukur berdasarkan ada tidaknya fasilitas pendidikan yang dirasakan migran sebagai alasan meninggalkan daerah asal.
- b. **Peluang berusaha di luar sektor pertanian** , didefinisikan sebagai ada tidaknya kesempatan bekerja atau berusaha di luar sektor pertanian sebagai alasan untuk meninggalkan daerah asal.
- c. **Pandangan terhadap pekerjaan bertani** adalah persepsi migran tentang pekerjaan bertani yang tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik sehingga harus meninggalkan daerah asal.
- d. **Konflik dan politik** adalah ada tidaknya peristiwa konflik atau politik sebagai alasan meninggalkan daerah asal.
- e. **Nilai/norma/budaya** adalah ada tidaknya objek-objek khusus kebudayaan



masyarakat yang dirasakan oleh migran sebagai pendorong melakukan migrasi. Nilai/norma/budaya meliputi: (a) Kewajiban adat (*Siluluton-Siriaon*); (b) Etos kerja masyarakat kolektif; (c) Nilai budaya *Hosom, late, gut-gut, mentiko*, dan sejenisnya; (d) Pandangan terhadap kebiasaan merantau atau status merantau.

9. Karakteristik Migran

- a. **Tingkat Pendidikan** yang dimaksud di sini adalah tinggi rendahnya pendidikan formal yang pernah diikuti oleh migran. Kategori tingkat pendidikan berlaku sama antara tingkat pendidikan meninggalkan daerah asal dengan tingkat sekarang, diukur dengan : Tidak pernah sekolah, Tidak Tamat SD, Tamat SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi. Untuk keperluan analisis dibagi dalam tiga kelompok : (1) Pendidikan Tinggi : SLTA ke Atas; (2) Pendidikan Sedang : SLTP-SLTA; (3) Pendidikan Rendah : Tidak sekolah-tamat SD.
- b. **Status perkawinan** menunjuk pada menikah tidaknya migran sesaat sebelum migrasi. Untuk keperluan analisis dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : (1) Tidak Kawin ; (2) Kawin ; (3) Duda.
- c. **Umur** adalah jumlah tahun usia seseorang. Untuk kepentingan analisis umur yang diukur berdasarkan klasifikasi ganda, yaitu : (1) Umur meninggalkan daerah asal (awal), dan; (2) Umur saat penelitian dilakukan (sekarang).
 - (1) **Umur meninggalkan daerah asal**, diklasifikasi menjadi tiga kategori, yaitu : (1) Umur muda : Di bawah 25 Tahun; (2) Umur Sedang : 26 - 46 Tahun; (3) Umur Tua : Di atas 46 tahun
 - (2) **Umur sekarang**, diklasifikasi menjadi tiga kategori umur, yaitu : Umur muda, Umur Sedang, dan Umur Tua yang diperoleh berdasarkan nilai standar deviasi.
- d. **Marga Huta** adalah tingkat kedekatan darah (genealogis) migran dengan marga si pembuka huta atau desa asal. Untuk kepentingan analisis digunakan dua kategori sebagai berikut : (1) Marga Huta ; (2) Bukan Marga Huta.

- e. **Jenis/bentuk keberangkatan** diukur berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam keberangkatan migran pertama kali meninggalkan daerah asal, yaitu :
- (1) Seorang diri ; (2) Bersama orang lain didampingi/mendampingi.
- f. **Suku istri**, menunjuk pada status etnis/suku bangsa istri dari migran. Dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Suku Batak ; (2) Suku bukan Batak
- g. **Jumlah tanggungan** adalah besarnya jumlah anggota rumahtangga migran kepala rumahtangga yang menjadi beban tanggungan migran secara ekonomi termasuk migran sendiri. Jumlah tanggungan dikategorikan menjadi: (1) Kecil; (2) Sedang, dan ; (3) Tinggi, yang ditetapkan setelah nilai standar deviasi diperoleh.
- h. **Masa Domilisi** adalah tingkat kelamaan waktu yang dihabiskan migran bertempat tinggal di daerah tujuan. Untuk kepentingan analisis masa domisili dibagi ke dalam 3 kategori yaitu : (1) Lama ;(2) Sedang, dan ; (3) Singkat. Dasar penetapan kategori dibangkitkan dengan menggunakan standar deviasi.
- i. **Tingkat pendapatan** adalah rata-rata nilai uang yang diperoleh oleh Rumahtangga Migran Kepala Keluarga dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini dikonversi menjadi tingkat pendapatan per bulan. Untuk kepentingan analisis tingkat pendapatan dibagi ke dalam 3 kategori yaitu : (1) Rendah ; (2) Sedang, dan ; (3) Tinggi. Penetapan kategori tingkat pendapatan diperoleh dengan menggunakan standar deviasi.
10. **Ikatan Keluarga** adalah ada tidaknya salah satu atau kedua orang tua dari migran yang bertempat tinggal dikampung halaman. Ikatan keluarga dibagi menjadi dua, yaitu : (1) **Ada**, apabila satu atau kedua orangtua dari migran (Ayah atau Ibu) hidup dan tinggal di daerah asal; (2) **Tidak ada**, apabila tidak ada satupun orangtua dari migran yang hidup atau tinggal di desa asal.
11. **Pola Adaptasi** adalah penyesuaian migran dengan lingkungan baru dalam konteks komunikasi antar budaya atau proses-proses sosial yang terjadi pada individu, keluarga, atau sesama migran di rantau. Pola adaptasi dipisahkan dalam dua

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



bentuk : (1) Pola bersikap, dan; (2) Pola bertindak.

Pola bersikap adalah pandangan ideal migran individu terhadap kebudayaan Batak (In-group) dan kebudayaan Sunda (Out-group) dalam membentuk/menerapkan nilai-nilai dan objek-objek kedua bentuk budaya tersebut dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam masyarakat yang lebih luas. Unsur-unsur ke-budayaan terukur diadaptasi dari 7 unsur kebudayaan menurut Kluckhohn ke dalam 19 item. Pengukuran sikap dilakukan dengan menggunakan skor-skor dalam skala ordinal (Likert) untuk memperoleh gambaran sikap responden terhadap kebudayaan ingroup dan membandingkannya dengan sikap terhadap out-grup. Sikap terhadap kebudayaan In-group diperlukan untuk melihat seberapa besar kebudayaannya dipandang ideal dalam kehidupannya yang baru. Sedangkan sikap terhadap out-group diperlukan untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai out-group dianggap penting untuk diadopsi dalam kehidupan responden. Unsur-unsur kebudayaan in-group dan out-group diterjemahkan menjadi 19 item dari tujuh unsur kebudayaan Klukhon. Jumlah kesembilan belas item tersebut kemudian dirata-ratakan per individu dan dikelompokkan pada skala:

1. **Sangat Kuat**, berarti menunjuk pada sikap/orientasi nilai budaya responden sangat kental dengan kebudayaan sendiri.
2. **Kuat**, menunjuk pada suatu tingkatan yang lebih rendah dari kategori sangat kuat.
3. **Labil**, menunjuk pada keraguan migran untuk mengidealkan kebudayaan in-group lama.
4. **Lemah**, menunjuk pada sikap atau pandangan yang tidak mengidealkan kebudayaan lama dalam kehidupannya.
5. **Sangat Lemah**, menunjuk pada minimnya sikap dan pandangan responden untuk mengidealkan kebudayaan lama dalam kehidupannya.

Adapun item-item dari unsur kebudayaan yang dibentuk dalam kuesioner dicon-

tohkan sebagai berikut:

Pertanyaan pokok: Menurut pandangan bapak bagaimana pentingnya menerapkan/menggunakan/membentuk hal-hal berikut dalam kehidupan bapak di perantauan

Nomor Item	Jawaban	Nilai/skor
.....	1. sangat penting	5
	2. penting	4
	3. ragu-ragu	3
	4. tidak penting	2
	5. sangat tidak penting	1

Total Skor Individu =

Faktor pembeda item yang digunakan untuk pengukuran sikap in-group dan out-group hanya pada penggunaan kata *khas* yang menunjuk pada perbedaan-perbedaan karakteristik budaya seperti contoh berikut:

1. Sikap terhadap kebudayaan in-group.

Contoh item (item 2):

Menggunakan tutur kata khas Angkola-Mandailing seperti Uda, Tulang, Naboru, Bere, dan lain-lain.

2. Sikap terhadap kebudayaan out-grup.

Contoh item (item 2):

Menggunakan tutur kata khas Sunda seperti Tete, Mamang, Akang, dan lain-lain.

Salah satu kelemahan penjumlahan skor-skor sikap yang diperoleh dari item ganda adalah besarnya kemungkinan cara untuk memperoleh skor rata-rata sikap ter-

tentu. Hal ini diantisipasi melalui penguraian skor rata-rata sikap individu menurut item yang dikelompokkan ke dalam tujuh unsur budaya untuk menemukan unsur budaya yang dipandang ideal.

Kesembilan belas item pola sikap, dilengkapi dengan pengukuran jarak sosial (*social distance*). **Jarak Sosial** adalah derajat kedekatan individu atau kelompok masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaan out-group. Dalam pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala :

1. **Sangat Dekat** ; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **istri**
2. **Dekat**; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **menantu**.
3. **Agak Dekat**; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **anggota keluarga lain**.
4. **Agak Renggang** ; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **sahabat/teman**.
5. **Renggang**; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **tetangga**.
6. **Sangat Renggang**; jika responden dapat menerima masyarakat setempat sebagai **bawahan**.

Pola bertindak adalah kelakuan terwujud dari migran dalam konteks kebudayaan Batak Angkola-Mandailing (In-group) dan kebudayaan Sunda (Out-group). Pola bertindak merupakan indikator untuk memperhatikan proses-proses sosial dan hasil komunikasi antar budaya di pihak migran, yaitu akulturasi, atau asimilasi.

12. **Pola Bersikap dan Bertindak Terhadap Daerah Asal** adalah perikelakuan migran berkomunikasi dengan daerah asal baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk kepentingan analisis pola bersikap dipisahkan dengan pola bertindak. Pola bersikap dalam hal ini adalah keinginan untuk kembali dan **menetap di daerah asal**. Sedangkan pola bertindak meliputi: (1) **Ada tidaknya**

keterlibatan migran dalam arus Uang/barang dan informasi dari dan ke daerah ; (2) Ada tidaknya keterlibatan dalam arus manusia (berkunjung, menarik/menerima orang dari daerah atau menyuruh orang ke daerah).

13. **Pola Bersikap dan Bertindak Terhadap Dalam GPDT-MHB.** adalah perikelakuan migran dalam momentum pembangunan GPDT-MHB berdasarkan defenisi masing-masing migran. **Pola bersikap** meliputi : (1) Pembeneran/persetujuan migran terhadap dasar pemikiran program GPDT-MHB, yaitu kemiskinan; (2) Keinginan untuk membantu "berpartisipasi" dalam GPDT-MHB; (3) Cara atau saluran yang diinginkan untu mewujudkan partisipasinya dalam GPDT-MHB (aspirasi). **Pola Bertindak** adalah partisipasi riil migran dalam GPDT-MHB, yakni partisipasi yang bersifat nominal. Artinya seorang migran dikatakan telah berpartisipasi jika dia menganggap dirinya ikutserta cukup pada satu tahap partisipasi pembangunan.

E. Kerangka Analisis

Kerangka analisis ini di buat untuk memberikan gambaran bagaimana tahapan hipotesis-hipotesis dianalisis.

Hipotesis 1.

Diduga ada hubungan karakteristik individu (awal) migran dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hipotesis ini diarahkan untuk melihat karak-teristik demografis dan sosio demografis pelaku migrasi.

Hipotesis 2.

Diduga ada hubungan antara keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah asal dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini diuji secara kualitatif dan kuantitatif. Gagasan pendidikan yang telah tersosialisasi sejak lama pada orang Batak akan mengakibatkan terjadinya "pemburuan" lebih intensif penduduk pada pusat-pusat perkembangan pendidikan. Hal ini tidak saja untuk kebutuhan individu, tetapi juga untuk generasi-generasi berikutnya. Orang Batak berpandangan bahwa salah satu jalur tercepat untuk mencapai tujuan-



tujuan hidup adalah melalui pendidikan yang setinggi-tingginya. Bila fasilitas pendukung tidak diperoleh di daerah, maka seseorang akan migrasi menuju pusat-pusat pendidikan.

Hipotesis 3.

Diduga ada hubungan peluang berusaha di luar sektor antara pertanian dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Struktur ekonomi di daerah asal yang berat ke perokonomian agraris tidak menyediakan kesempatan kerja yang luas di sektor lain. Akibatnya individu harus melakukan migrasi ke daerah lain yang menjanjikan ketersediaan pekerjaan non pertanian itu.

Hipotesis 4.

Diduga ada hubungan antara pandangan atau status perkerjaan bertani di daerah asal dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pekerjaan tertentu secara langsung akan memberikan status kepada pelakunya. Secara teoritis di daerah tanah Batak masih terdapat lahan untuk mengusahakan pertanian. Akan tetapi status profesi itu dianggap rendah. Dewasa ini terdapat kecenderungan diantara generasi muda dimana enggan berusaha di sektor pertanian, apalagi telah memiliki tingkat pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, individu memilih untuk mencari pekerjaan lain yang lebih bergengsi ke luar daerah, migrasi.

Hipotesis 5.

Diduga ada hubungan konflik atau politik dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan diuji secara kualitatif dan kuantitatif. Peristiwa konflik antar sesama kerabat atau tragedi politik seringkali memaksa individu untuk migrasi. Dengan demikian, ketegangan hubungan dalam kekerabatan tidak akan berkepanjangan, atau migrasi justru merupakan upaya untuk mengumpul kekuatan agar suatu saat individu dapat membuktikan kemenangan dengan memamerkan keberhasilannya kepada orang lain.

Hipotesis 6.

Diduga ada hubungan antara iklim sosial budaya (*kewajiban dalam adat, etos kerja, resiprositas, gut-gut, hosom, late, status atau pandangan*

terhadap kegiatan merantau) di daerah asal dengan terjadinya migrasi.

Iklim sosial budaya di suatu daerah akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berusaha dan berprestasi. Setiap orang yang berada di dalamnya akan selalu terikat dan harus mengikuti "aturan main" yang berlaku, meskipun secara etis suasana sosial menghambat setiap usaha. Etos kerja kolektif yang rendah, perilaku seperti *hosom, late, atau gut-gut*, kewajiban dalam kegiatan adat, resiprositas yang tinggi seringkali menghambat kemajuan di saat persaingan mencari nafkah semakin ketat. Agar terbebas dari belenggu itu, seseorang harus melakukan migrasi.

Suatu pandangan tradisional di kalangan masyarakat Batak bahwa untuk mencapai derajat dan tujuan hidup yang lebih baik, sebaiknya *Pungka Ma Hutam* atau carilah kampungmu yang baru, sedangkan pandangan temporer lebih tepatnya "Carilah hidup yang lebih baik di perantauan".

Hipotesis 7.

Diduga ada hubungan antara tersedianya peluang berusaha di daerah tujuan dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kualitatif. Struktur perekonomian daerah tujuan (dalam hal ini Kota Bogor) menjanjikan peluang berusaha yang lebih besar merupakan daya tarik tersendiri bagi sejumlah pencari kerja. Hal ini akan memancing terjadinya migrasi, atau mempengaruhi individu untuk mengambil keputusan kota atau daerah mana yang menjadi sasaran migrasi.

Hipotesis 8.

Diduga ada hubungan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah tujuan dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Salah satu daya tarik kota umumnya adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang baik, secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentunya menjadi sasaran migran yang berkeinginan untuk sekolah.

Hipotesis 9.

Diduga ada hubungan antara tersedianya informasi tentang keadaan daerah tujuan dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sebelum individu

migran memutuskan untuk melakukan migrasi, dia terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang keadaan daerah tujuan, baik mengenai peluang bekerja, pendidikan ataupun kondisi budaya masyarakatnya.

Hipotesis 10.

Diduga ada hubungan tersedianya kerabat atau teman sederaah dengan terjadinya migrasi.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Tersedianya orang lain, kerabat atau teman yang menampung atau bahkan menjanjikan pekerjaan di daerah tujuan mewarnai pengambilan keputusan migrasi individu. Disamping itu, teman atau kerabat juga berfungsi mengurangi derajat keragu-raguan mengambil keputusan migrasi.

Hipotesis 11

Diduga ada hubungan *setting migrasi* faktor pendorong, faktor pelancar, dan faktor penarik migrasi serta karakteristik individu pelaku migrasi.

Hipotesis ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hipotesis akan memberikan gambaran perubahan penetrasi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya migrasi, baik di daerah asal maupun di daerah tujuan, serta faktor pelancar. Perubahan-perubahan kondisi akibat faktor-faktor internal dan eksternal akan senantiasa mengubah komposisi determinan migrasi.

Hipotesis 12.

Diduga ada hubungan antara Ikatan keluarga (Keberadaan Orangtua) di daerah dengan pola bersikap dan bertindak migran dengan ke daerah asal.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Seorang migran akan berusaha menjalin hubungan dengan daerah asalnya sepanjang dia merasa masih mempunyai ikatan tanggung jawab dengan orang-orang di daerah. Ikatan itu bisa kepada keluarga orientasi atau kepada masyarakat dimana kerabat-kerabatnya berada. Bobot komunikasinya pun demikian, ikatan dan tanggung jawab dengan daerah asal akan memperlihatkan frekwensi "mudik", mengirim atau menerima uang atau surat, terlibat dalam kegiatan pembangunan desa asal atau daerah.

Hipotesis 12.

Diduga ada hubungan karakteristik individu (kini) dengan pola bersikap dan bertindak di daerah tujuan.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Pola bersikap dan tindakan migran dipengaruhi oleh karakteristik demografi, sosial, dan ekonominya.

Hipotesis 13.

Diduga ada hubungan antara pola bersikap dan bertindak migran di daerah tujuan dengan pola bersikap dan bertindak terhadap daerah asal.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Variabel pengaruh yang digunakan dalam pengujian kuantitatif hanya pola bersikap terhadap kebudayaan Out-grup dan in-grup (adaptasi) di daerah tujuan.

Hipotesis 14.

Diduga ada hubungan ikatan keluarga migran di daerah asal dengan pola bersikap dan bertindak migran terhadap daerah asal.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Keberadaan orang tua migran di daerah asal merupakan ikatan utama rantau dan desa, seterusnya mempengaruhi sikap dan tindakan migran dengan daerah asalnya. Variabel Sikap yang digunakan adalah keinginan untuk pulang dan variabel tindakan adalah keterlibatan dalam arus uang.

Hipotesis 15.

Diduga ada hubungan antara karakteristik individu (kini) dengan pola bersikap dan bertindak terhadap daerah asal.

Hipotesis ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sikap terhadap daerah asal adalah ada tidaknya keinginan untuk pulang dan bertempat tinggal di kampung halaman. Sedangkan tindakan adalah keterlibatan migran dalam arus uang, informasi, manusia dalam dan arus berkomunikasi dengan daerah asal. Bila migran telah berhasil meningkatkan status sosial ekonominya maka kemungkinan dia akan lebih banyak membantu keluarga yang masih menetap di daerah asal, dengan cara yang bervariasi. Misalnya, dengan menarik saudara-saudaranya untuk disekolahkan di daerah tujuan atau mengirim uang pendidikan ke daerah. Di samping itu, ciri-ciri migran seperti jumlah tanggungan, suku bangsa istri, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan umur juga akan mempengaruhi pandangan dan kelakuannya berkomunikasi dengan daerah asal.

Dari pada akhirnya akan dapat diidentifikasi bagaimana dampak migrasi Orang Batak terhadap daerah asalnya. Dan dapat pula memelihatkan dampaknya terhadap daerah tujuan. Variabel pengaruh yaitu pola adaptasi hanya menggunakan variabel-variabel sikap, sedangkan hubungan variabel tindakan dianalisis secara deskriptip.

Hipotesis 16.

Diduga ada hubungan antara karakteristik individu (kini) dengan pola bersikap dan bertindak terhadap dalam GPDT-MHB.

Hipotesis ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Program pembangunan Marsipature Hutana Be merupakan *setting* atau moment pembangunan yang baru beberapa tahun diprogramkan. Dalam hal ini perlu diperhatikan aspirasi migran sebagai salah satu komponen yang diharapkan berperan dalam program pembangunan itu. Variabel pola bersikap (variabel pengaruh) dalam hal ini adalah : (1) Persetujuan/pembenaran terhadap kemiskinan sebagai latar belakang GPDT-MHB; (2) Ada tidaknya keinginan untuk membantu atau berpartisipasi; (3) Saluran/cara yang diinginkan untuk mewujudkan partisipasi dalam GPDT-MHB. Variabel-Variabel pola bertindak adalah berupa partisipasi nyata (nominal) dari migran dalam GPDT-MHB.

Analisis kuantitatif yang dipakai dalam pengujian hipotesis digunakan pengujian X^2 dengan prosedur sebagai berikut :

1. Rumus,

$$X^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

dimana,

O_{ij} = Jumlah observasi untuk kasus-kasus yang dikategorikan dalam baris ke-i pada kolom ke-j.

E_{ij} = Banyak kasus yang diharapkan di bawah H_0 untuk dikategorikan dalam baris ke-i pada kolom ke-j.

2. **Hipotesis** : H_0 : Tidak ada perbedaan proporsi, tidak ada hubungan variabel
 H_1 : Ada perbedaan proporsional, ada hubungan variabel

3. **Signifikansi** : Nilai α yang biasa digunakan adalah 0.05 (Siegel, 1992), tetapi mengingat adanya kemungkinan penggabungan kolom yang berpotensi

menghilangkan nilai ekstrim maka $0.05 < \alpha < 0.20$ masih digunakan sebagai batas kecenderungan perbedaan proporsi.

Untuk mendapatkan kejelasan dari informasi yang akan disampaikan digunakan pemaparan dalam bentuk tabulasi silang dan diuji melalui X^2 Khi Kuadrat dengan penyesuaian tertentu, sesuai rekomendasi, (Siegel, 1992) tentang aturan penggunaannya, yaitu :

1. Bila $N > 40$ digunakan X^2 dengan korelasi kontinuitas, dengan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \frac{N (|AD - BC| - \frac{N}{2})^2}{(A+B) (C+D) (A+B) (C+D)}$$

dengan contoh tabel sebagai berikut :

Variabel Terpengaruh	Variabel Pengaruh	
	A	B
C		
D		

2. Bila Tabel kontingensi ($db =$ derajat bebas) lebih besar dari atau (k) lebih besar dari 2, Tes X^2 dapat digunakan jika kurang dari 20 persen diantara sel-sel itu mempunyai frekuensi kurang dari 5, dan jika tidak satu selpun memiliki frekuensi diharapkan kurang dari 1.
3. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi oleh data seperti yang terwujud pada waktu pengumpulannya yang asli, maka dibenarkan menggabungkan kategori-kategori yang berdekatan.



III. PENDEKATAN LAPANG

Penelitian lapang ini merupakan kombinasi antara penelitian menerangkan (*explanatory research*) dan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian yang bersifat menerangkan adalah penelitian yang menyangkut pengujian sejumlah hipotesis atau hubungan variabel-variabel. Namun demikian dalam paparannya menelitian menerangkan juga menggunakan uraian-uraian, tetapi fungsi utamanya adalah menganalisis variabel-variabel yang digunakan (Singarimbun dan Effendi, 1987).

Sementara itu penelitian deskriptif merupakan sejumlah uraian-uraian yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti. Pendekatan deskriptif ini akan mengungkapkan secara hidup berbagai gejala, suatu sifat yang tidak dapat dijangkau oleh penelitian yang bersifat menerangkan. Tan (1987) juga mengatakan bahwa penggunaan penelitian yang bersifat deskriptif akan dapat memberi gambaran yang lugas mengenai suatu keadaan, gejala, individu atau kelompok tertentu.

A. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini semula direncanakan berada hanya pada wilayah Kotamadya Bogor, kemudian dilebarkan ke wilayah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, yang meliputi enam kecamatan lingkaran Kotamadya Bogor. Abustam (1987) mengatakan bahwa pemilihan lokasi penelitian perlu dilandaskan pada kriteria-kriteria tertentu agar lokasi yang dipilih selaras dengan tujuan penelitian. Penetapan Kotamadya Bogor sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan atas beberapa kriteria : *Pertama*, Di Kotamadya Bogor banyak terdapat migran suku Batak dari desa atau kota kecil di Tapanuli Selatan. *Kedua*, Di Kotamadya Bogor terdapat kelompok-kelompok, paguyuban atau organisasi para migran sebagai wadah interaksi sesama mereka. *Ketiga*, di Kotamadya Bogor terdapat banyak migran suku Batak yang memiliki waktu berdomisili mulai dari puluhan tahun sampai beberapa bulan. Hal lain yang menjadi pertim-

bangan adalah menyangkut masalah teknis, yakni kemudahan dalam operasionalisasi penelitian di lapang. Pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi wilayah yang diperoleh peneliti selama kurang lebih 5 tahun berdomisili di kota ini, akan memudahkan penelitian ini.

Meskipun lokasi penelitian ini ditetapkan secara sengaja (*purposive*), sampai taraf tertentu tetap diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola migrasi penduduk yang berasal dari Tapanuli Selatan (sub suku Batak Angkola Mandailing) di kota atau daerah lain di Indonesia. Bahkan dalam taraf yang lebih rendah tetap diharapkan dapat menjelaskan pola migrasi orang Batak dari sub-sub suku lainnya.

B. Penentuan Sampel

Responden yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari : (1) individu laki-laki dan telah menikah, dan berasal dari sub suku Mandailing-Angkola. Penetapan laki-laki menikah (*purposive*) sebagai sampel didasarkan kepada pemahaman latar belakang budaya Batak yang dilandaskan pada konsepsi paternalisme. Dengan kata lain secara teoritis pengambilan keputusan melakukan migrasi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, dan tekanan kultural juga lebih kuat kepada laki-laki. (2) Disamping sampel individu, untuk studi mendalam dilakukan terhadap individu dan kelompok diantara kelompok-kelompok paguyuban yang ada untuk mengetahui bentuk interaksi anggotanya. Derajat interaksi sesama anggota kelompok akan lebih besar dari pada interaksi individu dengan orang di luar kelompoknya (Soekanto, 1970). Kelompok-kelompok ini biasanya didasarkan pada ikatan genealogis-teritorial di daerah asal atau yang terbentuk setelah berada di daerah tujuan. Penetapan sampel kelompok ini ditentukan di lapang karena informasi kelompok diperoleh dari migran. Sama seperti sampel individu informasi tentang kelompok migran Batak Angkola Mandailing tersedia, sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh kerangka sampling secara langsung.

Langkah-langkah penentuan sampel individu kepala rumahtangga dan kelompok secara ringkas adalah sebagai berikut : *Pertama*, Satu-satunya cara untuk mendapatkan

populasi migran asal Tapanuli Selatan yang paling mendekati nilai yang sebenarnya adalah melalui sensus area, yaitu melakukan survei ke setiap penjurur Kotamadya Bogor, namun cara ini membutuhkan waktu dan dana yang besar serta sulit dilakukan. Oleh sebab itu diupayakan pendekatan lain melalui perolehan informasi dari informan dan kelompok-kelompok atau organisasi migran untuk memperoleh sejumlah nama calon responden. Kedua bentuk informasi ini diharapkan dapat saling melengkapi dan bila ada anggota kelompok yang berdomisili di luar Kota Bogor tidak dipilih tidak dipilih menjadi responden. *Kedua*, survei I, setelah data diperoleh dari pendekatan di atas maka dilakukan survei kecil terhadap 200 orang migran menikah (kepala rumahtangga) untuk mengetahui karakteristik migran dan rumahtangga migran. *Ketiga*, setelah hasil survei I diperoleh, dilakukan pengambilan contoh secara acak stratifikasi sebesar 30 persen (60 orang) individu kepala rumahtangga (laki-laki) berdasarkan *setting* migrasi untuk diwawancarai (survei II). *Keempat*, Sebagai pembandingan dan pelengkap data-data survei, dilakukan studi mendalam terhadap 3 orang responden yang termasuk dalam responden terdahulu dan satu pengamatan terhadap satu kelompok.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden serta pengamatan langsung. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan panduan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya serta wawancara dengan menggunakan pertanyaan spontan untuk memperoleh informasi sedalam-dalamnya. Khusus untuk data primer yang dikumpulkan dari kelompok ditambah dengan pengamatan berpartisipasi.

Dalam pengumpulan data digunakan metoda *re-call* suatu metoda pengumpulan data berdasarkan daya ingat responden dalam *reference period* (Wigna, 1980). *Reference period* untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin ditetapkan 1 (satu) hari dan satu bulan, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan yang insidental (kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan komunikasi dengan daerah asal, kegiatan kemasyarakatan, dan lain-lain) *reference periode* yang digunakan adalah enam bulan yang lalu. Sementara itu, untuk memperoleh informasi tentang riwayat migrasi tidak

mempergunakan *reference perode*. Data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi yang ada pada kantor-kantor pemerintah, instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bogor, Jakarta dan Sumatera Utara.

Tabel 7. Matriks Pengumpulan Data

Jenis	Lokasi Pengambilan	Teknik	Sumber	Data
Primer	Rumah Tempat Tinggal	Wawancara, catatan dan dokumentasi	Informan, Tokoh Migran, Ketua Kelompok migran (11 orang)	1. Sejarah Migrasi 2. Sejarah kelompok/paguyuban. 3. Aktifitas kelompok 4. Perkiraan jumlah migran 5. Jenis-jenis pekerjaan Variabel sosio demografis, sejarah ringkas migrasi individu dan rumahtangga & Komunikasi Pembangunan GPDY MHB. Semua variabel yang berkaitan dengan pengujian hipotesis dan data-data pendukung. Kasus-kasus utama, data kualitatif Kasus tambahan, data kualitatif
		Survei ringkas, wawancara	Individu kepala Rumahtangga (200 orang)	
		Survei, wawancara, catatan lapang	Individu kepala rumahtangga (60 orang)	
		Wawancara mendalam	Individu kepala rumahtangga	
Sekunder	- Kantor perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Jakarta - Kantor Statistik Kodya Bogor - Kantor Statistik Kabupaten Bogor - Kantor Biro Pusat Statistik Jakarta	Pengamatan berpartisipasi dalam kelompok-kelompok migran, catatan lapang	Anonim	Gambaran Umum Gerakan Program Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be. Monografi wilayah Monografi wilayah Monografi wilayah Bogor dan Tapanuli
		Wawancara dan catatan	Kepala kantor yang bersangkutan	
		Catatan dan dokumentasi	-	
		Catatan dan dokumentasi	-	

D. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh sebagian akan diolah secara manual dan sebagian lagi menggunakan fasilitas komputer. Untuk melihat hubungan variabel dilakukan pengujian perbedaan proporsi X^2 (*Khi-Kuadrat*). Data-data tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan sebagai metoda analisis yang saling melengkapi. Bila analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dipadukan maka analisis kuantitatif diibaratkan sebagai *tulang-tulang* atau *rangka* dan analisis kualitatif dapat dipandang sebagai *dagingnya* sehingga melahirkan format analisis yang lebih hidup dan utuh (Wigna, 1987).



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bogor

1. Letak Geografis dan Administrasi.

Penelitian ini semula direncanakan berlokasi di Kotamadya Bogor yang terdiri atas lima kecamatan. Perkembangan di lapang memaksa pelebaran lokasi penelitian ke luar wilayah Kotamadya. Alasan utama perluasan ini adalah tidak terpenuhinya jumlah responden (200 orang) sesuai kriteria pengambilan responden yang ditetapkan sebelumnya. Pertumbuhan penduduk menuntut perluasan pemukiman penduduk dan satu aspek lagi perpindahan penduduk ke perkotaan simultan dengan proses perkotaan daerah-daerah lingkaranya.

Oleh sebab itu, Kota Bogor dalam penelitian ini meliputi seluruh wilayah Daerah tingkat II Kotamadya Bogor dan daerah-daerah berciri urban di sekitarnya yang merupakan bahagian administratif dari Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor. Namun demikian daerah penelitian ini tidak mencakup seluruh kecamatan yang ada pada DATI Kabupaten Bogor, tetapi terbatas pada kecamatan-kecamatan yang berada di lingkaran Kotamadya Bogor.

Kota Bogor terletak di wilayah Propinsi Jawa Barat, 58 Km bagian Selatan Jakarta. Sedangkan Jarak Bogor Sukabumi sepanjang 61 Km dan Bogor Cianjur 74 Km. Dengan gambaran seperti ini Bogor tergolong daerah mobil dan memiliki posisi yang strategis dalam konstelasi perekonomian regional.

Menurut Data Kantor Statistik Kotamadya Bogor, 1990 luas wilayah Kotamadya Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bogor Selatan	±	3.150 Km ²
2. Kecamatan Bogor Timur	±	4.566 Km ²
3. Kecamatan Bogor Tengah	±	3.100 Km ²
4. Kecamatan Bogor Barat	±	3.135 Km ²
5. Kecamatan Bogor Utara	±	8.823 Km ²
<hr/>		
Kotamadya Bogor	±	22.234 Km ²

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Selain wilayah kotamadya, menurut catatan Kantor Statistik Kabupaten Bogor kecamatan-kecamatan yang menjadi daerah penelitian memiliki luas sebagai berikut :

1. Kecamatan Ciampea	±	55.26	Km ²
2. Kecamatan Semplak	±	68.09	Km ²
3. Kecamatan Ciomas	±	175.05	Km ²
4. Kecamatan Kedung Halang	±	50.05	Km ²
5. Kecamatan Ciawi	±	157.99	Km ²
6. Kecamatan Cijeruk	±	148.88	Km ²
		<hr/>	
		655.32	Km ²

Secara historis Kota Bogor lahir dan menjadi pusat aktifitas penduduk sekitarnya sejak abad ke-delapan. Saat itu pemerintahan Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran menjadikan kota ini sebagai Ibu kota negara dengan segala perangkat dan kemegahannya. Pada abad ke 17, Gubernur Jenderal VOC (*Buitenzorg*) menetapkan Bogor sebagai kota peristirahatan petinggi-petinggi bangsa Belanda. Permulaan abad berikutnya status Bogor berubah menjadi Pusat kedudukan dan kediaman resmi Gubernur Jenderal, dengan klasifikasi kota *Gemeente* atau sederajat Kabupaten (RIK Bogor, 1985).

Tanpa mengikutkan daerah di luar Kotamadya, posisi Kota Bogor terletak pada pertemuan 106^o 40'Garis Bujur Timur dan 6^o 36' Garis Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata antara 250-260 di atas permukaan laut. Curah hujan rata-rata sepanjang tahun ± 3.400 mm, beriklim sejuk dengan suhu 25 °C, tetapi pada musim panas bisa mencapai 30 °C. Kota Bogor berada di kaki Gunung Salak, dengan topografi bervariasi mulai dari 0-3 persen, 3-5 persen, 5-10 persen, 15-20 persen, dan ≥ 20 persen. Sepanjang Kota bogor mengalir sungai kecil dan besar antara lain : Ciliwung, Cisadane, Cikarakhas, Cidepit, Cipekancilan, Cibalok, dan Ciater yang sebagian besar bermuará ke pantai Utara atau ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971 penduduk Kotamadya Bogor sejumlah 195.882 jiwa, sedangkan pada tahun 1980 meningkat menjadi 246.951 jiwa. Dengan demikian dalam kurun waktu 1971-1980 terjadi peningkatan penduduk 2.4 persen pertahun. Keadaannya secara drastis menurun pada tahun 1980-1990, dimana rata-rata

pertumbuhan penduduk pertahun hanya 0.36 persen, dari 246.951 menjadi 254.967 jiwa. Bahkan sampai tahun 1986 pertumbuhan penduduk ini berlangsung jauh lebih kecil, hanya 0.06 persen pertahun.

Tabel 8 Perkembangan Penduduk Kotamadya Bogor Dan Lima Kecamatan di Kabupaten Bogor, Tahun 1980-1990.

Kecamatan	Tahun		Perkembangan (persen)
	1980	1990	
Kotamadya Bogor			
1. Bogor Sel.	50.924	50.255	-0.13
2. Bogor Tim.	51.531	55.213	0.69
3. Bogor Teng.	39.472	33.636	-1.59
4. Bogor Bar.	40.755	41.167	-0.10
5. Bogor Utara	64.269	74.696	1.51
Sub total	246.269	254.967	0.35
Kabupaten Bogor			
1. Ciampea	96.734	130.518	3.04
2. Semplak	113.885	160.127	3.45
3. Ciomas	207.655	296.104	3.58
4. Kedunghalang	117.843	185.464	4.64
5. Ciawi*	134.799	120.217	-1.14
6. Cijeruk	91.769	123.388	3.01
Sub total	762.685	1.015.818	3.70
Total	1.008.954	1.270.785	2.79

- Sumber :**
1. Kantor Statitik Kotamadya Bogor, 1981. *Kotamadya Bogor Dalam Angka Tahun 1980.*
 2. Kantor Statistik Kabupaten Bogor, 1981. *Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 1980.*
 3. Kantor Statitik Kotamadya Bogor, 1991. *Kotamadya Bogor Dalam Angka Tahun 1990.*
 4. Kantor Statistik Kabupaten Bogor, 1991. *Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 1990.*

Keterangan : Penurunan jumlah penduduk Kecamatan Ciawi terjadi pemekaran dan sebagian wilayahnya menjadi bagian dari Kecamatan Caringin.

Dari Tabel 8 di atas, terlihat ada tiga kecamatan di Kotamadya Bogor yang memiliki pertumbuhan penduduk negatif, sedangkan dua kecamatan lainnya berkembang lambat. Sebaliknya kecamatan di lingkaran kotamadya Bogor (lima kecamatan) menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, di atas 3 persen pertahun. Menurut Wariso (1989), pertumbuhan penduduk kotamadya Bogor demikian kecil disebabkan

oleh perpindahan penduduk ke wilayah sekitarnya dan kemungkinan tersedotnya angkatan kerja ke wilayah Jakarta.

Daya dukung wilayah Kotamadya Bogor terutama untuk pemukiman penduduk telah mengalami kejenuhan. Menurut pengamatan di lapang, pertumbuhan pemukiman seperti *real estate* lebih banyak berkembang di wilayah lingkaran luar Kotamadya Bogor. Tanah peruntukan pemukiman umumnya berasal dari tanah-tanah pertanian.

Kotamadya Bogor terdiri atas 22 kelurahan dan semuanya masuk dalam kategori *urban*, sedangkan lima kecamatan daerah lingkaran pada tahun 1991 terdiri atas 58 persen desa *urban* dan selebihnya desa *rural*.

Khusus untuk Kotamadya Bogor, pada tahun 1991 hanya 0.9 persen penduduknya yang bermata pencaharian pertanian dan lahan yang tersisa untuk sektor ini terbatas 4 persen. Sedangkan tenaga kerja selebihnya berada di sektor-sektor sekunder dan tersier, seperti perdagangan (19.9 persen), buruh/karyawan swasta (32.7 persen), industri (2.7 persen), tukang (4.9 persen), dan pegawai negeri/ABRI/pensiunan sebesar 38,9 persen (Pemerintah Daerah Kodya Bogor, 1992). Komposisi ketenagakerjaan ini menunjukkan status dan peran Kotamadya Bogor adalah lebih condong pada Kota Jasa.

Tabel 9 Banyaknya Desa Menurut Kategori *Rural* dan *Urban* di Lima Kecamatan, Kabupaten Bogor Tahun 1991.

Kecamatan	Urban		Rural	
	Jlh	%	Jl	%
1. Ciampea	6	31.58	13	68.42
2. Semplak	17	68.00	8	32.00
3. Ciomas	22	55.00	18	45.00
4. Kedunghalang	15	71.42	6	28.58
5. Ciawi	15	62.50	9	37.50
6. Cijeruk	7	33.33	14	66.67
Total	82	54.67	68	45.33

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bogor, 1992. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 1991.

Daerah lingkaran kotamadya dengan sendirinya terangkat untuk mengikuti perkembangan Kotamadya Bogor. Ekonomi Urban bergulir mengeliminasi perekonomian pedesaan berciri pertanian.

2. Sosial Ekonomi

Sejak dahulu masyarakat pribumi yang mendiami Kota Bogor berasal dari Suku Sunda dan sampai saat ini diduga masih dominan, meskipun penduduk pendatang telah banyak memasuki kota sejak ratusan tahun. Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunda, dengan derajat penggunaan yang bervariasi.

Seperti halnya kota-kota lain yang memiliki daya tarik, Kota Bogor cenderung semakin majemuk karena adanya peristiwa migrasi penduduk. Daya tarik Bogor dapat dicirikan oleh :

1. Bogor memiliki iklim sejuk yang hampir tiada duanya di daerah lingkaran Ibukota Jakarta. Keadaan ini mengundang pendatang dari luar Bogor baik bermukim secara permanen, sementara maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kunjungan.
2. Di Kota Bogor terdapat fasilitas-fasilitas pendidikan mulai dari tingkat terendah sampai jenjang yang lebih tinggi. Daya tarik ini mengundang pelajar dan mahasiswa dari daerah lain untuk menempuh pendidikan di kota ini.
3. Sebagai akibat dari ciri pertama dan kedua serta faktor-faktor alami, penduduk Kota Bogor terutama daerah lingkaran terus mengalami pertumbuhan. Kepadatan penduduk seperti ini membuka peluang pasar dan dengan sendirinya peluang berusaha yang lebih luas bagi masyarakat pada berbagai sektor perekonomian.

Penduduk yang mendiami enam kecamatan lingkaran Kotamadya tiga kali lebih besar, namun fasilitas pendidikan menengah sampai tinggi lebih banyak ditemui di wilayah Kotamadya Bogor. Keadaan ini turut mewarnai mobilitas penduduk kotamadya dengan penduduk di sekitarnya.

Tabel 10. Banyaknya Fasilitas Pendidikan di Kotamadya Bogor dan Enam Kecamatan (Lingkar Kotamadya) Kabupaten Bogor Tahun 1990.

Wilayah	Kotamadya Bogor	Lima Kecamatan
1. Sekolah Dasar	172	486
2. SMTP	69	26
3. SMTA	52	23
Total	293	535

Sumber : 1. Kantor Statitik Kotamadya Bogor, 1991. Kotamadya Bogor Dalam Angka Tahun 1990.
2. Kantor Statistik Kabupaten Bogor, 1991. Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 1990.

Meski secara administratif daerah ini berbeda, namun dari segi sosial ekonomi kotamadya dan enam daerah lingkar relatif sama, yaitu komunitas perkotaan. Hal ini terlihat dari aktifitas penduduk keseharian serta potensi alamnya. Sepanjang pengamatan di lapang hanya sebagian kecil lahan yang diupayakan pertanian. Ini menunjukkan sebagian besar--- untuk tidak mengatakan seluruhnya--- penduduk bekerja di sektor non pertanian.

Pola pemukiman penduduk di kota ini bervariasi mulai dari kelas bawah seperti kantong-kantong pemukiman kumuh sampai perumahan kelas atas, mengisyaratkan keragaman status sosial ekonomi penduduknya. Oleh karena lahan pemukiman yang relatif terbatas di dalam kota, sebagian rumah-rumah penduduk ditata dengan kamar-kamar sempit, perkarangan dimanfaatkan secara efisien, menimbulkan kesan kurang sehat, apalagi dengan kelembaban yang sangat tinggi sepanjang tahun. Sebaliknya, perumahan kelas *elit* berdiri megah sendiri-sendiri atau berkelompok.

Sektor perdagangan dan transportasi berkembang dengan baik, disamping melayani penduduk setempat juga pendatang yang silih berganti memasuki Bogor untuk berwisata. Bisnis Rumah Makan dan Restoran, Shopping Center, Hotel dan Penginapan, Perdagangan Fast Food dan makanan jalanan tumbuh dengan subur.

Angkutan dalam dan pinggiran kota umumnya mempergunakan kendaraan jenis minibus dengan kapasitas 10-12 orang, sedangkan angkutan antar kota dan luar kota



didominasi oleh bis-bis kelas sedang dan atas. Struktur sektor angkutan seperti itu membuka peluang bekerja yang cukup banyak, tetapi seringkali menyebabkan kemacetan kota terutama pada hari-hari sabtu dan hari libur. Selain dengan angkutan jalan raya, untuk menuju kota Jakarta dan Sukabumi dapat digunakan angkutan kereta api.

Kedudukannya sebagai pintu gerbang dari arah selatan Ibukota, membuat Bogor strategis dalam kontelasi perekonomian regional. Jalan raya hampir tidak pernah sepi dari lalu lintas angkutan barang dari beberapa daerah/kabupaten di bagian selatan menuju *Jatabek* dan sebaliknya.

Beberapa studi tentang migrasi dan kaitan desa kota, seperti penelitian Wariso (1987), Sofiati (1987), dan Esra (1990), memperlihatkan betapa besarnya daya serap perekonomian sektor-sektor informal di Kota Bogor terhadap tenaga kerja pedesaan baik pria maupun wanita. Pelaku-pelaku sektor informal ini hampir seluruhnya berasal dari pedesaan dalam jarak dekat dari pedesaan Jawa Barat sampai jarak jauh dari pedesaan Jawa Timur atau bahkan dari Sumatera Barat. Wariso (1989) mencatat bahwa perpindahan mereka berlangsung secara sirkulasi kontinu atau musiman. Perdagangan jamu gendong merupakan salah satu lapangan usaha yang secara khusus digeluti wanita-wanita untuk membantu ekonomi rumahtangganya di desa (Sofiati, 1987). Pekerjaan-pekerjaan serupa yang banyak membutuhkan tenaga kerja wanita misalnya pembantu rumahtangga, baby sitter, pramuniaga, perdagangan makanan, dan sebagainya. Sementara itu, perdagangan sayur gerobak keliling (Esra, 1990) atau perdagangan makanan dan minuman jalanan, angkutan becak (Wariso, 1989) menyediakan kesempatan berusaha yang sangat besar, terutama bagi pria, yang datang secara bergantian memasuki kota Bogor.

Para migran sirkuler berasal dari desa-desa yang berbeda, tetapi ada kecenderungan diantara mereka untuk menempati kantong-kantong (*enclave*) pemukiman tertentu yang tidak merata di seluruh wilayah Kota Bogor. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian antara ketersediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemukim pribumi dengan harga yang dapat dijangkau oleh para sirkuler sebagai tempat untuk mempro-

dukasi jasa atau barang dagangan; atau sekedar tempat beristirahat setelah kembali bekerja. Tempat pemukiman para sirkuler umumnya berada di tempat-tempat strategis dan rumah dengan petak-petak kecil tempat tinggal mereka dikenal dengan sebutan *pondok boro* (Wariso, 1989).

Tabel 11 Persebaran Migran Sirkuler di Kelurahan Kebon Kelapa Menurut Pekerjaan dan Tempat Tinggal dan Tempat Pemandokan, Februari 1988.

Pekerjaan	Tempat Pemandokan di RW											Jumlah	Persen
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	PKJ		
1. Penjual makanan dan minuman	46	21	30	30	-	3	24	-	71	53	19	287	42.2
2. Penarik Becak	-	-	-	11	-	-	45	-	-	105	15	176	25.9
3. Penjual Sayuran	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	3	39	5.7
4. Penjual Rokok	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	32	40	5.9
5. Pelayan Toko, Warung	-	20	11	-	-	-	-	-	-	-	-	31	4.6
6. Buruh Kasar	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	9	24	3.5
7. Tukang Sepatu, Cat dan Gordin	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	26	3.8
8. Penjual Tas, Pa-kaiian, sepatu	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	2.8
9. Penjual Hasil Kerajinan	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.5
10. Penjual Minyak	-	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	11	1.6
11. Penjual Jamu	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	8	1.1
12. Lainnya	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	3	9	1.2
Jumlah	54	39	75	44	10	8	69	-	120	181	81	680	100
Persentase	7.9	5.8	11.0	6.4	1.5	1.2	10	-	17.9	26.6	11.9	100	

Sumber : Wariso, 1989.

Dari Tabel 11 dapat diperoleh suatu gambaran tentang peran Kota Bogor dalam menampung migran sirkuler atau komuter. Memang para pendatang sirkuler tidak terdistribusi secara merata di semua wilayah kota, tetapi mengingat banyaknya kantong-kantong pemukiman sirkuler yang terbentuk di Kota Bogor adalah masuk akal untuk membuat perkiraan kasar bahwa kota ini menampung puluhan ribu migran sirkuler-komuter, suatu jumlah yang besar untuk kota berukuran sedang.



Disamping menerima migran sirkuler, kota Bogor juga biasa dikunjungi pendatang harian atau pendatang singkat yang sifatnya berkala atau dadakan. Pendatang berkala datang dari luar kota terutama pada hari libur dan hari-hari besar, untuk pulang pada hari yang sama atau beberapa hari kemudian, sedangkan pendatang dadakan biasanya merupakan kelompok atau rombongan yang mempunyai tujuan khusus dan bisa terjadi pada hari-hari kerja. Di sisi lain, sektor pendidikan cukup banyak mengundang kehadiran migran terutama penduduk berusia muda ke kota Bogor.

B. Tapanuli Selatan

Sub bab ini memusatkan perhatian pada penjajagan tentang karakteristik umum ruang hidup dan kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan sebagai daerah asal migran. Dalam penyajiannya juga diupayakan untuk memberi penjelasan aspek-aspek yang bersifat khusus yang dianalisis dan didasarkan pada telaah data-data sekunder. Dengan demikian uraian ini akan mengantarkan bahasan kepada identifikasi beberapa faktor yang mungkin berpotensi mengakibatkan perpindahan penduduk dari daerah ini. Seterusnya gambaran ruang hidup dan kehidupan akan menggambarkan mengapa terbentuk pola-pola tertentu dalam proses migrasi, yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

Mobogunye (1970) dalam Abustam (1987) menyatakan, sistem-sistem migrasi penduduk tidak berlangsung dalam suatu lingkungan yang hampa, tetapi terbentuk di dalam suatu lingkungan tertentu yang mengandung perangkat objek-objek tertentu yang bersifat fungsional. Mungkin saja salah satu objek tidak secara langsung menimbulkan migrasi, namun karena interaksinya dengan objek lain dalam sistem kehidupan masyarakat, maka objek tersebut secara tidak langsung berperan dalam terjadinya migrasi. Naim (1970) menunjuk pada pentingnya peran faktor ekologi, lokasi, ekonomi, demografi, sosial-budaya sebagai faktor-faktor yang membentuk pola migrasi masyarakat Minangkabau yang khas itu. Dalam konsep yang hampir sama, Abustam (1987) merinci peran faktor-faktor lingkungan fisik, penyebaran, dan kepadatan, serta pertumbuhan

penduduk, struktur penduduk, pendidikan dan perhubungan untuk menggambarkan situasi umum penyebab perpindahan penduduk di Sulawesi Selatan.

1. Kondisi Fisik, Geografis dan Administrasi.

Tapanuli Selatan berada diantara $0^{\circ}.10'$ sampai $1^{\circ}.50'$ dan $98^{\circ}.50'$ sampai $100^{\circ}.10'$, dengan ketinggian 0 sampai 1915 meter di atas permukaan laut. Tapanuli Selatan merupakan Kabupaten Daerah Tingkat II (Dati II) paling selatan dari 17 Dati II di Sumatera Utara Sumatera Utara. Secara administratif batas-batas Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Riau dan Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara.
4. Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Dalam meningkatkan akselerasi pembangunan pemerintah daerah membagi Tapanuli Selatan menjadi empat Wilayah Pembangunan, atas dasar kesamaan potensi sumberdaya alam, ekologi, geografis, dan demografis (Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, 1990). Berdasarkan pembagian administrasi tahun 1990, keempat wilayah pembangunan tersebut adalah :

1. Wilayah Pembangunan I

- Kecamatan Natal
- Kecamatan Batang Toru
- Kecamatan Batang Natal (sebagian kecil, Bagian Barat)
- Kecamatan Padang Sidempuan (sebagian Kecil)

Daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah pembangunan I berada di bagian Barat dan berpusat di Natal, memiliki ciri-ciri antara lain, geografis rendah, rawa, dan pantai. Sumberdaya yang menjadi perhatian utama untuk dikembangkan terdapat pada sektor pertanian pangan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan.

2. Wilayah Pembangunan II

- Kecamatan Batang Angkola
- Kecamatan Sipirok
- Kecamatan SD Hole
- Kecamatan Padang Sidempuan (sebagian besar)

Daerah yang termasuk dalam wilayah pembangunan II sebagian besar merupakan dataran tinggi, mempunyai potensi utama di sektor pertanian pangan, industri kecil, perkebunan, dan sentral perdagangan Kabupaten. Wilayah pembangunan ini berada di bagian Utara dan berpusat di Padang Sidempuan.

3. Wilayah Pembangunan III

- Kecamatan Muara Sipongi
- Kecamatan Kotanopan
- Kecamatan Batang Natal (sebagian besar)
- Kecamatan Panyabungan
- Kecamatan Siabu

Letak wilayah pembangunan ini berada di bagian selatan berciri geografis dataran rendah dan dataran tinggi, memiliki potensi pengembangan di bidang pertanian pangan, pariwisata, perikanan darat, perkebunan, dan pertambangan. Pusat pembangunan wilayah ini berada di Panyabungan.

4. Wilayah Pembangunan IV

- Kecamatan Sosa
- Kecamatan Barumon
- Kecamatan Barumon Tengah
- Kecamatan Dolok
- Kecamatan Padang Bolak

Wilayah Pembangunan IV berada di bagian timur dengan ciri geografis dataran rendah, dan berbukit-bukit. Dengan ciri seperti itu, Wilayah Pembangunan IV mem-

punyai potensi di bidang pertanian pangan, peternakan, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Secara umum keadaan tofografi Tapanuli Selatan terdiri dari dataran rendah, dan dataran tinggi berbukit-bukit atau bergunung-gunung. Di bagian alur bukit barisan yang seakan-akan membelah Tapanuli Selatan menjadi dua bagian, terdapat empat buah gunung, yaitu Gunung Sorik Merapi di Kecamatan Kotanopan, Kecamatan, Gunung Gongonan di Kecamatan Siabu, Gunung Lubuk raya di Kecamatan Padang Sidempuan Barat, dan Gunung Sibual-buali di Kecamatan Sipirok. Gunung Sirok Merapi beberapa tahun belakangan sering diresahkan masyarakat, karena terlihat adanya gejala-gejala akan meletus.

Tapanuli Selatan dialiri 485 buah sungai-sungai besar dan kecil yang sebagian besar berhulu ke pegunungan Bukit Barisan. Diantara sungai-sungai tersebut sungai-sungai seperti Barumon, Batang Gadis, Batang, Aek Batu, Batang Toru Batang Ayumi, Batang Pane, Aek Sukamandi tergolong besar, dengan lebar antara 35 sampai 75 meter. Sungai yang mengalir ke Pantai Barat atau Lautan Indonesia relatif lebih pendek dan deras dibandingkan sungai yang mengalir ke Pantai Timur atau Selat Malaka. Hal ini disebabkan medan aliran menuju Lautan Indonesia terjal dan beralur pendek, sedangkan sungai yang mengalir ke Selat Malaka, setelah turun melewati patahan hanya menemui litanan dataran rendah. Karena perbedaan pola vegetasi yang dilewati, sungai yang mengalir ke pantai selat Malaka banyak mengandung lumpur, berupa lapisan top soil yang terangkut dari hulu. Keberadaan Bukit Barisan di Tapanuli Selatan, seolah-olah membagi wilayah ini ke dalam 2 atau bentuk ekotipe, curah hujan, dan fisiografi.

Bentuk fisiografi Tapanuli Selatan, terdiri atas 2 zona utama dan satu zona tambahan (Lampiran 5), yaitu :

1. Zona B1 dan B2, merupakan wilayah lipatan timur dan barat. Daerah ini tergolong dataran rendah yang terdiri atas batuan endapan tua, meliputi hampir separuh dari wilayah Tapanuli Selatan. Wilayah lipatan timur

relatif lebih landai bila dibandingkan dengan lipatan barat yang berciri lereng-lereng terjal. Bentuk fisiografi seperti ini dengan sendirinya kurang memungkinkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian yang baik.

2. Zona C2, merupakan zona patahan Batang Angkola dan Batang Gadis, terdiri atas batuan beku (atas, bawah dan dalam) yang menguasai sekitar seperempat wilayah Tapanuli Selatan. Wilayah ini berlereng terjal disebelah dan menyebelahi slenk, dan oleh karenanya lahan disekitarnya tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.
3. Zona A2, merupakan wilayah rawa barat. Daerah ini menghadap langsung ke samudra Indonesia berupa dataran rendah berawa-rawa. Dibandingkan dengan dua zona fisiografi sebelumnya luas daerah rawa ini jauh lebih kecil, dan belum banyak dimanfaatkan karena disamping vegetasi yang padat (hutan) juga memiliki penduduk yang sangat sedikit.

Melihat bentuk fisiografi di atas, wilayah Tapanuli Selatan terutama yang berada di sekitar zona C2 dan B2 sebagian besar tetap menjadi hutan, ladang berpindah atau pertanian lahan kering. Ketinggian dengan lereng terjal menjadi penghambat utama aktifitas penduduk dalam memanfaatkannya (Sandi, 1985). Meskipun demikian, dataran rendah pada zona B2 yang berada di daerah aliran sungai (DAS) tetap diusahakan oleh penduduk untuk pertanian lahan basah yaitu hamparan persawahan. Oleh karena sebahagian wilayah dalam zona B2 terdiri atas daerah datar dan memiliki vegetasi yang relatif rendah, daerah ini mempunyai potensi pertanian lahan basah dan kering.

Pola distribusi hujan di Tapanuli Selatan terutama dipengaruhi oleh topografi dan letak zona konvergensi antar tropik (ICJ). Bukit Barisan membagi Tapanuli Selatan menjadi tiga zona curah hujan utama. Daerah sebelah barat (Kecamatan Batang Toru, Natal dan sebagian Batang Natal) memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Secara drastis curah hujan menurun di belahan tengah yaitu di daerah bagian atas pegunungan Bukit Barisan dan kemudian sedikit bertambah menuju belahan timur (Lampiran 6). Perbedaan yang begitu besar dengan pola umum curah hujan di daerah tropika dipen-

dipengaruhi oleh perbedaan kerapatan vegetasi, angin lokal, elevasi dan sistim penggunaan lahan. Pola hujan di Tapanuli Selatan dapat dibagi ke dalam 4 zona, yaitu

1. *Sangat tinggi*, dengan curah hujan rata-rata lebih dari 3500 mm pertahun. Daerah yang memiliki curah hujan tinggi terdapat di kecamatan Natal, Batang Natal, Padang Sidempuan Barat, dan sebagian wilayah kecamatan Batang Toru. Daerah ini berada pada ekotipe hutan lebat dan rawa pantai.
2. *Tinggi*, dengan curah hujan rata-rata tahunan 2500-3500 mm. Daerah curah hujan tinggi terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan yang menghadap ke pantai barat dan membayang-bayangi daerah dengan curah hujan sangat tinggi.
3. *Sedang*, dengan curah hujan rata-rata tahunan 1750-2500 mm. Daerah dengan curah hujan sedang terdapat di sebagian besar wilayah administratif Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara mulai dari dataran tinggi Bukit Barisan mengarah ke pantai timur.
4. *Rendah*, dengan curah hujan rata-rata tahunan di bawah 1750 mm. Daerah ini berada dalam bayang-bayang hujan karena dibalik bukit barisan.

Menurut Withington (1960) dalam Silalahi (1982), jumlah dan variabilitas curah hujan di Sumatera Utara (1500-5200 mm/tahun) dipandang terlalu variatif dan ekstrim untuk daerah tropika.

Pada Tabel 12 terlihat jelas beberapa daerah Tapanuli Selatan memiliki tingkat curah hujan yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sedangkan gambar memperlihatkan bahwa bagian tengah merupakan wilayah pegunungan. Oleh sebab itu, fungsi hidrologi daerah di sekitarnya sangat tergantung kepada pola vegetasi dan curah hujan yang turun di daerah ini. Misalnya di daerah Sipagimbar (curah hujan rata-rata di bawah 1750 mm/tahun), Padang Sidempuan Timur, Panyabungan memiliki curah hujan rendah, padahal wilayah ini merupakan hulu sungai besar yang mengalir ke Selat Malaka dan Lautan Indonesia. Akibatnya debit air sungai berfluktuasi sangat tinggi antara musim hujan dan musim kemarau. Minimnya curah hujan di ketiga daerah diakibatkan oleh posisinya dihalangi oleh ketinggian Bukit Barisan.

Tabel 12 Banyaknya Curah Hujan Menurut Laporan Stasiun Klimatologi Di Tapanuli Selatan 1985 (mm).

Stasiun	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1. Natal	286	158	158	674	230	250	447	166	319	560	427	461	4.136
2. Muarasoma	299	312	387	327	150	305	278	104	459	443	358	200	3.622
3. Muarasipongi	288	358	283	357	423	90	300	217	296	360	-	-	2.972
4. Panyabungan	99	116	101	45	76	81	84	31	142	124	159	191	1.249
5. Siabu	197	259	232	349	24	55	68	61	141	67	351	51	1.855
6. Sosopan	206	287	309	173	177	4	15	157	242	251	299	235	2.355
7. Pintupadang	105	367	217	141	159	33	22	176	167	169	507	527	2.590
8. Batang Toru	271	323	366	410	206	219	390	227	365	559	579	285	4.200
9. Sipirok	123	126	199	253	383	277	312	187	279	269	103	170	2.681
10. Sipaginbar	237	90	326	142	258	65	300	12	5	113	249	85	1.882

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan

Disamping perbedaan volume curah hujan, Tapanuli Selatan juga memiliki perbedaan waktu musim hujan. Sandi (1985), membuat analisis tentang hal ini, dimana hujan mulai turun paada akhir Oktober di pantai timur yang kemudian bergiliran menuju pantai barat. Pada bulan November hujan mulai turun di Kecamatan Padang Bolak dan Padang Sidempuan. Dengan demikian di Sumatera Utara umumnya deskripsi musim hujan tahunan dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pada bulan Januari hampir semua wilayahnya mendapat hujan yang cukup, sesuai denga pola curahan hujan yang umum di Indonesia.
2. Pada bulan April hujan turun kecil dan tidak merata yang bergerak dari barat ke timur.
3. Pertengahan bulan Oktober pertama-tama hujan turun di pantai timur dan berlalu secara berantai ke pantai barat.

Perbedaan volume dan waktu turun hujan di Tapanuli Selatan menyebabkan perbedaan pengolahan lahan basah pada masing-masing zona hujan oleh penduduk. Di daerah Pantai Barat sawah cenderung dapat ditanam sepanjang tahun karena tersedia sumber air yang cukup, sedangkan bagian tengah sampai ke timur sangat tergantung kepada musim hujan. Oleh sebab itu musim panen sawah di zona hujan sedang dan rendah terdapat dua musim panen yaitu : *pertama*, musim panen raya (*taon godang*).

Hampir semua sawah termasuk sawah tadah hujan dapat ditanami. *kedua*, musim panen antara (*taon holang*), dimana persediaan air masih tersedia untuk mengolah sawah tetapi debitnya telah menyusut sehingga sawah yang ditanami hanya terbatas pada sawah beririgasi. Bahkan dalam musim tertentu sawah irigasi pun hanya sebagian yang dapat ditanami. Menghadapi keterbatasan air, petani membentuk pengaturan sistem tanam bergilir sesuai dengan kemampuan irigasi.

2. Penduduk.

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 1980, 1985, dan 1990 berturut 757.159 jiwa, 954.245 jiwa, dan 946.485 jiwa. Dari sejumlah 757.159 jiwa penduduk Tapanuli Selatan pada tahun 1980, 90 persen diantaranya bermukim di pedesaan, sedangkan selebihnya sebesar 10 persen bertempat tinggal di perkotaan. Berdasarkan Data Statistik Tahun 1985, keadaannya telah mengalami pergeseran menjadi 88.72 persen berbanding 11.28 persen antara penduduk pedesaan dengan penduduk perkotaan. Hal ini menggambarkan tingginya tingkat urbanisasi yang membawa permasalahan tersendiri bagi penyediaan fasilitas di perkotaan. Namun demikian komposisi penduduk seperti ini dipandang belum mengkhawatirkan bila dibandingkan dengan perkembangan urbanisasi secara nasional.

Penduduk Tapanuli Selatan menyebar secara tidak Merata di 20 Kecamatan. Kepadatan tertinggi terletak di pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti Kotanopan, Padang Sidempuan, dan Panyabungan, sedang penduduk dengan kepadatan rendah adalah Natal, Sosopan, Sosa, Dolok, dan Sipirok Dolok Hole.

Distribusi penduduk seperti ini tidak terlepas dari aspek lokasional, yaitu keterpencilan dari lintasan ekonomi, drajat isolasi atau ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan satu kecamatan dengan pusat perekonomian di sekitarnya. Kecamatan yang memiliki kepadatan rendah merupakan daerah-daerah yang lama terisolasi, baru tahun-tahun belakangan terbuka, melalui proyek-proyek peningkatan jalan desa dan jalan Kabupaten. Di samping itu, terlihat kecenderungan penduduk pemusatan penduduk ke kota-kota kecamatan yang berada di lintasan trans Sumatera.

Tabel 13. Perkembangan Kepadatan Penduduk Di Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan Tahun 1980-1990.

K e c a m a t a n	T a h u n		
	1980	1985	1990
1. Natal	9.02	11.81	13.22
2. Batang Natal	36.90	36.05	40.47
3. Kotanopan	63.91	65.44	72.33
4. Muara Sipongi	42.34	43.64	43.48
5. Panyabungan	67.69	88.62	97.92
6. Siabu	76.06	79.90	76.71
7. Sosa	21.34	23.38	26.08
8. Barumon	54.33	57.38	67.03
9. Barumon Tengah	18.83	18.88	21.36
10. Sosopan	19.18	19.04	21.18
11. Batang Angkola	57.39	61.82	68.36
12. Padang Sidempuan	69.13	-	-
13. Batang Toru	41.91	56.21	65.32
14. Sipirok	36.66	49.19	52.62
15. Padang Bolak	47.90	49.53	49.48
16. Dolok	24.20	31.86	35.37
17. Saipar Dolok Hole	22.54	24.00	24.75
18. Pd. Sidempuan Timur	-	96.47	111.90
19. Pd. Sidempuan Barat	-	60.18	75.83
20. Pd. Sidempuan Utara	-	5561.31	6601.05
21. Pd. Sidempuan Selatan	-	6300.67	7003.18
Tapanuli Selatan	41.94		

Sumber : 1. Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1981. Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1980.
 2. Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1986. Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1985.
 3. Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1991. Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1990.

Penyebaran penduduk tidak seimbang juga terjadi antara wilayah bagian timur yang memiliki jumlah penduduk relatif lebih besar dibanding dengan dataran tinggi dan wilayah pantai barat. Ketimpangan penduduk demikian berpengaruh terhadap pengembangan sumberdaya manusia serta pemanfaatan potensi sumberdaya alam. Di satu sisi daerah yang padat penduduknya mengalami kesulitan dalam penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, sedangkan di sisi lain terdapat pengangguran lahan di daerah yang berpenduduk jarang (Pemerintah Daerah Tapanuli selatan, 1989) .

Dibanding dengan Kabupaten DATI II lainnya di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan memiliki kepadatan penduduk yang paling kecil. Kepadatan penduduk Tapanuli

Selatan berturut-turut 27, 35, dan 44 jiwa/km² pada tahun 1961, 1971, dan tahun 1980 dan pada tahun 1990 kepadatan penduduk Tapanuli Selatan menjadi 56 jiwa/km².

Tabel 14. Perkembangan Kepadatan Penduduk Tapanuli Selatan Dan Dati II Lainnya Di Sumatera Utara Menurut Sensus 1961, 1971, dan 1980.

Kabupaten/Dati II	T a h u n		
	1961	1971	1980
1. Tap. Selatan	27	35	44
2. Tap. Tengah	53	71	73
3. Tap. Utara	50	55	49
4. Labuhan Batu	30	42	79
5. Asahan	85	123	166
6. Simalungun	113	151	181
7. Dairi	43	57	70
8. Karo	71	88	103
9. Deli Serdang	201	296	199
10. Langkat	54	82	111
SUMATERA UTARA	68	95	

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara, 1981

Kepadatan penduduk yang rendah menjadi kendala dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara optimal. Pemerintah melalui Departemen Transmigrasi sejak Relita Pertama berupaya mengatasi masalah ini melalui penempatan transmigran ke daerah-daerah berpenduduk jarang. Sejak Pelita Pertama hingga pertengahan Pelita IV, Tapanuli Selatan telah menerima 5925 KK atau 26.596 orang transmigran yang ditempatkan secara berangsur-angsur di empat lokasi, yaitu Sinunukan (I,II,III,IV), Ujung Batu (I,II, III,IV,V), Batang Pane (I,II,III), dan Sikara-kara (I,II). Daerah penempatan Transmigrasi merupakan wilayah dari kecamatan-kecamatan tergolong rendah kepadatan penduduknya, seperti Kecamatan Natal, Padang Bolak, dan Sosa.

Pada tahun 1985, 1988, dan 1993 penduduk yang berumur 1-14 tahun berturut-turut 420.134, 429.240, dan 484.239 jiwa, sedangkan penduduk dewasa adalah 426.351, 514.144, 539.923 jiwa. Perdefenisi beban tanggungan (*dependency ratio*), dimana penduduk yang berumur 65 tahun ke atas masuk dalam kategori tanggungan, maka sebenarnya dengan angka-angka di atas belum mencukupi untuk menentukan angka beban tanggungan. Akan tetapi dengan membandingkan penduduk selang umur 1-

14 tahun dengan penduduk 15 tahun ke atas saja, sudah dapat diambil kesimpulan yang menyakinkan bahwa beban tanggungan penduduk Tapanuli Selatan sangat besar, yaitu lebih besar dari 98,53 persen tahun 1985, 83.47 pada tahun 1988, dan 85.67 pada tahun 1993.

Tabel 15 Banyaknya Penduduk Yang Ditransmigrasikan Ke Tapanuli Selatan Sampai Tahun 1985.

L o k a s i	Transmigrasi	
	Kepala Keluarga	Orang
1. Sinunukan I	508	1944
2. Sinunukan II	471	2083
3. Sinunukan III	488	2261
4. Sinunukan IV	447	1976
5. Ujung Batu I	485	2095
6. Ujung Batu II	502	2251
7. Ujung Batu III	472	2042
8. Ujung Batu IV	478	2136
9. Ujung Batu V	498	2144
10. Batang Pane I	416	2392
11. Batang Pane II	282	1342
12. Batang Pane III	363	1560
13. Sikara-kara I	500	2391
14. Sikara-kara II	503	2240
Jumlah	5925	265596

Sumber : Dirjen Transmigrasi Sumatera Utara, 1986.

Menurut Sensus Penduduk Tahun 1980, Registrasi Penduduk Tahun 1985, Sensus Penduduk tahun 1990, jumlah penduduk laki-laki berturut-turut 373.568, 413.464, dan 468.374 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berturut-turut 381.793, 433.021, dan 485.871 jiwa. Dengan mempergunakan perhitungan rasio jenis kelamin maka berturut-turut angka rasio jenis kelamin pada tahun 1980, 1985, dan 1990 adalah 97.8, 95.5, dan 96.4. Ini berarti rasio jenis kelamin penduduk Tapanuli Selatan selama sepuluh tahun terakhir (1980-1990) berada di bawah rasio jenis kelamin alami. Bukti empiris menunjukkan rasio jenis kelamin secara alami pada saat lahir berkisar 103 - 105. Dalam keadaan normal angka rasio jenis kelamin pada saat lahir ini mengalami penurunan secara perlahan-lahan hingga mendekati angka 100 pada golongan-golongan umur muda, dan selanjutnya terus menurun sedikit dibawah 100

pada golongan umur tua, sehingga secara keseluruhan menjadi sekitar 100 (Rusli, 1983).

Gambaran rasio jenis kelamin di atas menarik untuk ditelusuri, apakah terbentuknya angka tersebut merupakan suatu kejadian yang alami atau apakah memiliki kaitan dengan peristiwa-peristiwa demografis seperti migrasi. Di antara beberapa faktor yang mungkin memengaruhi rasio jenis kelamin, migrasi dianggap paling berperan dalam pembentukan struktur penduduk ini. Bila dugaan ini benar, maka penduduk yang lebih banyak melakukan migrasi adalah laki-laki. Untuk lebih jelasnya perkembangan rasio jenis kelamin dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Tapanuli Selatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 1980, 1985, dan 1990 Diperinci per Kecamatan

Kecamatan	Tahun					
	1980		1985		1990	
	L	P	L	P	L	P
1. Natal	13.804	13.620	17.830	18.059	20.009	20.171
2. Batang Natal	15.471	14.973	17.791	18.150	20.306	20.039
3. Kotanopan	26.073	27.614	27.322	29.560	30.570	32.302
4. Muarasipongi	4.663	4.723	4.854	5.152	4.897	5.073
5. Panyabungan	40.332	42.185	44.043	45.114	47.824	51.318
6. Siabu	24.916	25.968	26.248	27.202	26.910	29.363
7. Batang Angkola	29.106	30.356	29.526	31.942	33.012	34.968
8. Sosopan	6.959	7.058	8.102	8.587	9.170	9.404
9. Barumon	20.535	20.974	21.923	23.049	25.694	26.842
10. Sosa	10.800	10.671	18.356	19.192	21.246	20.641
11. Barumon Tengah	15.294	15.566	19.086	20.075	21.856	22.453
12. Padang Bolak	33.094	34.169	37.384	37.914	42.877	44.729
13. Padang Sidempuan	79.825	80.505	-	-	-	-
14. Batang Toru	17.036	16.663	17.833	17.824	20.697	20.739
15. Sipirok	16.238	16.933	16.407	19.049	18.452	19.477
16. SD Hole	8.383	8.685	9.213	10.017	9.681	10.153
17. Dolok	11.041	11.130	12.492	12.480	14.017	13.704
18. PSP Timur *	-	-	21.790	22.926	25.496	26.368
19. PSP Barat *	-	-	22.380	22.918	28.286	29.792
20. PSP Utara *	-	-	20.583	21.961	22.778	25.902
21. PSP Selatan *	-	-	20.301	21.290	24.596	23.443
Jumlah	373.568	381.793	413.464	433.021	468.374	485.871

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1991

3. Pendidikan

Hasil-hasil penelitian seperti yang dilakukan Naim (1970), Abustam (1989), dan Tomagola (1986) menunjukkan adanya kaitan faktor pendidikan dengan migrasi. Pendidikan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak, tidak hanya pendidikan dasar tetapi juga pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Sementara itu, kemampuan pemerintah atau swasta untuk menyediakan fasilitas pendidikan masih terbatas, terutama untuk pendidikan tinggi. Bila fasilitas pendidikan tidak tersedia di daerah biasanya penduduk melakukan migrasi.

Penyediaan fasilitas pendidikan di Tapanuli Selatan sampai akhir Pelita IV belum mencukupi secara berimbang di semua tingkatan (Pemda Tapanuli Selatan, 1989) Fasilitas pendidikan dasar secara umum telah memadai dengan pendirian SD Inpres sampai ke pelosok-pelosok. Sejak awal Repelita jumlah SD Inpres yang dibangun mencapai 484 buah atau 46 persen dari jumlah Sekolah Dasar di Tapanuli Selatan. Dengan jumlah keseluruhan Sekolah Dasar 1060 buah pada tahun 1989 dan jumlah desa 1608 buah, maka setiap tiga desa terdapat dua buah sekolah Dasar. Selain SD, untuk pendidikan tingkat dasar terdapat pula sekolah keagamaan (Islam) berupa madrasah Ibtidaiyah, tetapi fungsinya lebih condong kepada pendidikan komplementer.

Pada pendidikan tingkat menengah pertama sekolah-sekolah umum dan termasuk kejuruan yang berada di bawah naungan Departemen pendidikan Dan Kebudayaan nampaknya dominan mengakomodasikan kebutuhan pendidikan masyarakat. Karena daya tampungnya terbatas, sekolah Pesanteren dan Madrasah tumbuh menjadi wadah pendidikan alternatif. Pada Tahun 1989 jumlah murid yang bersekolah di SMTP umum/kejuruan sebanyak 37.537 orang berbanding 11.860 orang pada sekolah Madrasah Tsanawiah. Bila kedua bentuk pendidikan dipandang substitutif berarti jumlah murid yang tertampung di SMTP sekitar 50.000 orang.

Fasilitas pendidikan tingkat menengah atas (SMTA) di Tapanuli Selatan belum tersedia pada masing-masing kecamatan. Pada tahun 1986 separuh SMTA (28 dari 54

buah) berada di Ibukota Kabupaten, Padang Sidempuan. Selebihnya (26 buah) terdistribusi pada 13 kecamatan. Ini berarti terdapat 6 kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan SMTA (Kantor Statistik Tapanuli Selatan, 1987). Siswa yang tertampung pada SMTA pada tahun 1989 sejumlah 22.062 orang pada sekolah umum/kejuwaan belum termasuk siswa Madrasah Aliyah dan Pendidikan Guru Agama (PGA).

Secara historis sektor pendidikan berkembang di Tapanuli Selatan sejak akhir abad ke 19 atau pasca Perang Padri. Sejumlah putra daerah menjalani pendidikan keagamaan di Sumatera, setelah menyelesaikan jenjang pendidikannya mereka membuka pondok-pondok pesantren untuk kebutuhan masyarakat (Parlindungan, 1964).

Di bidang pendidikan moderen, Kolonial Belanda membuka dan melegalisasi sekolah-sekolah Raja *Kweekshools*. dan masuknya misionaris Kristen dari Jerman, Inggris dan Belanda di Tapanuli mendirikan sekolah-sekolah *sintua*.

Tabel 17 Perkembangan Sarana Pendidikan Di Tapanuli Selatan Pada Pelita IV.

Pendidikan	T a h u n		Perkem- bangan (%)
	1984/1985	1988/1989	
Taman Kanak-kanak (TK)			
a. Jlh Sekolah	17	18	5.88
b. Jlh Murid	975	2.400	146.15
c. Jlh Guru	83	91	9.64
d. Rasio Guru : Murid	1:12	1:26	-
Sekolah Dasar (SD)			
a. Jlh Sekolah	1.032	1.060	2.71
b. Jlh Murid	157.896	165.360	4.73
c. Jlh Guru	5.022	6.961	3.86
d. Rasio Guru : Murid	1:31	1:24	+
Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP)*			
a. Jlh Sekolah	89	105	17.98
b. Jlh Murid	31.644	37.537	18.62
c. Jlh Guru	1.641	2.213	34.86
d. Rasio Guru : Murid	1:19	1:17	+
Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)**			
a. Jlh Sekolah	24	58	141.67
b. Jlh Murid	17.601	22.062	25.35
c. Jlh Guru	1.021	1.644	61.02
d. Rasio Guru : Murid	1:17	1:13	+
Perguruan Tinggi			
a. Jlh PT	-	6	
b. Jlh Mahasiswa	-	3.935	
c. Jlh Dosen	-	348	
d. Rasio Mhs : Dosen	-	1:11	

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, 1989. *Tapanuli Selatan Repelita V.*

Keterangan: *SMTP meliputi SMP,SKKP, dan ST; ** SMTA meliputi SMA, SPG, STM, SMEA,SMKK, PGSMTP, SGO, SMT Pertanian.

Tabel 18 Perkembangan Sarana Pendidikan Madarrasah dan Pesanteren Di Tapanuli Selatan Tahun 1980-1990.

Pendidikan	T a h u n		Perkem- bangan (%)
	1980	1990	
Madarrasah Diniyah Awaliyah.			
a. Jlh Sekolah	-	126	-
b. Jlh Murid	-	6.733	-
c. Jlh Guru	-	229	-
d. Rasio Guru : Murid	-	1:29	-
Madarrasah Ibtidaiyah			
a. Jlh Sekolah	297	122	-58.92
b. Jlh Murid	22.677	11.860	-47.61
c. Jlh Guru	716	525	-26.67
d. Rasio Guru : Murid	1:37	1:23	+
Madarrasah Tsanawiyah			
a. Jlh Sekolah	53	96	81.13
b. Jlh Murid	6.566	12.909	96.60
c. Jlh Guru	362	1.083	199.17
d. Rasio Guru : Murid	1:18	1:12	+
Madarrasah Aliyah			
a. Jlh Sekolah	55	96	23.68
b. Jlh Murid	5.193	6.074	16.97
c. Jlh Guru	314	584	85.99
d. Rasio Guru : Murid	1:16	1:10	+
Pesantren			
a. Jlh Pesantren	22	-	-
b. Jlh Santri	7.174	-	-
c. Jlh Guru	239	-	-
d. Rasio Santri : Guru	130	-	-

Sumber :1. Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1981.
Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1980.
2. Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1991.
Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1990.

4. Aktifitas dan Struktur Ekonomi

Sesuai dengan kondisi alam, aktifitas ekonomi penduduk Tapanuli Selatan umumnya terkonsentrasi pada bidang pertanian. Pola pemanfaatan lahan khususnya dalam kegiatan pertanian masih bervariasi, mulai dari pertanian yang primitif sampai kepada sistem intensifikasi lahan. Jenis pertanian primitif seperti perambahan hutan

atau perladangan berpindah (*shifting cultivation*) diusahakan dengan modal yang sangat minim, kecuali tenaga, sehingga hasilnya sepenuhnya tergantung kepada kemurahan alam. Warna lain dari penggunaan lahan adalah pertanian sawah yang tergantung pada curah hujan, persawahan dengan irigasi sederhana, irigasi semi teknis dan teknis.

Sejak dahulu penduduk Tapanuli umumnya dikenal sebagai petani-petani yang handal dalam mengolah sawah. Pertanian Tapanuli, khususnya dataran Tinggi Toba Adalah salah satu pengecualian bagi *Indonesia Luar*, yang umumnya kurang cocok untuk padi sawah (Geertz, 1976). Di sana berkembang kehidupan bertani sawah sebagai sumber ekonomi utama keluarga. Berbeda dengan daerah di sebelah Timur (Kabupaten Labuhan Batu) dimana penduduknya sudah terbiasa dengan aktifitas ekonomi perkebunan yang berorientasi pada pasar internasional, pertanian Tapanuli Selatan relatif masih terfokus pada aktivitas-aktivitas pertanian subsistensi.

Luas sawah di Tapanuli Selatan terus berkembang baik dari segi total produksi padi maupun luas lahan. Peningkatan luas lahan secara absolut berlangsung lebih cepat pada jenis sawah tadah hujan, sawah irigasi sederhana dan semi teknis, sedangkan sawah dengan jenis irigasi teknis belum terjangkau. Peningkatan produksi masih dapat lebih baik lagi jika dukungan irigasi teknis tersedia tersedia. Sumber air lokal tersedia untuk dieksploitasi dari puluhan sungai besar dan kecil yang mengalir di daerah ini.

Lahan-lahan dengan kemiringan tinggi sampai rendah di sepanjang daerah aliran sungai *dirimba* (dibuka) menjadi petak-petak sawah untuk menghasilkan padi kebutuhan domestik. Frekuensi tanam sangat tergantung kepada ketersediaan air yang dapat dialirkan melalui jaringan irigasi sederhana yang dibangun oleh penduduk secara bersama-sama. Di samping itu, penduduk juga mengusahakan persawahan di atas lahan yang pengairannya sepenuhnya tergantung curah hujan pada musim penghujan.

Tabel 19. menggambarkan betapa pentingnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian penduduk Tapanuli Selatan. Sebesar 44.60 persen penduduk bekerja sebagai petani, berturut-turut 2,40 dan 1,13 persen bekerja sebagai buruh tani dan nelayan. Ini berarti hampir separuh penduduk bergerak di bidang pertanian. Bila

Tabel 19. Luas Sawah di Tapanuli Selatan Menurut Jenis Irigasi Tahun 1984-1988.

Jenis Irigasi	Tahun				
	1984	1985	1986	1987	1988
Teknis	-	-	-	-	-
Semi Teknis	12.096	13.451	14.799	15.754	16.689
Sederhana	22.762	24.117	25.456	26.420	27.535
Tadah Hujan	6.580	6.880	10.000	11.000	12.801
Rawa	820	820	820	1.620	1.620
Jumlah	42.258	45.680	51.081	54.794	58.825

Sumber : Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan, 1989. *Repelita V Tapanuli Selatan.*

diasumsikan penduduk sebesar 47,80 persen merupakan penduduk dalam kelompok umur tanggungan (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan mengacu kepada rasio tanggungan penduduk Tapanuli Selatan yang mendekati nilai 1 berarti jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebesar dua kali lipat penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani dan nelayan.

Tabel 20 Jumlah Penduduk Menurut Matapencaharian Utama di Tapanuli Selatan Tahun 1980.

Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1. Petani	315.575	44.60
2. Buruh Tani	16.269	2.40
3. Nelayan	7.305	1.13
4. Pedagang/Pengusaha	5.723	0.91
5. Karyawan Swasta	4.269	0.65
6. Karyawan Pemerintah/ABRI	12.949	1.85
7. Pensiunan PNS/ABRI	1.962	0.30
8. Pengangguran	2.209	0.36
9. Lain-lain	338.588	47.80
Jumlah	704.849	100.00

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1981.

Sektor jasa seperti perdagangan dan jasa kemasyarakatan tampaknya tidak terlalu berarti dalam memberi peluang berusaha bagi penduduk. Penduduk yang bekerja di sektor ini tidak lebih dari 2.00 persen dari jumlah penduduk. Angka sebesar ini menunjukkan kurang berkembangnya perekonomian Tapanuli Selatan di sektor jasa.

Hal ini berkaitan dengan perekonomian di sektor sekunder yang kurang cerah, seperti industri manufaktur.

Dalam sistem pertanian tradisional terdapat ciri subsistensi dimana produksi petani sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik rumahtangga. Satu lagi dari ciri subsistensi ini adalah adanya tindakan untuk memprioritaskan pengusahaan tanaman yang dapat disimpan menanti panen berikutnya. Sumber pendapatan utama disandarkan pada pengusahaan tanaman kebutuhan pokok (padi, jagung, sayuran, hewan kecil) yang langsung dapat dikonsumsi selepas panen.

Bagi masyarakat yang sarat dengan kegiatan adat dan ritual religius, perlengkapan kegiatan demi kegiatannya juga termasuk dalam perhitungan ekonomi subsisten rumahtangga. Misalnya, penyelenggaraan pesta perkawinan membutuhkan syarat penyediaan kerbau, lembu, atau lebih rendah kambing dari keluarga mempelai agar kegiatan terlaksana mendapat restu dari kerabat. Kemampuan menyediakan persyaratan tersebut merupakan fungsi dari status serta gelar adat yang akan diperoleh pengantin pria. Oleh karenanya rumahtangga berupaya untuk selalu menempatkan fungsi tabungan dalam kegiatan ekonominya.

Pada masyarakat Tapanuli Selatan, fungsi tabungan masyarakat disesuaikan dengan sumberdaya lingkungan yang berbeda antar daerah. Di daerah dataran rendah dengan tipe ekologi padang rumput fungsi tabungan diletakkan pada pengusahaan ternak besar dan kecil seperti kerbau, lembu, dan kambing/domba. Kekayaan rumahtangga ini tidak ditujukan untuk sembarang kebutuhan, tetapi hanya terbatas kepada kebutuhan mendesak dan berbiaya besar.

Pada tipe ekologi lain, dataran tinggi dan hutan lebat fungsi tabungan keluarga satu-satunya terletak pada potensi lahan. Rumahtangga berupaya menanam tanaman keras (kulit manis, karet, durian, kemenyan, dll) di atas lahan, untuk kemudian pada waktunya dapat dipanen dan hasilnya ditabung dalam berbagai bentuk. Dahulu, orang Sipirok dan Angkola (dataran tinggi) terkenal sebagai pemilik ternak yang dipelihara

Tabel 21 Luas Lahan, Produktifitas, dan Produksi Padi Kabupaten Tapanuli Selatan Diantara Kabupaten Lainnya Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 1990.

Kabupaten	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Qt/Ha)	Produksi	
			T o n	Persen
1. Tap. Selatan	80.716	43.43	350.572	14.79
2. Nias	27.596	30.55	84.307	3.56
3. Tap. Tengah ¹	21.691	38.37	83.220	3.51
4. Tap. Utara	56.185	42.89	240.959	10.17
5. Lab. Batu	70.209	33.35	234.175	9.88
6. Asahan ²	61.038	36.20	220.956	9.32
7. Simalungun ³	70.039	45.80	320.800	13.53
8. Dairi	12.149	37.01	44.960	1.90
9. Karo	10.729	35.90	38.517	1.62
10. D. Serdang ⁴	130.281	41.94	546.450	23.06
11. Langkat ⁵	58.890	34.80	204.925	8.64
T o t a l	599.523	39.53	2.369.841	100

Sumber : BPS, 1991.

dengan sistem bagi hasil kepada petani ternak di Padang Lawas (dataran rendah). Dengan demikian perkembangan populasi ternak di Tapanuli Selatan tidak hanya berpengaruh kepada penduduk di wilayah padang rumput, tetapi juga menyentuh perekonomian penduduk di sekitarnya.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tapanuli Selatan terhadap PDRB Sumatera Utara hanya 6.25 persen pada tahun 1983, 6.45 persen tahun 1987, dan 6.55 persen tahun 1989. Dengan kontribusi PDRB sebesar itu peranan ekonomi Tapanuli Selatan dipandang kurang seimbang dengan proporsi luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing sebesar 26.43 persen dan kira-kira 11.0 persen.

Transformasi struktur perekonomian Tapanuli Selatan berlangsung lambat dibandingkan dengan Sumatera Utara. Secara ekonomi berdasarkan indikator PDRB pada tahun 1983 PDRB tersusun atas 46.25 persen sektor pertanian, 16.35 sektor industri, dan 37.40 persen sektor jasa. Selanjutnya pada tahun 1987 kontribusi sektor pertanian meningkat menjadi 49.09 persen, dan bertambah sedikit menjadi 49.48 pada

Tabel 22 Jumlah Ternak Besar Di Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan Tahun 1980, 1985, dan 1990

Kecamatan/ Wilayah Pembangunan	Ternak								
	Kerbau			Sapi/Lembu			Kambing		
	1980	1985	1990	1980	1985	1990	1980	1985	1990
Wilbang I									
1. Natal	700	755	816	55	415	584	973	1172	480
2. Batang Toru	90	101	112	50	82	141	457	671	688
3. PSP Barat	-	303	295	-	101	542	-	570	314
sub total	790	1159	1223	105	608	1277	1230	2413	1482
persentase	2.04	2.93	2.76	0.35	1.97	3.03	2.78	4.94	4.61
Wilbang II									
4. Batang Angkola	9	47	54	8	112	107	1187	1401	589
5. Padang Sidenpuan	720	-	-	810	-	-	3151	-	-
6. PSP Timur	-	380	437	-	577	130	-	1156	569
7. PSP Selatan	-	78	88	-	80	141	-	1368	577
8. PSP Utara	-	64	79	-	65	93	-	516	248
9. Sipirok	300	519	623	45	58	120	2600	2804	1534
10. SD Hole	145	195	169	18	31	18	448	647	375
sub total	1264	1283	1450	881	923	609	7386	7892	3892
persentase	3.27	3.24	3.24	2.97	3.00	1.45	16.68	16.16	12.12
Wilbang III									
11. Muarasipongi	25	55	58	120	107	184	335	546	235
12. Kotanopan	40	63	73	80	97	174	1521	1741	868
13. Batang Natal	17	38	45	20	47	77	700	899	375
14. Panyabungan	400	420	463	510	570	562	4649	4893	246
15. Siabu	63	137	159	80	148	185	1285	1454	877
sub total	545	713	798	810	969	1182	8490	9533	2601
Persentase	1.41	1.80	1.79	2.73	3.14	2.81	19.17	19.52	9.00
Wilbang IV									
16. Sosa	351	276	417	2	42	152	1372	1986	714
17. Barunon	905	960	1067	40	78	139	12515	12769	8060
18. Barunon Tengah	15536	15625	18289	4096	4162	4456	2891	3050	2629
19. Dolok	90	23	-	7	26	46	697	991	429
20. Padang Bolak	17260	17561	19325	23261	23382	33958	8431	8714	11689
21. Sosopan	1912	1947	2086	490	622	289	1268	1482	618
sub total	36054	36392	41221	27896	28312	39040	27174	28992	24139
persentase	93.28	92.02	92.23	93.95	91.89	92.71	61.37	59.37	75.17
Total	38653	39547	44692	29692	30812	42108	44280	48830	32114

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, 1990

tahun 1989. Di sisi lain kontribusi sektor industri terhadap PDRB bergeser menjadi 15.19 persen tahun 1987, dan meningkat menjadi 17.10 persen pada tahun 1989. Perekembangan sektor jasa menunjukkan kecenderungan menurun dari 37.40 persen tahun 1983 menjadi 35.72 tahun 1987 dan menurun lagi menjadi 32.42 persen pada tahun 1989.

Jika transformasi di atas dibandingkan dengan pergeseran struktur perekonomian yang terbentuk di Sumatera Utara terlihat adanya pola yang sama dimana sektor

pertanian cenderung menguat. Namun bila diamati lebih jauh model perekonomian regional Tapanuli Selatan dipandang masih tradisional. Hal ini diidentifikasi dari :

1. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Sumatera Utara hanya 32.68 persen pada tahun 1983, 35.82 persen pada tahun 1987, dan 35.82 persen tahun 1989. Sumber utama penerimaan sektor pertanian berasal dari sub sektor perkebunan (Bappeda Sumatera Utara, 1991) yang tersebar di dataran rendah sekitar pantai Timur. Sedangkan peran sektor pertanian Tapanuli Selatan dalam PDRB-nya masih 46.25 persen tahun 1983, 49.49 persen tahun 1987, dan 49.48 persen pada tahun 1989. Dalam hal ini sub sektor perkebunan khusus perkebunan besar swasta dan negara belum berarti banyak dalam perekonomian Tapanuli Selatan (Geotrav, 1993). Mengacu pada perbandingan di atas dapat ditarik sementara kesimpulan, penurunan kontribusi sektor pertanian Tapanuli Selatan terhadap PDRB terlambat sekitar 15 persen dalam kurun waktu 1983-1989.
2. Perkembangan sektor industri di Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara menunjukkan pola yang hampir sama yaitu cenderung fluktuatif perannya dalam PDRB. Berbeda dengan kontribusi sektor pertanian, sektor industri di Tapanuli Selatan justru jauh di bawah rata-rata kontribusi sektor industri di Sumatera Utara. Pada tahun 1983 peranan sektor industri dalam PDRB Tapanuli Selatan sebesar 16.35 persen, tahun 1987 sebesar 15.19 persen meningkat menjadi 17.10 persen tahun 1989. Struktur industri Tapanuli condong kepada industri skala kecil dan rumahtangga. Sementara itu sektor industri Sumatera Utara yang tersusun industri besar sampai kecil pada tahun 1983 berperan 24.12 persen, 22.73 tahun 1987 dan 24.04 persen tahun 1989. Dengan demikian ketertinggalan penguatan sektor industri Tapanuli Selatan sebesar delapan persen dari Sumatera Utara.
3. Peranan sektor jasa di Tapanuli Selatan dan Sumatera Utara cenderung menurun dengan catatan pergeseran ke arah penguatan, kontribusi sektor

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

jasa Tapanuli Selatan tertinggal dari Sumatera Utara enam sampai tujuh persen dalam selang waktu 1983-1989. Penurunan kontribusi sektor jasa di Tapanuli Selatan antara lain karena sektor jasa transportasi berkembang lambat walaupun perdagangan berkembang cepat. Dalam perekonomian Tapanuli Selatan sub sektor transportasi berperan penting dalam menyumbang pedapatan dan menyerap tenaga kerja daerah.

Ketiga ciri di atas menunjukkan kesenjangan yang berarti sebagai indikator ketertinggalan Tapanuli Selatan. Bagi daerah berkembang sektor industri berfungsi sebagai motor penggerak dan akselerator *economic building*, menjadi syarat yang belum terbentuk di Tapanuli Selatan.

Penjelasan tentang lemahnya peran sektor industri di Tapanuli Selatan dapat ditelusuri dari jenis atau kelas-kelas¹ industri yang tumbuh. Menurut Sensus Ekonomi tahun 1974 banyaknya industri besar dan sedang 21 perusahaan. Selama kurun waktu 11 tahun sampai Sensus Ekonomi tengah tahun 1986 jumlah perusahaan tersebut tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 21 perusahaan. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja relatif tidak meningkat di industri kelas menengah-atas. Pada industri kecil terjadi sedikit peningkatan dari 103 perusahaan menjadi 110 atau 0.6 persen pertahun. Perkembangan yang cukup berarti terjadi pada sektor industri kecil dan rumahtangga. Perusahaan/usaha industri kecil dan rumahtangga pada tahun 1974 sebanyak 807 buah, 11 tahun kemudian bertambah menjadi 3129 buah atau rata-rata 13.11 persen pertahun.

Bila dikaitkan dengan proses pembentukan kapital (*cavital formation*) struktur industri tersebut kurang seimbang dan tidak menggembirakan dalam menopang pertumbuhan PDRB.

1. Biro Pusat Statistik menetapkan : 1. Industri besar mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 orang; 2. Industri sedang 20-99 orang; 3. Industri kecil 5-19 orang, dan; industri rumahtangga 1-4 orang.

Tabel 23 : Perkembangan Jumlah Perusahaan Industri Di Tapanuli Selatan Menurut Jenis, Tahun 1985-1990

Tahun	Jenis Industri							
	ANEKA INDUSTRI				INDUSTRI KECIL - RUMAHTANGGA			
	Σ Prs (Buah)	Σ TK (orang)	Σ Inv. (Miliar)	Σ P R (Miliar)	Σ Prs (Buah)	Σ T K (Orang)	Σ Inv. (Miliar)	Σ P R (Miliar)
1 9 8 5	23	1299	11.3	34.7	3208	6112	1.9	4.2
1 9 8 6	23	1229	11.5	36.3	3291	6414	1.9	4.6
1 9 8 7	24	1631	12.3	28.1	3709	7966	2.5	4.2
1 9 8 8	24	1746	13.9	32.7	4640	8898	2.7	4.3
1 9 8 9	26	1926	14.8	60.0	6796	11323	3.4	6.7
1 9 9 0	25	1870	13.9	37.4	7707	12619	3.7	8.0

Keterangan : Prs = Perusahaan; TK = Tenaga Kerja; Inv = Investasi; P R = Produk Riil

Sumber : Kantor Dinas Perindustrian Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1990.

Faktor lokasional berpengaruh terhadap pola dan tingkat migrasi penduduk (Naim, 1971). Penyederhanaan dari kaitan ini adalah aksesibilitas suatu daerah dengan pusat-pusat ekonomi pendidikan, atau kekuasaan dan politik yang dapat bekerja secara parsial maupun terintegrasi. mempengaruhi karagaan sosial ekonomi dan politik masyarakat yang mendiaminya. Seterusnya interaksi aspek-aspek tersebut akan menentukan tingkat efesiensi dan efektifitas upaya-upaya pembangunan.

Untuk memahami Tapanuli Selatan lebih dalam dari sudut lokasional dapat diperhatikan dari peta Sumatera bagian Tengah (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau). Secara administratif Tapanuli Selatan merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Utara, namun secara ekonomi Propinsi Riau dan Sumatera Barat sama pentingnya dengan Sumatera Utara. Ketiga propinsi merupakan pasar aktual bagi produksi pertanian Tapanuli Selatan.

Dari luas wilayah Tapanuli Selatan 18.896,50 Km² panjang jalan sampai tahun 1988 baru tersediakan sepanjang 3.026,57 Km yang merupakan jalan Negara, Jalan propinsi, Jalan Kabupaten serta jalan desa. Sebagian besar desa-desa masih terisolir.

Pembukaan jalan-jalan desa dan pemeliharannya menjadi masalah tersendiri yang sulit diatasi karena jarak desa atau kecamatan berjauhan satu sama lain. Arus

produk pertanian dari tingkat petani rakyat menuju pasar-pasar berlangsung lambat dan seringkali harus mengeluarkan ongkos mahal.

Tabel 24 Banyaknya Desa Di Tapanuli Selatan Menurut Jaraknya Dari Kota Kecamatan Tahun 1986.

Jarak (Km)	Jumlah	Persentase
0 - 9	574	35.70
10 - 20	466	28.98
20+	535	33.27
Tidak tercatat	33	2.55
J u m l a h	1608	100.00

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara, 1987. Potensi Desa Sumatera Utara, 1986

Jalan raya berfungsi sangat vital bagi mobilitas penduduk dan arus keluar masuk barang dari dan ke Tapanuli Selatan. Mobilitas ekonomi melalui laut kurang berkembang, meski terdapat pantai di pesisir Barat Sumatera. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai tidak tersedia serta perdagangan di wilayah barat tidak berkembang dengan baik.

Pada tahun 1970-an sektor transportasi jalan raya merupakan salah satu sektor ekonomi baru terus berkembang dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional. Sektor ini memiliki daya tarik tertentu dan dipandang sebagai sektor ekonomi yang pantas untuk digeluti. Upaya pemerintah untuk membuka jalan-jalan baru di pulau Sumatera membuka kesempatan kerja di sektor ini terus membesar. Ketika itu jalur utama menuju ibukota propinsi ditempuh melalui Sibolga jalan negara trans sumatera

Ketika itu hampir tidak ada jalan alternatif yang kondisinya baik untuk dilewati. Dewasa ini jalan alternatif sudah tersedia melalui jalur tengah via Sipirok dan jalur timur via Labuhan Batu. Namun demikian ketiga jalur alternatif relatif tidak mengurangi waktu tempuh kota pelabuhan di pantai timur. Dibukanya jalur langsung dari propinsi Riau ke Kabupaten Labuhan Batu mengurangi arus lalu lintas barang yang melewati kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel 25 Panjang Jalan Di Tapanuli Selatan Menurut Statusnya Tahun 1984-1988.

Status Jalan	Tahun 1984 (Km)	Tahun 1988 (Km)	Pertumbuhan (%)
1. Jalan Negara	244.30	244.30	-
2. Jalan Propinsi	404.33	404.33	-
3. Jalan Kabupaten	1.548.28	1.713.46	5.93
4. Jalan Desa	167.30	664.48	41.17
Jumlah	2.164.21	3.026.57	

Sumber : Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan, 1989. Kabupaten Tapanuli Repelita V (1989/1990-1994/1994).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Tapanuli Selatan, walaupun disadari potensi ekonominya cukup besar. Data terakhir penetapan Desa Miskin penerima Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Tapanuli Selatan dapat diamati pada Tabel 26 dan dapat dibandingkan dengan Desa Miskin di Sumatera Utara.

Dari Tabel 26 terlihat, desa-desa miskin di Sumatera Utara terkonsentrasi di wilayah regional Tapanuli dan Nias. Perkategori wilayah pembangunan, kecuali Tapanuli Utara, berarti hampir dua-pertiga desa miskin Sumatera Utara berada di wilayah pembangunan I. Wilayah pembangunan I Sumatera Utara terdiri atas Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kotamadya Sibolga.

Kesimpulan ini selaras dengan isu yang mengatakan Tapanuli sebagai kantong-kantong kemiskinan. Daerah tingkat II yang memiliki angka desa-desa miskin paling menyolok adalah Kabupaten Tapanuli selatan dan Kabupaten Nias, masing-masing memberi kontribusi 31.89 dan 30.93 persen terhadap total desa miskin di propinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.331 desa. Desa-desa miskin ini menurun jumlahnya di Tapanuli Utara, yaitu 21.26 persen terhadap total desa miskin propinsi atau 34.48 persen terhadap total desa di Tapanuli Utara. Sementara itu pada Dati II lainnya yang memiliki rasio desa miskin (Dati II terhadap Propinsi) yang masuk dalam kategori

sedang adalah Deli Serdang (5.20 persen), Dairi (2.93 persen), Tapanuli Tengah (2.35 persen), dan Karo (2.30 persen).

Tabel 2.6. Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kotamadya Dan Status Desa Di Sumatera Utara Tahun 1993.

Kotamadya/ Kabupaten	Status Desa				Jumlah
	Miskin		Tidak Miskin		
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
1. Nias	422	64.23	235	35.77	657
2. Tapanuli Selatan	435	28.47	1.093	71.53	1.510
3. Tapanuli Tengah	32	22.86	108	77.14	140
4. Tapanuli Utara	290	34.48	551	65.52	841
5. Labuhan Batu	11	5.70	182	94.30	193
6. Asahan	8	3.67	210	98.33	218
7. Simalungun	5	2.42	202	97.98	207
8. Dairi	40	25.48	117	74.52	157
9. Karo	31	12.02	227	87.98	258
10. Deli Serdang	71	11.34	555	88.66	626
11. Langkat	6	2.88	202	97.12	208
12. Sibolga	0	00.00	11	96.98	11
13. Tangjung Balai	7	38.89	11	61.11	18
14. Pematang Siantar	0	00.00	38	100.00	38
15. Tebing Tinggi	0	00.00	17	100.00	17
16. Medan	6	4.17	138	95.83	144
17. Binjai	0	00.00	30	100.00	30
Total	1.364	25.78	3.927	74.22	5.291

Sumber : Biro Pusat Statistik, 1993.



V. DIMENSI HISTORIS MIGRASI SUKU BATAK

Pemahaman tentang pola migrasi suatu suku bangsa, termasuk dimensinya, mempunyai arti penting dalam menelaah pola serta tingkat perpindahan penduduk (Abustam, 1987). Khususnya dalam menelaah perpindahan penduduk Tapanuli Selatan sebagai sub suku dari suku Batak, uraian dimensi historis sangat penting karena penempatan wilayah itu berlangsung melalui proses migrasi.

Terlepas dari perbedaan dan perubahan konsep dalam memandangnya, migrasi adalah peristiwa yang selalu muncul akibat penambahan populasi penduduk di muka bumi. Pada jaman berburu dan berlandang pindah pengembaraan terus meluas makin jauh melewati pagar alam untuk menstabilkan ketersediaan pangan bagi kelompok pengembara. Kemampuan tanah untuk mengakomodasikan kebutuhan kelompok orang yang berdiam di atasnya menjadi faktor pembatas isolasi komunitas. Pada tingkat yang lebih tinggi manusia semakin akrab dengan praktek domestikasi dan budidaya tanaman, kebutuhan pangan tidak juga lepas dari ancaman ketidakstabilan, sekelompok orang terpaksa berpindah mencari lahan baru. Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia ---ilmu pengetahuan dan teknologi semakin efisien dan efektif menjadi fondasi yang kuat bagi industrialisasi--- kegiatan-kegiatan ekonomi menjadi terpesialisasi terstruktur sedemikian rupa merangsang perilaku dan proses perpindahan penduduk ke dalam konfigurasi semakin rumit. Dalam perkembangan terakhir peran industrialisasi sangat nyata. Forbes berpedapat ;

Hal itu tidak mengurangi trauma para pekerja yang tersingkir dari tanah, demikian juga, pertumbuhan industri tidak menjamin kehidupan yang lebih baik. Dimasukkannya pedesaan ke dalam perekonomian dunia dan mempercepat pelabihan desa perekonomian desa, seraya mengalihkan dan memperkuat keresahan yang ada pada penduduk pedesaan dan mengakibatkan pergeseran penduduk yang permanen dan sementara ke kota-kota kecil dan besar dalam skala luas [Forbes, 1983].

Watson (1970) sebagaimana yang dikutip Forbes (1984) mengatakan, riset mobilitas dinamika perpindahan penduduk kontemporer hanya dapat ditafsirkan dalam

pengertian struktur sosio-historis yang esensial bagi komunitas tertentu. Stimulus awal dari industrialisasi mengantarkan migrasi penduduk dari pola tradisional pramoderen menuju tahap *mobilitas transisi* (Zelinsky, 1971).

A. Zaman Pra Batak

Menurut catatan sejarah dari beberapa ahli, nenek moyang dari suku-suku bangsa yang berdiam di nusantara berasal dari dataran Asia Tenggara. Perjalanan menuju nusantara ditempuh melalui jalur : pertama, dari arah barat semenanjung malaysia bergerak ke selatan menuju pulau-pulau sumatera, jawa, dan nusa tenggara. Kedua, melalui jalur utara menuju taiwan kemudian berbalik arah ke selatan menuju philipina, kalimantan dan sulawesi, dan selanjutnya menyebar ke kepulauan maluku dan irian jaya. Ciri utama dari gelombang perpindahan ini adalah setiap gelombang selalu menggeser kedudukan suku bangsa yang terlebih dahulu menempati daerah di sekitar jalur lintasan sehingga cenderung menyisihkan bangsa terdahulu ke arah pinggir-pinggir di luar jalur utama (Koentjaraningrat, 1971). Gambaran semacam ini mengisyaratkan, nenek moyang suku batak menjadi salah satu suku bangsa yang berpindah mengikuti jalur utara semenanjung malaysia menuju sumatera.

Sementara itu menurut Parlindungan (1966), nenek moyang suku batak termasuk dalam kelompok suku protomalayan bersama dengan beberapa suku bangsa lain yang berdiam di nusantara. Suku bangsa protomalayan beranak pinak dan mengisolasi diri ribuan tahun di pegunungan perbatasan siam/burma membentuk pola ketergantungan yang khas di wilayah dataran tinggi. Kontak mereka dengan masyarakat luar minim. Pola ini berbeda sekali dengan bangsa-bangsa neomalayan yang senang tinggal di dataran rendah atau pantai yang relatif terbuka. Kedudukan bangsa-bangsa protomalayan mengalami perpecahan akibat desakan bangsa yang berada di bagian utara. Sepanjang sungai irawady, salween, serta mekong terdapat suku bangsa syan (paleomongoloi) nenek moyang bangsa-bangsa siam, mendapat ekspansi dari bangsa mongol jauh dari utara. Tertekan oleh ruang yang kian sempit bangsa paleomongoloi terpaksa



mendesak bangsa protomalayan dari kedudukannya dan secara transendental kelompok suku bangsa ini berpencar ke selatan. Pola *splended isolation* terpecah menuju diferensiasi dan penyebaran ke berbagai penjuru nusantara. Kelompok suku bangsa yang tergolong protomalayan adalah : (1) suku bangsa Bontok dan Igorot menjadi kelompok suku bangsa minoritas di Philipina, (2) suku Toradja bangsa bergerak ke bagian utara Sulawesi. (3) suku bangsa Tayal menyebar ke dataran tinggi di kepulauan formosa (Taiwan). (4) suku bangsa karen dan meo merupakan suku bangsa protomalayan yang tetap bertahan di pegunungan perbatasan Burma dan Thailand. (5) suku bangsa ranau mendarat di sumatera selatan dan menempati wilayah di sekitar danau ranau. (6) suku bangsa wajo merupakan satu-satunya kelompok bangsa protomalayan yang berubah menjadi bangsa pengembara di lautan, menempati kepulauan Lingga sampai Cebu di Philipina. (7) Suku bangsa Batak, mendarat di pantai barat Pulau Sumatera tetapi kemudian terpecah menjadi tiga gelombang.

Gelombang pertama berlayar terus menuju pulau Simalur, Nias, Batu, Mentawai, Siberut, dan Enggano serta pulau-pulau kecil di Samudra Indonesia. Sementara itu gelombang kedua mendarat di muara sungai simpang (sekarang Singkil) menyisir kedaratan tinggi sepanjang sungai simpang kiri dan kemudian menetap di Kutacane. Kedudukan terakhir terletak di pedalaman aceh, terkenal dengan suku Alas dan Gayo. Sampai sekarang kedua suku bangsa ini tetap berbeda sistem budayanya dengan kebudayaan suku-suku Aceh umumnya. Gelombang ketiga mendarat di Sungai Sorkam antara kota tua Barus dengan Sibolga. Terbiasa dengan alam pegunungan, pendaratan mereka dilanjutkan dengan perjalanan ke pedalaman sumatera dan berhenti di sekitar Danau Toba bagian barat, kaki gunung pusuk buhit.

Karakteristik umum dari bangsa protomalayan adalah sulit bergaul dengan bangsa-bangsa lain, hingga abad-abad belakangan ciri tersebut tetap bertahan. Salah satu bukti dari sikap ini terlihat dari keengganan mereka untuk menerima agama-agama yang dibawa oleh penganjur agama dari eropa dan timur tengah (Parlindungan, 1969).

Teori lain mengatakan, tidak terdapat bukti-bukti arkeologis dan etnologis yang mendukung kedua pendapat di atas (Benjamin *dalam* Naim, 1984). Menurut Benjamin pada dasarnya hanya ada satu suku bangsa yang mendiami nusantara, yaitu ras mongoloid. Perpindahan bangsa asia tenggara ke selatan telah berlangsung semenjak 20.000 tahun yang lalu tatkala kalimantan, Sumatera dan Jawa masih menjadi bagian dari daratan Asia. Diferensiasi suku-suku di pulau-pulau itu lebih merupakan pengaruh spesialisasi ekologis.

Khusus mengenai nenek moyang suku Batak, Hasibuan (1992) mengemukakan pendapat yang jauh berbeda dari teori-teori sejarah umumnya. Melandaskan diri pengamatan pada pola adaptasi, aksara, sistem religi dan beberapa unsur budaya Batak tradisional, Hasibuan berhipotesis bahwa besar kemungkinan suku Batak merupakan suku bangsa yang relatif muda menempati pulau Sumatera. Sifat kedatangannya tidak bergerombol seperti yang dilukiskan dalam sejarah perpindahan bangsa-bangsa versi perlindungan atau lainnya, tetapi hanya terdiri dari sekelompok kecil saja.

Sekitar 3.000 tahun yang lalu, perpindahan secara berantai melalui perdagangan kemenyan, kapur barus dan rempah-rempah untuk bahan pangan dan pengawet *mummi*, sudah berlangsung antara bangsa-bangsa asia selatan dengan orang-orang Afrika Utara dan Asia Barat. Pemasok utama komoditas tersebut adalah Tanah Batak yang sekarang. Vitalisasi komoditas timur mendorong konsumen utama dari mesir bergerak langsung ke produsen tanpa melalui pihak perantara dari bangsa-bangsa di asia selatan. Ekspedisi berlangsung secara berkelompok yang dipimpin oleh marinir-marinir Arab Mesir bertubuh besar dan berhidung mancung, sedangkan kalangan pembantu terdiri atas bangsa bani Israil yang bertubuh kecil, dan merupakan kelas pekerja dalam struktur kerajaan Fir'aun Mesir. Setelah sampai di pusat Kemenyan dan Kapur barus¹ di

1. Sampai abad ke 18 Barus tetap mendominasi supplay Kapur Barus dalam perdagangan hasil bumi di nusantara

Fansur dan Barus, kalangan pekerja mengadakan pembrontakan terhadap pemimpinnya, sehingga harus melarikan diri ke pedalaman hingga sampai di tepian Danau Toba. "Bani Israil merupakan nenek moyang suku Batak". Sebagai pelarian mereka menyeberangi danau menuju pulau di atasnya dan berupaya *menghilangkan identitas diri* dan membentuk tempat tinggal yang dikelilingi rumpun bambu (*bona pasogit* atau *bona bulu*) sebagai benteng pertahanan. Sampai sekarang Bona Pasogit atau bona bulu merupakan lambang kesatuan teritorial huta atau kampung halaman bagi orang Batak.

Bila dipertentangkan dengan pendekatan sejarah yang lazim pendapat Hasibuan ini lebih merupakan uraian imajinatif---untuk tidak menyebutnya sebagai mitos--- dan terlalu mengandalkan asumsi keras. Namun bila diperhatikan beberapa fakta dari argumen-argumennya terdapat hubungan yang logis. dan apakah hanya sekedar fakta yang terjadi secara kebetulan belaka ?. *Pertama*, *Toyyiba* adalah nama yang tersebut ketika pertama kali para pelarian melihat danau dihadapannya, untuk mengatakan "indah" dalam Bahasa Arab (Mesir). Akibat keausan bahasa menjadi Toba. Dalam bahasa Batak kata *Toba* tidak mempunyai arti. *Kedua*, pulau atau daratan di tengah Danau Toba dikenal dengan nama *Samosir*, orang yang keluar dari pulau itu menyebutnya *sian Mesir* atau *sian Mosir* (dari Mesir atau Mosir, menunjuk pada penghuninya) secara evolusioner berubah menjadi Samosir. *Ketiga*, Singa binatang yang dilekatkan pada raja-raja fir'aun menjadi lambang keperkasaan raja-raja Batak (Sisingamangaraja), bukan *balemun* atau harimau yang ada hutan-hutan Tapanuli. Ini mengesankan adanya hubungan historis antara Toba dengan Mesir. Keempat, bentuk aksara Batak dengan aksara Arab dalam beberapa hal menunjukkan kesamaan. Kelima, Agama Batak tradisional adalah *Debata Mulajadi Na Bolon*, menganut konsep keesaan (monotheis).

B. Periode Pra Abad 19

Pola tinggal menetap orang Batak pertama sekali terbentuk di daerah Toba (Harahap dan Siahaan, 1987; Parlindungan, 1960; Hasibuan, 1992, Sidjabat, 1987), sekitar 3000 tahun yang lalu atau kurang lebih 100 generasi dari sekarang (Parlindun-

gan, 1960). Meskipun demikian belakangan muncul kontroversi yang mempertanyakan siapa berasal dari siapa (Lubis, 1993).

Sejarah migrasi orang Batak umumnya dan penduduk Tapanuli Selatan yang terdiri atas suku Batak sub suku Angkola Mandailing khususnya tidak dapat digambarkan secara pasti, disamping karena keterbatasan data-data tertulis juga diakibatkan oleh kontroversi pendapat sekitar sejarah migrasi orang Batak. Pendapat-pendapat umumnya bermuara pada kesimpulan tingkat migrasi Orang Batak dewasa ini merupakan pelonjakan yang berarti dibandingkan kehadiran dalam kancah pergaulan antar etnis. Uraian yang cukup meyakinkan disertai yang dengan data-data empiris tentang keberadaan orang Batak di luar wilayah teritorialnya baru tersedia setelah abad ke sembilan belas. Hal ini tidak ditujukan untuk menyimpulkan bahwa tidak terjadi perpindahan Orang Batak pada masa-masa sebelumnya.

Sampai pada akhir abad ke delapan belas suku Batak dipandang belum banyak melakukan perpindahan ke luar batas teritorialnya. Secara bertahap tanah-tanah kosong di sepanjang pegunungan Bukit Barisan hingga terbentuk wilayah kebudayaan Batak yang dikenal sekarang. Tetapi penyebaran berlangsung lambat selama berabad-abad lamanya. Mereka terkondisi dalam ketertutupan (*splended isolation*), dengan gerak intra regional mengantisipasi sejalan pertumbuhan penduduk alami. Kraemer yang datang ke Sumatera Utara pada Tahun 1930, dalam laporannya mengatakan (Sidjabat, 1983) :

Selama berabad-abad mereka hidup dalam keterasingan dan karenanya mereka dapat bermanja-manja dalam sifat-sifat mereka yang khusus dalam jiwa kemerdekaannya.

Pendapat lain yang berbeda menyebutkan bahwa anggapan orang tentang keterasingan Suku Batak tidaklah benar. Sidjabat (1983) mengatakan bahwa suku Batak telah membuka hubungan dengan bangsa-bangsa lain di Nusantara dan bahkan sampai ke Jazirah Arab sejak abad-abad pertama Tarik Masehi. Bahwa barir ekonomi daerah Tapanuli sudah terlepas melalui perdagangan hasil bumi setempat di pantai barat dan

timur¹ Sumatera Utara, merupakan argumen yang patut diperhitungkan untuk mengungkapkan Orang Batak telah lama menjalin hubungan dengan suku bangsa lain. Dalam proses pertukaran itu memungkinkan bagi mereka untuk berpindah ke daerah lain di luar wilayah teritorialnya.

Terbentuknya sub suku Batak Angkola-Mandailing yang mendiami Tapanuli Selatan adalah hasil diferensiasi ekologis setelah melakukan migrasi dari daerah Toba belasan abad yang lalu. Secara proporsional sub suku Angkola Mandailing mendiami hampir sepertiga wilayah teritorial Batak. Sub suku lain yang terbentuk adalah : (1) *Toba*, mendiami daerah induk Dataran Tinggi Karo, Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, dan sebagian Dairi. (2) *Simalungun*, mendiami daerah induk Simalungun. (3) *Toba*, mendiami daerah pinggiran Danau Toba, Samosir, Dataran Tinggi Toba, sebagian Daerah Asahan, Silindung, daerah antara Barus dan Sibolga dan daerah pegunungan Pahae dan Habinsaran. (4) *Pakpak*, mendiami daerah induk Dairi (Bangun, 1972).

Menurut cerita-cerita legenda suku batak yang terdiri dari enam sub suku tersebut berasal dari dari satu keturunan yaitu Si Raja Batak dan pertama kali menetap di daerah Toba (Bangun, 1972). Melihat penyebaran pada masing-masing wilayah teritorial kebudayaan Batak, diduga penduduk yang memasuki wilayah Batak sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat Batak yang memasuki wilayah teritorial suku lain, seperti Melayu di Sumatera Timur, Aceh di bagian Utara dan Minangkabau di bagian Selatan. Arah penyebaran masyarakat Batak nampaknya lebih condong ke bagian daratan dari pada ke daerah lautan. Hal ini berkaitan dengan perpindahan masyarakat Batak secara Tradisional bertujuan mencari lahan pertanian dan memperluas Huta. Oleh karenanya proses perpindahannya berlangsung lambat. Wolf 1983 mengatakan, perpindahan penduduk untuk kegiatan perdagangan berlangsung jauh lebih cepat daripada perpindahan untuk perluasan areal pertanian. Penaklukan/extensifikasi tanah Siberia oleh bangsa Rusia sampai ke pegunungan Ural yang merukan perbatasan Asia

1. Pantai Barat meliputi Singkel, Barus, Tapian Nauli, Natal dan Air Bangis. Sedangkan Pantai Timur meliputi Buluh Anwar, Lebuan, Delitna, Batu Bara, dan Tanjung Balai.

dengan Eropah memakan waktu 600 tahun dan untuk mencapai samudera Pasific dibutuh waktu 100 tahun lagi.

Penempatan wilayah Tapanuli Selatan oleh masyarakat Batak berlangsung sekitar abad ke 5 Masehi oleh marga Lubis. Ekspansi ini tidak berlanjut keselatan karena berbenturan dengan orang-orang Minangkabau yang juga bergerak ke arah Utara memperluas perantauannya. Pada masa ini sistim pertanian penduduk masih berupa perladangan berpindah (Shifting Cultivation). Awalnya marga Lubis berdiam di wilayah Danau Toba, sekitar Balige yang sekarang. Marga Lubis yang tidak turut serta berpindah masih tetap mendiami daerah itu meski jumlahnya relatif sedikit. Pada kesempatan berikutnya daerah Tapanuli Selatan di datangi oleh marga-marga Harahap abad ke 11, Siregar abad ke 11-13, dan Nasution. Ke empat marga tersebut merupakan "the big five" yang mendiami Tapanuli Selatan hingga saat ini (Parlindungan, 1964). Namun demikian marga-marga lain yang berpindah pada gelombang-gelombang berikutnya lebih banyak jumlahnya, sehingga jumlah marga-marga yang mendiami Tapanuli Selatan dewasa ini dan memiliki wilayah teritorial sendiri berupa Huta mencapai angka puluhan bahkan ratusan. Marga-marga tersebut diantaranya adalah Hasibuan, Rangkuti, Pohan, Dalimunte, Daulay, dan yang lainnya.

Penempatan tanah-tanah di Tapanuli Selatan berlangsung lambat. Sampai pada tahun 1980 Tapanuli Selatan masih menempati urutan tingkat kepadatan terkecil di Sumatera Utara. Kepadatan penduduk lebih banyak terjadi akibat pertumbuhan penduduk alami.

Ciri *spelended isolation* melahirkan dugaan, sejarah pemukiman orang Batak tidak bersifat ekspansif jika menemukan tempat tinggal yang telah berpenghuni. Marga lubis sebagai migran *pioneer* menyisir daratan Tinggi Toba ke perbatasan Sumatera Barat menemui jalan buntu dengan hadangan orang Minangkabau dari Selatan, akhirnya memilih untuk berbalik arah ke utara hingga berhenti di daerah Mandailing dan menetap di sana (Parlindungan, 1964). Perpindahan berlangsung secara bertahap dilengkapi dengan klaim marga sebagai pemilik tanah dan menempatkan pemuki-

man huta di atasnya.

Huta merupakan warisan sejarah mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi tentang kehidupan orang Batak--- termasuk perilaku migrasinya--- paling tidak sejak orang Batak bermukiman menetap. Sebagai perbandingan tentang sejarah pertanian di Sumatera umumnya oleh Scholz (1988) digambarkan sebagai berikut :

Dimasa awal sejarah pemukiman ketika masyarakat masih merupakan pemburu dan menerapkan perladangan berpindah, bebas tanpa tempat tinggal yang tetap di atas tanah yang tersedia tak terbatas. Kecuali itu lahan tidak mempunyai nilai kecuali produk yang dihasilkannya. karena itu sedikit minat akan hak pemilikan tanah. Meningkatnya penduduk pada gilirannya memaksa diambilnya kelompok-kelompok hidup berdekatan karena tanah tidak lagi tak terbatas [Scholz, 1988].

Kegiatan berburu dan perladangan berpindah seperti yang dilukiskan tergolong migrasi primitif (Golsheider, 1987). Pola tempat tinggal menetap belum berlangsung pada periode ini. Mempelajari pola pembentukan huta yang bertahap dari penebangan hingga tinggal menetap dan membentuk huta dapat dipahami bila praktek tebang bakar terjadi dan mengesankan pola penebangan liar (*shifting cultivation*) tanpa keinginan menetap. Jika pun praktek itu terjadi kemungkinan berlangsung sebelum periode *huta*.

C. Periode Setelah Abad 19

Ketika negara-negara Hindu berkembang di pulau-pulau Selat Malaka, orang-orang sumatera merintis jalan ke Semenanjung Malaya. Akan tetapi arus ini berkurang setelah islamisasi Malaya, Kerajaan Malaya, abad ke-15. Orang Angkola Mandailing secara budaya tidak termasuk Melayu. Baru pada abad ke-19 selama perang Padri (1810-1930) tatkala masyarakat Angkola Mandailing memeluk Islam dan mereka *dime-layukan* (Attamini, 1985).

Gelombang besar perpindahan Orang Mandailing ke Semenanjung Malaya diawali oleh terjadinya perang Paderi melawan Kaum Padri Minangkabau. Raja-raja Mandailing meminta bantuan pihak Belanda yang ditebus mahal dengan cara menyediakan tenaga buruh dan mengutip pajak hasil bumi milik rakyat untuk kepentingan kolonialisasi. Bagi Orang Mandailing peristiwa Perang Padri tidak berbeda dengan perang

saudara, karena sebagian dari panglima perang Padri berasal dari Mandailing.

Sejalan dengan kondisi perekonomian yang memburuk dan keresahan masyarakat akibat perang, pada tahun 1870-an Orang Angkola-Mandailing membuka jalur perpindahan ke Semenanjung bersama dengan pemuka-pemuka agama Minangkabau yang berdiam di Mandailing setelah perang. Orang Minangkabau yang telah lebih dahulu bermukim di sana menjadi kelompok ikutan mereka (Attamimi, 1985). Cukup mengherankan, mengamati pola pemukiman serta mata pencaharian orang Mandailing yang terbentuk di Semenanjung, pemukiman mereka hampir seragam pada semua tempat, tidak ubahnya dengan *huta* atau keahlian menanam padi yang dibawa dari daerah asal. Malah Tugby dalam Attamini (1985), melihat betapa pentingnya fungsi guru agama dalam pembentukan pemukiman tersebut. Bila perpindahan Orang Mandailing merupakan kelompok pengikut gerombolan Orang Minangkabau diduga akan sulit terbentuk pola pemukiman semacam itu dan yang lebih masuk akal justru pola pemukiman yang assimilatif Minangkabau-Mandailing, dimana penduduknya juga terdiri dari dua suku. Dalam beberapa literatur memang sering ditemukan kejanggalan, dimana Perang Padri dipandang sebagai Perang antar Suku dan Agama. Dalam uraian panjang dari Parlindungan (1964), dapat disimpulkan bahwa Perang Padri lebih condong kepada perluasan Agama Islam mazhab Hambali, bukan perang suku. Hal ini terbukti dari sebagian panglima-panglima merupakan santri-santri asal Mandailing yang menempuh pendidikan agama di Minangkabau. Setelah perang Padri usai, kelompok santri atau pemuka agama dari Mandailing inilah yang paling mungkin untuk memboyong kerabatnya ke Semenanjung Malaysia.

Sumatera timur menjadi salah satu tujuan migrasi orang Batak dari segala sub sub suku. Sub suku Batak Simalungun dan Karo memiliki wilayah teritorial yang bersentuhan langsung dengan wilayah kebudayaan Melayu, menandakan kedatangan mereka ke tempat itu lebih awal dari Batak lainnya (Angkola Mandailing, Toba dan Dairi). Dalam beberapa literatur (Bangun, 1981; Cuningham, 1958) ditemukan bahwa

sub suku Batak Simalungun dan Karo dipandang merupakan etnis pribumi Sumatera Timur, disamping suku Melayu. Hubungan ketiga kelompok umumnya terbatas pada transaksi perdagangan, hubungan saling bela dan saling membantu dalam konflik (Cunningham, 1957; Candrakirana, 1988).

Ketika para pengusaha Eropah yang dibonceng oleh pemerintah kolonial, membuka perkebunan besar-besaran *kuli kebun* merupakan faktor produksi yang sangat dibutuhkan. Sumber tenaga lokal tidak dapat dimanfaatkan disamping karena jumlahnya yang sedikit juga keterampilan mereka umumnya spesifik di bidang persawahan. Pemilik perkebunan mengambil kebijaksanaan untuk mendatangkan buruh dari dataran cina dan dari Pulau Jawa.

Produksi perkebunan di satu pihak bertujuan untuk dijual ke pasar internasional mempergunakan tenaga kerja buruh-buruh dari Cina dan Jawa, sementara produksi pangan secara khusus diproduksi oleh petani lokal yang berasal dari Batak dan Melayu. Pemerintah kolonial waktu itu mendorong perpindahan penduduk dari Tapanuli, termasuk dari Angkola-Mandailing, untuk mengusahakan pertanian sawah.

Pada tahun 1930 perpindahan orang Angkola Mandailing ke Sumatera Timur berlangsung cukup besar, tetapi masih lebih kecil dari sub suku Batak lainnya. Menurut catatan Sensus Tahun 1930 etnis Angkola Mandailing mencakup 2.3 persen dari total penduduk Sumatera Timur. Dominasi penduduk pribumi Melayu pesisir, Batak Simalungun, dan Karo menurun secara drastis, kontribusi masing-masing hanya 15,0 persen, 9.0 persen, dan 6.3 persen. Kalangan pendatang akhirnya menyumbang penduduk lebih besar terdiri atas 42.8 persen Suku Jawa, 10.5 persen golongan Cina, 4.9 persen Batak Toba, dan kelompok suku lainnya 0.7 persen.

Intensitas migrasi orang Batak ke Sumatera Timur tergolong tinggi, sebesar 74.000 orang dan 80 persen diantaranya kelahiran Tapanuli. Orang Batak tergolong *kaki yang tidak pernah senang diam* dengan semangat dan perasaan ingintahu yang tinggi dan sentrifugal dalam banyak hal, walaupun secara historis tergolong paling terak-

hir masuk dalam peradaban (Naim, 1984). Efek daya tarik berupa perluasan irigasi oleh pemerintah Simalungun dan Asahan dan kebijakan pemerintah dalam memberikan dorongan pada para petani yang terlatih untuk menggantikan para peladang pindah di daerah itu (Cuningham, 1957).

Tabel 27 Perhitungan Orang Batak Tapanuli Dan Pesisir Timur Tahun 1930.

Kelompok Suku Bangsa Batak	Di Tapanuli		Di Pesisir Timur		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Batak Tapanuli	778 198	86.0	126 245	14.0	904 623	100.0
- Toba	523 524	87.6	74 197	12.4	597 667	100.0
- Pak-pak	19 936	99.0	197	1.0	20 133	100.0
- Angkola	79 849	92.3	6 706	7.7	86 555	100.0
- Mandailing	89 475	66.4	45 308	33.6	134 783	100.0
- Padang Lawas	65 414	99.9	75	0.1	65 489	100.0
Pesisir Timur	9 912	4.0	240 573	96.0	250 485	100.0
- Karo	8 921	5.8	145 429	94.2	154 350	100.0
- Simalungun	991	1.0	95 144	99.0	96 135	100.0
Orang Batak Lainnya	488	3.3	14 351	96.7	14 839	100.0
Keseluruhan Batak	788 674	67.4	381 349	32.6	1 169 947	100.0

Keterangan : 1. Bermigrasi Ke

Aceh	: 7 368	
Sumatera Barat	: 25 945	
Sumatera Lain	: 1 352	
Jawa Dan Madura	: 2 453	
Semenanjung	: 443	
Jumlah	: 37 612	(3.1 %)
2. Jumlah Orang Batak		
Batak Tapanuli	: 904 623	(74.9%)
Batak Pesisir	: 250 488	(20.7%)
Batak lainnya	: 14 839	(1.2%)
Melakukan migrasi	: 37 612	(3.1 %)
Batak keseluruhan	: 1 207 559	(100.0%)

Sumber : Volkstelling, 1930, dalam Naim (1971).

Dari Tabel di atas terlihat lebih dari 126.000 jiwa orang Batak telah menempati daerah-daerah Sumatera Timur. Dari sejumlah itu Orang Batak Angkola-Mandailing tercatat 52.000 jiwa. Rendahnya arus orang Angkola-Mandailing dan Padang Lawas dibanding Orang Batak lainnya terutama kemungkinan karena faktor jarak. Daerah *konsesi* bagi mereka berada pada daerah terdekat, yaitu bagian barat laut Sumatera Barat, Pasaman, Panti, Lubuk Sikaping, dan Rao yang kebanyakan bertujuan memperluas tanah pertanian (Naim, 1971). Pada tahun 1930 lebih dari 25.000 ribu jiwa orang Akola-Mandailing berada di sana dan bila digabung dengan perpindahan menuju Sumatera Timur sebanyak 78.000 jiwa lebih mereka yang telah berada di luar wilayah-

nya pada Tahun 1930.

Migrasi keluar Orang Batak sampai pada tahun 1960 berlangsung spektakuler, seperti ketagihan menikmati dunia luar. Cunighan menduga pada tahun 1930-1950 sebanyak seperempat juta Orang Batak migrasi ke Sumatera Timur. Sementara itu, Catles (dalam Naim, 1971) menduga sebanyak 40-50 ribu dari mereka telah mencapai Pulau Jawa, dan 29.000 diantaranya menetap di Jakarta.

Peristiwa DI/TII setelah kemerdekaan, menuntut pemerintah untuk merelokasi pasukan untuk menumpas pemberontakan itu. Dua Pasukan tentara dari Sumatera Timur yang terlibat dalam penumpasan adalah Batalion Malau pada tahun 1949 dan Batalion Bedjo tahun 1951, mendarat di pesisir Jawa Barat, Cirebon, kemudian ditempatkan di beberapa kota. Tentara yang dikirim dari Sumatera memiliki karakter budaya (agama, kebiasaan, suku, sub suku) yang berbeda, khususnya Batalion Malau yang berperilaku *tembak langsung* sehingga menonjol dalam pengamatan masyarakat lokal. Bagi sebagian tentara yang beragama nasrani syak saja menangkapi anjing masyarakat untuk dimakan, dan tampaknya hal ini lebih menonjol ketimbang perilaku verbal dan non verbal keseluruhan tentara yang agak *serampangan* menurut budaya lokal.

Antar sesama pasukan, perbedaan budaya tidak begitu merisaukan karena mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu di daerah asal yang plural, tetapi *geger budaya* tidak dapat dihindarkan pada orang-orang Sunda yang hampir seluruhnya beragama Islam dan berciri budaya *halus*. Rumpang budaya itu melahirkan kesan dan stereotipe baru "Orang Batak kasar amat sih" (Simandjuttak, 1972). Terlepas dari letak sudut pandang masyarakat lokal, pada dasarnya pasukan Batalion Malau, bukan pasukan yang bersifat komformitas, walaupun kenyataannya demikian kesan yang tertangkap oleh masyarakat lokal.

Batalion Bedjo, pasukan kedua yang mendarat di Jawa Barat pada tahun 1951 lebih integratif dengan masyarakat lokal, sehingga *dalam waktu setahun sudah bebera-*



pa orang yang menikahi gadis setempat¹. Oleh karena penempatan lokasi yang berbeda, etnosentrisme masyarakat yang dikuatkan oleh pasukan terdahulu tidak berubah.

Dari dulu hingga sekarang kebanyakan para perantau Batak merupakan perantau menetap. Pada mulanya mendapatkan lahan pertanian yang subur dan lebih luas adalah alasan mereka merantau. Inilah misalnya yang melatarbelakangi perpindahan orang Tapanuli Utara ke Simalungun dan ke Aceh Tenggara, perpindahan orang Tapanuli Selatan ke daerah Panti di Pasaman Sumatera Barat, dan perpindahan penduduk dari wilayah Tapanuli ke Sumatera Timur (Pasaribu, 1993).

Tampaknya sejak abad-19 terjadi revolusi migrasi dari fase *splended isolation* yang berlangsung ribuan tahun itu. Adalah menarik untuk mempelajari catatan intensitas migrasi di atas. Apa yang melandasi migrasi mereka sedemikian gencar dan unik, merupakan pertanyaan pokok. Orientasi nilai *maranak sampulu pitu marboru sampulu onom* (berputra 17 dan berputri 16) telah lebih lama hadir dalam kehidupan Batak, mungkin merupakan salah satu determinan tekanan aktual terhadap lahan pertanian. Tetapi jika alasan ini diterima, adalah meragukan untuk membenarkan akibat dari tekanan itu yang sedemikian berkembang secara alamiah dalam rentang waktu satu setengah abad, sementara lahan tetap tersedia sampai tahun-tahun belakangan.

Kegiatan mengembara *marjajo* (Pelly, 1992) atau *marjalang* (Cunningham, 1957) pernah terbentuk pada orang Batak Tradisional. Jalang (*marjalang*, menunjuk pada kegiatan bekerlana, berjalan) dalam Bahasa Toba dikontaskan dalam mobilitas geografis yang terbatas pada lokasi sekitar huta---dekat atau jauh--- ditilik dari segi luas tidak terlihat sebagai kegiatan merantau sama sekali (Pasaribu, 1993). Ini sesuai pernyataan Naim (1971) bahwa orang Batak terlambat muncul ke kancah pergaulan antar budaya.

1. Wawancara bebas dengan informan, seorang istri mantri kesehatan pada pasukan Batalion Bedjo yang ikut diberangkatkan bersama pasukan. Tanggal 28 Maret, 1994.

VI. HASIL PENELITIAN

Telaah pola migrasi yang dimaksudkan dalam tema penelitian ini, akan diuraikan ke dalam empat bagian: *pertama*, sistematika migrasi; menggambarkan gelombang migrasi dari daerah asal, komposisi ruang daerah asal migran (kecamatan-kecamatan di Tapanuli Selatan), karakteristik pelaku migrasi, alasan-alasan melakukan migrasi, migrasi antara, komposisi penempatan daerah-daerah tujuan (kecamatan-kecamatan di Kota Bogor) termasuk alasan-alasan memilih kota ini sebagai kota tujuan. *Kedua*, pola adaptasi meliputi proses-proses penyesuaian dalam konteks komunikasi antar budaya, arah penyesuaian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya,. *Ketiga*, pola sikap dan tindakan migran terhadap daerah asal, suatu perkiraan dampak secara langsung maupun tidak langsung dari peristiwa migrasi. *Keempat* migrasi dan *Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Marsipature Hutana Be (GPDT-MHB)*. Dua bagian terakhir masing-masing diletakkan pada bab tersendiri.

Data yang dipergunakan meliputi semua hasil wawancara pada survei pertama, survei kedua, pengamatan lapang, kasus-kasus individu dan kelompok. Data dari hasil survei pertama kebanyakan digunakan untuk bagian karakteristik individu dan peta perpindahan, sedangkan data yang lain digunakan untuk bagian-bagian selanjutnya. Catatan lain untuk bagian karakteristik individu adalah metoda pengambilan sampel yang *purposive* pada migran laki-laki dan menikah. Jadi, data yang diperoleh tidak sepenuhnya representatif untuk menjelaskan keseluruhan peristiwa migrasi terutama untuk kelompok migran yang belum menikah. Namun demikian, pengambilan responden secara sengaja pada migran berstatus menikah, cukup memungkinkan untuk menduga karakteristik migran di luar itu.

A. Sistematika Migrasi

Batasan perpindahan penduduk dalam tulisan mengacu kepada konsep migrasi sistematis Goldscheider (1981) yakni seseorang yang berpindah ke suatu tempat melewati wilayah geografis dan administrasi tertentu (kabupaten) dalam jangka waktu tertentu (penelitian ini menetapkan minimal 6 bulan), tanpa memandang apakah perpindahan

itu *remigrasi* atau *migrasi berantai*. Dasar pemikiran menggunakan kabupaten sebagai tapal batas administrasi berkaitan dengan konsekuensi sosial yang akan diterima migran perbedaan budaya dan aspek-aspek sosial lainnya. Dalam hal ini Tapanuli Selatan dipandang sebagai satu kesatuan sistem, yang memiliki sistem budaya yang relatif homogen, yaitu masyarakat Angkola-Mandailing.

Jumlah reponden terlibat dalam survei pertama penelitian ini berjumlah 200 orang, mencakup 25 orang berpindah pada setting pertama (sebelum tahun 1966), 59 orang setting kedua (1966-1979), dan 116 orang setting ketiga (1980-1993).

1. Migrasi Dari Tapanuli Selatan

Orang Batak Angkola Mandailing yang mendiami Kota Bogor sebagian besar berpindah dari Tapanuli pada zaman Orde Baru. Migran perpindahan zaman sebelumnya hanya sedikit menempati Bogor, tetapi ada diantaranya yang migrasi sebelum zaman kemerdekaan. Ketika itu angkutan laut merupakan jalur utama penyeberangan ke pulau Jawa. Selain migrasi langsung ke kota Bogor ada juga yang terlebih dahulu melewati kota-kota di Sumatera sekedar singgah atau pun bekerja di instansi pemerintah (guru dan kerani-kerani). Hambatan geografis benar-benar menjadi penghalang untuk mencapai tujuan. Mereka umumnya termasuk migran generasi pertama yang mempunyai tujuan khusus melakukan migrasi yaitu melanjutkan studi setelah menamatkan sekolah di sekolah-sekolah raja *Kweekschools* di Tapanuli Selatan. Keresidenan Tapanuli saat itu menjadi salah satu konsentersasi penyediaan fasilitas pendidikan rakyat di Sumatera, sehingga sebagian lulusannya dipekerjakan sebagai guru di sekolah-sekolah rakyat di Sumatera bagian tengah. Migran generasi pertama yang menuju Kota Bogor sebagian besar telah meninggal dunia, sedangkan yang tersisa sudah berumur lanjut¹.

Migran tertua yang tercakup dalam responden berpindah Tahun 1941, seorang ahli konservasi alam yang bekerja sejak zaman Belanda. Migran ini merupakan kalan-

1. Wawancara bebas dengan informan N, Tanggal 20 Agustus 1993.



gan marga huta dari *bagas godang* (istana kerajaan) dan langsung menuju Bogor untuk melanjutkan pendidikan. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia jumlah migran dari Tapanuli terus bertambah, tidak sulit mencari *halak hita* (orang kita¹) di Kota Bogor dan sekitarnya.

Gelombang migrasi dari Tapanuli Selatan yang sampai ke Bogor belakangan ini mengalami regionalisasi ditunjukkan oleh kecamatan daerah asal migran yang tidak terdistribusi secara merata. Proporsi kecamatan tertentu dominan, sementara kecamatan yang lain ada yang tidak turut menyumbang migran. Dari 20 kecamatan di Tapanuli Selatan ada enam kecamatan yang tidak tercatat sebagai daerah asal migran.

Tabel 28. Distribusi Migran Menurut Kecamatan Daerah Asal, Tahun 1993.

Kecamatan	Jumlah	Persentase
1. Kotanopan	124	64.0
2. Panyabungan	15	7.5
3. Sipirok	10	5.0
4. Pd. Bolak	10	5.0
5. PSP Selatan	2	1.0
6. PSP Timur	4	2.0
7. PSP Barat	5	2.5
8. PSP Utara	5	2.5
9. Batang Toru	6	3.0
10. B. Angkola	6	3.0
11. B. Natal	2	1.0
12. Barumon	2	1.0
13. B. Tengah	1	0.5
14. Siabu	8	4.0
15. 6 Kecamatan	0	0.0
Jumlah	200	100.0

Sumber : Data Primer

Kecamatan-kecamatan daerah asal migran hampir semua berada di lintasan trans Sumatera, sedangkan kecamatan yang tidak tercatat sebagai daerah asal berada di luar jalur itu. Kecamatan-kecamatan yang ibukotanya berada di lintasan trans Sumatera

1. *Halak hita* Bahasa Tapanuli merupakan kata ganti yang biasa digunakan oleh Orang Batak menunjuk pada in-grup.

adalah Kecamatan Padang Bolak (Gunung Tua), Kecamatan Sipirok (Sipirok), empat Kecamatan di wilayah Padang Sidempuan, Kecamatan Siabu (Siabu), Kecamatan Batang Toru (Batang Toru), Kecamatan Batang Angkola (Pintu Padang), Kecamatan Panyabungan (Panyabungan), dan Kecamatan Kotanopan (Kotanopan). Derajat keterpencilan kecamatan dari jalan trans Sumatera bergandengan karakteristik pertumbuhan ekonomi wilayah; pedalaman relatif lebih lambat berkembang dibanding daerah sekitar jalur ekonomi.

Sebagian besar (64.0 persen) responden berasal dari Kecamatan Kotanopan diikuti oleh kecamatan tetangganya Panyabungan 7.5 persen. Migran yang berasal dari Kecamatan Sipirok dan Padang Bolak masing-masing 5 persen, Siabu 4 persen, empat kecamatan di wilayah Padang Sidempuan (Barat, Timur, Utara, dan Selatan) 8 persen, dan selebihnya 8.5 persen berasal dari 5 kecamatan lainnya. Kecamatan yang tidak tercatat sebagai daerah asal migran adalah Kecamatan Sosa, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Dolok, Kecamatan Sipirok Dolok Hole, dan Kecamatan Natal.

Kecamatan Kotanopan menjadi sebuah pengecualian dalam jumlah pelaku migrasi menuju Bogor. Jumlah migran yang besar dari kecamatan ini berkaitan erat dengan terbukanya kesempatan bekerja di sektor perdagangan kelontong yang banyak diminati oleh migran asal Kecamatan Kotanopan. Tanpa memperhitungkan migran di sektor perdagangan kelontong jumlah migran dari Kecamatan Kotanopan relatif tidak berbeda dengan kecamatan lainnya.

Jumlah migran tidak merata menurut kecamatan daerah asal dan ada kecamatan yang tidak menyumbang migran, hampir tidak mungkin untuk mengangkat kecenderungan itu kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum bahwa tingkat migrasi berdasarkan daerah kecamatan asal di Bogor berlaku representatif untuk semua daerah tujuan perpindahan. Dengan kata lain kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai suatu kejadian yang kebetulan atau spesifikasi rantau tujuan berdasarkan daerah asal.

2. Karakteristik Migran

Bagian ini akan menguraikan ciri-ciri demografis dan sosio demografis perilaku migrasi. Uraian ciri-ciri demografis dan sosio demografis ditujukan untuk menguji hipotesis bahwa: *Ada hubungan karakteristik individu dengan terjadinya migrasi dan Ada hubungan setting dengan karakteristik pelaku migrasi*. Hipotesis pertama berupaya menjawab keterkaitan karakteristik individu dengan migrasi tanpa memperhatikan perubahannya sepanjang waktu perpindahan, sedangkan hipotesis kedua mengidentifikasi perubahan berdasarkan waktu perpindahan. Pengujian kedua hipotesis dilakukan secara bersamaan karena masing-masing saling berhubungan.

Data lapang yang melibatkan 200 responden kepala rumahtangga dari berbagai lapisan menunjukkan bahwa pada umumnya mereka berasal dari pedesaan atau desa *rural*. Hampir semua mengakui pernah bekerja di bidang pertanian, bersawah atau berkebun, sebagai petani pengelola atau sebagai pekerja keluarga membantu orang tua. Pekerjaan pertanian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pedesaan Tapanuli Selatan. Sebagian besar responden dapat menjelaskan secara detail bagaimana sistem pertanian yang diterapkan serta memahami tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan tersebut.

Dalam proporsi yang lebih kecil ada juga responden yang menyebutkan pekerjaan utama orang tuanya berada di luar pertanian, seperti pegawai negeri, pedagang, pengrajin, dan ABRI. Akan tetapi pekerjaan pertanian bukan kegiatan yang asing bagi keluarganya karena adakalanya bertani merupakan sumber nafkah tambahan selain pekerjaan utama di atas. Ketika salah satu orang tua bekerja di kantor atau berdagang ---ayah atau ibu--- yang lain turut mencari nafkah yang terbuka luas tersedia di bidang pertanian.

Dengan demikian, migrasi, selain merupakan peristiwa mobilitas geografis tetapi juga sebagai mobilitas sosial dari pelaku sektor pertanian pedesaan menuju ke sektor non pertanian di perkotaan. Mobilitas sosial berupa perubahan status warga

masyarakat ditandai dengan adanya keinginan individu untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan di mata masyarakat (Wariso, 1987).

a. Marga dan Marga Huta

Ada 17 marga berpartisipasi dalam migrasi, yaitu Nasution, Lubis, Rangkuti, Siregar, Tanjung, Batubara, Daulay, Parinduri, Hasibuan, Pohan, Pulungan, Ritonga, Hutasuhut, Simatupang, Pane, dan Pasaribu. Marga-marga tersebut merupakan marga yang tidak asing di Tapanuli Selatan dan nampaknya cukup representatif dipandang dari sudut marga. Jumlah terbesar adalah marga Nasution (28 persen), Rangkuti (14 persen), dan Lubis (17.5 persen), umumnya berasal dari Kecamatan Kotanopan dan Panyabungan yang tergolong daerah Mandailing. Selain itu, marga-marga dari Mandailing yang tercakup sebagai responden adalah Batubara (8.5 persen) Pulungan (6.0 persen) dan Parinduri (3.0 persen). Jika marga-marga di atas digabungkan berarti mencakup 80 persen dari total migran, menggambarkan kesamaan dengan dominasi Kecamatan Kotanopan dan Panyabungan (wilayah kebudayaan Mandailing) sebagai daerah asal migran. Meskipun demikian ada juga migran yang bermarga Mandailing yang mengaku berpindah ke daerah Angkola seperti daerah Padang Sidempuan, Batang Angkola, dan Siabu. Sebelum melakukan migrasi mungkin orang tua mereka telah berpindah ke daerah Angkola.

Tabel 29. Distribusi Migran Menurut Marga.

No.	Marga	Jlh	%	No.	Marga	Jlh	%
1.	Nasution	56	28.0	10.	Pohan	2	1.0
2.	Lubis	28	14.0	11.	Pulungan	12	6.0
3.	Rangkuti	35	17.5	12.	Ritonga	2	2.0
4.	Siregar	14	7.0	13.	Hutasuhut	1	1.0
5.	Tanjung	4	2.0	14.	Harahap	11	5.5
6.	Batubara	17	8.5	15.	Simatupang	2	1.0
7.	Daulay	5	2.5	16.	Pane	1	0.5
8.	Parinduri	6	3.0	17.	Pasaribu	2	1.0
9.	Hasibuan	2	1.0				

Sumber : Data Primer, 1993.

Migran bermarga Harahap sebesar 5.5 persen, Siregar 7 persen; Hasibuan, Pohan, Ritonga masing-masing satu persen. Kebanyakan berasal migran ini dari daerah Angkola dan Padang Lawas sebagai wilayah kebudayaannya, tetapi ada juga yang berpindah dari Mandailing. Migran yang bermarga Pasaribu, Hutasuhat, dan Simatupang mengaku berasal dari Tapanuli Selatan dan mendiami daerah-daerah perbatasan Angkola dengan Toba, yaitu Kecamatan Sipirok dan dan Kecamatan Batang Toru. Ketiga marga terakhir memang banyak berdiam di Tapanuli Selatan tetapi populasi terbanyak dari marga-marga itu dapat ditemukan di wilayah kebudayaan Batak lainnya.

Uraian di atas menerangkan, daerah asal migran tidak identik lagi dengan wilayah kebudayaan. Dengan kata lain *mixing population* dan pelintasan batas wilayah kebudayaan sudah banyak terjadi di daerah asal, Tapanuli Selatan.

Tabel 30. Hubungan Setting Migrasi Dengan Status Marga Huta.

Status Migran Dalam Huta atau Desa Asal	Setting Migrasi						Keseluruhan	
	(I)		(II)		(III)			
	Sebelum 1966		1966 - 1979		1980 - 1993			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Marga Huta	19	76.0	31	52.5	60	51.7	110	55.0
2. Bukan Marga Huta	6	24.0	18	30.5	42	36.2	66	31.0
3. Tidak tercatat	0	0.0	10	17.0	14	12.1	24	12.0
J u m l a h	25	100.0	59	100.0	116	100.0	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Lebih dari separuh (55 persen) responden merupakan orang-orang asli marga huta atau orang-orang seketurunan dengan marga pemilik huta. Selebihnya, 33 persen termasuk sebagai pendatang atau memiliki marga yang berbeda dengan marga huta yang ditinggalkannya dan 12 persen tidak teridentifikasi. Migran yang dimasukkan dalam kategori terakhir adalah gabungan dari : (1) Responden sama sekali tidak mengetahui marga huta asal; (2) Responden berpindah dari desa *urban* yang penduduknya majemuk, seperti ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, sehingga

tidak jelas atau tidak diketahui lagi marga yang pertama membuka huta.

Besarnya peran marga huta dalam migrasi sedikit banyak dapat menjelaskan kondisi komunitas huta yang belum sangat heterogen dan bila hal ini terjadi berarti penemuan ini tidak dapat menjelaskan hubungan marga huta dengan migrasi keseluruhan. Artinya tidak dapat disimpulkan bahwa kalangan marga huta lebih banyak melakukan migrasi atau sebaliknya.

Data di atas lebih berarti untuk menjelaskan pergeseran peran marga huta dalam peristiwa migrasi menurut *setting*. Tanpa memperhatikan migran *tidak tercatat*, lebih dari dua pertiga (76.0 persen) peristiwa migrasi *setting* pertama dari Tapanuli Selatan berasal dari kalangan marga huta, sedangkan *setting* kedua dan seterusnya hanya sedikit di atas separuh. Uji beda proporsi memperlihatkan nilai X^2_{Hitung} , $db=4$ sebesar 7.53, tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada $\alpha=0.05$, tetapi berada dalam selang kecenderungan berbeda. Artinya peran migran bukan marga huta cenderung menguat pada *setting* pindah belakangan. Ini sesuai dengan kenyataan sejarah bahwa sejak revolusi sosial di Sumatera Timur *putra mahkota huta* umumnya tidak dipersiapkan lagi untuk menerima *huta* teritorial tetapi lebih diarahkan untuk mengecap pendidikan di luar Tapanuli (Diapari, 1988). Perkembangan belakangan tuntutan pendidikan sudah menjadi milik semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang terbuka kesempatan untuk sekolah. Disamping itu motivasi migrasi tidak lagi terbatas pada pendidikan tetapi menjangkau motivasi lain seperti mencari pekerjaan dan sebagainya.

Data kuantitatif status ekonomi migran sebelum melakukan migrasi. Dalam penelitian migrasi sirkuler atau komuter di Pulau Jawa status ekonomi migran meninggalkan desa asal lazim diukur dengan menggunakan indikator luas pemilikan lahan. Tanah memberi status yang tinggi pada masyarakat pedesaan (Temple, 1976).

Dalam penelitian ini status pemilikan lahan juga dipandang penting, tetapi tidak dapat dibangkitkan secara signifikan oleh karena keterbatasan metodologis *recall*. Meskipun lingkungan pertanian berperan mewarnai latar belakang dan siklus hidup

migran, hanya sebagian kecil yang mengetahui secara pasti luas lahan pertanian yang dimilikinya. Pengetahuan responden yang minim dalam pemilikan tanah disebabkan oleh: *pertama*, batas-batas tanah milik masyarakat di daerah asal, khususnya tanah-tanah non sawah tidak defenitif. Batas-batas tanah ulayat biasanya menggunakan pohon hidup, lembah, bukit atau sungai (Diapari, 1987). Disamping itu, ukuran luas lahan basah masih menggunakan ukuran lokal yang berbeda-beda, misalnya menurut jumlah produksi *lungguk*; atau luas *rante* atau *pastak*. Keragaman ukuran luas ini sulit untuk dikonversi ke dalam satuan luas yang umum; *Kedua*, keterlibatan responden di bidang pertanian hanya sebatas pekerja keluarga dan mereka telah berpindah ke luar desa tidak lama setelah menamatkan sekolah. Akibatnya ingatan dan perhatian terhadap pemilikan tanah serta perubahannya kurang kuat; *Ketiga*, responden menerima tanah warisan setelah dia melakukan migrasi dan ada pula diantaranya yang belum menerima tanah warisan karena orangtuanya masih hidup. Sistem pewarisan tanah yang berlaku menurut fiqih Islam tidak memungkinkan klaim hak milik dari ahli waris sebelum pewarisnya meninggal. Oleh karenanya responden lebih senang untuk memberi jawaban *tidak punya* daripada mencoba membuat kalkulasi dan rekaan terhadap tanah milik orangtuanya. *Kelima*, masih ada tanah adat komunal yang tidak atau belum dibagikan kepada ahli waris, sementara migran secara *de jure* dan *de facto* turut menjadi ahli waris.

Oleh sebab itu, upaya mengidentifikasi status marga huta dilakukan untuk mendekati status pemilikan lahan. Marga huta mengisyaratkan pemilikan huta karena cukup dipercaya bahwa marga huta identik dengan tanah teritorial (Situmorang, 1983; Harahap dan Siahaan, 1987; Hasibuan, 1990). Pendekatan seperti ini tidak terlepas dari keterbatasan karena ukuran marga huta lebih menggambarkan situasi umum dan bukan individu.

Konsekuensi dari perpindahan orang-orang marga huta secara ekonomi berkaitan dengan pemilikan tanah dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Migrasi sangat memungkinkan terjadinya pemilikan tanah *in-absentia* yang kurang menguntungkan baik

dari segi-segi penguasaan dan pemanfaatan, maupun konsevasi lahan.

Perpindahan penduduk internal membawa perubahan dalam komposisi marga yang mendiami huta. Pluralisasi marga yang mendiami huta berjalan lebih intens pada pusat-pusat perekonomian seperti pekan (*poken* atau *onan*), ibukota kecamatan, dan ibukota kabupaten. Daerah pedalaman relatif lebih lambat berubah karena kurang menarik bagi pendatang. Meskipun kepemimpinan masyarakat berada di tangan marga huta, masuknya pendatang ke dalam hutanya menjadi awal dari melemahnya kekuatan kelembagaan tradisional mengatur kepentingan-kepentingan masing-masing. Kontrol sosial sistem kekerabatan dalam sistem sosial. Aspek terpenting dari perubahan komposisi penduduk berdasarkan marga adalah pemilikan dan penguasaan tanah ulayat atau tanah marga. Pendatang menginginkan tanah untuk pertanian, perumahan atau kepentingan lain diperoleh dengan cara menyewa atau membeli kepada pemilik tanah yaitu orang-orang dari marga huta. Pemindahan hak kepemilikan tanah sistem distribusi yang terakhir ini persawahan, berbagai kepentingan yang berbeda antara pendatang.

b. Status atau Bentuk Kepergian

Kepergian pertama kali keluar daerah berlangsung lebih besar secara sendiri-sendiri, baik untuk melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, atau berspekulasi mengadu nasib di rantau. Sejumlah 135 orang responden atau 67.5 persen tidak didampingi oleh

Tabel 31. Distribusi Bentuk Keberangkatan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Pertamakali Menurut Setting Migrasi.

Jenis Keberangkatan	Setting Migrasi						Keseluruhan	
	(I) Sebelum 1966		(II) 1966 - 1979		(III) 1980 - 1993			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Seorang Diri	25	100.0	42	71.2	68	58.6	135	67.5
2. Bersama Org lain	0	0.0	17	28.8	48	41.4	65	32.5
Total	25	100.0	59	100.0	116	100.0	200	100.0

Sumber : Data Primer

orang lain ketika meninggalkan Tapanuli Selatan, sedangkan selebihnya 65 (32.5 persen) berangkat bersama keluarga atau dengan orang lain secara bersama-sama, mengikuti atau diikuti.

Tabel 31. menjelaskan bahwa *perpindahan yang berlangsung dari dari waktu ke waktu semakin banyak dilakukan dengan cara mengikuti atau dikuti oleh orang lain, baik saudara, istri, anak, atau kerabat lainnya. Semua (100 persen) responden perpindahan setting pertama berangkat seorang diri, setting kedua mengalami perubahan dimana hampir sepertiga (28.8 persen) responden berpindah bersama orang lain. Pada setting ketiga perpindahan bersama orang lain bertambah besar hampir berimbang dengan jumlah responden yang berangkat sendirian (58.6 persen berbanding 41.4 persen). Perpindahan bersama orang lain dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : pertama, migrasi mengikuti orang yang telah lebih dahulu melakukan migrasi, misalnya mengikuti saudara atau kerabat; kedua, migrasi bersama orang yang belum pernah melakukan migrasi.*

Pengujian X^2 terhadap Tabel 30, menghasilkan nilai hitung Khi-kuadrat sebesar 16.57 menunjukkan terdapatnya perbedaan yang nyata pada $\alpha=0.001$ dalam bentuk keberangkatan migran menurut setting migrasi. (Nilai $X^2_{db=2;\alpha=0.001} = 9.21$)

c. Keluarga Orientasi

Keluarga orientasi adalah keluarga dimana migran mengalami sosialisasi, mendapatkan pendidikan informal tentang bagaimana bersikap dan bertindak dalam masyarakat (Goede, 1989). Keluarga orientasi terdiri dari dua orang tua (ayah dan ibu) dan beberapa orang anak. Mengacu pada konsep *manjae* (membentuk rumah tangga sendiri) berlaku pada kebudayaan Batak maka jumlah anggota rumahtangga kurang lebih sama dengan keluarga orientasi setelah ditambah dua orang orang tua.

Survei kedua yang melibatkan 117 keluarga (60 keluarga suami dan 57 keluarga istri, tiga orang menikah dengan orang yang bukan berasal dari Tapanuli Selatan) mencatat bahwa jumlah anak dari keseluruhan keluarga 799 orang, rata-rata 6.8 orang perkeluarga. Jumlah anak rata-rata dalam keluarga ini tergolong besar. Dari jumlah



anak dalam keluarga orientasi, kurang dari separuh (349 orang atau 43.55 persen) menetap di Tapanuli Selatan, 13.64 persen (109 orang) berada di luar Tapanuli Selatan tetapi masih di wilayah Propinsi Sumatera Utara dan 42.67 persen (341 orang) berada di luar Sumatera Utara. Keadaan ini menunjukkan tingkat migrasi penduduk khususnya keluarga migran sangat tinggi. Distribusi jumlah anak dari keluarga orientasi migran dapat diperhatikan dalam Tabel 31 berikut.

Tabel 32. Distribusi Jumlah Anak Dalam Keluarga Orientasi Migran (termasuk Migran) Tahun 1993 (N-118).

Jumlah Anak Dalam Keluarga Orientasi Migran	Frekuensi	Persentase	Jumlah
1	3	2.57	3
2	4	3.42	8
3	7	5.98	21
4	9	7.69	36
5	20	17.09	100
6	15	12.82	90
7	17	14.52	119
8	23	19.66	224
9	7	5.98	63
10	5	4.28	50
11	1	0.85	11
12	4	3.42	48
13	2	1.72	26
Jumlah	117	100.00	799

Sumber : Data Primer, 1993.

Tabel 32 menunjukkan, sebagian besar (71.78 persen) migran berasal dari keluarga yang mempunyai anak 4-8 orang. Selebihnya 16.25 persen dan 11.97 persen masing-masing berasal dari keluarga yang mempunyai anak 9-13 dan 1-3 orang. Jumlah rata-rata anak dalam keluarga sebesar 6.8 tergolong tinggi atau kira-kira 7 orang. Memiliki banyak anak adalah salah satu tujuan hidup orang Batak, yaitu *hagabeon*, dimana anak dan kerabat yang banyak merupakan lambang status bagi orang tuanya. *Anakkonki do hamoraon diahu*, (anakku adalah harta atau kekayaan bagiku).

d. Umur dan Status Perkawinan

Migrasi bersifat selektif (Lee, 1966) dan umur merupakan satu-satunya determinan migrasi yang dapat digeneralisasi (Goldsceider, 1984). Penduduk umur muda lebih mobil dibandingkan dengan penduduk golongan umur di atasnya. Hal ini terbukti pada penelitian-penelitian migrasi penduduk berbagai daerah di Indonesia antara lain: Hugo (1981), Mantra (1981), Rusli (1983), dan Abustam (1987).

Dari hasil survei ditemukan, *migran meninggalkan daerah asal rata-rata berusia muda*. Penduduk yang termasuk usia pemuda (angkatan kerja muda) menurut Sudomo (1984) dalam Tjakrawati (1988) adalah 10-34 tahun.

Tabel 33. menunjukkan, umur migran meninggalkan daerah asal terbanyak berada pada kelompok umur 16-25 tahun yaitu 74.5 persen, sedangkan pada kelompok umur 26-35 tahun sebanyak 14.5 persen, yang selanjutnya diikuti oleh kelompok umur 0-15 sejumlah 7 persen dan selebihnya 4.0 persen berada pada kelompok umur 36 ke atas. Berdasarkan kla-sifikasi Sudomo di atas maka distribusi umur migran ini tergolong muda. Umur migran terbesar berada pada kelompok umur di bawah 26 tahun. Kelompok umur 15-25 tahun secara teoritis termasuk dalam angkatan kerja tetapi secara empiris kelompok umur tersebut masih berada dalam segmen transisi dari usia belajar pada pendidikan formal menuju angkatan kerja aktual. Dengan demikian sebagian migran berstatus beban tanggungan ketika melakukan perpindahan.

Tabel 33. Hubungan Setting Migrasi Dengan Umur Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Pertamakali.

Selang Umur	Setting Migrasi						Keseluruhan	
	(I) Sebelum 1966		(II) 1966 - 1979		(III) 1980 - 1993			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Muda 0 - 15	1	2.5	11	18.6	2	1.7	14	7.0
2. Sedang 16 - 25	21	84.0	45	76.3	83	71.6	149	74.5
3. Tua 26 - 35	3	7.5	3	5.1	23	19.8	29	14.5
36 - 45	0	0.0	0	0.0	6	5.1	6	3.0
46 - 55	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5
56+	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5
Jumlah	25	100.0	59	100.0	116	99.8	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Hubungan umur dengan waktu perpindahan terlihat bahwa *semakin lama umur migran semakin bervariasi*. Migrasi tidak hanya berlaku pada penduduk usia muda, tetapi sudah terjadi pada penduduk usia tua. Seleksi umur migran pada periode perpindahan sebelum Tahun 1966 cenderung lebih ketat dari tahun-tahun sesudahnya. Hampir semua migran (96.0 persen) berumur antara 16-36 tahun. Umur perpindahan Tahun 1966-1979 masih terkonsentrasi pada selang umur 16-25 tahun (76.3 persen), tetapi diikuti dengan pelebaran selang ke umur yang lebih muda. Proporsi migran pada tahun 1966-1979 yang berumur di bawah 16 tahun adalah 18.6 persen jauh lebih besar dibanding 2.5 persen pada perpindahan sebelum Tahun 1966.

Umur perpindahan pada selang waktu Tahun 1980-1993 cenderung makin tua, meskipun peran penduduk berusia muda masih dominan. Jumlah terbesar dari migran berumur 15-26 tahun (71.6 persen) diikuti oleh migran umur 26-35 tahun 19.8 persen, umur 36-45 sebesar 5.1 persen dan selebihnya 1.6 persen di berumur di atas 45 tahun. Partisipasi Migran yang berumur di atas 35 tahun tidak ditemukan pada setting pertama dan kedua.

Proses-proses perubahan sistem sosial makro yang bergerak ke arah modernisasi menentukan perubahan demografis (Goldscheider, 1985), termasuk fenomena pergeseran umur dalam peristiwa migrasi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi mempermudah mobilitas geografis masyarakat desa. Nilai Hitung $X^2_{db=2}$ sebesar 11.75, nyata pada $\alpha = 0.01$. (Nilai $X^2_{db=2; \alpha = 0.01} = 9.21$).

Tabel 34. Hubungan Setting Migrasi Dengan Status Perkawinan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan.

Status Kawin	Setting Migrasi						Keseluruhan	
	(I) Sebelum 1966		(II) 1966 - 1979		(III) 1980 - 1993			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Belum Kawin	24	97.5	54	91.5	72	62.1	150	75.0
2. Kawin	1	2.5	5	8.5	44	37.9	50	25.0
3. Duda	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Total	25	100.0	59	100.0	116	100.0	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993

Sebagian besar migran (73.0 persen) berpindah pertama kali dengan status belum kawin; berlaku pada semua setting perpindahan. Meskipun demikian pada tahun-tahun belakangan terlihat kecenderungan perpindahan berstatus menikah makin besar. Pada periode sebelum tahun 1966 jumlah migran yang menikah ketika melakukan migrasi hanya satu orang atau 2.5 persen dari seluruh kejadian migrasi pada setting itu. Selanjutnya pada periode 1966-1979 jumlahnya meningkat menjadi 8.5 persen (5 dari 59 orang) dan secara drastis menjadi 37.9 persen (44 dari 116 orang) pada periode 1980-1993. Kecenderungannya hampir sama dengan bentuk keberangkatan dimana semua (25 orang) migran berangkat seorang diri pada periode pertama (sebelum 1966), 28.8 persen pada periode kedua (1966-1979), dan 41.4 persen pada periode terakhir (1980-1993). Nilai Hitung $X^2_{db=2}$ sebesar 24.81, nyata pada $\alpha = 0.001$. (Nilai $X^2_{db=2; \alpha=0.001} = 13.82$). Ini menandakan terjadinya pergeseran status perkawinan melakukan migrasi dari dominasi bujangan menjadi berimbang antara bujangan dan menikah.

Uraian data di atas mengisyaratkan, pada tahun-tahun belakangan derajat keragu-raguan dalam pengambilan keputusan migrasi semakin kecil. Orang-orang yang berpindah pada periode pertama dapat digolongkan sebagai migran *pioneer* kebanyakan berangkat sendirian ketika pertama sekali melakukan migrasi. Fenomena ini dapat diterangkan dengan semakin transparannya kehidupan rantau bagi calon migran. Informasi daerah tujuan secara akurat diperoleh melalui penuturan para *pioneer* yang pulang ke kampung, tetapi banyak juga yang memperoleh informasi secara tidak langsung dari kerabat atau keluarga yang tinggal di desa.

e. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan memudahkan terjadinya peristiwa migrasi. Faktor pendidikan bukan hanya sebagai motivasi, tetapi juga sebagai faktor seleksi dimana penduduk berpendidikan lebih tinggi relatif lebih mobil ketimbang penduduk berpendidikan rendah.

Tabel 35. Hubungan Setting Migrasi Pendidikan Responden Meninggalkan Daerah Asal Pertamakali.

Tingkat Pendidikan	Setting Migrasi						Keseluruhan	
	(I) Sebelum 1966		(II) 1966 - 1979		(III) 1980 - 1993		Jumlah	%
	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		
Rendah								
1. Tidak Sekolah	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2. Tidak Tamat SD	0	0.0	3	5.1	3	2.6	6	3.0
3. Sekolah Dasar	2	8.0	9	15.2	31	26.7	42	21.0
Menengah								
4. SMTP	9	36.0	27	45.7	35	30.1	71	35.5
5. SMTA	14	56.0	20	33.9	44	37.9	78	39.0
Tinggi								
6. Akademi/Diploma I,II,III	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	1.0
7. Sarjana/S1,S2,S3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5
Jumlah	25	100.0	59	100.0	116	99.8	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Migran yang berpindah pada setting pertama semua berpendidikan menengah, sedangkan setting kedua meski terkonsentrasi pada pendidikan menengah tetapi sudah terlihat peran migran berpendidikan rendah. Seterusnya pada setting terakhir semakin melebar ke tingkat pendidikan rendah dan tinggi. Bila dikaji lebih jauh tingkat pendidikan migrasi setting pertama yang keseluruhan berpendidikan menengah tidak dapat disejajarkan dengan tingkat pendidikan menengah sekarang ini. Pada setting migrasi tersebut dapat disebutkan, masyarakat berpendidikan menengah merupakan lapisan masyarakat tertinggi dari status pendidikan. Jadi tingkat pendidikan menengah saat itu lebih mendekati tingkat pendidikan tinggi saat ini. Sebagai perbandingan, pada tahun 1985 tenaga kerja di Tapanuli Selatan 69.2 persen berpendidikan sekolah dasar, 29.3 persen sekolah menengah, dan 1.5 persen akademi dan universitas.

Nilai Hitung $X^2_{db=2}$ sebesar 5.74, tidak nyata pada $\alpha=0.05$, tetapi masih dapat diterima dalam batas kecenderungan perbedaan proporsi. (Nilai $X^2_{db=2}$; $\alpha=0.10 = 4.60$). Artinya secara kategorikal tingkat pendidikan migran yang berpindah belakangan cenderung lebih bervariasi.

3. Alasan Meninggalkan Tapanuli Selatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk menurut teori *full-push factor* dibedakan atas faktor pendorong dan faktor pelancar, dan menurut teori lain disebutkan adanya faktor pelancar serta faktor pribadi. Faktor pendorong meliputi semua variabel-variabel pengaruh yang ditemui di daerah asal akan diuraikan pada bagian berikut sedangkan faktor pribadi telah diuraikan di atas. Faktor pendorong ini diidentifikasi melalui alasan-alasan migran berpindah dari daerah asal. Alasan-alasan melakukan migrasi dirangkum dalam bentuk respon ganda tertutup yang memungkinkan seorang responden untuk mempunyai lebih dari satu jawaban. Artinya pengambilan keputusan melakukan migrasi tidak hanya dilandasi oleh satu faktor saja tetapi merupakan akumulasi dari sejumlah faktor yang dirasakan sebagai tekanan di daerah asal.

Tabel 36. Alasan-alasan Migran Meninggalkan Tapanuli Selatan Dan Tingkat Pengaruh Masing-Masing Alasan (N=60).

Alasan	Frekuensi	Persentase	Tingkat
1. Tidak tersedia pendidikan yang sesuai.	22	36.7	Sedang
2. Peluang berusaha di sektor non pertanian terbatas.	40	66.7	Kuat
3. Bertani tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik	26	43.3	Kuat
4. Politik/Konflik	8	13.3	Lemah
5. Gut-gut, hosom	11	18.3	Lemah
6. Kewajiban adat terlalu memberatkan	5	8.3	Lemah
7. Ketergantungan antar sesama	6	10.0	Lemah
8. Etos kerja masyarakat rendah	22	36.7	Sedang
9. Merantau mengangakat harga diri	33	55.0	Kuat
10. Lain-lain			
-Mencari Pengalaman dan coba-coba	17	28.3	Sedang
-Ajakan Teman	10	16.7	Lemah
-Bencana Alam	2	3.3	Lemah
Rata-rata	16.8	28.5	
Standar deviasi	11.4		

Sumber : Data Primer, 1993.

Dari Tabel 36 terlihat, ketidakersediaan lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian menjadi alasan migrasi, yang mendapat skor tertinggi (66.7 persen), diikuti oleh anggapan bahwa merantau akan mengangkat harga diri (55.0 persen), bertani tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik (43.3 persen), etos kerja masyarakat yang rendah (36.7 persen), mencari pengalaman (28.3 persen), ajakan teman (16.7 persen), konflik (13.3 persen), karakteristik budaya hosom, gut-gut (8.3 persen) kewajiban adat (13.3 persen), ketergantungan antar sesama (10.7 persen), dan bencana alam (3.3 persen).

Alasan-alasan migrasi kemudian dikategorikan ke dalam tiga tingkatan pengaruh sebagai penyebab migrasi, yaitu kuat, sedang, dan lemah. Penggolongan ini dilakukan secara sederhana dengan menggunakan nilai rata-rata alasan dan standar deviasi Tingkat pengaruh variabel-variabel terukur memperlihatkan bahwa ada empat aspek yang kuat pengaruhnya terhadap peristiwa migrasi, yaitu peluang berusaha non pertanian yang terbatas, bertani tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik, etos kerja masyarakat yang rendah, dan merantau mengangkat harga diri.

Keterbatasan fasilitas pendidikan dan keinginan mencoba-coba (individu) merupakan penyebab migrasi yang termasuk dalam kategori sedang, sedangkan penyebab migrasi yang tergolong lemah adalah sifat budaya hosom dan gut-gut, kewajiban adat, ketergantungan sesama kerabat, dan konflik/politik.

a. Alasan Pendidikan

Pengaruh pendidikan terhadap peristiwa migrasi termasuk dalam kategori sedang. Alasan pendidikan umumnya berkisar pada kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai dan sesuai dengan minat, terutama mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor pendorong keterbatasan pendidikan yang tergolong sedang adalah suatu kewajaran dipandang dari keseluruhan responden tetapi alasan ini relevan bagi mereka yang memiliki karakteristik umur muda atau usia sekolah. Di luar itu, keinginan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi mungkin saja ada tetapi relatif terbatas dibandingkan kelompok usia muda.

Sebagai perbandingan dapat diperhatikan hasil survei pertama, sebanyak 44 orang dari 200 responden (22 persen) mengalami perubahan tingkat pendidikan sesudah melakukan migrasi, 33 (75.00) persen diantaranya terjadi pada mereka yang berumur muda (di bawah 26 tahun). Selebihnya, 25 persen berada pada kelompok umur sedang (26-45 tahun) dan kelompok umur tua tidak mengalami pergeseran tingkat pendidikan. Pergeseran tingkat pendidikan migrasi berlaku pada kelompok umur sedang, patut disangsikan apakah tujuan utama berpindah karena alasan melanjutkan pendidikan ataukah termotivasi kesempatan yang tersedia setelah migrasi.

Pergeseran tingkat pendidikan migran terdiri atas : (1) Tidak Tamat SD-SMA 1 orang (3.0 persen); (2) SD-SMP 2 orang (6.1 persen); (3) Tidak Tamat SD-SMA 1 orang (3.0 persen); (2) SMP-Diploma/ Akademi 3 orang (9.1 persen); (3) SMP-SMA 11 Orang (33.3 persen), (4) SMP-Sarjana 3 orang (9.1 persen), dan; (5) SMA-Sarjana 12 orang (36.4 persen). Pergeseran tingkat pendidikan migran kelompok umur menengah terjadi pada 11 orang responden dengan komposisi sebagai berikut : (1) SMP-sarjana 2 orang (18,2 persen); (2) SMA-Sarjana 6 orang (54.5 persen); (3) SMP-SMA 1 orang (9.1 persen), dan; (4) SMA-Diploma/Akademi 2 orang (18.2 persen). Perubahan tingkat pendidikan terjadi lebih besar pada jenjang pendidikan menengah-menengah dan menengah-Tinggi, artinya migrasi akibat dorongan pendidikan lebih disebabkan oleh kekurangan fasilitas pendidikan menengah dan tinggi di daerah.

Pendidikan merupakan determinan migrasi yang berfungsi mengantarkan pelakunya pada bentuk migrasi peralihan yaitu, berawal dari migrasi peralihan menjadi migrasi permanen. Khusus migrasi dari Tapanuli dilukiskan oleh Pasaribu (1993), sebagai berikut :

Faktor pendidikan mendorong terjadinya perantauan peralihan, yaitu penduduk yang melakukan studi di lembaga-lembaga pendidikan formal dari tingkat rendah sampai tinggi di luar daerah. Dari segi waktu migrasi bersifat sementara tetapi mereka biasanya tidak kembali lagi ke kampung halaman. Ini benar-benar karena desa-desa masih agak banyak yang terpencil di Tapanuli, dan yang lebih penting lagi kebanyakan desa-desa dan kota-kotanya berjauhan dari perguruan tinggi. Tapanuli adalah satu-satunya bekas keresidenan di pulau Sumatera yang tidak terdapat perguruan tinggi dan tidak mempunyai perguruan tinggi negeri. Adapun perguruan tinggi swasta disamping tidak banyak jumlahnya, perguruan



tinggi swasta tersebut dipandang sebagai pilihan kedua. Praktek yang selama ini berlaku di universitas-universitas kabupaten, dimana dosen-dosennya hampir semua dosen luar biasa dan terdiri dari pegawai kantor bupati, dan guru-guru sekolah menengah setempat saja. Perguruan tinggi seperti itu tidak akan mungkin bermutu tinggi.

Pendidikan merupakan salah satu saluran untuk melakukan mobilitas sosial vertikal dan keadaan ini telah melembaga pada masyarakat Tapanuli Selatan sejak pertengahan abad 19. Pemasyarakatan pendidikan moderen yang dipelopori Willem Iskandar rupanya telah begitu melembaga pada masyarakat, melandasi keinginan yang kuat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya sejak saat itu. Struktur penyediaan fasilitas pendidikan di Tapanuli Selatan belum seimbang untuk semua tingkatan seperti uraian data pada sub bab pendidikan (Bab IV). Statistik pendidikan Tapanuli Selatan Tahun 1989 menampakkan, fasilitas pendidikan menengah dan tinggi kurang memadai untuk mengakomodasikan kebutuhan peserta didik dari tingkat yang lebih rendah. Di pihak lain kualitas pendidikan yang ada juga masih rendah karena faktor-faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan kurang memadai. Dalam suasana demikian, mau tidak mau setiap orang yang berkeinginan mengikuti pendidikan bermutu tinggi harus melakukan migrasi ke kota-kota besar di Sumatera atau Pulau Jawa, dimana kebutuhan itu dapat dipenuhi.

b. Alasan Ekonomi

Dalam penelitian migrasi di Pulau Jawa disebutkan tekanan struktural pedesaan yang ditandai oleh munculnya petani tuna kisma dan melemahnya hubungan sosial *patron client* memaksa masyarakat lapisan bawah untuk berpindah ke kota-kota (Siahaan, 1989). Sektor pertanian tidak lagi memberikan alternatif bagi petani untuk menjadi tumpuan harapan. Tekanan pertanian nyata pada kecilnya lahan yang tidak menjanjikan kebutuhan bertahan (*survival*). Masukan teknologi irigasi, bibit unggul, pupuk kimia, mekanisasi terbukti mampu meningkatkan produksi, tetapi pada saat yang sama sistem pembagian lebih menguntungkan tuan tanah atau petani pemilik (Temple, 1976). Dalam bahasa yang berbeda peneliti lain, seperti Sjahrir (1989) menterjemahkan tekanan itu sebagai himpitan politis pamong dan pihak atas desa; kegelisahan ekonomi menurut Hugo (1978), selain mengejar pendidikan (Mantra, 1981).

Peran ekonomi sebagai faktor pendorong migrasi penduduk Tapanuli Selatan dapat dijelaskan dalam dikotomi sektor pertanian dan non pertanian sebagai lahan mata pencaharian masyarakat. Tabel 37 memperlihatkan tekanan kedua sektor terhadap peristiwa migrasi termasuk dalam kategori yang kuat. Artinya perkembangan baik sektor pertanian maupun sektor non pertanian bagi migran sama-sama kurang menjanjikan peningkatan taraf hidup.

Secara makro lahan pertanian di Tapanuli Selatan masih tersedia mencukupi baik lahan basah maupun lahan-lahan kering, antara lain dicirikan oleh kepadatan penduduk yang rendah. Tahun 1990 kepadatan penduduk Tapanuli Selatan menempati urutan terakhir (59 jiwa/km²) diantara 17 DATI II di Sumatera Utara (Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara, 1991). Keadaan ini menguatkan dugaan bahwa pengaruh faktor ketersediaan lahan relatif tidak mempengaruhi migrasi dibandingkan dengan peristiwa migrasi di Pulau Jawa.

Lahan-lahan yang dimiliki rumah tangga tersedia untuk menghasilkan produksi bentuk natura, tetapi daya tukarnya (*term of trade*) terhadap barang-barang luar yang mereka butuhkan tidak seimbang. Intervensi pemerintah dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian *arus utama* dan politik *swasembada beras* menempatkan petani kepada posisi sulit, miskin alternatif, cenderung menekan kreatifitas petani di pedesaan (Lains, 1991). Pada saat kebutuhan petani meningkat cepat akan barang-barang industri kota, salah satunya akibat *demonstrasi effect*, nilai riil produk pertanian yang diterima petani bergerak lambat.

Ketersediaan lahan yang cukup luas jika dikelola dengan teknologi moderen sedemikian rupa akan menghasilkan surplus produksi. Tetapi syarat itu saja tidak cukup untuk menahan penduduk tetap bertahan menggeluti usaha-usaha pertanian. Keberadaan surplus akan benar-benar dinikmati oleh petani bila produk diimbangi insentif harga. Di Tapanuli Selatan terdapat 6 kecamatan (Kotanopan, Muara Sipongi, Muara Soma, Sipiongot, Sipagimbar, Sosa) yang ibukotanya berjarak lebih dari 100 km dari ibukota kabupaten sebagai pusat pasar.

Nasution (1993) memandang posisi wilayah Tapanuli Selatan yang berona agraris kurang strategis dalam konstelasi perekonomian regional. Aksesibilitas daerah terhadap pasar-pasar produk utama yang rendah. Nasution kemudian mencontohkan bagaimana besarnya biaya tataniaga produk Tapanuli Selatan yang harus dikeluarkan petani untuk mencapai kota Medan dan Belawan yang berjarak lebih dari 400 km atau waktu tempuh 8-11 jam. Waktu tempuh yang sama dibutuhkan untuk mencapai Padang dan Pekan Baru. Tanpa memperhitungkan adanya pihak *competitor* beban biaya tataniaga sendiri telah menghilangkan insentif harga yang mungkin diterima petani. Dalam suasana demikian petani-petani akan memprioritaskan tanaman subsisten ketimbang tanaman lain. Pada Tahun 1990 produksi beras Tapanuli Selatan memberikan kontribusi lebih dari 12 persen terhadap total produksi beras Sumatera Utara.

Di lain pihak, pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian sangat terbatas. Bab 4 sebelumnya dengan jelas mengulas bahwa kesempatan kerja di sektor industri sekunder dan tersier tidak lebih dari 10 persen. Perkembangan kesempatan kerja di sektor-sektor non pertanian lebih banyak di sektor industri kecil/rumah tangga (Kantor Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan, 1991).

Di wilayah timur Sumatera Utara (Kabupaten Asahan, Labuhan Batu) sektor pertanian juga mendominasi perekonomian lokal, tetapi ciri pertaniannya berskala *estate* atau perkebunan yang berorientasi pada pasar internasional. Perkebunan mendukung terbentuknya industri-industri hilir yang berfungsi menampung tenaga kerja. Keadaan jauh berbeda dengan wilayah di bagian pantai barat dimana komunitas perkebunannya tersedia sedikit, sekalipun ada bukan menjadi tumpuan pendapatan masyarakat umumnya. Dalam rentang waktu lebih dari satu abad peta perekonomian Sumatera Utara tidak jauh berubah, ekonomi industri berorientasi pasar internasional di pantai timur dan ekonomi agraris berorientasi pasar domestik di pantai Barat--- termasuk Tapanuli Selatan. Hal ini tampaknya sesuai dengan konsep dualisme ekonomi Boeke.

Kegiatan pertanian di Tapanuli Selatan beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup cerah, suatu proses menuju perbaikan sistim pertanian yang selama ini digunakan. Pada tahun 1991 dua buah irigasi besar (Irigasi Batang Gadis dan Irigasi Batang Ilung) di bangun dan akan dapat mengairi sawah ribuan hektar. Keberadaan irigasi teknis di Tapanuli Selatan agaknya berkaitan dengan target pemerintahan untuk mempertahankan swasembada beras. Disamping itu tenaga kerja yang teresap semakin besar karena frekuensi tanam meningkat, pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Bekerjanya irigasi baru ini menjadikan Tapanuli Selatan sebagai lumbung beras bagi wilayah di sekitarnya. Secara ekonomis penggunaan lahan penggembalaan atau sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi teknis adalah menguntungkan bagi petani. Tetapi secara makro berdasarkan prinsip-prinsip keunggulan komparatif pertumbuhan, konversi lahan dan pencetakan sawah beririgasi kurang menjanjikan akselerasi pertumbuhan ekonomi karena apresiasi nilai tukar barang-barang pertanian termasuk beras tidak meningkat. Potensi pasar lokal yang relatif kecil fluktuasi musiman dan transportasi yang mahal sedangkan pasar alternatif sangat jauh menyebabkan biaya tataniaga jauh lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Apalagi pada musim panen harga produk cenderung menurun, sehingga mau tidak mau resiko akibat eksese supply harus ditanggung olah petani.

c. Alasan Sosial Budaya

Dialektika kebudayaan akan menempatkan masyarakat dan kebudayaannya ke dalam fase transisi. Transisi kebudayaan berarti membentuk manusia-manusia sebagai *pasien* dan *agen* kebudayaan. Menurut Kleden (1985^a) transisi kebudayaan mempunyai dua konsekuensi. *Pertama*, perubahan kebudayaan akan lebih mungkin terjadi jika suatu kebudayaan baru tidak ditanggapi sebagai pengaruh yang membahayakan kebudayaan lama, melainkan sebagai kelanjutan dari kebudayaan lama. Sebaliknya jika unsur-unsur kebudayaan baru itu ditanggapi sebagai pengaruh yang membahayakan kebudayaan lama, maka akan timbul resistensi atau penolakan. *Kedua*, semakin dominan masyarakat *pasien* bekerja semakin sulit pula unsur kebudayaan baru mendapat

kemungkinan masuk dan sebaliknya semakin dominan para *agen* bekerja akan semakin terbuka suatu kebudayaan pada pengaruh baru dan perubahan kebudayaan akan lebih mudah terbentuk.

Suatu transisi kebudayaan terlewati dengan mantap dan produktif jika perubahan pandangan dan sistem nilai budaya (domain konitif dan normatif) disertai dengan perubahan organisasi dan landasan material. Keutuhan perubahan terjadi bila faktor-faktor objektif yang terdapat dalam bentuk-bentuk konkrit interaksi yang kemudian dimantapkan dalam organisasi maupun landasan material kebudayaan itu. Kalau terjadi kesenjangan antara landasan kognitif-normatif, material, dan organisasi maka terjadilah disintegrasi, disorientasi sikap atau disorganisasi sosial. Transisi kebudayaan yang terkondisi stabil dan permanen menghasilkan proses involusi, dan sebaliknya apabila transisi terlewati dengan berhasil terbentuklah reorganisasi, reorientasi, dan reintegrasi kebudayaan (Kleden, 1985^b).

Ulasan di atas diterjemahkan ke dalam kebudayaan Batak yang transisif sebagai modal pembentukan migrasi penduduk dari sistem kebudayaan itu. Migrasi bukan satu-satunya tindakan/respon penduduk terhadap fase transisi budaya, tetapi transisi berperan mengubah dimensi interaksional masyarakat. Oleh sebab itu, titik tolak pengamatan bertumpu pada aspek-aspek sosial budaya, dimensi-dimensi interaksional suatu sistem kebudayaan yang transisif. Pengaruh-pengaruh eksternal dan internal yang dapat diamati sejak abad ke 19 (Perang Padri, Kolonialisme, sistem pendidikan moderen, kapitalisme dan monetasi, globalisasi informasi, penurunan basik material relatif akibat pertumbuhan penduduk) berpotensi menggeser kebudayaan ke dalam fase transisi, dan melahirkan masyarakat *pasien* dan *agen* kebudayaan.

Masyarakat Batak tradisional memiliki sistem kekerabatan *dalihan natolu*, mengajarkan pentingnya azas resiprositas yang totalitas. Kecuali itu *huta* yang dikenal pada masyarakat Batak tradisional memiliki mekanisme distribusi sumber-sumber hidup dengan landasan konsepsional yang sama, resiprositas atau *take and gave*. Di alam kontemporer yang beranjak sedemikian rupa dari *setting* Batak tradisional, hubungan

berpola individualisme kemungkinan muncul sebagai landasan kognitif antitesis resiprositas.

Dalam masyarakat petani hubungan-hubungan antar rumah tangga berfungsi untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan-kepentingan unit-unit yang berpartisipasi dan kepentingan korelasi-korelasi yang mengikat kaum petani kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam hubungan itu upacara adat atau seremoni mempunyai fungsi yang lebih khusus dalam rangka memberi pengesahan unit-unit sosial dan interaksi diantara mereka (Wolf, 1983). Bila dalam masyarakat terbentuk *pasien* dan *agen* disinilah munculnya migrasi sebagai sintesis keadaan transisi. Migrasi berlangsung dari suatu sistem untuk mendapatkan basik material dan organisasi di luar sistem yang sesuai dengan landasan basik kognitif-normatif baru yaitu individualisme.

Faktor pendorong migrasi dari segi sosial budaya yang terangkum dalam Tabel 37 meliputi 5 unsur, yaitu : kewajiban adat, gut-gut dan hosom, konsep repositas, etos kerja, nilai-nilai merantau. Dua aspek terakhir termasuk dalam kategori kuat mendorong migrasi, sedangkan tiga aspek lainnya berada dalam kategori lemah. Satu faktor lagi yang termasuk dalam faktor sosial budaya adalah konflik/politik tergolong lemah.

Hubungan sosial dalam kompleks kegiatan adat *siluluton siriaon* berlangsung intensif pada masyarakat Batak Angkola Mandailing disebabkan kekerabatannya yang luas baik kekerabatan yang terbentuk dari jalur genealogis (marga), maupun hubungan perkawinan. Setiap posisi yang ditempati memberi konsekuensi peran individu atau keluarga dalam kegiatan adat. Dengan demikian seseorang mempunyai kewajiban menunaikan perannya, yang berarti menyangkut pengeluaran sumber daya keluarga natura, innatura, dan waktu yang bersifat konsumtif. Pada kondisi tekanan penduduk yang meningkat terhadap sumber-sumber ekonomi, penetrasi kapitalistik, dan pengaruh eksternal lainnya, kewajiban adat boleh jadi menjadi baban yang berkonsekuensi ekonomi bagi lapisan masyarakat tertentu. Peran kewajiban adat dalam mendorong migrasi masuk dalam kategori lemah, namun betapapun kecilnya, aspek ini tampaknya cukup berarti untuk menjelaskan disfungsi kebudayaan tradisional dalam era

perubahan. Kategori lemah yang muncul pada faktor kewajiban adat tidak bermakna untuk mewakili semua migran, karena perbedaan karakteristik sosio demografis, khususnya status perkawinan. Kewajiban adat secara langsung lebih banyak berlaku bagi individu yang (menikah) *diparaja* sebelum migrasi.

Huta adalah unit dasar dari kehidupan masyarakat di Tanah Batak. *Huta* mengandung makna sebagai tempat hidup sekelompok orang dalam ikatan genealogis yang saling terikat satu sama lain dan mempunyai fungsi yang sangat luas dalam segala aspek kehidupan. Memahami *huta* sebagai unit dasar masyarakat Batak tidak dapat dipandang hanya dari gambaran saat ini melainkan harus memperhatikan dimensi historis dimana beberapa faktor yang bersifat eksternal telah mewarnai kehidupan *huta*. Organisasi komunitas desa yang terpadu atas dasar hubungan sosial dan prinsip-prinsip moral cenderung eksplosif jika ekonomi kapitalis menekan ke dalam sistem ekonomi petani yang subsisten. Rumah tangga sebagai kesatuan produksi mengalami restrukturisasi dan reorientasi dari moral subsistensi menuju moral monetasi.

Pembangunan pedesaan paling tidak dihadapkan pada masalah sifat hubungan impersonal dan akurasi intervensi pemerintah (Prayitno, 1985). Perhitungan-perhitungan terhadap ikatan sosial mengendor digantikan oleh individualisme yang terus mengakar. Pranata sosial dapat dilaksanakan apabila komunitasnya terpadu dalam sistem sosial yang solid. Dalam sistem sosial demikian manusia akan menyesuaikan diri sekuat mungkin dengan norma-norma yang ada tanpa berusaha untuk menghindari jika berada dalam sistem sosial tersebut.

Perpaduan tekanan ekologis, faktor eksternal dan nilai budaya tradisional menghasilkan rona kehidupan masyarakat stagnan, seperti deskripsi *huta* di salah satu bagian Tapanuli Selatan berikut ini :

Irama kehidupan desa di hamparan dataran rendah padang rumput, luas dan miskin air, miskin vegetasi, berlangsung monoton dan kurang dinamis. Tetapi di atas tanah itu sejumlah nadi menggantungkan denyutnya, mengalirkan sumber-sumber hidup rumahtangga-rumahtangga dan biaya anak-anak yang bersekolah di tingkat lokal atau jauh di seberang lautan. Potret keperihatinan *huta* terlihat jelas saat alam kurang bersahabat, musim hujan dan musim panen *taon godang* terlewati.



Pagi-pagi matahari terasa terlalu cepat terbit karena cahaya tidak banyak mendapat halangan dari pepohonan diikuti hembusan angin pada sore hari menguapkan air dan menguras tabungan air di tebat-tebat kecil yang sengaja dibangun untuk menampung surplus air kala musim hujan. Rumah-rumah penduduk ditata renggang satu sama lain berjajar berada ratusan meter di sebelah sungai kecil memanjang dan jarang, menghadap langsung ke arah datangnya matahari. Hanya pohon tahunan seperti kelapa, kapuk atau mangga sebagai pembatas terpaan panas.

Ibu-Ibu rumahtangga sibuk menyiapkan makanan di dapur; anak-anak bersiap-siap berangkat ke sekolah; sementara kaum Bapak selepas subuh *ngantor* menikmati secangkir kopi di warung-warung kecil *ngobrol---* tentang dunia mereka sampai dunia orang lain yang ditangkap melalui siaran Televisi; Saddam Husein, Kebijakan ekonomi Klinton --- mengikuti pergerakan matahari hingga jauh di atas kepala. Sebahagian lelaki menghalau kerbau atau lembu dari kandangnya, dilepas ke *padang-padang* begitu saja pada musim *taon holang*. Pada musim ini, di siang hari pemilik ternak dibebaskan dari kewajiban menggembala, tetapi tetap harus mengandangkannya sejak sore hari agar tidak mengganggu tanaman orang lain.

Ketika kegiatan dalam rumah selesai, ibu-ibu satu demi satu mulai dengan aktivitas tradisionalnya menuju sawah atau kebun mereka yang berada di sekitar huta atau ke tempat yang jaraknya beberapa kilometer. Sebuah keberuntungan dapat bertanam padi pada musim *taon holang* dan kesempatan ini tidak akan disia-siakan karena tidak semua keluarga bisa memperoleh lahan dengan sumber air yang mencukupi. Tidak ada keluhan dengan irama hidup seperti ini. Ibu-ibu menjadi semacam pemandu bagi anggota keluarganya agar tetap bekerja di waktu *luang* musim kering ini. Dengan menggendong si kecil di punggung sambil mengapit *haronduk* (tas dari anyaman pandan) ada kalanya harus pula menjunjung karung atau ember berisi segala macam keperluan *nyawah* di atas kepalanya menuju lahan pertanian.

Kaum Bapak baru akan ke sawah ketika matahari menurun ke senja, selepas makan siang yang ditanak istrinya yang telah kembali dari sawah.

Gambaran seperti ini dibenarkan dalam Kongres *Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna di Jakarta Sahumaliangna* Tahun 1992 di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Paternalisme menempatkan urusan-urusan domestik terdiferensiasi antara lelaki (suami) dengan wanita (istri) dan dalam perspektif produktifitas kurang menguntungkan ekonomi keluarga. Lelaki meraja dalam keluarga prokreasi; dalam aristokrasi *anak-anak raja* menjadikan dirinya sebagai pengendali lembaga yang tidak perlu dimanifestasikan dalam bentuk tenaga fisik. Kolektifitas dalam keluarga-keluarga membentuk rona lingkungan sosial yang tidak kondusif untuk mencukupi landasan material kebudayaan dan keadaan demikian menguatkan peran migrasi sebagai media

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

emansipatoris. Goldsceider (1985) memandang kejadian seperti ini sebagai migrasi yang berpola inovatif.

d. Alasan lain.

Bedol desa, akibat kekhawatiran meletusnya gunung Sorik Merapi terjadi di kampung-kampung disekitar gunung tersebut. Desa-desa sekitar gunung yang terancam semburan lahar panas antara lain adalah Desa Sibanggor dan sekitarnya yang merupakan bagian dari Kecamatan Kotanopan. Secara keseluruhan saat ini keluar yang memilih Bogor sebagai tempat tujuan kurang lebih kira-kira 200 kepala keluarga¹.

Migrasi dari Tapanuli Selatan ada juga yang terdorong oleh *referensi* teman atau saudara. Ini menunjukkan orang lain berperan dalam pengambilan keputusan individu untuk melakukan migrasi.

4. Perubahan Alasan Migrasi

Alasan keluar daerah asal hanya ada tiga yang kuat dan konsisten mempengaruhi motifasi migrasi pada setiap *setting* yaitu, pandangan terhadap kebiasaan merantau sebagai saluran mobilitas sosial ekonomi keengganan bekerja di sektor pertanian, dan peluang berusaha diluar sektor pertanian yang sedikit. Alasan selebihnya termasuk dalam kategori sedang dan cenderung menguat pada mereka yang berpindah belakangan. Artinya tekanan migrasi semakin lama terus mengalami perumitan, bukan hanya pada tekanan *tradisional* tapi juga tekanan-tekanan yang datang kemudian. Pengaruh dorong migrasi yang berkembang belakangan tampak pada kompleks faktor sosial budaya seperti nilai-nilai kegiatan adat, hosom, late, gut-gut, dan konflik. Keadaan seperti itu menunjukkan ketidakstabilan kehidupan masyarakat desa belakangan ini.

Pandangan dan anggapan, merantau mengangkat harga diri berjalan stabil sepanjang setting pindah, suatu indikasi pembentukan nilai itu terjadi lama sebelum perpindahan yang terekam dalam penelitian ini. Sedangkan alasan yang berbentuk enggan

1. Wawancara bebas dengan informan tanggal 23 Agustus 1993.

bekerja di sektor pertanian karena dianggap tidak mampu untuk mengangkat status dan ekonomi mendukung tampaknya bergandengan alasan-alasan ketidaktersediaan peluang berusaha di luar sektor pertanian yang stabil sepanjang setting migrasi.

Tabel 37. Hubungan Setting Dengan Alasan-alasan Migrasi dari Tapanuli Selatan (Respon Ganda, N=60).

Alasan-alasan	Keseluruhan (N=60)		Setting Migrasi (Tahun)					
			80-93 (N=35)		66-79 (N=17)		66 (N=8)	
	Frek.	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Pindah Dari Tapanuli Selatan.								
1. Tidak tersedia pendidikan yang sesuai.	22	36.7	9	25.7	7	41.2	6	75.0
2. Peluang berusaha di sektor non pertanian terbatas.	40	66.7	24	68.6	12	70.6	4	50.0
3. Bertani tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik	26	43.3	18	51.4	6	35.3	2	25.0
4. Politik/Konflik	8	13.3	7	20.0	0	0.0	1	12.5
5. Gut-gut, hosom, late	11	18.3	10	28.6	1	5.9	0	0.0
6. Kewajiban adat terlalu memberatkan.	5	8.3	4	11.4	0	0.0	1	12.5
7. Ketergantungan antar sesama	6	10.0	6	17.1	0	0.0	0	0.0
8. Etos kerja masyarakat rendah	22	36.7	17	48.6	5	70.6	0	0.0
9. Merantau mengangkat harga diri	33	55.0	19	54.3	13	76.5	1	12.5
10. Lain-lain								
-Mencari Pengalaman	17	28.3	10	25.7	6	35.3	1	12.5
-Diajak Teman	14	16.7	9	25.7	4	23.5	0	0.0
-Bencana Alam	2	3.3	2	100.0	0	0.0	0	0.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : 1. Nilai-nilai dalam Tabel merupakan jumlah dan persentase jawaban Ya. Dalam pengujian beda proporsi dimunculkan jawaban dikotomi Ya dan Tidak dan diperoleh nilai χ^2 sebagai berikut :

- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 1 = 3.28*, cenderung beda
- χ^2 Hitung; db=2 setting-alasan 2 = 1.46*, tidak beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 3 = 1.52*, tidak beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 4 = 3.23, cenderung beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 5 = 4.35, beda nyata (0.05).
- χ^2 Hitung; db=2 setting-alasan 6 = 0.35, tidak beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 7 = 3.05, cenderung beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 8 = 3.12*, cenderung beda
- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 9 = 0.02*, tidak beda

Catatan : (*) Kuat dan konsisten

Derajat bebas (db) disesuaikan dengan syarat pengujian χ^2 .

2. Alasan lain tidak diuji proporsi.

Mencari pengalaman adalah satu alasan lain meninggalkan daerah asal yang berlangsung konstan sepanjang waktu perpindahan. Keadaan ini sejalan dengan pernyataan Cunningham (1957) bahwa Orang Batak merupakan *kaki-kaki yang tidak pernah diam*. Tampaknya mereka tidak puas dengan kondisi daerah asal yang monoton, sehingga perlu melakukan migrasi untuk mencari pengalaman di dunia lain.

Secara keseluruhan alasan-alasan migrasi tampak mengalami perubahan meskipun perubahan itu berlangsung dengan derajat yang berbeda. Hal tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 38. Perkembangan masyarakat dan daya dukung alam di daerah asal semakin menekan penduduk untuk melakukan migrasi. Alasan-alasan migrasi juga menampakkan perpindahan lebih awal mempunyai tujuan yang lebih pasti ketimbang perpindahan belakangan.

5. Migrasi Antara.

Titik tolak pengukuran frekuensi migrasi adalah perpindahan dari Tapanuli Selatan pertama kali. Batasan demikian mengisyaratkan, migrasi ke luar dari Tapanuli Selatan tidak selalu diikuti oleh penempatan migran di Kota Bogor. Frekuensi migrasi dalam Tabel 38 dicatat dalam survei kedua, memperlihatkan bahwa migrasi langsung menuju Bogor lebih sedikit dari pelaku dari migrasi antara. Sebesar 30.0 persen responden yang migrasi langsung menuju Kota Bogor, 40.0 persen mengalami migrasi antara satu kali, 23.3 persen melakukan migrasi antara dua kali, dan masing-masing 3.3 persen untuk migrasi antara tiga dan empat kali.

Tabel 38. Distribusi Migran Menurut Frekuensi Migrasi (termasuk Migrasi ke Bogor) Tahun 1993 (N=60).

Frekuensi Migrasi	Jumlah	Persentase
1. Satu Kali Migrasi	18	30.0
2. Dua Kali Migrasi	24	40.0
3. Tiga Kali Migrasi	14	23.3
4. Empat kali Migrasi	2	3.3
5. Lima Kali Migrasi	2	3.3
Jumlah	60	99.9

Sumber : Data Primer, 1993.

Gambaran migrasi antara di atas sesuai dengan teori kesempatan antara bahwa jumlah orang yang berpindah ke suatu tempat tertentu dengan jarak tertentu berbanding langsung dengan jumlah kesempatan-kesempatan tersebut dan berbanding terbalik dengan jumlah kesempatan-kesempatan antara (Stoffer, dalam Rusli, 1983). Kesempatan menempuh jenjang pendidikan tertentu berlaku bagi penduduk pada selang umur muda sedangkan kesempatan ekonomi berlaku bagi mereka yang angkatan kerja yang telah menyelesaikan pendidikan atau mencari pekerjaan. Formulasi Gee (1976) kurang lebih sama dengan teori kesempatan antara bahwa semakin jauh suatu kota tujuan semakin kecil semakin kecil daya tariknya terhadap pendatang dari daerah-daerah luar, dan semakin besar ukuran kota semakin jauh pula daya tariknya menjangkau daerah-daerah di luarnya.

Daerah-daerah tujuan migrasi antara sebagian besar berada di kota-kota Pulau Sumatera, seperti Medan, Padang, Pekanbaru, tetapi ada pula yang melakukan migrasi antara ke kota-kota Pulau Jawa seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Surabaya dan pulau-pulau lainnya. Tampaknya migrasi antara menuju kota-kota kabupaten di Sumatera Utara kurang menonjol, lebih banyak menuju kota-kota yang lebih besar, yaitu ibukota propinsi. Kota Kabupaten terdekat di sekitar Tapanuli Selatan (Balige, Sibolga, Pasaman, Rantau Prapat) mungkin kurang memenuhi kebutuhan migrasi, seperti pendidikan, pekerjaan, atau aspek kultural lainnya, karena tingkat perkembangan kotanya relatif sama dengan Padang Sidempuan, ibu-kota Tapanuli Selatan. Gejala ini sedikit berbeda dengan perpindahan penduduk yang terjadi di Pulau Jawa yang berpola berantai (*chain migration*) dengan prioritas utama kota-kota kecil di sekitar desa yang kemudian berlanjut ke kota yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pelaku migrasi dan motivasi migrasi yang berbeda.

6. Migrasi Ke Kota Bogor

Orang Angkola-Mandailing yang bermigrasi ke Kota Bogor tergolong besar jumlahnya. Tempat tinggal mereka yang cenderung merata di segala penjuru Kota membuat keberadaannya tidak menyolok. Di terminal-terminal mungkin tidak cukup

sulit menemukan Orang Batak Angkola-Mandailing tetapi itu hanya sebagian kecil dari mereka yang merantau ke Kota Bogor. Di kantor pemerintahan, mahasiswa, dosen, atau pedagang kelontong yang tinggal di tengah pemukiman penduduk agak terselip ketimbang kehidupan terminal. *KeAngkola-Mandailing* mereka tidak akan mudah diketahui, hanya orang yang terbiasa bergaul yang dapat membedakan mereka dengan orang Batak lainnya. Di pusat aktifitas terminal Orang Batak Angkola-Mandailing lebih tampak serba sama dengan sub suku Batak lainnya yang juga tergolong banyak jumlahnya.

Pandangan masyarakat umumnya, tidak terkecuali masyarakat pribumi Sunda sering menganggap Orang Batak yang ada *hanya satu yaitu Batak yang bila berbicara meletup-letup, menganut agama tertentu, kasar, dan sifat-sifat lain yang berbeda dengan suku bangsa lain*—sedikit pengetahuan mereka terhadap keberagaman Batak yang sesungguhnya. Kekurangtahuan ini membuat pola hubungan antar etnis terhambat menuju komunikasi antar budaya yang lebih intim. Bagi orang luar agak sulit untuk memahami perbedaan-perbedaan yang ada pada orang Batak, bahkan sesama Orang Batak sendiri ketidaktahuan tentang sifat-sifat sub suku Batak lainnya sering terjadi. Hal ini merupakan kejadian yang logis, seperti orang Sumatera yang kurang memahami perbedaan suku bangsa Jawa dengan Sunda yang tinggal di Pulau Jawa, hingga cenderung menganggap kedua suku bangsa adalah satu yaitu suku Jawa. Orang Sunda tentunya tidak ingin dianggap sama dengan Orang Jawa.

Dalam batas tertentu sifat *kebatakan* merupakan milik bersama orang Batak yang terdiri dari 5 sub suku, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Dairi-Pakpak, dan Batak Angkola Mandailing yang menjadi topik pembicaraan ini. Jika diamati lebih jauh tidak sulit untuk memperoleh perbedaan diantara mereka, tetapi untuk sampai pada pemahaman sejauh itu orang luar sering terhalang oleh pandangan konformitas tadi.

Kembali pada migran Batak Angkola Mandailing, menurut pengamatan di lapang, jarang ditemukan migran yang bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga. Hal ini terjadi bukan karena sesama mereka tidak ingin bergaul tetapi lebih ditentukan oleh

jenis pekerjaan atau profesi yang menuntut demikian. Migran yang dominan berusaha sebagai pedagang kelontong dengan sendirinya menghindari diri bertetangga dengan migran lain yang berprofesi sama, tetapi mungkin tidak menolak akan bertetangga dengan migran pekerja kantor atau pekerja diluar perdagangan kelontong.

Tabel 39. Distribusi Migran Menurut Tempat Tinggal di Kota Bogor Tahun 1993.

Kecamatan	Jumlah	Persentase
1. Bogor Tengah	8	4.0
2. Bogor Barat	16	8.0
3. Bogor Selatan	20	10.0
4. Bogor Timur	20	10.0
5. Bogor Utara	30	15.0
6. Semplak	7	3.5
7. Kedunghalang	25	12.5
8. Ciomas	53	26.5
9. Ciampea	7	3.5
10. Cijeruk	7	3.5
11. Ciawi	7	3.5
Jumlah	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993

Distribusi migran menurut tempat tinggal dapat di lihat pada Tabel 39. Kecamatan daerah penelitian yang paling banyak dihuni oleh responden adalah Ciomas 26.0 persen, diikuti oleh Kecamatan Bogor Utara (15 persen), Kedunghalang (12.5 persen), Bogor Selatan dan Bogor Timur masing 10 persen, dan 6 kecamatan lainnya masing-masing di bawah 10 persen. Kecuali Ciomas, kecamatan-kecamatan di luar Kotamadya Bogor seperti Cijeruk, Ciawi, Semplak, dan Ciampea ditempati oleh migran dalam jumlah kecil mencerminkan desa-desa di daerah-daerah tersebut lebih banyak yang berciri desa *rural* sehingga kurang diminati migran. Perbedaan jumlah migran di masing-masing kecamatan di Kotamadya dipengaruhi oleh perbedaan luas wilayah dan pola pemukiman. Misalnya, Kecamatan Bogor Tengah disamping karena luasan kecil, wilayah kecamatan ini juga banyak diperuntukkan untuk lokasi perkantoran dan pertokoan.

7. Alasan Memilih Kota Bogor Sebagai Daerah Tujuan

Uraian alasan-alasan sebelumnya, sebagian sudah menju-ruskan perhatian kepada aspek-aspek ekonomi dan pendidikan, sebagai kemungkinan alasan pemilihan daerah tujuan. Bekerja nilai budaya di pihak lain tampaknya lebih relevan untuk diamati pada bagian selanjutnya, tentang pola adaptasi.

Alasan-alasan migran memilih kota Bogor sebagai daerah tujuan, menurut setting domisili dapat diperhatikan pada Tabel 40. Sebagian besar migran (66.7 persen) memasuki kota Bogor memberikan alasan adanya daya tarik ekonomi. Peluang berusaha di sektor-sektor khusus, seperti perdagangan, jasa kemasyarakatan, pegawai pemerintah, yang memungkinkan terpenuhinya obsesi ekonomi mereka sebelum berpindah dari kota-kota lain atau luar Tapanuli Selatan.

Tabel 40 memperlihatkan, peluang berusaha tidak berlangsung konsisten menurut setting pindah. Migran yang berpindah tahun-tahun belakangan (Setting III) lebih besar yang membenarkan adanya daya tarik ekonomi itu. Jika pada Setting I dan Setting II, alasan peluang usaha hanya 37.5 persen, pada setting belakangan meningkat hampir dua kali lipat menjadi 61.7 persen. Hal ini tampaknya sesuai dengan motivasi keberangkatan yang besar karena faktor ekonomi pada setting II dan setting III. Bila kesuaian itu benar, selain yang migrasi langsung ke Bogor, diduga migrasi ke Bogor bagi migrasi antara terjadi karena daerah-daerah antara tersebut tidak cukup mengakomodasi kepentingan migran, oleh karenanya harus dilanjutkan ke Bogor.

Peningkatan intensitas tekanan ekonomi dari setting I dan Setting II ke setting III, berkaitan dengan perkembangan ekonomi kota Bogor secara menyeluruh. Kota Bogor berada di daerah lingkaran pusat perputaran uang nasional dan menerima efek-efek multiplier. Selain menjadi wilayah pemukiman dan pariwisata yang paling "menarik" di lingkaran ibukota, Bogor juga berada di Zona Ekonomi Industri (RIK Bogor, 1985). Pertumbuhan ekonomi membuka peluang berusaha yang besar bagi penduduk, termasuk para migran.

Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 2.18, tidak menunjukkan perbedaan proporsi yang nyata pada $\alpha = 0.05$, tetapi masih dalam batas kecenderungan perbedaan proporsi pada $\alpha = 0.20$. Hal ini menandakan daya tarik ekonomi Bogor bagi migran cenderung mengalami peningkatan pada tahun belakangan.

Faktor pendidikan sebagai daya tarik kota sudah menjadi kenyataan umum di Indonesia. Perbedaan penyediaan fasilitas pendidikan (kuantitas dan kualitas) antara kota dan desa berfungsi menyeret penduduk usia sekolah untuk mobil ke kota atau ke pusat-pusat pendidikan terkemuka, seperti halnya Kota Bogor. Sebesar 30 persen migran memilih kota Bogor sebagai daerah tujuan karena alasan pendidikan. Alasan-alasan mengalami pergeseran dari setting ke setting. Melalui penggabungan kolom setting I dan II diperoleh nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 6.60. Artinya terdapat perbedaan daya tarik pendidikan Kota Bogor kepada migran sepanjang waktu perpindahan, semakin lama semakin menurun. Pergeseran ini dimungkinkan adanya kota pendidikan alternatif baik di kota-kota Pulau Sumatera maupun kota-kota di Pulau Jawa dan lainnya. Selain alasan yang telah disebutkan di atas terdapat satu faktor penarik lagi, yaitu pindah tugas keberadaan saudara atau kerabat.

Sebelum memasuki Kota Bogor sebagian migran (38.3 persen) telah mengetahui atau memperoleh informasi kota, tetapi umumnya mereka mempunyai kerabat atau saudara yang akan dituju (71.7 persen). Faktor pelancar ini tidak berubah sepanjang setting, dilihat dari Nilai X^2 yang kecil.

Keberadaan saudara di kota yang disebutkan sebagai faktor penarik tampak agak tumpang tindih dengan keberadaan saudara atau kerabat pada faktor pelancar. Namun hakikat keduanya berbeda terutama perihal spontanitas migran individu mengambil keputusan migrasi dan keterlibatan orang lain dalam pengambilan keputusan itu.

Jika saudara atau kerabat sebagai penarik menunjuk pada keterlibatan aktif orang lain dalam menentukan terjadinya migrasi, maka pada faktor lain (faktor pelancar) keberadaan saudara lebih mengarah pada ada tidaknya saudara yang menampung di

Tabel 40. Hubungan Setting Dengan Alasan-alasan Migran Memilih Kota Bogor Sebagai Daerah Tujuan, dan Faktor Pelancar Migrasi. (Respon Ganda, N=60).

Alasan Memilih Kota Bogor Sebagai Daerah Tujuan	Keseluruhan (N=60)		Setting Migrasi (Tahun)					
			80-93 (N=52)		66-79 (N=5)		66 ⁻ (N=3)	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Tersedia Kesempatan Berusaha	40	66.7	37	61.7	1	20.0	2	66.7
2. Tersedia Fasilitas Pendidikan	18	30.0	12	23.1	4	80.0	1	33.3
3. Dinas	1	1.7	0	0.0	1	20.0	0	0.0
4. Ada saudara	24	40.0	22	46.2	2	40.0	0	0.0
C. Faktor Lain (Pelancar)								
5. Mengetahui Informasi/Keadaan Kota	23	38.3	20	38.5	2	40.0	1	33.3
6. Ada saudara/orang lain yang menampung sebentar atau lama	43	71.7	39	75.5	3	60.0	1	33.3

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : 1. Nilai-nilai dalam Tabel merupakan jumlah dan persentase jawaban Ya. Dalam pengujian beda proporsi diaunculkan jawaban dikotomi Ya dan Tidak dan diperoleh nilai χ^2 sebagai berikut :

- χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 1 = 2.18, cenderung beda
 - χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 2 = 6.60, beda nyata
 - χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 3 = tidak di uji
 - χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 4 = 0.29, tidak beda
 - χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 5 = 0,10, tidak beda
 - χ^2 Hitung; db=1 setting-alasan 6 = 1.08, tidak beda
2. Derajat bebas (db) disesuaikan dengan syarat pengujian χ^2 .

kota sementara atau lama. Dilihat dari komposisi keberadaan sadara pada masing-masing kategori faktor, peran saudara sebagai penarik lebih kecil dari faktor palancar, yaitu 40.0 persen berbanding 71.7 persen. Dengan demikian migran yang memperoleh pelancaran migrasi tidak semua tertarik oleh karena adanya saudara atau kerabat.

8. Karakteristik Migran (kini)

Bagian ini akan menerangkan secara ringkas perubahan karakteristik migran setelah melakukan migrasi. Karakteristik ini berfungsi untuk pengujian-pengujian hipotesis selanjutnya.

a. Tingkat Pendapatan

Gambaran sebelumnya disebutkan bahwa tujuan migrasi pada kebanyakan migran adalah memenuhi orientasi nilai budaya 3H (*hamoraon, hagabeon, hasangapon*). Salah satu indikator tujuan hidup itu adalah *hamoraon* yaitu peningkatan status ekonomi (harta, kekayaan) untuk mendukung tujuan yang lain.

Tingkat pendapatan dalam Tabel 41 terbagi dalam tiga kategori sesuai perhitungan standar deviasi. Migran berpendapatan rendah (hingga 354 ribu rupiah) tidak berarti dari sembarang jumlah di bawah itu, melainkan dari sekitar 225 ribu rupiah; dan tingkat pendapatan tinggi (di atas 957 ribu rupiah) tidak berarti sampai tak hingga, melainkan sampai sekitar 10 juta rupiah perbulan.

Bagi pedagang kelontong ada kecenderungan mengukur keberhasilan usaha setelah beberapa bulan melalui pendapatan rata-rata perhari. Nilai pendapatan kotor rata-rata perhari agar dapat kedai kelontong bertahan (*survival*) berkisar 125-150 ribu rupiah. Sedangkan pendapatan bersih usaha dagang tergantung tingkat laba yang diberlakukan pedagang setelah dipotong harga dasar dari *toke*, biasanya sekitar 7 sampai 15 persen menurut jenis-jenis barang yang dijual. Dengan mengambil margin rata-rata 10 persen berarti pendapatan pedagang kelontong pada batas *survival* berkisar 12.5 ribu-15 ribu rupiah perhari. Adakalanya seorang pedagang memiliki 2-3 kedai, satu kedai dikelola sendiri sementara yang lain dipercayakan kepada saudara atau pemagangnya. Jika tingkat pendapatan berada di atas batas *survival* dan memiliki kedai 2-3 buah, dapat dimengerti bila pendapatan mereka lebih besar lagi.

Pola pemasukan pendapatan migran yang bekerja di sektor servis foto studio agak berbeda dengan pedagang kelontong, dimana usaha mereka lebih mengandalkan keterampilan *mengolah* ketimbang menjual dalam bentuk instan. Jika pedagang kelontong hanya memperoleh margin kira-kira 10 persen maka pengelola servis foto studio bisa mencapai 50 persen. Artinya dengan pemasukan kotor yang sama usaha servis foto memperoleh pendapatan bersih yang jauh lebih besar. Kesamaan dari kedua

Tabel 41. Distribusi Tingkat Pendapatan Migran Angkola-Mandailing Di Kota Bogor.

Tingkat Pendapatan (Rupiah)	Frekuensi	Persentase
1 Rendah < 355 ribu	8	13.3
2 Sedang 355-957 ribu	46	76.7
3 Tinggi > 957 ribu	6	10.0
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Klasifikasi Tingkat Pendapatan berdasarkan nilai standar deviasi.

bentuk usaha itu, pedagang kelontong maupun servis foto studio biasanya menempati rumah sekaligus tempat usaha berjualan.

Migran yang bekerja di sektor angkutan memiliki pola pemasukan pendapatan yang agak berbeda dengan migran terdahulu. Bila migran berstatus sopir-pemilik jumlah pendapatannya tentu jauh lebih besar, sedangkan migran yang hanya berstatus sopir tetap atau sopir tak tetap memperoleh pendapatan setelah dikurangi setoran kepada pemilik. Pola pemasukan pendapatan sopir bersifat fluktuatif, ada hari-hari sarat penumpang tetapi ada juga hari-hari tertentu yang lengang penumpang sehingga pendapatan kotor tidak bersisa, kecuali setoran. Selain itu dikalangan migran pekerja angkutan tampaknya terdapat mekanisme distribusi pendapatan yang khas. Ada semacam etika yang bersifat *hamburan* pendapatan untuk memenuhi *tanggung jawab* terhadap orang-orang yang menanti *uluran tangan* di sekitar mereka, seperti sopir tak tetap, kondektur atau penganguran yang tidak mendapat kesempatan bekerja pada waktu-waktu tertentu. Mekanisme seperti ini terlihat dalam memberi uang kontan diperlukan atau sekedar membayar uang makan orang teman sesama sopir. Sebaliknya ketika seorang supir tidak *narik* berlaku sama terhadap yang lain. Ini tampaknya merupakan mekanisme distribusi pendapatan yang berpola resiprositas. Dengan demikian pendapatan bersih setelah dikurangi setoran tidak bulat sampai ke rumahtangga migran.

Mereka yang bekerja sebagai pegawai kantor pemerintah atau swasta selain mengandalkan gaji ada juga yang mempunyai sumber pendapatan lain. Sehingga secara keseluruhan pendapatan mereka tergolong tinggi.

Indikator lain dari status ekonomi migran adalah pemilikan rumah. Menurut informan, di kalangan pedagang ada kecenderungan diantara mereka untuk memprioritaskan pembelian rumah, terutama rumah yang awalnya berstatus dikontrak tetapi memiliki posisi yang strategis dalam berdagang. Hal ini dapat dimengerti karena rumah bagi pedagang biasanya sekaligus tempat berjualan (*rudai*, rumah-kedai atau *ruko*, rumah-toko).

Untuk melihat perubahan status ekonomi atau mobilitas ekonomi layaknya diperlukan tingkat pendapatan sebelum melakukan migrasi (Golschider, 1987). Namun karena sebagian dari migran berstatus pekerja keluarga ketika melakukan migrasi, disamping perbedaan *setting* pindah, maka pendapatan sulit dipergunakan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu dipergunakan data persepsi migran tentang pendapatannya sebelum dan sesudah migrasi.

Tabel 42. Persepsi Migran Angkola-Mandailing tentang Keadaan Ekonominya Sesudah Migrasi.

Persepsi Migran Tentang Keadaan Ekonomi Sesudah Migrasi	Frekuensi	Persentase
1. Lebih Baik	57	95.0
2. Sama Saja	3	5.0
3. Lebih Buruk	0	0.0
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Persepsi migran tentang keadaan ekonominya seperti uraian Tabel, terlihat hampir semua (95.0 persen) mengatakan lebih baik dan tidak satupun yang mengatakan lebih buruk. Hal ini merupakan pertanda mobilitas ekonomi mereka umumnya berlangsung mulus.

b. Karakteristik lain

Masa domisili migran bervariasi sesuai dengan tahun migran memasuki Kota Bogor, terlepas dari waktu migrasi dari Tapanuli Selatan (Tabel 42). Umur migran menurut klasifikasi sebaran masing-masing 38.5 persen muda dan sedang, sedangkan berumur tua sebesar secara berimbang separuh muda 23.3 persen. Jumlah tanggungan migran hampir separuh kecil (45.0 persen), selebihnya 35. persen sedang, dan 20 persen besar.

Migran Batak Angkola-Mandailing di Kota Bogor hanya sebagian kecil yang beristri bukan Batak. Pada survei pertama diperoleh hanya 10 orang migran (5.0 persen) yang beristri bukan Batak. Survei kedua terambil 3 orang migran beristri bukan batak (5.0 persen) dan ternyata semua beristri Sunda. Bagian selanjutnya suku bangsa istri akan menggunakan dikotomi Batak dan Sunda. Tingkat pendidikan migran hasil survei pertama secara keseluruhan telah diuraikan pada sub bab alasan migrasi. Migran terambil dari hasil survei pertama yang di wawancarai pada survei kedua sebagian besar berpendidikan menengah (65.0 persen), selebihnya 23.3 persen berpendidikan rendah dan 11.7 persen berpendidikan tinggi.

Faktor tambahan yang dikedepankan adalah daerah asal migran yang mengacu kepada wilayah kebudayaan di daerah asal, yaitu angkola dan Madailing. Sebanyak 13 (21.7 persen) orang migran berasal dari wilayah kebudayaan Angkola dan selebihnya berasal dari wilayah kebudayaan Mandailing (78.7 persen). Wilayah kebudayaan Mandailing meliputi kecamatan-kecamatan Kotanopan dan Panyabungan (yang lain tidak terambil dalam survei II) dan wilayah kebudayaan Angkola meliputi kecamatan-kecamatan Padang Sidempuan (barat,timur, utara,selatan), Sipirok, Batang Angkola, Padang Bolak, Siabu (yang lain tidak terambil dalam survei II). Karakteristik migran yang digunakan sebagai variabel penduga tambahan yang dipandang penting untuk kepentingan analisis akan diungkapkan pada bagian lebih lanjut.

Tabel 43. Karakteristik Migran Batak Angkola-Mandailing Di Kota Bogor.

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Masa Domisili*		
1. Singkat	21	35.0
2. Sedang	19	31.7
3. Lama	20	33.3
U m u r*		
1. Muda	23	38.3
2. Sedang	23	38.3
3. Tua	14	23.3
Jumlah Tanggungan*		
1. Kecil	27	45.0
2. Sedang	21	35.0
3. Besar	12	20.0
Suku Bangsa Istri		
1. Batak	57	95.0
2. Sunda	3	5.0
Tingkat Pendidikan		
1. Rendah	14	23.3
2. Menengah	39	65.0
3. Tinggi	7	11.7
Daerah Asal		
1. Angkola	13	21.7
2. Mandailing	47	68.3
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Klasifikasi berdasarkan nilai standar deviasi.

Masa Domisili : Singkat (1-5 Tahun) ; Sedang (6-9 Tahun) ; Lama (10⁺ Tahun)

Umur : Muda (28 Tahun) ; Sedang (29-45 Tahun) ; Tua (46⁺ Tahun)

Tanggungan : Kecil (2-4 Orang) ; Sedang (5-6 Orang) ; Besar (7⁺ Orang)

B. Pola Adaptasi

Bogor merupakan adalah satu rantau dari sekian banyak kota tujuan migrasi orang Batak Angkola-Mandailing di penjuru Indonesia. Dalam banyak hal Kota Bogor memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota-kota lain, dan yang paling utama adalah lingkungan kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda Bogor tampak merupakan akulturasi budaya Sunda Pakuan Pajajaran dengan budaya kota yang berciri plural. Kadar *kesundaan* masyarakat Kota Bogor agak berbeda dengan *kesundaan* masyarakat pedesaan di sekitarnya.

Pola kebudayaan demikian mempengaruhi sikap-sikap pendatang yang memasuki kota. Perilaku dalam hal ini meliputi sikap dan tindakan. Sikap individu

merupakan pandangan etis dan ideal terhadap suatu objek, baik-buruk, layak tidak layak untuk dilakukan sendiri ataupun oleh orang lain. Penyesuaian cara hidup berlangsung selektif tetapi tanpa disadari ada juga unsur budaya lokal yang terdifusi ke dalam sistem-sistem budaya Batak yang dianut migran baik secara individu maupun dalam kelompok migran.

Budaya yang dominan (*dominant culture*) yang terdiri dari komponen demografi sosial, kebudayaan daerah dan letak kekuasaan mempengaruhi pola-pola hubungan dan ekspresi kesukuan suatu kelompok etnik di suatu kota (Bruner, 1974). Dengan mengambil contoh Kota Bandung ---kelompok etnik Sunda dominan sedangkan beragam etnis lain berposisi minoritas---konsep budaya dominan menurut Bruner terlihat jelas. Kelompok etnik pendatang cenderung menyesuaikan diri dengan kebudayaan Sunda.

Penemuan Bruner di atas kemudian tidak ditemukan Abustam (1987) dalam penelitiannya di Sulawesi Selatan. Kedatangan kelompok etnik Mandar dan Toraja di Ujung Pandang yang secara historis dan proporsional didominasi kelompok etnik Bugis-Makassar tidak mengakibatkan proses penyesuaian pendatang mengarah pada kebudayaan Bugis-Makassar. Pola diferensiasi penyesuaian hidup terbentuk pada orang-orang Mandar dan Toraja menurut kekhasannya masing-masing.

Data-data statistik sosio demografis, khususnya mengenai kelompok etnis sejak tahun 1961 tidak diperoleh lagi baik dalam sensus-sensus nasional maupun monografi wilayah, padahal data-data tersebut seringkali sangat dibutuhkan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian ini. Secara historis Kota Bogor merupakan wilayah kebudayaan Sunda dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Sampai sekarang kelompok etnik Sunda tampak tetap mendominasi, kelompok etnik lain dalam proporsi yang beragam menduduki posisi minoritas. Oleh sebab itu, Kota Bogor cenderung serupa dengan kondisi komposisional etnis yang ditemukan Bruner di Kota Bandung.

Asumsi ini membuat dugaan bahwa penyesuaian migran akan lebih banyak mengarah pada kebudayaan Sunda. Dengan demikian telaah ini dapat diisolasi dengan memunculkan dua interaksi budaya, yaitu budaya Batak dan budaya Sunda. Di luar kedua budaya ini masih terdapat budaya-budaya lain yang bisa mempengaruhi salah satu atau kedua budaya.

Proses adaptasi migran ini ditelaah menurut kerangka komunikasi antar budaya dari sisi derajat konsistensi atau perubahan sosial budaya migran sebagai kelompok minoritas di daerah tujuan dan proses komunikasi antar budaya dengan masyarakat *Sunda Kota*. Kebudayaan menyangkut pola bersikap dan bertindak kelompok masyarakat terhadap objek-objek tertentu.

Dengan menggunakan hasil-hasil survei, informasi dari informan, dan data yang dibangkitkan dari wawancara maupun pengamatan, uraian ini secara khusus menguraikan pola penempatan migran asal Tapanuli Selatan (Angkola-Mandailing) di Kota Bogor. Dalam analisisnya telaah ini dilengkapi dengan pengangkatan pola kehidupan migran di tempat lain baik Orang Batak sendiri khususnya Angkola-Mandailing maupun pola kehidupan migran dari etnis lain seperti Orang Banjar di Surakarta; orang Makasar, Bugis dan Toraja di Ujung Pandang; Orang Minangkabau di berbagai penjuru Indonesia, dan; Orang Jawa di beberapa kota.

Hipotesis pokok yang diajukan sebelumnya menyangkut pola bersikap dan bertindak migran individu terhadap kebudayaan Batak (*in-group*) dan kebudayaan Sunda (*out-group*). Sikap terhadap kebudayaan *in-group* menunjuk pada konsistensi pengidealan nilai-nilai budaya Batak pada pribadi, keluarga dan kelompok migran di rantau. Sedangkan sikap terhadap budaya *out-group* menunjuk pada sikap mengidealkan kebudayaan Sunda dalam kehidupan perantauan. Sikap-sikap migran terhadap kedua kebudayaan lebih merupakan potensi untuk manifes. Jika faktor pendukung tidak akomodatif, maka potensi tersebut bisa laten dimana pada satu saat akan manifes. Unsur-unsur budaya yang dijadikan sebagai alat analisis diadaptasi dari 7 unsur budaya Kluckhohn yaitu; *sistem religi, sistem pengetahuan, kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan, sistem mata pencaharian (sistem ekonomi), dan peralatan*. Konsistensi budaya Batak yang berlaku pada migran, menjelaskan seberapa besar nilai-nilai budaya Batak Angkola-Mandailing dipandang sebagai nilai yang ideal bagi dirinya, keluarga, orang-orang sedaerah maupun masyarakat sekitarnya di rantau. Jika pola bersikap migran terpusat pada nilai-nilai kebudayaan Batak Angkola-Mandailing, itu menggambarkan etnosentrisme pada diri migran. *Etnosentrisme* merupakan penghayatan nilai budaya *in-group* tertinggi, dikategorikan sangat kuat. Sedangkan nilai terendah adalah *peleburan sikap* ke dalam budaya *out-group*, tidak saja kepada sistem budaya Sunda tetapi juga budaya-budaya lainnya. Komunikasi antar budaya terjadi apabila produsen pesan adalah anggota suatu kebudayaan dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lain. Derajat pengaruh budaya dalam komunikasi antar budaya merupakan fungsi perbedaan antar budaya-budaya bersangkutan (Porter dan Samovar, 1982).

1. Sikap Terhadap Budaya *In-Group* dan *Out-Group*

Sikap adalah pandangan etis, baik-buruknya, objek-objek budaya tertentu (Bennet, 1979). Sikap sendiri lahir dari proses sosialisasi dalam lingkungan budaya yang menjadi *in-group*. Sikap berpotensi melandasi tindakan seseorang, tetapi sikap

tidak selalu manifes. Bahkan sikap seringkali tidak kontradiktif dengan tindakan terwujud, atas dasar kesadaran atau diluar kesadaran (Oberg, 1972). Bagi migran di kota sikapnya kemungkinan tidak semua manifes dan melandasi tindakannya karena keterbatasan-keterbatasan ruang hidup untuk mewujudkan sikap itu dalam tindakan, disamping ketidaksadaran menerima efek komunikasi antar budaya yang dijalani.

Tabel 48. Distribusi Sikap-Sikap Migran Terhadap Kebudayaan *In-group* (Batak Angkola-Mandailing) dan Kebudayaan *Out-group* (Sunda)

Kategori Sikap	Batak		Sunda	
	Σ	%	Σ	%
1. Sangat Kuat	1	2	0	0
2. Kuat	41	68	12	20
3. Labil	17	28	42	70
4. Lemah	1	2	6	10
5. Sangat Lemah	0	0	0	0
Jumlah	60	100	60	100

Sumber : Data Primer, 1993

Keterangan : Diolah dari Tabel Lampiran 1.

Dari Tabel 48 dapat diperhatikan bahwa sebagian besar (68 persen) migran Batak Angkola Mandailing memiliki sikap kuat terhadap budaya sendiri (*in-group*), selebihnya 28 persen bersikap labil dan masing-masing 2 persen bersikap sangat kuat dan lemah. Sikap seperti ini merupakan petunjuk bahwa orientasi nilai budaya Batak pada diri migran masih kuat, tetapi tidak ekstrim. Sikap *in-group* yang labil di pihak lain menjelaskan adanya pergeseran orientasi nilai budaya migran dari *in-group* ke arah budaya *out-group*. *Out-group* yang dimaksud ini tidak saja nilai budaya Sunda sebagai lingkungan sosial budaya yang dominan di rantau, tetapi juga nilai-nilai budaya lainnya, baik budaya tertentu maupun budaya plural. Sikap *in-group* yang kuat menunjuk pada sikap individu migran mengidealkan kebudayaannya sendiri. Migran yang tidak mengidealkan budayanya sendiri dalam kehidupan rantau hanya satu orang (2 persen) sama dengan migran yang bersikap sangat kuat.

Sikap migran terhadap budaya *out-group* Sunda tampak terkonsentrasi pada kategori sikap labil (70 persen). Ini menunjukkan ketidakpastian sikap migran mengi-

dealkan kebudayaan Sunda dalam kehidupan rantau. Sikap migran yang *labil* pada budaya *out-group* berarti terbentuknya sikap tidak antipati atau simpati kepada budaya Sunda. Sikap ini lebih banyak menjelaskan selektifitas nilai budaya; simpati pada objek-objek budaya tertentu tetapi tidak demikian dengan nilai-nilai budaya yang lain.

Sikap *lemah* pada kebudayaan Sunda dapat diterjemahkan sebagai sikap yang kurang menerima nilai budaya Sunda dalam kehidupan di rantau atau sikap migran yang tidak memandang nilai-nilai budaya Sunda sebagai budaya yang ideal. Migran yang termasuk dalam kategori sikap ini sebanyak 10 persen. Sikap *kuat* berarti memper-lihatkan tingginya simpati atau pengidealan budaya Sunda oleh migran. Sikap migran yang termasuk dalam kategori ini sebesar 20 persen.

Sikap-sikap migran yang terbentuk di rantau merupakan hasil dari komunikasi antar budaya. Sikap-sikap yang ditunjukkan juga dapat menjelaskan bahwa migran tidak ingin menghindari dari kehidupan budaya masyarakat dominan, tetapi sekaligus tidak ingin menjadi melibatkan diri ke dalam budaya Sunda terlalu dalam. Berikut ini akan diidentifikasi beberapa variabel karakteristik individu untuk mendapatkan faktor pembeda sikap *out-group* dan *in-group*. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut, sikap-sikap *in-group* dan *out-group* digabung menjadi dua kategori sikap yaitu *kuat* dan *labil*, dengan cara memasukkan baris (kategori sikap) terkecil ke baris yang lain. Karakteristik migran seperti pengajuan hipotesis adalah tingkat pendidikan, umur, suku bangsa istri, tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, dan masa domisili. Hubungan masing-masing faktor dengan sikap terhadap budaya *in-group* dan *out-group* dapat diperhatikan pada Tabel 49.

Tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan mempengaruhi sikap seseorang dalam komunikasi antar budaya, terutama dalam bersikap dan memandang objek-objek budaya *out-group* (Porter dan Samovar, 1982). Tingkat pendidikan mempengaruhi sikap inovatif pada nilai-nilai budaya yang dipandang penting.

Sikap *in-group* kuat tampak lebih besar pada tingkat pendidikan menengah (77 persen). Adapun pada pendidikan rendah hanya 64 persen, dan lebih rendah lagi pada

pendidikan tinggi, yaitu 43 persen. Jika kecenderungan ini dapat diterima berarti sikap *in-group* tidak bersifat linear dengan tingkat pendidikan. Melalui uji X^2 hitung, $db=1$, setelah menggabungkan tingkat pendidikan tinggi ke menengah diperoleh nilai sebesar 0.04, artinya tidak terdapat perbedaan sikap *in-group* menurut tingkat pendidikan. Akan tetapi jika asumsi tidak linear diterima, dan dilakukan penggabungan kolom pendidikan rendah dengan tinggi, maka diperoleh nilai X^2 hitung, $db=1$ sebesar 1.69 dan ini lebih besar dari nilai $X^2_{tabel,db=1}$ pada $\alpha = 0.20$ sebesar 1.64. Artinya migran berpendidikan menengah secara proporsional lebih tinggi sikap *in-group* mereka dibanding dengan kategori pendidikan lainnya.

Di pihak lain, sikap *out-group* menurut tingkat pendidikan cenderung linear. Sebesar 93 persen migran berpendidikan rendah bersikap labil dan sikap ini secara perlahan menurun pada tingkat pendidikan menengah (77 persen), dan menurun lagi pada tingkat pendidikan tinggi menjadi 71 persen. Nilai $X^2_{hitung,db=1}$ yang diperoleh dari hubungan ini sebesar 0,98; ($X^2_{tabel,db=1,\alpha=0.20}=1.64$). Dengan demikian tidak ada perbedaan sikap *out-group* menurut tingkat pendidikan.

Umur. Usia seseorang mencerminkan derajat kematangan psikologis (Oberg, 1972). Dalam kaitan komunikasi antar budaya faktor usia ini juga di duga turut mempengaruhi sikap *in-group* dan *out-group*nya. Pertambahan umur dan pengalaman membedakan sikap-sikap tersebut.

Hubungan umur dengan sikap *in-group* yang ditunjukkan pada Tabel, tidak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Migran umur muda sedikit lebih tipis sikap *in-group*nya, dibandingkan dengan migran yang berumur sedang dan tua. Nilai $X^2_{hitung, db=2}$ hanya 2.03; ($X^2_{tabel,db=2,\alpha=0.20}=3.32$). Artinya ada perbedaan sikap *in-group* migran berdasarkan kelompok umur.

Tabel 49. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Sikap Terhadap Budaya Batak Angkola-Mandailing (In-group) dan Budaya Sunda (Out-group).

Kategori Sikap	Tingkat Pendidikan			Umur					Suku Asli		
	Rendah	Menengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Tua	Batak	Sunda			
In- group	1. Kuat	9 (64)	30 (77)	3 (43)	15 (65)	17 (74)	10 (71)	40 (70)	2 (67)		
	2. Labil	5 (36)	9 (23)	4 (57)	8 (35)	6 (26)	4 (29)	17 (30)	1 (33)		
Out- group	1. Kuat	1 (7)	9 (23)	2 (29)	7 (30)	3 (13)	2 (14)	11 (23)	1 (33)		
	2. Labil	13 (93)	30 (77)	5 (71)	16 (60)	20 (87)	12 (84)	46 (77)	2 (67)		
Jumlah	14 (100)	39 (100)	7 (100)	23 (100)	23 (100)	14 (100)	57 (100)	3 (100)			
Kategori Sikap	Tingkat Pendapatan			Jumlah Penggungan					Masa Domisili		
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Besar	Singkat	Sedang			
In- group	1. Kuat	3 (38)	35 (76)	4 (67)	18 (67)	15 (71)	9 (75)	10 (50)	16 (84)	16 (76)	
	2. Labil	5 (62)	11 (24)	2 (33)	9 (33)	6 (29)	3 (25)	10 (50)	3 (16)	5 (24)	
Out- group	1. Kuat	4 (50)	7 (15)	1 (17)	8 (30)	2 (10)	2 (17)	2 (10)	7 (37)	3 (14)	
	2. Labil	4 (50)	39 (85)	5 (83)	19 (70)	19 (90)	10 (83)	18 (90)	12 (63)	18 (86)	
Jumlah	8 (100)	46 (100)	6 (100)	27 (100)	21 (100)	12 (100)	20 (100)	19 (100)	21 (100)		

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Angka dalam kurung persentase (pembulatan).

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Sikap *out-group* migran umur muda sedikit lebih besar pada kategori sikap kuat, yang menurun kemudian pada kelompok umur sedang dan tua. Melalui penggabungan kolom-kolom sedang dan tua diperoleh nilai X^2_{hitung} , $db=1$ sebesar 1.59, yang berada di luar selang untuk menerima perbedaan sikap menurut umur migran (X^2_{tabel} ; $db=1$ dengan $\alpha = .0.20$ sebesar 1.64).

Suku bangsa istri. Amalgamasi merupakan saluran terdepan menuju asimilasi budaya (Soekanto, 1987). Asimilasi tidak saja menyangkut budaya terwujud tetapi juga budaya-budaya tak terwujud. Dalam hal ini diduga suku bangsa istri akan memperkokoh sikap individu untuk mengidealkan kebudayaan istrinya dibanding mereka yang beristri sesuku. Dan sebaliknya amalgam akan menghindari sikap terhadap budaya *in-group*. Migran beristri Sunda tampak tidak menunjukkan sikap *in-group* yang berbeda dengan migran beristri Batak. Pola yang sama juga ditunjukkan pada sikap *out-group*. Dua dari tiga orang amalgam bersikap *in-group* kuta dan dengan komposisi yang sama dalam sikap *out-group*. Dengan data yang minim, tabel kontingensi tidak dapat diuji secara statistik. Keputusan maksimal yang dapat diambil disesuaikan dengan uraian Tabel 49 bahwa tidak ada perbedaan sikap *in-group* dan *out-group* migran menurut suku istri.

Makna dari sikap *in-group* dan *out-out-group* yang ditunjukkan oleh amalgam adalah ketidakinginan migran untuk lekang dari budaya *in-group* dan ini tampaknya berkaitan dengan sikap *out-group* yang labil. Ketika dua orang amalgam bersikap *in-group* kuat dua orang pula diantaranya bersikap labil. Jadi dapat disebutkan meski tidak terdapat perbedaan proporsi sikap dalam bersikap menurut istri, sesungguhnya di pihak amalgam terdapat sikap yang lebih kuat ketimbang yang beristri sesuku. Gambaran yang lebih meyakinkan dapat dibandingkan dengan pengalaman HR pada bagian selanjutnya (Kasus 3).

Tingkat Pendapatan. Pemasukan uang dalam rumahtangga migran merupakan basik material pendukung kehidupan migran di rantau. Dapat disebutkan jika status ekonomi meningkat maka ketergantungan ekonomi kepada lingkungan akan menurun.



Migran berpendapatan rendah memiliki sikap *in-group* yang berbeda dibanding migran yang berpendapatan sedang dan tinggi. Sebesar 38 persen berpendapatan rendah bersikap *in-group* kuat, pada tingkat pendapatan sedang menjadi 76 persen, kemudian menurun pada tingkat pendapatan tinggi sebesar 67 persen. Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 3.02; ($X^2_{tabel, db=1, \alpha=0.20} = 1.64$), artinya terdapat kecenderungan perbedaan sikap *in-group* menurut tingkat pendapatan.

Peran tingkat pendapatan kembali terlihat pada sikap *out-group*, yaitu tingkat pendapatan rendah lebih kecil pada sikap labil ketimbang berpendapatan sedang dan tinggi. Proporsi migran berpendapatan rendah hanya 50 persen yang labil, sementara pendapatan sedang 85 persen dan tinggi 83 persen. Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 3.26, artinya terdapat perbedaan sikap *out-group* menurut tingkat pendapatan. Migran berpendapatan tinggi lebih lemah sikap *out-group*nya dibanding migran berpendapatan tinggi.

Jumlah Tanggungan. Jumlah tanggungan migran di kota diduga mempengaruhi bagaimana dia bersikap terhadap kebudayaan orang-orang di sekitarnya (*out-group*) dan kebudayaan sendiri yang dimiliki sebelum melakukan migrasi. Hubungan jumlah tanggungan dengan sikap-sikap migran dapat diperhatikan pada Tabel 49. Sikap *in-group* agak menguat sejalan dengan pertambahan jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan rendah memiliki sikap *in-group* yang kuat sebesar 67 persen, sedikit meningkat menjadi 71 persen pada jumlah tanggungan sedang dan meningkat lagi menjadi 75 persen pada tanggungan besar. Sikap terhadap budaya *in-group* dengan $X^2_{hitung, db=2}$ adalah 0.31 lebih kecil dibanding dengan $X^2_{tabel, db=2}$ sebesar 3.28, artinya tidak perbedaan sikap *in-group* migran menurut jumlah tanggungan.

Sikap *out-group* terlihat sebagian besar bersikap labil terhadap jumlah tanggungan baik rendah, sedang, maupun tinggi. Proporsi paling besar terjadi pada migran dengan jumlah tanggungan sedang, yaitu sebesar 90 persen, menyusul tanggungan besar 83 persen dan tanggungan rendah 70 persen. Dengan uji statistik, hubungan sikap *out-group* terhadap jumlah tanggungan diperoleh nilai $X^2_{hitung, db=1}$

sebesar 3.08, artinya tidak nyata pada $\alpha = 0.05$, tetapi masih berada pada batas kecenderungan beda proporsi. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan sikap *in-group* menurut jumlah tanggungan tetapi jumlah tanggungan ini cenderung membedakan sikap *out-group*.

Masa Domisili. Masa domisili migran menunjukkan pengalaman melakukan komunikasi antar budaya di wilayah budaya dominan. Waktu yang dihabis selama berdomisili memungkinkan internalisasi nilai-nilai *out-group* ke dalam sikap migran disadari atau tidak disadari. Penelitian ini menemukan, bahwa sikap *in-group* justru cenderung menguat sejalan dengan penambahan masa domisili. Migran masa domisili singkat, sikap *in-group* lebih rendah dibanding dengan masa domisili di atasnya, yaitu 84 persen pada masa domisili sedang, dan 76 persen pada masa domisili lama. Proporsi seperti itu mengisyaratkan sikap "kebatakan" mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan masa domisili. Nilai $X^2_{hitung, db=2}$ adalah 6.02 lebih besar dari nilai $X^2_{tabel, db=2}$ sebesar 5.99, artinya nyata pada $\alpha = 0.05$.

Sebaliknya pada sikap *out-group* menurut masa domosili berfluktuasi. Pada masa-masa awal (singkat) menempati kota Bogor secara proporsional para migran kebanyakan memperlihatkan sikap *labil* (90 persen), dan mengalami penurunan pada masa domisili sedang (63 persen). Arah pergeseran sikap menuju *kuat*. Artinya sikap mengidealkan budaya *out-group* lebih tinggi. Akan tetapi sikap itu kemudian bergeser lagi ke arah *labil* pada masa domisili lama menjadi 86 persen. Ini berarti sikap mengidealkan budaya Sunda (*out-group*) pertama-tama berada pada posisi ketidakpastian, menguat pada masa domisili sedang dan kembali tidak stabil pada masa domisili lama. Fluktuasi sikap *out-group* tersebut tidak tampak dalam dalam statistik terutama karena proses penggabungan kolom-kolom kecil (sedang dan lama) agar terpenuhi syarat pengujian. Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 1.05, jauh dari kemungkinan untuk menerima pernyataan terdapat perbedaan sikap *out-group* menurut masa domisili ($X^2_{Tabel, db=1, \alpha=0.2} = 1.64$).

2. Jarak Sosial

Setelah diperoleh sikap-sikap migran terhadap kebudayaan *in-group* dan *out-group*. Jarak sosial dalam konteks komunikasi antar budaya memperlihatkan tingkat kedekatan individu-individu (selanjutnya kelompok) dengan orang lain yang berbeda kebudayaan (*out-group*). Jika sikap *in-group* dan *out group* sebelum lebih menekankan pada penelusuran posisi migran dalam dua sistem budaya secara umum, maka jarak sosial dalam lebih bersifat khusus pada kemungkinan migran untuk menempatkan orang-orang *out-group* ke dalam sistem budaya *in-group*. Jarak sosial yang renggang terhadap *out-group* tidak memungkinkan terbentuknya pola hubungan yang bersifat assimilatif (Soekanto, 1987 Oberg, 1972).

Jarak sosial migran Batak Angkola Mandailing dengan masyarakat setempat umumnya masih agak renggang. Sikap *out-group* dan *in-group* masih terbentang *jauh* meski tempat tinggal mereka berdekatan.

Jarak sosial migran berdasarkan Tabel.50 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) **Tingkat pendidikan.** Tingkat pendidikan berperan dalam mempersempit jarak sosial. Migran berpendidikan tinggi semuanya berjarak sosial dekat dengan *out-group*. (2) **Jenis Pekerjaan.** Hubungan jenis pe-kerjaan dengan jarak sosial yang disajikan pada tabel, tampak migran pedagang lebih renggang jarak sosialnya ketimbang migran non pedagang. (3) **Suku bangsa istri.** Semua migran yang beristri sunda memiliki jarak sosial yang dekat dengan *outgroup*. Keadaan ini secara teoritis dapat diterima karena ukuran jarak sosial *sangat dekat* adalah seorang dapat menerima *out-group* sebagai istri. (4) **Umur.** Migran berumur tua cenderung lebih dekat jarak sosialnya dibanding umur dibawahnya. Nilai X^2 dapat diperhatikan pada tabel sebesar 1.99, masih masuk dalam batas kecenderungan beda proporsi. (5) **Tingkat Pendapatan** tingkat pendapatan tidak membedakan jarak sosial migran dengan masyarakat Sunda. (6) **Masa Domisili.** Jarak sosial migran menurut masa domisili tidak terlalu berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terdapat pada kategori sangat dekat, dengan kategori agak dekat.

Tabel 50. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Jarak Sosialnya Dengan Masyarakat *Out-group* Sunda (N=60).

Jarak Sosial		Karakteristik Individu															
		(1) Tingkat Pendidikan			(2) Jenis Pekerjaan		(3) Suku Istri		(4) Umur			(5) Tingkat Pendapatan			(6) Masa Domisili		
		T	S	R	D	MD	B	S	T	S	R	T	S	R	T	S	R
Sangat Dekat	Σ %	2 27	3 8	-	4 8	1 10	2 4	3 100	-	2 9	3 13	-	4 9	1 13	-	4 21	1 5
Dekat	Σ %	5 73	1 2	1 7	3 6	4 40	7 12	-	6 43	-	1 4	4 67	2 4	1 13	5 25	1 5	1 5
Agak Dekat	Σ %	-	2 5	1 7	3 6	-	3 5	-	-	1 4	2 8	-	3 6	-	-	-	3 14
Agak Renggang	Σ %	-	6 15	4 28	9 18	1 10	10 17	-	1 7	3 13	6 26	2 33	5 11	3 37	2 10	3 16	5 24
Renggang	Σ %	-	27 70	8 59	31 62	4 40	35 61	-	7 50	17 74	11 49	-	32 70	3 37	13 65	11 58	11 53
Jumlah	Σ %	7 100	39 100	14 100	50 100	10 100	57 100	3 100	14 100	23 100	23 100	6 100	46 100	8 100	20 100	19 100	21 100

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan: a. Singkatan (1) T = Tinggi; S= Sedang; R= Rendah (2) D = Pedagang Kelontong; MD = Non Pedagang Kelontong ;(3) B = Batak ;S= Sunda. (4) M = Milik Sendiri; K = Kontrak Sewa; D = Dinas.

b. Untuk pengujian beda proporsi, baris-baris sikap digabung menjadi dikotoai dekat dan renggang. Karegori dekat merupakan penggabungan baris sangat dekat sampai agak dekat, sedangkan kategori renggang merupakan penggabungan baris renggang dan agak renggang. Perolehan Nilai nilai χ^2 sebagai berikut:

- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (1)-Jarak Sosial = 19.50, beda nyata
- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (2)-Jarak Sosial = 2.56, cenderung beda
- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (3)-Jarak Sosial = Tidak diuji
- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (4)-Jarak Sosial = 1.99, cenderung beda
- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (5)-Jarak Sosial = 0.0, tidak beda
- χ^2 Hitung;db=1 Karakteristik (6)-Jarak Sosial = 0.0, tidak beda

Derajat bebas (db) disesuaikan dengan syarat pengujian χ^2 .
 Nilai χ^2 Tabel, db=1, $\alpha=0,05=3.84$; χ^2 Tabel, db=1, $\alpha=0,2=1.64$.

Satu faktor lain yang diperoleh kemudian berhubungan dengan jarak sosial migran adalah pemilikan rumah. Kepemilikan rumah menandai adanya keinginan migran untuk menetap di kota. Hal ini memungkinkan dia lebih berkeinginan berintegrasi dengan masyarakat lokal.

Tabel 51. Hubungan Kepemilikan Rumah Dengan Jarak Sosial Terhadap Masyarakat Sunda (*Out-grup*).

Jarak Sosial	Pemilikan Rumah		
	Punya	Dinas	Tidak Punya
1. Sangat Dekat	3 (14)	0 (0)	2 (6)
2. Dekat	3 (14)	2 (50)	2 (6)
3. Agak Dekat	2 (10)	0 (0)	1 (3)
4. Agak Renggang	3 (14)	1 (25)	6 (17)
5. Renggang	10 (48)	1 (25)	24 (69)
Jumlah	21 (100)	4 (100)	35 (100)

Sumber : Data Primer, 1993

Keterangan : Angka dalam kurung persentase (pembulatan)

Setelah melakukan penggabungan kolom *dinas* ke kolom *punya* karena dianggap lebih mendekati, diperoleh nilai X^2 hitung, $db=1$ sebesar 5.29, artinya terdapat perbedaan proporsi jarak sosial migran menurut pemilikan rumah (X^2 Hitung, $db=1$, $\alpha=0,05=3.86$).

Dari hubungan variabel yang diuji ternyata hanya ada dua faktor yang mempengaruhi jarak sosial secara berarti yaitu tingkat pendidikan dan suku bangsa istri, sedangkan faktor yang tampak cenderung mempersempit jarak sosial dengan out-grup sunda adalah status pemilikan rumah dan jenis pekerjaan. Migran yang menempati rumah milik sendiri dan dan bekerja sebagai di luar perdagangan cenderung memperdekat jarak sosial. Fenomene ini kemungkinan berhubungan dengan pertimbangan konsekuensi yang akan diterima jika memiliki rumah dan bertempat di tengah-tengah out-group, yaitu terlibat dalam komunikasi yang lebih mendalam bukan hanya migran pribadi, tetapi juga anggota keluarga. Migran berumur tua tampak memiliki jarak sosial yang lebih dekat ketimbang migran berumur muda, tampak masih berkaitan dengan pertimbangan bahwa besar kemungkinan ana-anaknya menikah dengan masyarakat lokal, yang dengan sendirinya mengantarkan sikapnya pada kategori *kuat*. Seseorang disebut memiliki jarak sosial dekat apabila bersedia menerima masyarakat Sunda sebagai menantu.

Ditinjau dari segi frekuensi interaksi sosial dan jenis pekerjaan migran pedagang lebih intensif berhubungan dengan masyarakat lokal dibanding dengan migran bukan pedagang karena tempat bekerja/berjualan biasanya sekaligus menjadi tempat tinggal menetap. Tetapi frekuensi interaksi ini tidak menjadi faktor yang mempersempit jarak sosial. Keadaan ini mungkin disebabkan, semakin besar migran terlibat dan berpengalaman mengamati tingkah laku masyarakat lokal, semakin besar pula ditemukan objek-objek budaya lokal yang dipandang tidak etis menurut nilai budayanya (*budaya in-group*).

Sikap-sikap individu yang ditunjukkan pada bagian terdahulu merupakan rata-rata dari sikapnya terhadap unsur-unsur budaya *in-group* dan *out-group*. Bila diperhatikan secara seksama sikap-sikap itu ternyata tersusun dari sikap-sikap yang bervariasi atau selektif. Berikut ini dapat diamati unsur-unsur budaya *in-group* mana yang dianggap penting untuk dipertahankan serta unsur-unsur budaya *out-group* mana yang dipandang diteladani.

Dari Tabel 52 terlihat keseluruhan sikap-sikap migran terhadap budaya *in-group* termasuk dalam kategori kuat (skor 3.68) dan sikap terhadap budaya *out-group* termasuk dalam kategori labil (3.07). Hal ini menandakan adaptasi migran yang ditunjukkan oleh sikapnya berpotensi untuk membentuk pola komunikasi antar budaya akulturatif. Dengan kata lain ketika nilai budaya *in-group* dipandang ideal, terbentuk pula sikap mengidealkan budaya *out-group*.

Dari 19 unsur budaya *in-group* dan *out group* terukur ada 5 unsur yang dianggap sama-sama penting (kuat) dalam kehidupan rantau, yaitu tutur kata, sopan santun, gotong royong, bahasa dan solidaritas. Yang menarik dari kesamaan sikap itu adalah kelima unsur budaya berdimensi interaksional, yaitu fungsi budaya banyak terwujud bila berhubungan dengan orang lain. Tuturkata, sopan santun, dan bahasa hanya dapat diwujudkan dan dirasakan bila berkomunikasi dengan orang lain; gotong royong bersifat kolektif; atau nilai-nilai kesetiakawanan dalam bermasyarakat. Ringkas kata kelima unsur budaya banyak digunakan bila berinteraksi dengan orang lain dan berperan strategis dalam komunikasi antar budaya.

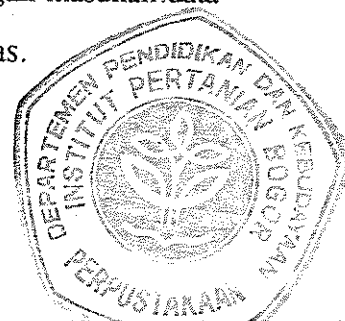
Tabel 52. Skor Rata-rata Sikap Terhadap Budaya In-Group Dan Out-Group Menurut Unsur Budaya

Unsur Budaya	Sikap Migran Terhadap Kebudayaan					
	Batak (<i>In-group</i>)			Sunda (<i>Out-group</i>)		
	Σ Skor	Rata-rata	Kategori	Σ Skor	Rata-rata	Kategori
1. Kekerabatan	249	4.15	4	206	3.43	3
2. Tutar kata	253	4.22	4	223	3.71	4
3. Tatakrama/santun	246	4.10	4	228	3.80	4
4. Adat perkawinan	225	3.75	4	162	2.70	3
5. Pola pemukiman	159	2.65	3	152	2.53	3
6. Gotong royong	245	4.08	4	213	3.55	4
7. Tatacara ibadah	243	4.05	4	189	3.15	3
8. Tatacara rembuan	230	3.83	4	202	3.37	3
9. Seni Suara	207	3.45	3	157	2.62	3
10. Seni Gerak	200	3.33	3	149	2.48	3
11. Makanan/konsumsi	245	4.08	4	138	2.30	2
12. Disain/arsitektur	147	2.45	2	163	2.72	3
13. Perlengkapan RT	175	2.92	3	156	2.60	3
14. Pakaian/Busana umum	176	2.93	3	143	2.38	2
15. Pakaian ibadah	207	3.45	3	193	3.22	3
16. Bahasa	234	3.90	4	228	3.80	4
17. Ketekunan	231	3.85	4	184	3.10	3
18. Kejujuran	258	4.30	4	194	3.23	3
19. Solidaritas	263	4.30	4	209	3.40	4
Jumlah	4193	3.68	4	3489	3.07	3

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : 1. Skor adaptasi individu
 2. Skor terendah : 19, Skor tertinggi : 95
 3. Selang Nilai :
 (1) 1.00 - 1.49 = 1, Sangat Lemah
 (2) 1.50 - 2.49 = 2, Lemah
 (3) 2.59 - 3.49 = 3, Labil
 (4) 3.50 - 4.49 = 4, Kuat
 (5) 4.50 - 5.00 = 5, Sangat Kuat

Hanya ada unsur budaya yang terbentang dalam jarak yang jauh yaitu pola konsumsi, dimana budaya *in-group* masuk dalam kategori kuat sedangkan budaya *out-group* masuk dalam kategori lemah. Tampaknya pola konsumsi budaya *in-group* sampai batas tertentu akan tetap terpelihara karena peran lembaga keluarga yang terpisah Sikap-sikap *in-group* dan *out-group* akan dibandingkan dengan tindakan mereka yang sesungguhnya dalam kehidupan kota. Data-data sikap dilengkapi dengan masukan data lain yang tidak dikuantifikasi bersama dengan data terkuantifikasi di atas.



3. Sikap dan Tindakan Migran

a. Sistem Religi

Sistem religi menyangkut unsur budaya yang paling hakiki dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kontjaraningrat (1981) sistem religi memiliki tingkat konsistensi yang paling tinggi diantara unsur-unsur budaya dan paling sulit berubah. Demikian pula fungsi dan perannya, sistem religi secara fungsional mempengaruhi unsur-unsur budaya lainnya dan seringkali merupakan sumber aspirasi dari totalitas suatu kebudayaan.

Dalam penelitian ini keseluruhan responden baik pada survei tahap pertama (200 orang) maupun wawancara tahap kedua (60 orang) beragama Islam dan masyarakat Bogor dominan beragama Islam. Agama menjadi unsur budaya yang tidak berbeda dalam bagi keduanya dan bila dipandang dari keseluruhan unsur budaya, unsur agama Islam suatu pengecualian dari perbedaan-perbedaan yang kontras.

Oleh sebab itu pendekatan pola adaptasi sistem budaya diukur bukan berdasarkan perbedaan agama secara nominal, tetapi terfokus pada *gaya* (tatacara, suasana, dan perlengkapan) dalam menjalankan ibadah yang mungkin berbeda antar daerah. Meskipun secara universal agama Islam mempunyai landasan ideal yang sama tetapi tidak dapat dihindari munculnya ciri khas beribadat akibat pengaruh kebudayaan lokal. Perbedaan tatacara, suasana, dan perlengkapan beribadat akan lebih mudah terlihat bila seseorang terlibat dalam kegiatan beribadat secara berjamaah misalnya di Mesjid, Majelis Taklim atau Musholla.

Tata cara beribadat yang berlaku di daerah asal dipandang penting untuk diterapkan di sini terlihat dari skor rata-rata yang muncul bernilai 4.0 (kuat). Meskipun demikian tata cara beribadat masyarakat setempat cenderung tidak diabaikan (skor rata-rata 3.0). Tampaknya migran memperlihatkan sikap hati-hati dalam menetapkannya, tidak simpati tetapi juga tidak antipati. Komentar responden tentang tatacara beribadat masyarakat setempat cenderung menjadikan tatacara beribadat di daerah asalnya sebagai standar penilaian. Kehidupan beribadat masyarakat di lingkungan mesjid setempat umumnya menjadi sorotan--- bukan pada jumlah atau kehadiran jam-

aah--- tetapi pada suasana mesjid yang menurut mereka mengalami diskoordinatif, gaduh, kurang mendukung kekhusukan beribadat. Anak-anak atau remaja berkeliaran di sela-sela waktu sholat, bersifat permisif, suatu suasana yang asing bagi kehidupan beribadat di daerah asal.

Agaknya sistem nilai yang berlaku di masyarakat di luar mesjid sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan internal mesjid. Kontrol sosial masyarakat di Tapanuli Selatan berlaku ketat berdasarkan prinsip kekerabatan *dalihan na tolu* memungkinkan seseorang mengawasi setiap anggota masyarakat yang dipandang tidak etis tidak terkecuali dalam beribadat. Stratifikasi sosial berdasarkan umur atau status kawin secara tidak sadar turut mengatur *shaf* dalam mesjid; orang tua berada di *shaf* depan diikuti remaja dan anak-anak di bagian belakang. Ciri-ciri seperti ini kelihatan tidak terpola dalam kehidupan beribadat masyarakat lokal.

Busana ibadah adalah bagian dari kompleksitas kegiatan religi. Dibandingkan dengan tatacara beribadat, kefanatisan untuk menggunakan busana beribadat khas Tapanuli Selatan cenderung *melunak* labil, dalam sikap responden (skor rata-rata 3.3). Sedangkan sikap terhadap busana beribadat masyarakat setempat berada dalam posisi tidak defenitif, antara ragu-ragu dan tidak penting (skor rata-rata 2.6). Skor ini berarti menunjukkan bentuk sikap yang mungkin menyulitkan adaptasi menuju *imitasi*.

b. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan yang diketengahkan dalam bagian ini terbatas pada pengetahuan cerita-cerita dongeng tradisional yang sering didongengkan orang tua kepada anak-anaknya di Tapanuli Selatan. Dongeng yang terangkum dalam penuturan migran misalnya *Sampuraga, Jai Kancil atau Jai Landuk, Sorik Marapi, Bawang Merah-Bawang Putih, dan lain-lain*.

Sebagian besar (81.7 persen atau 49 orang) migran mengatakan mengetahui dan dapat menceritakan satu atau lebih dongeng khas di atas. Dari sejumlah itu 71.4 persen mengatakan ingin dan telah mendongengkan kisah-kisah itu kepada anak cucunya. Sedangkan migran yang memiliki pengetahuan dan dapat menceritakan dongeng Sunda

sebanyak 36.7 persen (22 orang), dan yang akan dan telah menceritakan kisah-kisah itu kepada anak cucunya sebesar 22.7 persen. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada Tabel 53.

Tabel 53. Pengetahuan Migran Tentang Cerita-Cerita/Dongeng Rakyat Batak Angkola-Mandailing dan Sunda Serta Sikap dan Tindakan Menceritakan Kepada Keturunannya.

Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Migran Menceritakan Cerita/Dongeng	Cerita-Cerita Rakyat			
	S u n d a		Angkola-Mandailing	
	Σ (N)	%	Σ/N	%
Pengetahuan				
1. Mengetahui dan mampu menceritakan salah satu cerita/dongeng	22	36.7	49	81.7
2. Tidak Mengetahui	38	63.3	11	
Total	60	100.0	60	100.0
Sikap dan Tindakan				
1. Mengetahui cerita/dongeng, akan dan telah menceritakan dongeng/cerita kepada anak/cucu	5	22.7	35	71.4
2. Mengetahui, tapi tidak menceritakan	17	78.3	14	28.6
Total	22	100.0	49	100.0
Jumlah migran yang tidak terlibat dalam pewarisan pengetahuan budaya	55	91.7	25	41.7

Sumber : Data Primer, 1993.

Memperhatikan Tabel 53 di atas, pewarisan nilai-nilai pengetahuan berupa cerita-cerita rakyat daerah asal kepada anak cucu migran telah berkurang. Jumlah riil pewarisan nilai itu terbatas 58.3 persen dari seluruh migran, sedangkan pewarisan budaya Sunda lebih kecil tetapi sudah banyak yang mengetahui dan dapat menceritakannya.



c. Kesenian

Ekspresi seni adalah salah satu unsur kebudayaan, dalam seni tradisional dikenal dalam bentuk seni gerak dan seni suara (Koentjaraningrat, 1987). Kesenian dalam konteks Batak Angkola-Mandailing tradisional terkait dengan aspek kehidupan lainnya misalnya, pesta perkawinan. Cilek (silat), gondang (gendang), suling bambu adalah instrumen-instrumen yang integral dengan prosesi pesta perkawinan. Oleh karenanya jarang dilakoni diluar kegiatan itu. Meskipun ada sifatnya terbatas atau menikmati secara pasif (mendengarkan). Kecuali yang telah disebutkan, ada juga yang biasa dilakoni dalam kehidupan sehari-hari seperti, **sitogol**, **ole-ole**, **uyup-uyup**, **tulila**, **kicak**, dan lain-lain. Untuk mengekspresikan kesenian itu diperlukan alat bantu yang tidak sepenuhnya tersedia atau terkondisi dirantau (kota). Uyup-uyup misalnya, diperoleh dan dilakoni ketika padi mulai berbulir hingga mendekati panen. Uyup-uyup terbuat dari batang padi muda, sedangkan suling terbuat dari bambu. Kicak dilakoni saat mandi di sungai yang mengalir deras.

Kasus nilai budaya Batak Angkola-Mandailing yang tertangkar diketengahkan.

Di Krangai, suling Batak tak pernah lagi dimainkan kembali. Yang tersisa hanya upacara perkawinan, yang tampak masih asli. ... Begitu selesai upacara perkawinan, penganten wanita bersama barang-barang miliknya diboyong ke rumah laki-laki seperti biasanya adat Mandailing. Orang tua dan kedua mempelai seperti adat asli satu demi satu memberi nasehat untuk kerukunan pasangan baru itu. Sementara sanak keluarga penganten perempuan meratap karena sang putri akan meninggalkan mereka [Attamini, 1985: 41]

Sikap migran terhadap kesenian dari kebudayaan in-grup tergolong *labil* baik seni tari dan maupun seni suara. Skor yang muncul untuk keduanya masing-masing 3.45 dan 3.33. Sedangkan sikap responden terhadap kebudayaan seni out-grup tergolong *lemah* untuk seni tari dan *labil* untuk seni suara walaupun rata-rata skornya hampir berdekatan, 2.62 dan 2.48.

d. Bahasa

Bahasa verbal merupakan unsur budaya yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Bahasa juga merupakan unsur budaya yang memberi identitas kepada pemilikinya. Dengan kemampuan berbahasa seseorang dapat berkomunikasi secara sempurna, mengerti dan memahami aspirasi lawan bicara. Dalam konteks komunikasi

antara budaya, bahasa adalah saluran terdepan dan paling strategis dibandingkan dengan unsur kebudayaan lainnya untuk dapat *merasa* fungsi-fungsi dari objek-objek khusus kebudayaan out-grup.

Sikap migran terhadap bahasa in-grup tergolong *kuat* (skor rata-rata 3.90) dan dengan skor yang sedikit lebih kecil (3.80) sikap terhadap bahasa out-grup juga tergolong *kuat*. Skor sikap ini menandakan bahwa migran sama-sama berkeinginan kuat untuk menggunakan bahasa Angkola dan Mandailing dan Bahasa Sunda secara proporsional dalam pergaulan sehari-hari.

Pola penggunaan bahasa berbeda menurut lawan bicara, yaitu bahasa dengan istri, bahasa dengan anak, bahasa dengan kerabat sesama migran, dan bahasa dengan masyarakat setempat (Sunda). *Pertama*, bahasa utama dengan istri, sebagian besar (80.0 persen) migran menggunakan bahasa Angkola-Mandailing dalam berbicara dengan istrinya. Selibuhnya 11.7 persen menggunakan Bahasa Indonesia dan 6.7 persen menggunakan Bahasa Sunda. *Kedua*, bahasa utama dengan anak, 23.3 Bahasa Batak, 16.7 Sunda, Bahasa Indonesia 60.0 persen. *Ketiga*, Bahasa dengan kerabat, 95.0 persen Bahasa Batak, 5.0 persen Bahasa Indonesia. *Keempat* bahasa dengan masyarakat setempat, 66.7 persen Indonesia, 33.3 persen Bahasa Sunda.

Pola penggunaan Bahasa Batak kepada kerabat menempati posisi teratas lebih kuat dari bahasa dengan istri dan anak. Dalam pewarisan budaya bahasa tampaknya kebiasaan berbahasa seperti itu cenderung melahirkan karakteritik sosial baru pada generasi migran.

Tabel 54. Bahasa Utama Yang Digunakan Migran Menurut Lawan Bicara.

Bahasa	Lawan Bicara			
	Istri	Anak Batak	Kerbat/Sedaerah	Masyarakat Setempat
Batak	47 (78.3)	13 (22.8)	57 (95.0)	0 (0.0)
Indonesia	8 (13.3)	34 (59.7)	3 (5.0)	48 (80.0)
Sunda	5 (8.3)	10 (17.6)	0 (0.0)	12 (20.0)
Jumlah	60 (100.0)	57 (100.0)	60 (100.0)	60 (100.0)

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Angka Dalam kurung, persentase.

1. Bahasa dengan Istri.

Bahasa dengan istri dominan (78.3 persen) menggunakan Bahasa Batak dan semuanya dilakukan oleh responden yang beristri Batak. Semua responden (5 orang) yang berbicara dengan istri menggunakan Bahasa Sunda berasal dari mereka yang beristri Batak. Dua pertiga dari pengguna Bahasa Indonesia beristri Batak dan selebihnya beristri Sunda. Penggunaan Bahasa Sunda sebagai bahasa utama bagi mereka yang beristri Batak relatif sedikit tetapi cukup memberi indikasi bahwa penyesuaian dari sisi bahasa mengarah pada pola akulturatif. Pergaulan suami dan istri dengan masyarakat atau melalui kebiasaan anak berbahasa Sunda sadar tidak sadar turut berperan menggeser kebiasaan berbahasa suami istri.

Mereka yang beristri Sunda semua menggunakan Bahasa Indonesia dalam berbicara sesama mereka. Tampaknya pemakaian bahasa diantara mereka lebih memilih jalan tengah, bukan salah satu diantara Bahasa ibu, Sunda atau Batak. Meskipun demikian pihak yang lemah dari segi konsistensi dan pewarisan budaya berada pada pihak suami, karena penetrasi Bahasa Sunda lebih mungkin mengenai dirinya dari pada penetrasi Bahasa Batak kepada istrinya akibat lingkungan sosial yang dominan berbahasa Sunda.

Karakteristik lain dari migran pengguna Bahasa Sunda bila berbicara dengan istri adalah : (1) memiliki waktu domisili *sedang* (60.0 persen) dan *singkat* (40 persen); (2) memiliki rumah sendiri (60.persen) dan kontrak (40.0) persen; (3) berumur muda (40.0 persen) dan sedang (60.0 persen); (4) Tingkat pendidikan rendah (20.0 persen) dan sedang (80.0 persen); (5) menempati pekerjaan berdagang (80.0 persen) dan non dagang (20.0 persen). Sementara itu, mereka yang menggunakan Bahasa Indonesia berbicara dengan istrinya memiliki ciri-ciri : (1) memiliki waktu domisili *lama* (44.4 persen), *sedang* (22.2 persen) dan *singkat* (33.3 persen); (2) memiliki rumah sendiri (33.3 persen) dan kontrak (66.7 persen); (3) berumur muda (66.7 persen), sedang (11.1 persen), dan tua (22.2 persen); (4) Tingkat pendidikan rendah (11.1 persen) dan sedang (66.7 persen), dan tinggi ; (5) menempati pekerjaan Dagang (44.4 persen) dan non Dagang (55.6 persen).

2. Berbicara dengan Anak

Jenis bahasa yang digunakan berbicara dengan anak secara proporsional berbeda dengan bahasa berbicara dengan istri. Bila bahasa dengan istri dominan menggunakan Bahasa Batak, maka sebaliknya berbicara dengan anak sebagian besar (59.6 persen) menggunakan Bahasa Indonesia. Selebihnya, dalam proporsi yang hampir sama menggunakan Bahasa Batak (22.8 persen) dan Sunda (17.5 persen). Karakteristik pengguna Bahasa Batak berbicara dengan anak adalah : (1) Semua beristri Batak ;(2) memiliki waktu domisili *domisili lama* (23.1 persen) *sedang* (15.4 persen) dan *singkat* (61.5 persen); (3) memiliki rumah sendiri (30.8 persen), kontrak (69.2) persen dan Dinas (7.7 persen); (4) berumur muda (41.1 persen) dan sedang (30.1 persen) dan Tua (23.1 persen); (5) Tingkat pendidikan tinggi (7.7 persen) sedang (61.5 persen) dan rendah (30.1 persen); (6) menempati pekerjaan berdagang (92.3 persen) dan non dagang (7.7 persen).

Karakteristik responden pengguna Bahasa Indonesia berbicara dengan anak adalah : (1) Semua beristri Batak ;(2) memiliki waktu domisili *domisili lama* (23.1 persen) *sedang* (15.4 persen) dan *singkat* (61.5 persen); (3) memiliki rumah sendiri (30.8 persen), kontrak (69.2) persen dan Dinas (7.7 persen); (4) berumur muda (41.1 persen) dan sedang (30.1 persen) dan Tua (23.1 persen); (5) Tingkat pendidikan tinggi (7.7 persen) sedang (61.5 persen) dan rendah (30.1 persen); (6) menempati pekerjaan berdagang (92.3 persen) dan non dagang (7.7 persen).

Karakteristik responden pengguna Bahasa Sunda berbicara dengan anak adalah : (1) beristri Batak (90.0 persen) dan Sunda (10.0 persen); (2) memiliki waktu domisili *lama* (20.0 persen) *sedang* (50.0 persen) dan *singkat* (20.0 persen); (3) memiliki rumah sendiri (40.0 persen) dan kontrak (60.0) persen ;(4) berumur muda (60.0 persen) dan sedang (40.0 persen) ; (5) Tingkat pendidikan sedang (100.0 persen) ; (6) menempati pekerjaan berdagang (90.0 persen) dan non dagang (10.0 persen).

3. Bahasa Dengan Kerabat

Berbicara dengan kerabat sesama migran hampir semua (95.0 persen) menggunakan

Bahasa Batak dan selebihnya (5.0 persen) menggunakan bahasa Indonesia. Mereka yang menggunakan Bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri: pendidikan *Tinggi*, masa domisili *lama*, memiliki rumah sendiri, beristri Batak, berumur Tua, berprofesi non Dagang.

4. Bahasa Dengan Masyarakat Setempat/Lokal

Bahasa utama yang digunakan migran berbicara dengan masyarakat lokal umumnya Bahasa Indonesia (73.3 persen), selain Bahasa Sunda (26.7 persen). Responden yang menggunakan Bahasa Sunda semua berasal dari mereka beristri Batak, separuh (50.0 persen) menempati rumah milik sendiri, berprofesi sebagai pedagang (81.25) dan tingkat pendidikan sedang (68.75).

Sebuah perbandingan dapat diperhatikan pada hasil pengamatan Attamini (1985) di Semenanjung Malaysia. Perilaku berbahasa orang Angkola Mandailing di sana dilukiskan sebagai berikut :

Suasana Tapanuli baru terasa ketika mendengar percakapan mereka. Semua menggunakan Bahasa [*Aangkola*¹]-Mandailing, termasuk anak-anak di sekolah menggunakan bahasa Melayu. Ini sungguh berbeda dengan suku-suku Sumatera yang tinggal di Malaysia. Suku-suku lain umumnya sudah tak tahu lagi bahasa datuk-datuknya. ... bahkan, ketika berbicara Melayu, lidah Mandailing ini masih terdengar tebal. Ketika [*seorang perantau pemukim, penulis*] berkunjung ke Mandailing Kadang tidak mengerti beberapa kata yang mereka ucapkan, meski sama-sama berasal dari Mandailing *Godang*. Di daerah asli itu kata-katanya sudah tak dipakai lagi. Sudah bercampur dan berubah mengikuti zaman. Jika bahasa mereka murni, sebagian dari daerah asal mereka justru sebaliknya [1985: 41].

Mengikuti uraian di atas terlihat proses perubahan bahasa sedemikian lambat, malah lebih asli dari induk kebudayaannya, sesungguhnya menggambarkan kuatnya orientasi mereka ke daerah asal. Konservasi unsur budaya bahasa seperti itu memang sulit untuk disejajarkan dengan perilaku berbahasa migran yang terjaring dalam peneli-

1. Penulis. Orang-orang yang berdiam di Tapanuli bagian selatan sering dikonotasikan sebagai orang Mandailing. Dalam tulisannya yang panjang lebar ternyata disebutkan komposisi marga pemukim di sana ada juga bermarga Siregar, Pohan, Pane, Hasibuan, yang bila diperhatikan menurut peta sosialnya berasal dari Angkola.

tian ini. Kecuali berbeda *setting* pindah juga dipengaruhi oleh isolasi geografis. Attamini (1985) mengatakan, pemukiman orang Mandailing di Semenanjung, teramat, dibentuk pada awal abad ke-20 di wilayah subur Krangai, terpisah dengan pemukiman penduduk pribumi, interaksi sosial antar budaya secara intensif baru berlangsung belakangan. Pemukiman itu terbentuk merupakan prakarsa seorang *guru ngaji* dari pemukiman lain---bukan migrasi langsung dari Mandailing--- setelah memperoleh izin pemukiman dari penguasa. Homogenitas budaya manusia penyusun komunitas, membentuk jaringan pewarisan budaya yang langgeng sampai saat ini.

Perlindungan yang kuat terhadap kebudayaan lama di Semenanjung tampaknya lebih tepat untuk disejajarkan dengan terciptanya mosaik yang terjadi di Sumatera Timur (Cunningham, 1957; Pelly, 1992). Hubungan antar etnis Toba, Karo, Jawa, dan pribumi Melayu hanya terbatas pada hubungan saling membela dalam konflik, tukar-menukar atau perdagangan barang di pasar, sementara ciri esensial dari kebudayaan mereka tetap dipertahankan. Orang Mandailing seperti disebutkan Pelly (1992) lebih beradaptasi dengan kalangan tetapi tidak melepaskan dari tujuan immanent memperoleh jatah tanah ulayat, untuk mendirikan *huta* sama seperti orang Batak Toba.

Satu lagi perbedaan yang dapat dijadikan sebagai alasan mengapa perilaku berbahasa jauh berubah sampai ke dalam keluarga prokreasi. Perpindahan ke Semenanjung terjadi jauh sebelum terjadi perubahan-perubahan besar dalam sistem sosial Angkola Mandailing tradisional. Terpaan nilai-nilai Islam sejak perang Pederi (1810-1330), konsep *floating mass* yang diberlakukan pemerintahan Kolonial Belanda melalui penguangan kekuasaan raja huta, imbas revolusi sosial di Sumatera Timur, struktur pemerintahan desa zaman kemerdekaan, kapitalisme, ekonomi uang, arus informasi dan globalisasi desa adalah determinan eksternal yang mengurangi kemampuan *self sufficiency* kebudayaan, termasuk perilaku masyarakat berbahasa. Migran, dalam penelitian ini sebagian besar tersosialisasi dalam suasana itu.

Orientasi nilai migran berbicara dengan anak dan istri tampak berbeda dengan berbicara dengan kerabat. Keadaan seperti itu menandakan fungsi orientasi nilai dari

lembaga keluarga prokreasi telah bergeser dari homogenitas menjadi heterogenitas kultural. Keluarga prokreasi merupakan lembaga satu-satunya yang terpisah dari masyarakat yang lebih luas dalam proses sosialisasi anak dari manusia biologis menjadi manusia sosial (Goede, 1991). Bila dalam keluarga atau rumahtangga migran menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa out-grup, selektif atau seragam, maka memungkinkan untuk membentuk pribadi anak yang tidak memiliki identitas bahasa ibu-bapaknya. Hal ini tampaknya sudah menjadi kecenderungan pada keluarga Batak migran umumnya atau mungkin migran dari suku bangsa yang lain.

Pengaruh budaya dominan di pihak lain sangat potensial untuk membentuk perilaku berbahasa anak. Meski Bahasa Nasional diberlakukan di sekolah-sekolah, Bahasa Sunda tampak intensif digunakan anak-anak dalam bergaul, khususnya di pemukiman penduduk yang homogen pribumi Sunda. Interaksi sosial anak yang demikian, didukung oleh ketidakbiasaan orang tuanya berbicara dalam bahasa leluhur, pada gilirannya akan memperjelas arah penyesuaian anggota-anggota keluarga prokreasi migran kepada komformitas bahasa dengan out-grup. Penggunaan bahasa oleh migran yang terstruktur menggambarkan bahwa konsistensi kebudayaan Batak pada kelompok migran hanya terpelihara pada interaksi sesama kerabat, melemah pada keluarga prokreasi. Artinya karakteristik generasi-generasi sesudah migran akan jauh berubah dari orangtuanya.

e. Sistem kemasyarakatan

Sikap migran terhadap sistem kemasyarakatan diukur melalui beberapa unsur tatanan sosial masyarakat, yaitu tatacara bergotong royong, kesetiakawanan sosial, bermufakat dan bermusyawarah, dan sikap-sikap bermasyarakat seperti kejujuran dan solidaritas umumnya menempati kategori sikap kuat baik dari segi budaya Batak maupun Budaya sunda. Sikap-sikap itu berpotensi untuk dibentuk dalam budaya-budaya terwujud seperti berorganisasi, baik organisasi dengan masyarakat lokal (*out-group*) maupun organisasi sesama migran (*in-group*).

Tabel 55. Keikutsertaan Migran Dalam Organisasi/Kelompok/Perkumpulan Etnis dan Organisasi/Kelompok/Perkumpulan Masyarakat Setempat Serta Status Keanggotaannya (N=60).

Keikutsertaan Dan Status	Organisasi/Kelompok/Perkumpulan*	
	Etnis atau sesama Angkola-Mandailing	Masyarakat Lokal/Setempat
1. Ikutserta Ketua/Penasehat/ Sesepuh Pengurus Lainnya Anggota Biasa	3 (5.9)	3 (12.5)
	12 (23.5)	4 (16.7)
	36 (70.6)	17 (70.8)
	-----	-----
	51 (100)	24 (100.0)
2. Tidak Ikutserta	9	36

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan: - * Memenuhi syarat azas hierarkis dan formalitas.
- Angka dalam kurung, persentase.

Tabel 55 di atas menunjukkan, sebagian besar migran mengikatkan diri dalam organisasi/kelompok etnik di kota, tetapi hampir separuh dari mereka turut dalam organisasi yang anggotanya dominan masyarakat lokal. Status migran dalam organisasi masyarakat lokal malah ada yang menjabat sebagai ketua/penasehat/sesepuh, selain yang berstatus sebagai pengurus biasa dan anggota biasa. Hal ini dapat menjelaskan bahwa migran ingin berintegrasi dengan masyarakat setempat tanpa menghambat aktifitas-aktifitas primordial dan emosional yang akan diperoleh di kelompok-kelompok etnik.

Konflik antara migran dengan masyarakat lokal jarang terjadi. Dari 60 orang migran hanya 4 orang (6.7 persen pernah mengalami ketegangan dan konflik dengan masyarakat lokal (Tabel 52).

Peristiwa konflik migran dengan masyarakat sedemikian rendahnya tampak kontradiktif dengan sejarah masa lalu, dimana Orang Sunda, tidak terkecuali yang mendiami Bogor, umumnya tidak familier dengan Orang Batak. Pasukan Batalion Malau pada tahun 1949 berjasa dalam menguatkan etnosentrisme orang Sunda pada orang Batak umumnya, *Orang Batak Kasar*. Selain sifat-sifat masyarakat Sunda yang

halus dan relatif terbuka pada pendatang, kondisi yang tergambar dalam pergaulan migran ini bisa merupakan akomodasi berbentuk saling menahan diri yang tidak didahului oleh konsensus pada masing-masing pihak. Tetapi kemudian komunikasi antar budaya mengalami pelancaran ketika migran terlibat dalam organisasi masyarakat lokal. Tanpa sikap terbuka dan toleransi tidak memungkinkan bagi migran untuk menjadi orang yang dituakan dalam organisasi masyarakat lokal.

Kontak sosial yang intensif mempercepat proses asimilasi (Soekanto, 1984). Jarak geografis yang berjauhan sesama migran mengurangi frekuensi interaksi sesama mereka dan mendorong interaksi intensif dengan masyarakat lokal.

Tabel 56. Persepsi Migran Tentang Suasana Bergaul Dengan Masyarakat Lokal (out-group).

Orang Yang Dihubungi	Pernyataan		
	Sering Bergaul	Dihubungi bila kesulitan	Dimintai Petuah
1. Orang Sedaerah	18 (30.0)	32 (53.3)	52 (88.7)
2. Orang Setempat	42 (70.0)	28 (46.7)	7 (11.7)
3. Lain-lain	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)
Jumlah	60 (100.0)	60. (100.0)	60 (100.0)

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Angka dalam kurung, persen.

Sampai batas bergaul, masyarakat lokal dominan dalam interaksi sosial migran. Intensitasnya kemudian menurun dalam hubungan saling membantu dalam kesulitan, dan menurun lagi untuk hubungan meminta nasehat atau petuah. Struktur interaksi demikian menandakan sikap dan tindakan migran belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem *out-group*. Suasana interaksi dengan masyarakat lokal yang dirasakan migran umumnya tidak terlalu istimewa, seperti perpepepsi yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 57. Persepsi Migran Tentang Pengalaman Bergaul Dengan Masyarakat Lokal (out-group).

Persepsi	Frekuensi	Persentase
1 Sangat Menyenangkan	3	5.0
2 Menyenangkan	12	20.0
3 Biasa Saja	45	75.0
4 Tidak Menyenangkan	0	0.0
5 Sangat Tidak Menyenangkan	0	0.0
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Persepsi migran tentang pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat lokal memperlihatkan suasana komunikasi yang mapan, tanpa gejolak meski terdapat perbedaan budaya diantara mereka. Hal ini sesuai dengan sikap terhadap budaya *out-group* yang ditunjukkan bagian sebelumnya. Sikap terhadap budaya *out-group* yang *labil* bermakna hampir sama dengan persepsi *biasa saja*, artinya tidak antipati atau simpati, tetapi empati.

Sikap-sikap yang terbentuk pada migran dipengaruhi oleh adanya sistem lain diluar sistem masyarakat lokal, yaitu paguyuban/kelompok etnik yang berfungsi memenuhi kebutuhan migran; dan keberadaan kelompok-kelompok diantara mereka berperan menghalangi penyesuaian budaya mereka dengan kebudayaan masyarakat setempat.

Kemunculan kelompok, asosiasi atau paguyuban migran di kota-kota tujuan merupakan kejadian yang umum terjadi di Indonesia (Hamid dan Ahmad 1992; Abus-tam, 1987; Sjahrir, 1983; Situmorang, 1983; Bruner, 1974). Gejala ini menggambarkan bahwa migran tidak ingin melibatkan diri sepenuhnya dengan kehidupan sosial di daerah yang baru dan tampaknya di lingkungan sosial baru ada kebutuhan migran yang tidak terpenuhi.

Kehadiran asosiasi marga di kota-kota rantau sejak lama merupakan fenomena kultural dalam perantauan Orang Batak (Sjarir, 1983). Sementara itu Situmorang

(1983) mengatakan asosiasi marga Orang Batak Toba yang spontan di kota rantau adalah lahir dan berkembang dari tradisi bermarga.

Persekutuan migran Batak Angkola-Mandailing umumnya terbentuk atas dasar:

(1) ikatan genealogis marga; (2) ikatan teritorial di daerah asal ; (3) Ikatan keluarga. Ketiga jenis kelompok mempunyai kekhasan masing-masing, walaupun pada dasarnya sama-sama bertujuan membantu migran untuk mempercepat proses adaptasi. Di samping itu, ketiga jenis persekutuan berfungsi saling melengkapi dan bukan saling meniadakan, walaupun mungkin keanggotaan migran yang rangkap akan mengakibatkan perhatian dan partisipasinya pada salah satu kelompok atau keduanya berkurang.

Kelompok marga dan keluarga. Kelompok marga didasari oleh prinsip ikatan darah (marga), bebas dari batasan teritorial ataupun status sosial lain. Dalam Bahasa Angkola-Mandailing perkumpulan marga biasanya dinamakan *parsadaan marga Anu dohot anak boruna*) dimana anggotanya adalah orang-orang semarga, ditambah kelompok *anak boru* (keluarga-keluarga dari pihak suami-suami anak gadis marga). Otoritas serta kepemimpinan kelompok senantiasa berada di tangan marga, sedangkan pihak anak boru berfungsi sebagai pelengkap.

Sifat-sifat kelompok marga dalam banyak hal dapat ditemukan dalam kelompok keluarga. Akan tetapi tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan kedua jenis kelompok mempunyai bentuk yang sama. Terbentuknya kelompok keluarga lebih menampakkan bentuk dan fungsinya sebagai sebuah keluarga luas, bersifat informal, memiliki ikatan emosional dan perasaan kesamaan (*in-group feeling*) yang sangat kuat. Hal ini dimungkinkan karena anggotanya terdiri atas anggota-anggota keluarga yang dekat seperti saudara kandung, ipar, paman, atau anak. Peranan dari salah satu anggotanya tidak dapat diwakilkan kepada yang lain.

Pada dasarnya kelompok keluarga lahir secara spontan, biasanya terbentuk diantara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dekat atau sangat dekat, baik karena ikatan darah atau perkawinan. Masing-masing penyusun mempunyai status

keanggotaan yang sama dalam kelompok walaupun dalam hubungan kekerabatan status masing-masing akan berbeda sesuai dengan konsepsi kekerabatan *dalihan natolu*. Kelompok keluarga ini tidak asing di kota Bogor karena banyak diantara migran yang saudara bersaudara sama-sama tinggal di dalam Kota atau kota-kota terdekat.

Kelompok Teritorial. Pada tahun-tahun awal penempatan Kota Bogor (tahun 1960-an) jumlah migran masih terbatas dan mereka mengikat diri dalam kelompok yang mengatasnamakan Tapanuli Selatan sebagai nama kelompok, bukan Angkola atau Mandailing yang lebih berkonotasi wilayah kebudayaan. Kelompok migran yang tergolong tua seperti dicitrakannya¹ bernama Imatapsel (Ikatan Masyarakat Tapanuli Selatan) pada tahun 1960-an. Anggota kelompok waktu itu umumnya telah menikah (orang tua) dan kebanyakan bekerja sebagai pegawai negeri dan ABRI. Pada tahun 1963 kalangan mahasiswa asal Tapanuli Selatan yang belajar di Kota Bogor juga membentuk organisasi Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan dengan singkatan nama yang sama dengan kelompok orang tua, yaitu *Imatapsel*. Ikatan Masyarakat Tapanuli Selatan (Orang tua) tidak terdengar lagi keberadaannya sedangkan Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan sampai saat ini masih aktif.

Pada tahun 1993 kelompok migran kurang lebih 15 buah. Pada awalnya hampir semua anggota kelompok bergabung dalam HIKTAS (Himpunan Keluarga Islam Tapanuli Selatan), suatu kelompok yang menghimpun anggota tanpa memperhatikan desa asal. HIKTAS didirikan pada tahun 1989, diketuai seorang anggota ABRI oleh sampai saat ini masih berjalan tetapi intensitas kegiatannya telah menurun dibanding dengan permulaan berdirinya.

Pengelompokan migran berdasarkan wilayah sub etnis (Angkola, Mandailing, Padang Lawas); huta atau beberapa huta tampak menggejala. Hal ini terjadi karena :

1. Wawancara bebas dengan Siregar, seorang migran perindahan Tahun 1961 tanggal 18 Agustus 1993.

(1) jumlah migran Angkola-Mandailing yang mendiami kota bertambah pesat, dan; (2) Daerah asal migran di Tapanuli Selatan kian tersebar. Proses pergeseran bentuk kelompok dan keterlibatan migran dalam kelompok berlangsung secara bertahap. Kelompok yang lebih besar senantiasa dianggap penting bagi migran, tetapi keragaman latar belakang seperti daerah asal, pekerjaan dan adakalanya perbedaan sifat-sifat sub etnis Angkola dan Mandailing dan jarak sosial anggota menyulitkan koordinasi kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketika jumlah migran masih sedikit perbedaan sifat-sifat sub etnis dieliminir sedemikian rupa dan masing-masing migran berusaha menonjolkan kesamaan diantara mereka. Misalnya, dalam penggunaan nama kelompok yang mengatasnamakan wilayah kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah asal anggota, bukan atas wilayah kebudayaan (Angkola atau Mandailing), atau huta seperti yang dominan terlihat belakangan ini. Keberadaan orang *sehuta* apalagi dalam jumlah besar di kota akan mengurangi ketergantungan seseorang terhadap migran yang berasal dari huta/desa lain.

Berbeda dengan kelompok migran, organisasi mahasiswa asal Tapanuli Selatan tidak mengalami kevakuman atau fragmentasi. Imatapsel satu-satunya organisasi mahasiswa asal Tapanuli Selatan di Kota Bogor. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh jumlah anggotanya yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Secara formal pembentukan organisasi ditujukan untuk: (1) membina kekeluargaan diantara migran yang dijiwai oleh prinsip tolong menolong dan perasaan senasib sepenanggungan. Tujuan ini mengisyaratkan pentingnya aktualisasi nilai-nilai kebersamaan saling membantu antar sesama migran. Dalam umpama Batak Angkola-Mandailing disebutkan *songon siala sampagul rap tuginjang rap tutoru, malamun saulak lalu, magulang saulak margulu*; (2) membina mental spritual dan membangun kesejahteraan anggota; (3) membina hubungan silaturahmi sesama anggota.

Kelompok migran atas dasar teritorial daerah asal mempunyai kegiatan yang kompleks. Di dalam kelompok terdapat aktifitas-aktifitas ekonomi, keagamaan, dan

sosial budaya. Dipandang dari segi fungsinya kelompok migran kurang lebih sama dengan *huta* di daerah asal. Meski azas ciri formalitas, hierarkis organisasi mulai diterapkan prinsip hubungan sosial *siluluton siraon* tetap terjaga diantara mereka.

Aktivitas ekonomi dalam kelompok migran umumnya ber bentuk Arisan dan koperasi simpan pinjam, yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau selang-seling. Tingkat mobilisasi dana dalam kelompok bervariasi berdasarkan jumlah anggota dan jumlah iuran. Semakin besar jumlah iuran dan jumlah anggota yang terlibat dalam kelompok maka semakin besar pula dana yang dipertukarkan dalam kelompok. Keikutsertaan anggota dalam mengikuti arisan dan koperasi bukan suatu keharusan, sedangkan kehadiran dalam mengikuti kegiatan rutin di luar arisan dan koperasi berlaku ketat. Kelalaian seseorang untuk menghadiri kegiatan rutin setidaknya akan mendapat sanksi sosial berupa bahan pembicaraan anggota lain dalam kelompok. Namun jarang anggota yang melewatkan kegiatan arisan dan koperasi simpan pinjam. Arisan dan koperasi simpan pinjam mendidik anggotanya untuk berpola hidup hemat dan terbiasa menabung dengan cara yang halal, disamping adanya unsur tolong menolong sesama anggota. Di luar kelompok praktek pinjam-meminjam antar personal juga lazim dilakukan baik dalam bentuk pinjaman barang dagangan maupun uang untuk menambah modal atau keperluan mendadak lainnya.

Waktu dan perhitungan biaya transportasi membatasi aktifitas lebih intensif, sehingga beberapa kegiatan dilakukan bersamaan dalam kurun waktu mingguan, dua mingguan, bulanan, dan triwulanan. Frekuensi pertemuan dalam kelompok kebanyakan berlangsung mingguan. Kegiatan kelompok dilakukan secara bergiliran di rumah anggota kelompok, tetapi ada juga yang menetap di salah satu atau dua rumah tokoh kelompok.

Berikut ini akan diuraikan dua bentuk aktifitas bersama migran yang teramati selama di lapang, yang pertama adalah tahlilan kematian yang berlangsung secara kolektif oleh masyarakat migran, dan yang kedua secara khusus menyoroti kegiatan

pada satu kelompok. Kegiatan bersama sesama migran seperti ini memungkinkan untuk menemukan bagaimana wajah kebersamaan di rantau dibandingkan dengan di desa asal.

Tahlilan adalah bentuk kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh sesama migran apabila salah satu keluarga tertimpa musibah meninggal dunia. Tahlilan umumnya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam diisi dengan pembacaan doa-doa islami untuk mendoakan keselamatan orang yang meninggal dunia. Pada masyarakat Batak Angkola Mandailing yang umumnya beragama Islam kegiatan ini termasuk dalam kompleks kegiatan *siluluton* (kemalangan). Kegiatan tahlilan secara bersama merupakan manifestasi dari nilai-nilai *tangi di siluluton, bege di siriaon* (tanggap atau sigap pada kemalangan kesedihan kerabat, tahu akan kegembiraan atau suka ria kerabat). Nilai budaya itu menuntun setiap orang untuk memberikan bantuan moral dan material yang lebih dipentingkan pada kemalangan tanpa mengurangi makna menempatkan diri dalam kegembiraan sesama.

Kegiatan tahlilan biasanya terlaksana dengan spontan di kota. Bahkan tahlilan cenderung lintas teritorial, baik kemalangan migran di kota maupun kemalangan anggota keluarga yang terjadi di kampung. Seorang migran yang mengalami musibah di kota dengan cepat tersebar ke berbagai penjuru ---dimudahkan fasilitas kota--- satu demi satu berdatangan melayat dan melaksanakan tahlilan, tiga malam berturut tetapi ada juga yang sampai tujuh hari. Sedangkan musibah terjadi di daerah asal, tahlilan seringkali dimundurkan oleh karena migran yang mengalami kemalangan biasanya pulang ke kampung, tetapi itu tergantung jarak kedekatan keluarga. Tahlilan untuk musibah kematian di kota biasanya melibatkan masyarakat lokal, suatu pertanda adanya pergaulan migran dengan lingkungan sosialnya. Sebelum peserta tahlilan beranjak, pembagian sedekah berupa makanan (*besekek*) kerap dilakukan, walaupun di daerah asal kebiasaan seperti itu tidak ada. Sedekah diberikan dalam bentuk makan bersama yang dihidangkan di tempat tanpa adanya pembungkusan untuk di bawa ke rumah. Prosesi

tahlilan juga tampak berbeda antara tahlilan bergaya sunda dan bergaya Angkola-Mandailing. Oleh karena perbedaan kebiasaan ini, tahlilan yang mengikutkan masyarakat lokal berlangsung dua tahap. *Tahap pertama*, tahlilan dengan masyarakat setempat yang diikuti oleh beberapa orang kerabat yang mengalami kemalangan. *Tahap kedua*, diisi dengan prosesi tahlilan ala Angkola-Mandailing yang sepenuhnya diikuti oleh kerabat-kerabat sederhana.

Menurut pengamatan, selain hidangan di tempat, pemberian *besek* juga sudah diterapkan kepada kerabat sederhana. Pola perubahan prosesi tahlilan seperti itu, mencerminkan terbentuknya akulturasi budaya di pihak migran. Pemberian *besek* dan makan bersama di tempat tahlilan kepada kerabat sederhana mencirikan dua bentuk budaya, yaitu Batak Angkola-Mandailing dan Sunda.

Kegiatan kelompok (Sebuah Kasus (1)). Sebuah kelompok *huta S*, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Tapanuli Selatan bernama formal IMS. Kelompok beranggota kebanyakan sebagai pedagang kelontong, sebagian kecil berprofesi sebagai sopir angkutan kota, menikah, dan ada satu orang yang bekerja sebagai karyawan swasta. Umur anggota umumnya sekitar 20-40 tahun. Meski nama kelompok berciri desa asal, tetapi ada juga anggotanya yang berasal dari desa-desa terdekat. Jumlah anggota yang aktif sebanyak 43 orang, diluar itu ada beberapa orang yang bukan anggota formal kelompok, tetapi sering mengikuti kegiatan-kegiatan kelompok IMS karena sama-sama berasal dari desa S. Tempatnya berada di luar Bogor (Bekasi dan Depok). Secara formal, kelompok berbentuk organisasi yang memiliki aturan-aturan tertulis (AD/ART) dan terstruktur (hierarkis). Pengamatan kegiatan kelompok adalah sebagai berikut:

Hari pertama, menghadiri kegiatan rutin kelompok tampak tuan rumah telah berkemas menanti tamu-tamu. Rumah tempat pertemuan berada di pemukiman padat Kecamatan Ciomas, sekitar 30 meter masuk ke dalam dari pinggir jalan besar. Di sebelah rumah terdapat parit pembuangan yang di sisi atasnya sebelah kanan bertengger tembok-tembok rumah penduduk. Anak-anak kecil dan orang-orang hilir mudik melewati gang di pinggir jalan lain parit, sebuah pemandangan yang tidak asing teramati di pemukiman belahan lain kota.

Rumah pertemuan tidak terlalu besar tapi tersedia ruang tengah kira-kira 4x5 meter. Di serambi depan terdapat warung/kedai dengan luas kurang lebih 3x4

meter, yang terhubungkan oleh pintu ke ruang tengah. Dari ruang tengah orang-orang yang melewati gang hanya tampak sebatas kepala tertupi horden yang dipasang di jendela.

Kira-kira 10 rumah ke bagian dalam gang terlihat ada warung kecil.

Tikar plastik pabrikan dihamparkan di ruang tengah menutupi sebagian pelataran, sebagian lagi dipenuhi tikar pandan (*amak, lage*) tikar khas kerajinan tangan Tapanuli Selatan yang terbuat dari pandan. Suasana tidak begitu asing, layaknya *marpokat* atau *martahi* (bermufakat) yang biasa ditemui di desa.

Seminggu sebelumnya diperoleh informasi kegiatan kelompok dimulai pukul 14.00 WIB, tetapi disepakati dengan ketua kelompok untuk hadir lebih awal, jam 13.18 WIB sampai di tempat. Jam 13.50 WIB seorang tamu datang menyalami tuan rumah, hingga jam 14.15 WIB terhitung ada 12 orang di dalam ruangan, sementara 5 orang masih berada di luar. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dimulai. Seseorang terlibat dalam obrolan dengan yang lain tentang pengurusan KTP adiknya. Dalam obrolan itu terdengar tutur kata yang lazim *uda* dari seorang ke yang lain; di sisi ruangan bagian depan 4 orang bercanda dan tertawa tercekikikan. Dialek Mandailing yang khas tampak membentuk suasana akrab sesama mereka. Sekali-sekali tercetus guyonan berbahasa Sunda dengan dialek agak lain dengan yang biasa di dengarkan dari obrolan masyarakat setempat, terkesan tebal pengucapannya. Tepat pukul 14.28 WIB tampak tanda-tanda acara akan dimulai. Seorang yang sejak tadi berada di dalam ruangan spontan *manggore* (memanggil, mengajak): "*Adope masuk bo hamu nasution, ita mulai mada rohangu*" (Ayolah nasution, tampaknya acara sudah bisa kita mulai).

Terhitung 33 orang telah memasuki ruangan, di bagian depan terlihat lebih banyak tamu yang berumur rata-rata lebih tua, diantaranya ada seseorang yang agak beda, tidak banyak bicara, memakai peci putih, menghadap tas kecil dihadapannya. Seseorang kemudian mengucapkan "Assalamualaikum Wr.Wb ...". Tanda acara benar-benar akan dimulai. Tetapi kemudian, sebentar pembuka acara terlibat dengan bisik-bisik dengan orang yang disampingnya. Tampaknya ingin meminta pendapat tentang sesuatu, kemudian dia melanjutkan "Adapun acara kita hari adalah sebagai berikut, pertama, Insya Allah akan kita mulai dengan pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak ..., acara kedua sehubungan dengan berpulangnya ke rohmatullah orang tua kita dari Bapak ..., tanpa diminta kami dari pengurus berniat memberikan sedekah yang juga akan disampaikan oleh Bapak Al-ustad ... semoga arwah orangtua kita tersebut mendapat kelapangan dalam kubur. Selanjutnya acara kita yang ketiga seperti biasanya mengundi arisan dan penarikan koperasi, dan yang terakhir doa penutup. Untuk mempersingkat waktu marilah kita mulai dengan acara yang pertama, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak ustad... "

Suasana seperti ini terlihat formal, menggunakan Bahasa Indonesia, seremonis, tetapi memiliki keluwesan dalam penggunaan waktu. Inti cerah Ustad yang tertangkap berada disekitar figih Islam, perdagangan, zakat dan nasab zakat. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya-jawab. Satu sesi acara terselesaikan, dilanjutkan dengan doa kecil seperti pengantar tadi, mendoakan arwah salah satu orangtua anggota yang mengalami musibah.

Jam 15.32 WIB. Pembawa acara memberikan pengantar kepada para hadirin. Suasana terlihat berubah, formalitas melunak. Sebagian ada yang menyulut

rokok, sebagian lagi terlibat obrolan kecil. Pemutaran arisan tampak akan dimulai. Seseorang mengeluarkan kantong plastik transparan dari dalam sebuah kantong plastik hitam yang ukurannya lebih besar. Di dalamnya ada potongan-potongan sedotan kecil yang panjangnya kira-kira 2 centimeter. Jumlahnya tidak begitu pasti, kira-kira sejumlah kecil tiga jari. Seseorang kemudian berinisiatif mengambil gelas dan mengoperinya ke tangan yang lain hingga terletak di depan pemegang sedotan tadi. Potongan sedotan dimasukkan ke dalam gelas yang ditutup di bagian atasnya oleh plastik bening tempat sedotan. Terlihat ada uji coba apakah potongan sedotan mau keluar dari lobang yang sengaja dibuat pada plastik penutup gelas. Uji coba berhenti.

Sebelumnya masing-masing yang hadir sudah merogoh kantongnya masing-masing, ada yang menggulung dalam lipatan tangan dan ada juga yang meletakkan lembaran rupiah di depannya.

Panggilan demi panggilan diserukan kepada hadirin untuk mengeluarkan setoran arisannya. Dua lembar sepuluh ribuan berkeluaran menuju pembawa acara, tetapi ada juga yang terlihat memberikan uang yang lebih besar. Seseorang menyerahkan uang sambil berkata : "*dohot natutuarian da*" (dengan yang kemarin ya!). Sedotan yang dikeluarkan berjumlah dua buah.

Wadah baskom tampak disediakan di tengah ruangan dan orang-orang terlihat melemparkan uang recehan ke dalamnya.

Menurut pembicaraan dengan tokoh kelompok (XI, akan diuraikan pada bagian lebih lanjut), seorang anggota tidak diberi kesempatan untuk mengulur pembayaran iuran arisan, apalagi pengembalian uang koperasi. Jika ada anggota yang terlambat membayar, akan dikenai sanksi uang sebesar seribu rupiah untuk keterlambatan pembayaran arisan setiap kali pemutaran (seminggu). Disamping itu seorang anggota diwajibkan untuk hadir dalam setiap pertemuan mingguan, sedapat-dapatnya mengirimkan utusan sebagai pengganti. Tetapi inipun hanya dibolehkan dua kali berturut-turut. Bila seseorang tidak hadir tetapi namanya muncul sebagai pemenang arisan, namanya akan dibatalkan dan digantikan dengan orang lain. Seseorang yang beruntung mendapat arisan disepakati memotong lima ribu rupiah untuk kas kelompok. Iuran arisan per minggu untuk satu nomor penarikan sebesar Rp 20.000.-, tetapi ada juga yang mengambil tiga nomor penarikan. Dengan demikian uang arisan termobilisasi dalam kelompok lebih dari Rp 900.000,- setiap minggu yang dibagikan kepada dua orang anggota. Untuk kegiatan amal setiap minggu disediakan wadah bagi anggota yang ingin turut bersedekah kepada anak yatim atau perbaikan tempat-tempat ibadah di daerah asal. Uang sumbangan dikelola oleh pengurus kelompok.

Arisan berakhir, dilanjutkan dengan pembagian uang koperasi dengan cara yang sama dengan acara arisan, tetapi terlihat ada 4 orang yang mendapat bagian.

Menurut informasi tokoh jumlah uang koperasi yang dimiliki kelompok sebanyak

ak tiga juta rupiah, yang pada awalnya (1990) hanya lima ratus ribu rupiah. Pertambahan jumlah uang kas koperasi diperoleh dari potongan uang arisan dan jasa pengembalian koperasi sebesar sepuluh ribu rupiah pada setiap kali kebagian. Saat ini penarikan koperasi berlangsung sekali sebulan, beda dengan arisan yang berlangsung sekali per minggu. Dengan uang kas yang ada setiap orang yang beruntung memperoleh uang koperasi berjumlah Rp 750.000,-. Dengan demikian secara ekonomi dapat diukur tingkat bunga sebesar 1.3 persen/bulan. Mekanisme pendistribusian dana koperasi tampak berbeda dengan arti koperasi yang umum, dimana setiap anggota tidak bebas meminjam uang koperasi kecuali untuk hal-hal yang bersifat khusus. Seorang anggota hanya akan mendapat dana koperasi bila namanya muncul dalam pengundian yang berlangsung sekali sebulan.

Mekanisme seperti itu menurut tokoh, diberlakukan untuk: (1) Menghindari kemungkinan pendistribusian yang tidak merata dan pengembalian yang tidak tepat waktu. "*Susah do dabo mangatur halak hita, anggo adong hepeng samo-samo naisangka dongan do hepeng nia*" (sebenarnya susah untuk mengatur orang kita, jika ada uang bersama teman menganggap uang itu milik dia sendiri). Cara demikian ternyata memiliki kekuatan hukum mengatur orang-orang dalam kelompok. Cara-cara tradisional, informal, saling percaya tidak dapat diandalkan meski anggota umumnya bersaudara (2). Menghindari kemungkinan ketidaksiplinan anggota untuk menghadiri kegiatan rutin arisan dan pengajian.

Koperasi dan arisan merupakan daya pengikat migran terhadap kelompok. Ketika seseorang telah kebagian (menarik) arisan, masih ada kemungkinan namanya muncul dalam pengundian koperasi. Inilah salah satu faktor yang menarik anggota. Bedanya koperasi dengan arisan dalam kelompok ini terlihat dari status uang yang didistribusikan kepada anggota. Uang arisan merupakan uang pribadi sedangkan uang koperasi merupakan uang bersama yang bersifat anonim.

Kegiatan kelompok terencana berakhir dengan pembacaan doa penutup. Setelah itu tampak anggota belum beranjak pulang karena ada acara tambahan berupa makan bersama. Piring-piring berisi nasi ketan dilengkapi dengan lauk pauk seadanya digilir kepada semua yang hadir dengan tempat cuci tangan yang

jarang-jarang. Acara begitu ringkas, sesaat setelah semua kebagian, langsung ada seruan untuk memulai acara makan bersama.

Keseluruhan rangkaian acara selesai dan masing-masing beranjak dari tempat duduknya. Di luar rumah terhitung 7 buah sepeda motor yang diparkir berjejer-jejer di bagian depan warung, dihidupkan, dan berlalu. Satu angkutan kita *Daihatsu* tampak diparkir di pinggir jalan besar juga meniggalkan tempat.

Cita rasa makanan terasa agak beda dengan makanan yang biasa dibeli di Warung Tegal, atau Warung khas Sunda. Cita rasanya lebih mendekati masakan yang biasa diperoleh di restoran Padang, rasa pedasnya menonjol. Cara menyajikan makanan ala *nasi rames* tidak biasa dilakukan di daerah asal, khusus untuk jamuan orang tua (menikah). Disini tampak agak berubah, lebih ringkas dan lugas, kemungkinan karena kegiatan berlangsung rutin, sehingga tidak perlu diistimewakan.

Hari kedua, seminggu setelah mengikuti kegiatan kelom-pok pertama kali, berlangsung di Kecamatan Bogor Barat, di sebuah pemukiman yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan kegiatan minggu lalu. Untuk mencapai rumah pertemuan harus melewati gang-gang *senggol*, jaraknya kira-kira 300 meter dari pinggir jalan raya.

Hari ini, anggota yang hadir dalam kegiatan kelompok lebih sedikit dari minggu lalu, sampai acara dimulai Jam 14.13 WIB tercatat baru 28 orang yang siap di tempat. Sejak pukul 13.36 WIB obrolan bebas berlangsung dengan tuan rumah yang ternyata orang yang menda-pat arisan minggu lalu. Dari obrolan itu diperoleh informasi kesempatan menjadi tempat melaksanakan arisan sangat dinantikan. "*job roha harana jarang-jarang do nongan iba sahuta sakoum markumpul di bagas niba, paling sakali sataon*" (senang sekali sebab jarang-jarang saudara sekampung sekeluarga berkumpul di rumah kita, paling sekali setahun). Dari obrolan juga diperoleh informasi ternyata dalam perkumpulan ini ada beberapa orang yang berasal dari satu keluarga, dan umumnya hubungan kekerabatan satu dengan yang lain masih jelas, ipar-beripar, uda, bere, lae, dan sebagainya.

Secara umum susana acara hari ini tidak berbeda dengan acara minggu lalu, yang berbeda hanya rangkaian acara lebih pendek, tanpa penarikan koperasi. Informasi baru yang diperoleh, ada kesempatan baru untuk mengikuti pengumpulan dana qurban bulan haji mendatang, dan pemberian sumbangan kepada salah satu anggota yang istrinya baru melahirkan.

Demikianlah suasana kelompok migran teramati. Gambaran aktifitas kelompok seperti ini tampak juga pada kelompok lain yang dikunjungi selama di lapang. Beberapa catatan yang bisa diambil dari suasana kelompok adalah : (1) kelompok etnis migran selain merupakan penyaluran kebutuhan emosional anggota, dia juga berfungsi sebagai wadah ekonomi, dan sosial budaya untuk mencapai tujuan di Kota. (2) Kelompok merupakan jembatan yang menghubungkan masyarakat perantau dengan desa asal dan sebaliknya, dalam urusan-urusan yang bersifat kolektif. (3) Mekanisme pengaturan orang-perorang secara tradisional dalam kehidupan kota ternyata tidak handal lagi



dalam lingkungan migran yang lebih luas, oleh karenanya kelompok dilengkapi dengan mekanisme pengaturan baru, formalitas.

f. Sistem Mata Pencaharian (Ekonomi)

Minat kelompok masyarakat atau suku bangsa terhadap suatu jenis pekerjaan berpola sedemikian rupa, terlihat jelas terutama di perantauan. Beberapa sektor pekerjaan yang sama-sama disenangi oleh hampir semua suku bangsa, misalnya pegawai kantoran, tetapi disamping terdapat pula jenis pekerjaan yang disenangi dan kurang disenangi oleh suku bangsa tertentu, misalnya perdagangan Sate oleh Orang Madura dan Orang Minangkabau. Gejala ini merupakan proses okupasional yang lama bertahan.

Di beberapa kota tujuan pekerjaan incaran orang Batak antara lain adalah pegawai negeri/swasta, polisi atau jabatan militer. Pemilihan pekerjaan seperti pegawai negeri/swasta, polisi atau jabatan militer dilatarbelakangi oleh sosialisasi mereka dalam suasana masyarakat aristokratis yang menjunjung tinggi pada makna formal suatu kekuasaan dan otoritas (Pelly, 1991). Ciri aritokrasi yang dapat diperhatikan pada proses sosialisasi orang Batak. *Pertama*, seorang lelaki dalam siklus hidupnya dididik untuk terampil dan bertanggung jawab dalam bidang pengaturan sosial (*social management*). Lelaki remaja dalam kebudayaan Batak selain terikat untuk menjaga norma-norma marga juga berperan dalam mengelola kehidupan *naposo nauli bulung* (kelompok informal remaja dalam huta sebagai sub sistem dalam huta). Disamping itu, seorang anak lelaki memiliki tanggung jawab memberi kontrol terhadap kalangan *iboto* (remaja putri umumnya, khususnya yang semarga dengannya).

Pekerjaan-pekerjaan migran Batak Angkola di Bogor hampir seluruhnya berada di sektor ekonomi tersier, meski tercatat sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga petani. Hal ini dimungkinkan karena tipe Kota Bogor berbentuk kota industri dan jasa yang tidak memungkinkan bagi migran untuk mengulangi pekerjaan orang tua mereka di sini. Disamping itu, yang paling menentukan adalah minat migrasi sudah terfokus pada pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian, seperti tampak pada alasan perpindahan mereka yang berusaha menghindari dari pekerjaan-pekerjaan tradisional itu.

Seperti yang disebutkan pekerjaan sektor angkutan, ABRI, pegawai negeri pada awalnya merupakan jenis pekerjaan yang disenangi. Perkembangan terakhir orang Batak terutama orang Angkola Mandailing di Kota Bogor, terlihat kecenderungan munculnya sektor pekerjaan baru, yaitu perdagangan kelontong eceran menetap atau foto studio. Namun ini pun belum menunjukkan pekerjaan kantoran benar-benar telah turun derajatnya, melainkan karena kapasitas individu dan kesempatan kerjalah yang tidak tersedia di sektor tradisional itu. Secara ekonomi pendapatan di sektor perdagangan tergolong tinggi dan berpeluang untuk berkembang lebih baik tetapi mereka umumnya memandang pekerjaan *kantoran* lebih bergengsi, seperti pernyataan responden berikut:

Daripada marsaba sanga manantik dao mantong untagi marjagal, tai leng tagian dope nigrohangku songon dongan nadeba jadi insinyur baru mangan gaji. Ketimbang bersawah atau menyadap [karet] jauh lebih enak berjualan, tapi kayaknya lebih enak seperti teman yang lain yang jadi insinyur lalu makan gaji.

Terlepas dari struktur pekerjaan yang diminati, kehadiran sektor perdagangan sebagai okupasi baru dapat ditafsirkan sebagai gejala resistensi pekerjaan-pekerjaan andalan tradisional. Perdagangan kelontong memiliki ciri, usaha pribadi tanpa subordinasi orang lain, akomodatif terhadap tujuan hidup mendirikan kerajaan pribadi (*sahala harajaon*), tetapi pekerjaan itu bukan okupasi Orang Batak yang dikenal sejak lama. Perdagangan kelontong hadir sebagai penyelamat aspirasi aristokrasi mereka baru-baru ini, meski mungkin belum mensejajarkan diri dengan pekerjaan kantoran atau angkutan bersenjata. Gejala resistensi budaya dapat dibandingkan dengan perdagangan Soto "Taman" di Jakarta. Keberhasilan segelintir penduduk Desa "Taman" berjualan soto telah memutarbalikkan anggapan masyarakat desa semula bahwa pekerjaan berdagang soto tidak dapat bergengsi, sekarang menjadi pekerjaan incaran (Hamid dan Ahmad, 1993).

Tabel 58 memperlihatkan, perdagangan kelontong merupakan pekerjaan yang paling banyak (70.0 persen) diterjuni oleh migran. Secara keseluruhan diperkirakan

jumlah migran yang terlibat dalam pekerjaan ini mencapai 1000-1200 orang¹. Sedangkan migran yang bekerja sebagai awak minibus (sopir dan kondektur) tercatat 9 persen, diikuti oleh pegawai negeri (Dosen, Pegawai Kantor pemerintah) 7.5 persen, karyawan swasta 4.5 persen, pemilik Foto Studio 3.5 persen, pensiun PNS/ABRI 3.5 persen, dan lain-lain 2.5 persen. Pekerjaan kantoran, tampak menjadi pengecualian dari jenis pekerjaan yang ada, karena migran biasanya bekerja pada lembaga pemerintahan, dosen atau karyawan swasta. Pekerjaan-pekerjaan di luar itu, relatif mandiri dan pelakunya berperan sebagai pengelola dan pemegang otoritas usaha.

Tabel 58. Distribusi Migran Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 1993

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1 Perdagangan Kelontong	140	70.0
2 Sopir/Angkutan Kota	18	9.0
3 Karyawan Swasta	9	4.5
4 Pegawai Negeri	15	7.5
5 Servis Foto Studio	7	3.5
6 Wartawan	1	0.5
7 Pensiunan PN/ABRI	6	3.0
8 Lain-lain	4	2.0
Jumlah	200	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Bila diperhatikan pola pekerjaan di atas, pekerjaan tersebut hampir semuanya tergolong dalam sektor tersier, suatu pelonjakan yang dari sistem produksi primer pertanian di pedesaan. Selama di lapang kepada responden sering dipertanyakan mengenai pengetahuan mereka tentang orang sederhana yang bekerja di luar empat pekerjaan utama di atas, jawabannya ternyata jarang. Tetapi responden tidak menghindar jika disebutkan adanya orang-orang sederhana yang bekerja sebagai *calo* atau malah *copet* yang umumnya berlokasi di terminal dan tempat keramaian lainnya. Tampaknya pekerjaan yang disebutkan terakhir lebih akomodatif terhadap aspirasi mereka yang

1. Jumlah ini diduga berdasarkan data jumlah anggota-anggota 15 kelompok/paguyuban migran asal Tapanuli Selatan yang berkedudukan di kota Bogor.

enggannya berada dalam posisi subordinasi. Meski pekerjaan itu ilegal dan di luar batas-batas norma masyarakat--- termasuk menurut pelakunya--- tetapi itu lebih terjangkau oleh alam pikiran mereka. Pekerjaan seperti ini digeluti biasanya hanya untuk sementara, terdesak oleh kebutuhan fisiologis; akan beralih pekerjaan lain yang sesuai.

Okupasi migran berjalan sebagai sub sistem ekonomi perantauan yang relatif terpisah satu sama lain. Migran pedagang kelontong lebih banyak berinteraksi dengan sesama pedagang meminjam modal kepada migran lain bentuk barang atau uang kontan, mengikuti arisan. Kalangan migran pekerja angkutan kota juga terkondisi untuk lebih banyak bergaul dengan sesama pekerja angkutan di terminal; tukang foto studio juga demikian. Jika seorang migran berprofesi ganda (sopir atau pedagang) memungkinkan baginya untuk terlibat dalam subsistem-subsistem itu sekaligus. Hubungan ekonomi masing-masing okupasi perantauan hampir tidak terhubungkan satu sama lain apabila migran dan keluarganya berprofesi tunggal, pedagang, tukang foto, atau pegawai negeri/kantor swasta saja. Kecuali dijumpai oleh hubungan keluarga/marga atau saling kenal di daerah asal tampak pekerja kantoran lebih sedikit berinteraksi dengan migran pada okupasi lain.

Perdagangan kelontong. Penempatan migran di sektor perdagangan kelontong dipandang mempunyai postur pembiakan yang paling konsisten diantara pekerjaan-pekerjaan lain. Pada Tahun 1960-an penempatan di sektor perdagangan ada ditempati migran tetapi tidak spesifik di bidang perdagangan kelontong. Pola pekerjaan perdagangan membentuk piramida atas dasar jumlah partisipan yang berkembang sejak akhir tahun 1970-an.

Syarat-syarat tempat tinggal bagi pedagang kelontong lebih spesifik dari golongan migran lainnya. Kualifikasi utama dalam pemilihan tempat tinggal adalah kepadatan penduduk. Tempat tinggal bagi mereka sekaligus menjadi tempat berjualan.

Pekerjaan berjualan kelontong adalah cermin kebebasan berkarya membuat perencanaan, keputusan sendiri dan mengembangkan usaha. Meski modal awal sebagian diperoleh hanya dengan memanfaatkan kepercayaan dari pengusaha grosir keturun-

an Cina dan yang paling penting bagi pedagang kelontong adalah otoritas pengelolaan usaha tetap di tangannya, tidak ada halangan untuk menentukan dimana berusaha, bertempat tinggal, berapa dan siapa yang dipekerjakan untuk mengurus dagangan.

Perselisihan dengan grosir Cina kerap terjadi tetapi tidak sukar bagi mereka untuk mencari grosir lain walaupun untuk bisa mendapatkan kelonggaran pembayaran membutuhkan waktu yang lama. Penyebab perselisihan bukan hanya karena masalah ekonomi saja tetapi masalah psikologis juga timbul, misalnya grosir terlalu banyak ikut campur dalam usaha pedagang kelontong. Pengalihkan pembelian barang dagangan ke grosir lain sebenarnya masalah bagi pedagang kelontong, sehingga sesama mereka atau kepada orang yang lebih bijaksana sering mengkonsultasikan masalah tersebut.

Langganan para pedagang kelontong terdiri atas masyarakat menengah ke bawah. Hal ini erat kaitannya dengan pemilihan tempat berjualan yang umumnya berada di lokasi pemukiman padat. Kondisi lingkungan yang berjejal-jejal mengandung potensi penjualan yang sangat besar walaupun transaksinya berskala kecil atau recehan. Barang dagangan kelontong yang dijual meliputi kebutuhan primer masyarakat.

Kesetiakawanan khas orang Angkola Mandailing menempati skor tertinggi diantara 19 unsur kebudayaan terukur. Rupa-rupanya aspek sosial dan identitas kesukuan selalu dikedepankan dalam pertimbangan masa depan dan kesinambungan hidup di perantauan dan ini tampak jelas pada okupasi perdagangan keolontong. Ada kecenderungan sesama pedagang kelontong menghindari berjualan secara berdekatan dengan pedagang kelontong sesuku. Menghindar dari persaingan dengan perantau sesuku suatu etika mempertahankan hidup dan mempertahankan perantauan, bermuara pada adanya keinginan untuk saling menolong dalam menghadapi kesusahan. Persaingan dengan pedagang kelontong dari suku lain justru tidak menjadi hambatan untuk membuka kedai secara berdekatan. Etika perdagangan ini merupakan salah satu penyebab migran Batak Angkola Mandailing tidak membentuk *enclave*.

Rantau Kota mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah asal, baik dari segi-segi kesempatan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi daerah tujuan yang

umumnya tergolong urban dengan dinamikanya, justru sangat subur bagi pertumbuhan ekonomi migran. Kota merupakan suatu lingkungan yang asing, penuh rangsangan, tantangan dan sekaligus harapan untuk berusaha lebih maju. Kondisi seperti itu tidak terbentuk di daerah asal, miskin alternatif, dan kegiatan berusaha sarat pertimbangan sosial. Banyak di kalangan kaum migran yang dapat meningkatkan status ekonominya dalam waktu singkat. Pada seorang pedagang kelontong, keberhasilan berdagang biasanya ditandai penambahan warung-warung baru, memperluas warung atau mengubah status penjualan dari sekedar eceran menjadi grosir skala kecil.

Perluasan usaha perdagangan memerlukan tenaga kerja tambahan dengan prioritas utama adalah saudara sendiri, *anak, bere, lae, ipar*, atau adakalanya kerabat jauh lainnya yang berdiam di desa. Tenaga kerja tambahan dari masyarakat sekelilingnya jarang digunakan, karena alasan-alasan seperti kurang jujur, kurang bisa dipercaya, tidak bebas diatur, waktu kerja kurang fleksibel dan alasan-alasan lain yang berbau *etnosentrisme*. Sebaliknya dengan mempekerjakan *keluarga sendiri*, disamping dapat meringankan beban kerabat di desa, dalam bekerja tidak terlalu perlu untuk diawasi, mudah diatur, sistem penggajian fleksibel. Singkat kata, mempekerjakan anggota keluarga akan mempermudah peningkatan usaha tanpa mengurangi otoritas pemiliknya.

Pola hubungan dalam sistem produksi berlangsung menyerupai pola hubungan kerja dalam sistem produksi tradisional yang berlaku di bidang pertanian. Sistem produksi tradisional dicirikan oleh bentuk hubungan yang tidak jelas antara hubungan formal dan hubungan sosial dalam sistem produksi atau di luar sistem produksi (Shneider, 1987).

Seorang pendatang yang memiliki modal, dapat langsung membuka usaha kedai kelontong sendiri tanpa harus menjalani proses magang kepada salah satu kerabatnya. Sedangkan mereka yang tidak memiliki modal butuh waktu lebih lama agar bisa mendapatkan tempat berjualan sendiri. Proses pemandirian pemegang secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut: *Tahap penjagaan*, kerabat tumpangan atau pemilik modal beserta pemegang mencari tempat yang layak untuk berjualan dan

mengisi barang dagangan di warung baru itu. Pemegang bertindak sebagai pengelola, setiap hari atau beberapa hari sekali memberi setoran semua hasil penjualan kepada pemodal. *Tahap mencicil*, ketika volume penjualan menunjukkan tanda-tanda kestabilan dan pemegang dianggap sudah mampu *survive*, pencicilan akan berlangsung beberapa waktu. Pemodal masih melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha dan kadang-kadang memasok barang dagangan tertentu. Jumlah uang dan lama pencicilan bervariasi, tergantung kesepakatan pemberi modal dan pemegang. *Tahap kemandirian*, setelah tahap pencicilan selesai pemegang mulai mengelola usaha sendiri tanpa pengawasan khususnya ekonomi dari orang lain. Pemegang kini berubah status menjadi pemilik kedai kelontong dan ketika itu pula kesempatan untuk menjadi anggota kelompok secara personal terbuka. Di dalam kelompok setiap anggota berhak mengikuti aktivitas-aktifitas sosial ekonomi, seperti arisan dan koperasi. Pedagang baru yang biasanya memulai karir pada waktu lajang mulai memikirkan untuk mencari pendamping untuk membantu usahanya berdagang. Kebanyakan dari mereka menikahi wanita dari kampung atau daerah sendiri karena alasan-alasan yang bersifat kultural, seperti: hemat dan bersedia hidup susah.

Umur dan pendidikan tidak begitu diperhatikan untuk pekerjaan berjualan, hanya membutuhkan syarat minimal mampu menghitung dan menulis. Adakalanya kerabat yang didatangkan dari desa untuk membantu usaha di kota masih tergolong anak-anak; ada yang bekerja sambil sekolah tetapi ada pula yang langsung bekerja tanpa melanjutkan sekolah.

Transportasi Kota. Okupasi transportasi seperti yang terbentuk pada migran orang Angkola Mandailing di Bogor bukan bidang yang asing bagi orang Batak umumnya. Dalam berbagai anekdot, kreasi sinematik, audio dan audiovisual, peran orang Batak dalam pekerjaan ini sering dimunculkan dan cenderung menggambarkan bahwa orang Batak tidak dapat dipisahkan dari sektor transportasi khususnya angkutan darat. Anekdot yang menggelitik, misalnya: *untuk mengukur jumlah orang Batak di Jakarta cukup menghitung jumlah bis metromini dikalikan 3 atau jika ingin mencari*

orang Batak tidak perlu susah-susah, carilah di terminal. Meskipun terkesan berlebihan, anekdot atau bentuk identifikasi lain, pekerjaan sopir atau awak bis sudah menjadi ladang pencaharian orang Batak perantau atau bukan perantau sejak lama.

Secara historis dapat ditelusuri bahwa pekerjaan sebagai awak bis merupakan profesi moderen yang paling tua di luar pertanian setelah apa yang disebut oleh Pelly (1990) sebagai *white collar dynasty*. Pilihan atas pekerjaan yang berpusat pada status formal dan otoritas meletakkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam struktur hirarkis. Keadaan ini cenderung menghambat mobilitas kerja ke level yang lebih rendah sesuai tatanan nilai yang dimiliki migran.

Jumlah orang Batak asal Tapanuli Selatan (Angkola Mandailing) yang bergerak di bidang angkutan kota sekitar 150 orang¹, dengan pusat aktifitas berlokasi di Terminal Merdeka. Jika digabung dengan orang Batak lainnya (Karo, Toba, Simalungun, Dairi-Pakpak) orang Batak yang bergerak dibidang angkutan bisa mencapai 750-1000 orang. Awak bis asal Tapanuli Selatan separuh berasal dari Angkola, sementara selebihnya berasal dari Mandailing dan Padang Lawas. Komposisi ini membuat keraguan untuk menyimpulkan bahwa sektor transportasi merupakan okupasi utama Orang Angkola.

Sopir angkutan asal Tapanuli Selatan tidak tersebar secara merata untuk semua *line*, melainkan cenderung menumpuk pada *line-line* tertentu. Jalur angkutan yang ditempati berada dalam kota merupakan jumlah terbesar, sedangkan selebihnya berada pada jalur luar kota dan antar kota. *Line* dalam kota Bogor yang paling banyak menampung orang Tapanuli Selatan sopir adalah Barangsiang Merdeka (03), Warung Jambu-Merdeka (07), Sukasari-Merdeka (02A).

Sektor transportasi memiliki struktur pasar tenaga kerja yang terbuka sehingga

1. Hasil wawancara dengan Hasibuan, Ketua Serikat Tolong-Menolong Putra Tapanuli Selatan, tanggal 2 Oktober 1993.

tingkat mobilitas pekerjaanya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan migran lain, dalam arti pekerjaan itu dengan mudah dapat ditinggalkan untuk kemudian dimasuki lagi. Seorang sopir tidak begitu risau untuk absen *narik* selama beberapa hari atau lebih ekstrim lagi memutuskan ikatan dengan majikan karena dapat dialihkan kepada sopir lain yang berstatus sopir cadangan, sopir tembak, atau awak yang biasanya hanya kondektur. Berbeda dengan profesi sopir, pedagang kelontong atau Tukang Foto Studio tidak semudah itu menutup usaha untuk kemudian hari membukanya kembali.

Dari 150 orang migran yang terlibat dalam sektor transportasi hanya sebagian kecil yang menyopir minibus milik sendiri. Kebanyakan dari mereka berstatus *nyetor* (menyewa atau kantrak) dari *toke* (majikan) orang sederhana atau yang lain dengan pola penyeteran biasanya berlaku harian. Jumlah *setoran* antar line berbeda sesuai dengan kepadatan penumpang sepanjang line yang dilalui. Setoran tertinggi berada pada line 03 (Baranangsiang-Merdeka), dimana orang Batak banyak berperan, diikuti oleh line 07 (Warung Jambu-Merdeka).

Foto studio. Pekerjaan lain yang menampakkan perkembangan adalah Servis Foto studio. Bila perdagangan kelontong ditempati oleh orang-orang Mandailing --- daerah asal migran Kecamatan Kotanopan dan Panyabungan--- pengusaha di bidang servis Foto Studio asal Tapanuli semua berasal dari daerah Padang Lawas atau Kecamatan Padang Bolak dan sekitarnya¹. Jumlah migran yang mengeluti profesi ini lebih sedikit dibandingkan dengan perdagangan kelontong; sampai pada pertengahan tahun 1993 tercatat 7 orang. Perbedaan jenis usaha foto studio dengan perdagangan kelontong terletak pada jenis dagangan yang dijual, serta jarak konsumen dari tempat berusaha. Kebutuhan masyarakat akan foto studio relatif jarang sehingga foto studio biasanya dilengkapi dengan fotokopi. Sistem produksi foto studio lebih menjurus pada

1. Hasil wawancara dengan Harahap, tanggal 15 Agustus 1993, seorang pengusaha service foto studio.

keahlian dan pengolahan *manufacture*. Jika pedagang kelontong konsumen utamanya biasanya terdiri dari tetangga-tetangga sekitar warung, foto studio biasa sampai jauh. Meskipun demikian tetangga merupakan konsumen utama foto studio.

Interaksi migran sektor wiraswasta dengan masyarakat sekitarnya terjadi atas dasar: (1) kepentingan ekonomi, bagi pedagang kelontong, tetangga merupakan konsumen utama barang dagangannya. Keadaan ini menuntut migran membaur dengan masyarakat di sekelilingnya, dengan harapan dapat menjalin hubungan berlangganan yang langgeng. Konflik terbuka dengan tetangga sedapat mungkin dihindarkan menyadari dirinya berada dalam posisi minoritas. Hubungan ekonomi migran pedagang kelontong dan pemilik foto studio dengan masyarakat pribumi Sunda umumnya hanya sebatas berlangganan. Dalam permodalan biasanya migran lebih banyak mengikat hubungan dengan WNI keturunan Cina jika tidak diperoleh dalam kelompok/paguyuban. Sopir angkutan ada yang menyopir minibus milik masyarakat setempat. (2) kepentingan sosial. Oleh karena tempat tinggal pedagang kelontong dan foto studio biasanya sekaligus tempat berusaha, keberadaan masyarakat bagi mereka selain sebagai kelompok konsumen juga merupakan lingkungan sosial tempat mendapatkan kebutuhan-kebutuhan non material. Jika dibandingkan antara pedagang kelontong dan foto studio dengan pekerjaan kantoran dan sopir angkutan, migran yang bekerja pada dua jenis pekerjaan terakhir memiliki kepentingan sosial kepada masyarakat tampak lebih khusus.

Kehadiran Orang Angkola Mandailing di pemukiman masyarakat khususnya kalangan wiraswasta sedikit banyak membentuk resistensi budaya lokal kepada orang Batak umumnya. Kedatangan mereka dan pergaulan yang intensif dengan masyarakat Sunda telah memutarbalikkan anggapan yang lahir dari etnosentrisme murni, stereotipe dan representasi Batalion Malau pada tahun 1950-an---*Orang Batak kasar dan tidak etis*. Pemiakan perdagangan kelontong yang sedemikian cepat dalam jangka waktu relatif singkat tidak semata-mata karena bekerjanya dalil-dalil ekonomi penawaran dan permintaan. Tetapi lebih dari itu, seberapa besar kapasitas *costumer oriented* dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 @Hak Cipta milik IPB University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

migran dan pandangan konsumen (masyarakat lokal) terhadap migran produsen. Distribusi *Warung-warung Si Abang* yang merata di seluruh penjuru kota merupakan jendela terdepan menguraikan diferensiasi Batak yang bersumber dari kebudayaan yang sama. Warung-warung *Si Abang* yang merupakan mata rantai tataniaga terujung mencapai konsumen, tidak akan berkembang secepat itu dengan kesan lama, Orang Batak Kasar.

Peloncatan jarak sosial (*social distance*) yang besar dalam perubahan pandangan masyarakat setempat kepada migran sering menjadi pengalaman yang mengesankan bagi migran. Pembukaan warung baru biasanya kurang diminati masyarakat lokal, mungkin karena mengetahui tukang warung itu *Si Batak*. Tetapi untuk waktu-waktu selanjutnya, 2 sampai 3 bulan, terjadi pelonjakan drastis jauh di atas pedapatan minimum untuk bertahan. Demonstrasi identitas migran ditunjukkannya melalui keikutsertaan dalam kegiatan bersama dengan masyarakat, seperti shalat di Mesjid dan Musholla, memberi stimulus kepada masyarakat lokal dalam bentuk komunikasi non verbal. *Feed back* yang muncul biasanya ditandai oleh kedatangan ibu-ibu rumahtangga, anak-anak, orang dewasa membeli ke warung *Si Abang*, sebutan sebelumnya warung *Si Batak*. Penguatan hubungan berlangganan terjadi setelah konsumen tidak lagi mendengarkan dialek yang meletup-letup seperti kesan lama yang bulat pada Orang Batak umumnya. Lidah tebal ciri fonetik Orang Batak menggunakan Bahasa Indonesia membutuhkan proses menuju pelafalan yang lebih mendekati orang Sunda--- untuk menyebutkan suatu kesulitan mencapai komformitas dialek. Dialek bahasa Batak Angkola Mandailing lebih bernada *membujuk*, ketimbang dialek bicara Orang Batak Toba yang lugas.

Tampaknya gambaran pendekatan jarak sosial yang menguat antara migran dengan orang-orang Sunda, merupakan fungsi terbalik dari konsep *geger budaya* (cultural shock). Apa yang tersimpan dalam memori etnosentrisme masyarakat lokal jauh dari kenyataan empiris yang dialami ketika kontak sosial dengan *Si Abang*.

Tabel 59. Karakteristik Pola Okupasi Batak Angkola Mandailing Di Kota Bogor

Karakteristik	Perdagangan Kelontong	Angkutan Kota	Foto Studio	Pegawai Negeri
1. Sumber Modal	Sendiri/Toke	Sendiri/Toke	Sendiri/Toke	Tidak Ada
2. Pengaruh Tempat Tgl Terhadap keberhasilan Usaha	Sangat Penting	Tidak Penting	Sangat Penting	Tidak Penting
3. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Keberhasilan Usaha.	Sangat Penting	Tidak Penting	Penting	Tidak Penting
4. Keterlibatan Orang lain	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
5. Keluar Masuk pekerjaan	Sulit	Mudah	Sulit	Sulit
6. Status Pengelola	Manajer	Manajer	Manajer	Bawahan
7. Syarat Pendidikan dalam karier	Kurang Penting	Kurang Penting	Kurang Penting	Sangat penting
8. Pengambilan Keputusan	Sendiri	Sendiri	Sendiri	Bersama
9. Prioritas Rekrutmen	Keluarga	Keluarga	Keluarga	Badan/Lembaga

g. Peralatan dan Perlengkapan Hidup

Hidup berdesak-desakan di tengah kota, bukanlah tipe pemukiman yang lazim di daerah asal. Di kota Medan keluarga migran asal Tapanuli Selatan lebih senang bertempat tinggal di daerah pinggiran kota dengan cara mengelompok (Pelly, 1992). Di kota Bogor tidak ditemukan pola pemukiman semacam itu. Skor rata-rata sikap yang ditunjukkan migran untuk pemukiman seperti di daerah asal hanya 2.65 (labil), tidak jauh berbeda sikap mereka terhadap pola pemukiman yang ada di kota, 2.53 (labil).

Desain rumah tradisional Batak di Tapanuli Selatan sudah jarang ditemukan, yang ada dan banyak di temukan adalah rumah-rumah panggung (berkolong). Disamping itu rumah bertipe tanpa kolong sudah menggejala menggantikan rumah-rumah panggung. Rumah tradisional dari Batak Angkola-Mandailing dinamakan *Bagas Godang*, dengan ornamen-ornamen hitam, merah dan putih agak berbeda dengan rumah tradisional Batak lainnya (Diapari, 1988). Bagaimanapun bentuk rumah-rumah mereka yang ditinggalkan, migran cenderung menganggap kekayaan budaya itu tidak penting dibawa ke rantau. Skor rata-rata sikap migran untuk objek budaya ini sebesar 2.4 (lemah). Sebaliknya desain rumah masyarakat lokal cenderung dianggap penting dengan skor rata-rata 3.3 (labil).

Tampak nilai budaya lokal dalam desain rumah dipandang lebih tepat untuk diterapkan dalam kehidupan rantau. Meskipun demikian rumah-rumah penduduk yang teramat di kota Bogor tidak sepenuhnya merupakan *khas* Sunda, sehingga perbedaan sikap ini lebih menunjuk pada kondisi situasional rumah penduduk kota, dimana migran hidup didalamnya.

Status penempatan rumah tempat tinggal berkaitan dengan permanensi migrasi. Semakin kuat keinginan untuk menempati kota secara permanen migran cenderung untuk menempati rumah milik sendiri, tidak terbatas pada kontrak atau sewa. Pada perilaku migrasi non permanen (sirkulasi atau komutasi) pemilikan rumah tidak begitu penting karena status kota hanya sebagai tempat tinggal *nomor dua* atau sementara setelah desa. Para sirkuler atau komuter bersedia tinggal di tempat-tempat yang khusus menampung mereka, seperti pondok boro atau *enclave*.

Lebih separuh (53 persen) belum memiliki rumah, selebihnya 43.0 persen memiliki rumah, dan 4.0 persen belum memiliki rumah tetapi tinggal di rumah dinas. Secara proporsional responden yang belum memiliki rumah sendiri kelihatan masih lebih kecil, namun data ini sudah cukup meyakinkan bahwa tingkat pemilikan rumah sudah tinggi atau penempatan kota cenderung permanen. Mereka yang belum memiliki rumah tidak berarti tidak berkeinginan untuk memiliki rumah sendiri.

Salah satu aspek terpenting dari unsur kebudayaan peralatan dan perlengkapan hidup adalah makanan atau pola konsumsi. Pemilihan makanan tertentu oleh seseorang dilandasi oleh pengalaman atau pengenalan atas makanan yang bersangkutan. Hasil penelitian tentang kebiasaan pangan di 11 suku bangsa di Indonesia diperoleh kesimpulan, suku Batak Angkola-Mandailing mempunyai tipe konsumsi beras untuk makan pokoknya (Roestamsjah, 1989 dalam Lubis, 1992).

Lubis (1992) menyebutkan, ada beberapa makanan populer di Bogor yang jarang dikonsumsi masyarakat di Tapanuli Selatan terutama di pedesaan misalnya, tempe dan tahu. Pola pengolahan makanan di Tapanuli Selatan dilukiskan sebagai berikut:



Bumbu masakannya didominasi oleh santan (kelapa), cabe, kunyit, jahe, bawang putih dan merah, sere, laos dan perencah (seperti udang kering, teri tawar, dll). Dengan jenis pangan seperti itu terciptalah makanan seperti gulai daun singkong tumbuk, sambal tuk-tuk, dan gulai ikan sale [1992: hal 6].

Hasil pengolahan makanan melahirkan makanan bercitarasa agak pedas dan manis dengan citarasa manis. Makanan khas demikian terbalik dengan jenis makanan masyarakat Sunda yang condong pada makanan bercitarasa manis.

Tabel 60. Frekuensi Jawaban Migran Atas Pertanyaan "Dalam Hal Kebiasaan Makan, Apakah Bapak Mengkonsumsi Makanan Khas Masyarakat Setempat (Sunda)"

Jawaban	Frekuensi	Persentase
1. Sangat Sering	2	3.3
2. Sering	7	11.7
3. Jarang	1	1.7
4. Jarang Sekali	20	33.3
5. Ya, karena terpaksa	30	50.0
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Pola konsumsi migran sebagian sudah teradaptasi pada jenis makanan Sunda, walaupun persentase migran yang mempertahankan kebiasaan mengonsumsi makanan daerah lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena semua migran yang terjaring dalam penelitian ini sudah menikah dan memasak di dapur sendiri. Ketrampilan serta jenis makanan yang diperoleh di daerah asal tetap digunakan di kota.

Pergeseran pola konsumsi terjadi pada kalangan mahasiswa yang umumnya tidak memasak sendiri, baik dalam frekuensi makan harian maupun jenis makanannya. Preferensi mahasiswa terhadap makanan yang pedas-pedas mengalami penurunan di samping pergeseran pola konsumsi energi berkurang dibawah 100 persen (Lubis, 1992).

Tabel 61 memperlihatkan terjadinya pergeseran frekuensi makan dari modus 3 kali sehari menjadi 2-3 kali sehari. Perubahan lain terlihat juga pada variasi makanan yang terus meningkat. Pergeseran ini lebih disebabkan oleh perubahan lingkungan dan keterbatasan fasilitas pendukung kehidupan mahasiswa. Sebaliknya pada migran yang

telah berumahtangga dan mengolah makanan sendiri kemungkinan tetap dengan pola konsumsi lama tanpa banyak perubahan. Hal ini juga diperlihatkan dalam sikap migran yang bernilai 4.08 (kuat) untuk pola makan *in-group* dan 2.30 (lemah) untuk pola makan Sunda.

Tabel 61. Frekuensi Makan Mahasiswa Asal Tapanuli Selatan, Sebelum Dan Sesudah Bertempat Tinggal Di Bogor.

Frekuensi Makan	Sebelum Di Bogor		Sesudah Di Bogor	
	Σ	%	Σ	%
1. 4 kali/hari	1	2	-	-
2. 3 kali/hari	46	77	24	40
3. 2 kali/hari	12	20	26	43
4. 2-3 kali/hari	1	2	9	15
5. 1 kali/hari	-	-	1	2
Jumlah	60	101	60	100

Sumber : Lubis, 1993.

Pada kelompok migran yang telah "jarang-sering sampai sangat sering" mengkonsumsi jenis makanan setempat dan ternyata menyukainya adalah jenis makanan sayuran, seperti sayur *lodeh*, sayur *asem*, *lalapan*, dan *karedok*. Tampaknya jenis makanan ini tidak terlalu sarat dengan citarasa manis, sehingga tidak bermakna perubahan pola konsumsi secara revolusioner. Terpisahnya rumahtangga migran dari lingkungan luar memungkinkan terjadinya pelestarian jenis makanan dalam keluarga yang berciri khas Tapanuli Selatan. Kalaupun terjadi perubahan tampaknya lebih mudah terjadi pada konsumsi kalori karena perubahan pekerjaan dari tenaga fisik di lahan pertanian menjadi tenaga fisik dan mental di kehidupan rantau.

Pada kegiatan-kegiatan kolektif, misalnya *Halal Bi Halal*, kegiatan rutin kelompok, makanan khas Tapanuli Selatan umumnya menjadi prioritas hidangan, misalnya sambal tuk-tuk, daun singkong tumbuk, teri kacang, gulai ikan kering, anyang pahu (pakis) disamping hidangan *nasional* lainnya. Menurut penelitian Lubis (1993) ada beberapa aspek perubahan pola konsumsi mahasiswa IPB asal Tapanuli Selatan di

Bogor. Kesempatan Hari Raya biasanya besar keinginan migran untuk menghadirkan makanan khas seperti lemang, ketupat, dodol, serta rendang.

Berkaitan dengan peralatan-peralatan rumahtangga dapur, sikap migran cenderung labil baik kepada budaya sendiri maupun kepada budaya Sunda, yaitu 2.92 dan 2.60 artinya sama labil. Hal ini menandakan adanya nilai-nilai budaya lain yang dipandang lebih pantas diadopsi.

4. Out-group lain

Selain bergaul dengan masyarakat Sunda, migran Angkola-Mandailing juga kepada masyarakat pendatang, seperti Orang Batak lainnya (Toba, Karo, Simalungun, Pakpak), Minangkabau, Jawa, Cina, Madura, dan beberapa suku bangsa lainnya. Dari fungsi-fungsi antar budaya interkasi, secara proporsional Orang Batak Angkola-Mandailing lebih senang bergaul dengan orang Batak lainnya dan WNI keturunan Cina, serta Orang Jawa. Tampak *in-group feeling* terpelihara atau mungkin menguat setelah di rantau karena berposisi minoritas.

Respon ganda yang diperoleh dari migran tentang lingkungan pergaulannya dapat diperhatikan pada Tabel 62. Sebanyak 9 orang menyatakan tidak bergaul dengan out-group selain Sunda. Yang menarik diperhatikan dari respon ganda yang muncul adalah : *Pertama*, Migran yang bergaul dengan Orang Batak lainnya (Toba, Karo, Simalungun, Dairi) hampir berimbang dengan Orang Minangkabau dan Orang Jawa. Tampaknya data tersebut sedikit banyak terkait dengan komposisi sosio-demografis kota Bogor dimana menurut dugaan Orang Jawa merupakan suku bangsa terbesar yang mendiami kota selain Sunda. Sedangkan kemunculan Orang-orang Minangkabau sebagai lingkungan pergaulan migran Angkola-Mandailing, mesti tidak sebanyak Orang Jawa, tergolong besar menempati Kota Bogor.

Penelitian Wariso (1989) memperlihatkan Orang Minangkabau merupakan satu-satunya etnis Sumatera yang terjaring dalam komunitas areal penelitiannya tentang migrasi sirkuler dan sektor informal di Kecamatan Bogor Timur.

Tabel 62. Lingkungan Pergaulan Migran Angkola-Mandailing dengan Out-Grup selain Sunda Di Kota Bogor, dan Out-grup Yang Paling Disenangi sebagai Teman Bergaul (Respon Ganda).

Out-Group	Jumlah Interaksi	Out-grup Yang Paling Disenangi
1. Batak Lainnya (Toba, Karo, Simalungun, Dairi)	33	16 (48.5)
2. Melayu	10	2 (20.0)
3. Aceh	8	0 -
4. Minangkabau	26	5 (19.2)
5. Palembang/Lampung	7	2 (28.6)
6. Jawa	31	12 (38.7)
7. Madura	10	1 (10.0)
8. Bali	9	0 -
9. Ambon	11	1 (9.1)
10. Kalimantan	6	0 -
11. Sulawesi	6	0 -
12. Arab	6	3 (50.0)
13. China	15	9 (60.0)
14. Lainnya	3	0 -
Tidak menjawab	9	-
Jumlah	181	51

Sumber : Data Primer, 1993.

Keterangan : Angka Dalam Kurung, persentase terhadap interaksi.

Kedua, Out-group lainnya yang terlihat menonjol dalam lingkungan pergaulan migran adalah WNI keturunan Cina. Ini terjadi karena selain tergolong besar menghuni Kota Bogor, juga terhubung oleh kepentingan bisnis pada sebagian besar migran yang berprofesi sebagai pedagang kelontong. WNI keturunan Cina merupakan toke bagi pedagang. Dari 15 interaksi yang terjadi dengan WNI Cina 60 persen mengatakan paling senang bergaul dengan out-group tersebut. Dengan demikian defenisi senang WNI keturunan Cina terdorong oleh motivasi ekonomi yang saling menguntungkan antara pengecer dan toke. Sikap senang terhadap *out-group* Cina kurang dipercaya jika itu terjadi pada migran yang berprofesi di luar dagang.

Ketiga, Pergaulan migran dengan "saudara kembar" (Batak lainnya) terlihat paling intensif, tetapi lebih dipercaya bila interaksi itu yang dilandasi oleh perasaan kesamaan (*in-group feeling*) yang kental, bukan semata-mata karena proporsinya yang besar di kota. Alasan-alasan migran senang bergaul dengan Orang Batak lainnya umumnya berdasar pada kesamaan-kesamaan kebiasaan dan pengetahuan yang besar

tentang perilaku Orang Batak lainnya itu. Meskipun lebih dari 90 persen penduduk Tapanuli Selatan memiliki identitas budaya Batak Angkola-Mandailing, dalam pergaulan sehari-hari tidak asing menemukan Orang Batak lainnya, khususnya Batak Toba di pemukiman kota-kota kecil kecamatan atau kabupaten. Sebagai catatan, Orang Batak Toba pindah ke Tapanuli bagian selatan terjadi kira-kira sejak awal abad ke-20 akibat konflik internal. Bahasa Batak dialek Toba biasanya menjadi ciri yang khas yang membedakan dengan Orang Batak Angkola-Mandailing. Dapat dikatakan interaksi sosial antara Orang Batak Angkola-Mandailing dan Orang Batak lainnya khususnya Toba hanya terhambat oleh satu faktor penting, yaitu perbedaan kepercayaan. Meski bersifat relatif Orang Batak Angkola-Mandailing umumnya menganut Agama Islam. Sedangkan Orang Batak Toba lebih besar beragama Nasrani, demikian pula dengan Orang Batak lainnya. Suasana interaksi migran Angkola-Mandailing dengan Orang Batak lainnya tampak jelas dipusat aktivitas bersama, terminal-terminal. Di sana sulit membedakan ciri luar mereka, karena mereka bergabung satu sama lain tanpa terlihat adanya perbedaan sikap yang menunjuk pada perbedaan yang ada. Banyak diantara migran Angkola-Mandailing yang berbicara dengan dialek Batak Toba.

Keempat, Bergaul dengan Orang Jawa tergolong disenangi. Sifat halus dan lembut serta ekspresi saling menghormati menjadi alasan utama migran senang bergaul dengan out-group tersebut. Referensi migran tentang Orang Jawa mungkin tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman hidup di rantau, melainkan juga dipengaruhi oleh komunikasi sebelumnya yang terjadi di daerah asal. *Kelima*, Senang bergaul dengan Orang Arab terbentuk oleh anggapan bahwa kebiasaan Orang Arab terpuji. Tampaknya senang bergaul itu disebabkan oleh konotasi Arab dengan Agama Islam. *Keenam*, Jumlah interaksi pergaulan dengan Orang Minangkabau tergolong tinggi hampir menyamai dengan interaksi Batak lainnya. Tetapi jumlah interaksi itu tidak diikuti oleh senang bergaul. Alasan-alasan migran yang senang bergaul adalah karena berdekatan daerah asal. *Ketujuh*, Bergaul dengan Orang Ambon termotivasi oleh kesamaan-kesamaan relatif dengan out-group tersebut. Sedangkan out-group lain yang belum disinggung diatas umumnya karena migran memiliki pengalaman khusus bergaul dengan out-group tersebut.



VII. POLA BERSIKAP DAN BERTINDAK MIGRAN TERHADAP DAERAH ASAL

Perpindahan dalam bentuk apapun pada dasarnya selalu memberi dampak pada sistem-sistem yang terlibat; daerah asal, daerah antara, dan daerah tujuan. Konsekuensi sosial, ekonomi dan budaya yang diterima sistem-sistem sosial, juga berlaku pada individu pelaku migrasi. Bagi sistem sosial di daerah asal, dampak migrasi mulai terbentuk sejak anggotanya beranjak ke sistem lain hingga kemudian terjadi kontak fungsional atas perilaku migran dengan daerah asalnya. Sebaliknya daerah tujuan merasakan dampak migrasi adalah sejak migran memasuki sistem itu dan akan tetap menerima dampak secara berkelanjutan. Sedangkan dampak yang terjadi pada individu berbentuk perubahan status sosial ekonomi yang dicapai selama proses migrasi.

Secara garis besar dampak yang ditimbulkan migrasi terdiri dari dampak pasif dan aktif (Goldsceider, 1989). Dampak pasif migrasi diartikan sebagai akibat *ketidakhadiran* seseorang dalam sistem sosial yang ditinggalkan, sedangkan dampak aktif adalah akibat yang ditimbulkan oleh keterlibatan migran secara langsung atau tidak langsung terhadap sistem sosial.

Dari ciri-ciri migran dapat dipelajari bahwa mereka yang melakukan migrasi berasal dari kelompok umur muda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dari rata-rata tingkat pendidikan penduduk di daerah asal umumnya. Dengan gejala demikian, peristiwa migrasi merupakan salah satu penyebab berkurangnya sumberdaya di Tapanuli Selatan terutama sumber daya manusia. Tenaga-tenaga muda berpendidikan lebih tinggi berpotensi untuk bertindak lebih inovatif dalam berkarya dari golongan penduduk yang berpendidikan rendah. Migrasi penduduk usia muda secara permanen atau relatif permanen berpengaruh pasif yakni meninggalkan ketidakhadiran dalam kegiatan-kegiatan sosial ekonomi rumah tangga dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Di satu sisi ketidakhadiran mengurangi tenaga kerja di pedesaan, sementara di sisi lain ketidak-

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

hadiran secara permanen atau sementara berfungsi mengurangi tekanan penduduk terhadap sumber-sumber hidup.

Dampak aktif migrasi terhadap masyarakat desa berlangsung apabila migran melakukan komunikasi dengan daerah asal, langsung maupun tidak langsung. Faktor jarak senantiasa mengurangi frekuensi kunjungan ke kampung halaman dan demikian pula sebaliknya kunjungan kerabat dari kampung. Faktor jarak juga mempengaruhi sifat kunjungan timbal balik antara migran dengan keluarga atau kerabat di daerah asal. Transportasi melalui darat dan laut memakan waktu dua sampai tiga hari untuk mencapai Tapanuli Selatan, sedangkan melalui udara harus terlebih dahulu melalui ibu-kota Propinsi Sumatera Utara, Medan. Waktu tempuh Medan Padang Sidempuan antara 8-11 jam. Bagi migran berpendapatan menengah ke bawah jalur darat menjadi pilihan utama selain karena ongkos yang relatif murah dan tidak perlu transit, juga dapat memilih perusahaan bis yang pemiliknya berasal dari Tapanuli Selatan.

Kegiatan pulang ke desa biasanya direncanakan jauh-jauh hari, kecuali untuk kunjungan mendadak seperti kemalangan keluarga keluarga. Bab-bab terdahulu telah menerangkan secara jelas dari lapisan masyarakat mana migran berasal, dan bagaimana pola kehidupan migran di daerah tujuan. Mereka yang berpindah, baik diukur pada saat pertama kali meninggalkan Tapanuli Selatan maupun saat ini, memiliki karakteristik individu antara lain : (1) tingkat pendidikan rata-rata migran lebih tinggi daripada rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang ditinggalkan; (2) migran sebagian besar berusia muda; (3) lebih dari separuh berstatus sama dengan marga huta, berkaitan erat dengan pemilikan sumberdaya. Dengan demikian dampak *ketidakhadiran* migran di daerah asal atau pedesaan merupakan ketidakhadiran sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan daerah. Penduduk berusia muda dan berpendidikan tinggi memiliki sikap progressif dan inovatif untuk berkarya mengelola sumberdaya alam yang tersedia.

Semakin tinggi tingkat migrasi, dari sisi ketidakhadiran, dapat dipastikan akan semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkan. Suatu kecenderungan bahwa belakangan ini mereka yang bermigrasi semakin bervariasi tingkat umur dan tingkat pendidikannya. Hal ini menandakan hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses migrasi semakin menurun. Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari gejala ini adalah dampak negatif yang bersifat akumulatif.

Motivasi utama melakukan migrasi adalah ekonomi, merupakan respon terhadap kesulitan ekonomi yang ditemui di daerah asal. Dalam hal ini migrasi berfungsi mengurangi tekanan penduduk terhadap alam. Permasalahan yang sering diperdebatkan sekitar migrasi Orang Batak umumnya adalah rendahnya minat untuk kembali ke kampung halaman. Bagian berikut akan mengamati faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap keinginan migran kembali ke daerah asal yang diidentifikasi dari karakteristik individu migran kepala rumahtangga.

A. Keinginan Untuk Pulang dan Menetap Di Daerah Asal

Salah satu ukuran permanensi migrasi yang sering digunakan dalam berbagai penelitian adalah ada tidaknya keinginan untuk menetap di kota tujuan. Dari sudut pandang daerah asal berarti dapat disebutkan bahwa permanensi migrasi terjadi apabila migran tidak berkeinginan untuk pulang dan menetap di tempat asalnya. Sebanyak 38 persen responden berniat untuk kembali ke kampung halaman, 8 persen ragu-ragu, dan selebihnya 53 persen mengambil sikap tidak kembali. Proporsi yang lebih besar pada mereka yang tidak ingin kembali mendukung kenyataan umum bahwa migrasi orang Batak cenderung "hanyut" atau permanen di suatu tempat tujuan. Dari 23 orang migran yang ingin kembali sebagian besar, 82 memilih desa tempat tujuan, 13 persen minimal di kota kecamatan dan 4 persen di ibukota kabupaten. Dalam pengujian statistik beda proporsi berikutnya migran ragu-ragu tidak akan diikutsertakan dalam pengujian, tetapi tetap ditampilkan dalam Tabel 63. Dengan demikian jumlah responden yang termasuk dalam perhitungan menjadi 55 orang.

Tabel 63. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Keinginan Untuk Pulang Kampung Halaman

Keinginan Untuk Pulang (Kembali)	Umur						Jumlah Tanggungan						Tingkat Pendidikan									
	Muda		Sedang		Tua		Kecil		Sedang		Tengah		Sedang		Tinggi		Sedang		Tinggi			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
1. Ya	13	57	5	22	5	36	14	52	5	23	4	33	4	29	18	46	1	14				
2. Ragu-ragu	2	9	3	13	0	0	2	7	2	10	1	9	1	7	4	10	0	0				
3. Tidak	8	34	15	65	9	64	11	41	14	67	7	58	9	64	17	44	6	86				
Jumlah	23	100	23	100	14	100	27	100	21	100	12	100	14	100	39	100	7	100				
	Tingkat Pendapatan																					
	Rendah						Sedang						Tinggi									
1. Ya	4	50	18	39	1	7	7	54	16	34	19	38	4	40								
2. Ragu-ragu	2	25	3	7	0	0	1	8	4	9	5	10	0	0								
3. Tidak	2	25	25	54	5	83	5	38	27	57	26	52	6	60								
Jumlah	8	100	46	100	6	100	13	100	47	100	50	100	10	100								
	Sikap Terhadap Budaya Batak (In-group)																					
	Kuat						Labil						Sikap Terhadap Budaya Sunda (Out-Group)									
1. Ya	16	38	7	16	7	39	8	67	15	31	20	35	3	100								
2. Ragu-ragu	3	7	2	5	2	11	0	0	5	10	5	9	0	0								
3. Tidak	23	55	9	21	50	83	4	33	28	59	32	56	0	0								
Jumlah	42	100	18	43	59	100	12	100	48	100	57	100	3	100								
	Keinginan																					
	Setting Migrasi						Masa Domisili						Keberadaan Orang Tua									
	I		II		III		Singkat		Sedang		Lama		Ada		Tidak Ada							
1. Ya	0	0	3	18	20	57	10	48	8	42	5	25	15	37	8	40						
2. Ragu-ragu	0	0	1	6	4	11	3	14	1	5	1	5	4	10	1	5						
3. Tidak	8	100	13	76	11	32	8	38	10	53	14	70	21	53	11	55						
Jumlah	8	100	17	100	35	100	21	100	19	100	20	100	40	100	20	100						

Sumber : Data Primer, 1993.

Umur. Hubungan umur dengan keinginan untuk pulang dapat diperhatikan pada Tabel 63 diuji dengan X^2 . Migran berumur muda cenderung lebih besar yang berkeinginan untuk pulang ke kampung halaman dibandingkan dengan migran berumur sedang dan tua. Persentase migran berumur muda yang berniat pulang sebesar 57 persen, sedangkan yang berumur sedang dan tua hanya sebesar 20 persen dan 36 persen. Hubungan umur dengan keinginan untuk pulang melalui pengujian proporsi diperoleh nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 4.38; ($X^2_{Tabel, db=1; \alpha=0.05} = 3.84$). Hal ini menjelaskan, migran yang berumur muda lebih besar berniat pulang ke kampung halaman (menetap) dibanding kelompok umur di atasnya.

Jumlah Tanggungan. Hubungan jumlah tanggungan migran dengan keinginan untuk pulang ke kampung halaman terlihat, bahwa proporsi jumlah tanggungan yang kecil memiliki keinginan untuk kembali lebih besar dibanding dengan migran jumlah tanggungan sedang dan besar, masing-masing sebesar 52 persen, 24 persen dan 33 persen. Akan tetapi pada migran yang mempunyai jumlah tanggungan yang sedang terlihat ada kecenderungan sedikit lebih besar untuk tidak pulang ke kampung halaman daripada para migran yang mempunyai jumlah tanggungan kecil dan besar, yaitu sebesar 67 persen. Uji statistik menunjukkan nilai $X^2_{hitung, db=1}$ adalah 3.05 tidak nyata pada $\alpha = 0.05$, tetapi terlihat nyata pada $\alpha = 0.1$. Dengan demikian ada kecenderungan, keinginan untuk pulang dipengaruhi oleh jumlah tanggungan. Dalam pencapaian tujuan (3H) tanggungan tampak termasuk dalam tujuan *hamoraon*, yaitu memiliki anak, saudara, atau kerabat yang sebanyak banyak-banyaknya. Hal ini berarti semakin tercapai tujuan hidup itu di rantau maka keinginan untuk pulang semakin kecil.

Tingkat Pendidikan. Hubungan tingkat pendidikan dengan keinginan untuk pulang dapat diperhatikan pada Tabel 63. Responden berpendidikan rendah lebih besar berniat tidak kembali ketimbang kembali sebesar 64 persen berbanding 29 persen. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan sedang tampak berimbang antara berniat pulang (46 persen) dan tidak berniat pulang (44 persen). Migran berpendidikan tinggi lebih pasti dalam bersikap bahwa mereka tidak ingin kembali, yaitu sebesar 86 persen.

Uji statistik setelah menggabungkan kolom-kolom kecil pendidikan tinggi dan pendidikan menengah didapatkan, bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi yang nyata antara pendidikan dengan keinginan untuk pulang. Nilai $X^2_{hitung, db=1} = 0.44$.

Tingkat Pendapatan. Status ekonomi tampaknya turut berperan dalam pembentukan sikap ini, sebanyak 4 orang (50.0 persen) dari 8 migran yang berpendapatan rendah mengatakan ingin kembali, 2 migran (25 persen) masih ragu dan sisanya sebanyak 2 migran (25 persen) yang berniat untuk migrasi permanen. Kelompok berpendapatan menengah sebanyak 39 persen berkeinginan untuk pulang dan 7 persen ragu-ragu serta 54 persen berniat menetap. Sikap yang lebih nyata untuk menetap di rantau terbentuk pada migran yang berpendapatan tinggi, yaitu 83 persen yang tidak ingin pulang berbanding 17 persen yang ingin pulang.

Pengujian statistik X^2 , setelah melakukan penggabungan kolom-kolom kecil diperoleh nilai $X^2_{hitung, db=1}$ sebesar 1.81, artinya tidak nyata pada $\alpha = 0.05$, tetapi nyata pada $\alpha = 0.2$. Penggabungan tingkat pendapatan menjadi dikotomi rendah dan sedang/tinggi, secara statistik mengurangi kekontrasan pengaruh tingkat pendapatan pada keinginan untuk kembali. Dengan sampel-sampel yang lebih besar mungkin akan diperoleh gambaran yang benar-benar meyakinkan tentang pengaruh pendapatan terhadap keinginan untuk pulang.

Daerah Asal. Orang Batak Angkola Mandailing merupakan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang relatif seragam, tetapi pada aspek-aspek tertentu mereka memiliki perbedaan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penting untuk melihat apakah ada perbedaan dalam hal keinginan pulang setelah sama-sama merantau.

Secara proposional keinginan pulang orang Angkola tidak terlalu berbeda dengan orang-orang daerah asal Mandailing, masing-masing sebesar 54 persen dan 38 persen. Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ adalah 0.95 jauh lebih kecil dari ($X^2_{tabel, db=1; \alpha=0.05} = 3.84$). Informasi ini cukup meyakinkan bahwa keinginan pulang para migran dari wilayah sub etnis Angkola dan Mandailing adalah homogen.

Jenis Pekerjaan. Keadaan yang sama ditemui pada migran yang berbeda jenis pekerjaan. Migran yang bekerja di bidang perdagangan dan non perdagangan memiliki

proporsi yang hampir sama dalam hal keinginan pulang, yaitu 38.0 persen dan 40.0 persen. Nilai $X^2_{hitung, db=1}$ adalah 0.05 sangat kecil dibandingkan dengan $X^2_{tabel, db=1, \alpha=0.05}$ sebesar 3.84.

Sikap Terhadap Budaya In-Group. Sikap terhadap budaya *in-group* yang kuat tampak tidak berbeda dengan sikap *in-group* labil terhadap keinginan pulang ke kampung halaman. Migran yang memilih sikap *in-group* kuat (39 persen) berkeinginan untuk pulang sedang yang bersikap *in-group* labil juga memiliki proporsi yang sama (39 persen). Dugaan semula bila seseorang memiliki sikap *in-group* labil akan mengurangi minat untuk kembali karena secara logis seseorang yang pemilik sikap *in-group* memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghadapi benturan sikap dengan komunitas *in-group*, tidak terbukti.

Sikap Terhadap Budaya Out-Group. Migran pemilik sikap *out-group* kuat ternyata memiliki keinginan yang kuat pula untuk pulang ke kampung halaman (67 persen) dibandingkan dengan sikap *out-group* yang labil (31 persen). Nilai $X^2_{hitung, db=1} = 3.95$ lebih besar dari nilai $X^2_{Tabel, db=1, \alpha=0.05}$ adalah 3.84.

Suku Istri. Suku istri ternyata tidak menghambat kemungkinan migran untuk pulang kampung halaman. Semua migran beristri Sunda berniat untuk kembali ke daerah asal, sementara proporsi migran yang beristri Batak lebih besar tidak berkeinginan untuk pulang sebesar 56 persen. Keinginan untuk pulang yang besar pada migran amalgam merupakan fenomena tersendiri dalam migrasi. Bagian terakhir bagian khusus, akan menampilkan kasus seorang pelaku kawin campur (*amalgamasi*) tentang pengalamannya menjalani amalgamasi. Kasus juga akan mengungkapkan bagaimana sejarah perpindahan menuju kota Bogor, pengalaman menaklukkan rantau, dan yang terakhir tentang aspirasinya untuk kembali ke kampung halaman.

Setting Migrasi. Orang Batak Angkola Mandailing yang mendiami kota Bogor berpindah pada tiga selang waktu perpindahan. Waktu perpindahan dari daerah asal diduga mempengaruhi sikap migran untuk kembali ke sana. Jika masa domisili yang diungkapkan sebelumnya lebih menunjuk pada lama bertempat tinggal di kota Bogor, *setting* lebih banyak menerangkan pengaruh tahun perpindahan dari daerah asal.

Pengaruh waktu perpindahan dengan keinginan pulang tampaknya menonjol, yakni sebesar 57 persen pada setting I, sedangkan pada setting II hanya 18 persen, sedangkan terlihat bahwa pada setting III jumlah migran yang berkeinginan untuk pulang tidak ada sama sekali. Setelah melakukan penggabungan kolom setting I ke setting II diperoleh nilai $X^2_{Hitung, db=1}$ sebesar 9.89. Pada $\alpha = 0.01$ dapat diterima, bahwa terdapat perbedaan proporsi keinginan untuk pulang ke kampung halaman menurut setting pindah. Dengan kata lain, perpindahan migran setting I dan II lebih kuat keinginannya untuk pulang daripada migran yang berpindah pada tahun-tahun belakangan.

Masa Domisili. Masa domisili migran tampak berhubungan dengan keinginan pulang ke kampung halaman. Masa domisili singkat berkeinginan lebih besar lebih besar untuk kembali ke kampung halaman dibanding masa domisili sedang dan masa domisili lama, yaitu sebesar 48 persen berbanding 42 persen dan 25 persen. Uji statistik menunjukkan, nilai $X^2_{Hitung, db=2}$ adalah 3.32, lebih besar dari nilai $X^2_{Tabel, db=2, \alpha=0.20}$ sebesar 3.22, artinya hanya dapat dipercaya perbedaan masa domisili berhubungan dengan keinginan pulang pada $\alpha = 0.20$.

Keberadaan orang tua. Keberadaan orang tua di kampung halaman diduga memiliki daya pengikat bagi migran untuk kembali ke sana. Jika seseorang masih memiliki orang tua, kemungkinan lebih besar keinginannya untuk kembali ketimbang migran yang orang tuanya telah meninggal atau berada di luar daerah asal.

Keinginan migran untuk kembali yang masih memiliki orangtua hampir sama dengan mereka yang tidak memiliki orang tua di daerah asal, masing-masing 37 persen dan 40 persen. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai $X^2_{Hitung, db=1}$ adalah 0.08, artinya tidak ada perbedaan keinginan pulang antara migran yang tidak mempunyai (tidak ada) orangtua maupun yang masih mempunyai orangtua di kampung halaman.

Keinginan untuk pulang ke kampung halaman berdasarkan keberadaan orang tua ternyata tidak berbeda. Ikatan migran moral dan kultural dengan tanah asal, bukan hanya kepada orang tua, saudara-saudara, tetapi juga kepada lingkungan alam penyusun

komunitas desa. Semua bentuk ikatan itu tidak serba sama dalam mempengaruhi sikap dan tindakan migran terhadap daerah asalnya. Kesetiaan kepada ikatan kultural mungkin dipengaruhi oleh status sosial migran dalam sistem kekerabatan *dalihan natolu* yang berimplikasi relatif terhadap pemilikan tanah marga.

Secara teoritis pemegang otoritas huta adalah marga huta. Orang-orang diluar itu menempati status dibawah marga huta, tetapi tetap penting dalam kehidupan sosial di huta. Pada survei kedua ditemukan separoh dari migran berasal dari kalangan marga huta (50 persen), selebihnya 37 persen berasal dari bukan marga huta, selebihnya tidak tercatat.

Berkaitan dengan status dan otoritas kehidupan desa lebih banyak menekan kalangan bukan marga huta. Setelah melakukan perantauan keinginan untuk kembali ke tempat itu tetap dipengaruhi oleh status itu. Sebagai perbandingan perantauan lelaki pada orang-orang Minangkabau tidak terlepas dari pengejaran status; karena tidak mendapat tempat yang kokoh diantara keluarga ibunya atau keluarga istrinya, mengantarkan perantau bertindak sirkulasi dalam merantau untuk mendapatkan status dari kalangan keluarga yang ditinggalkan. Pola pengejaran status seperti itu kemungkinan bisa berlangsung pada Orang Batak khususnya pada mereka yang berstatus bukan marga huta, dimana kalangan bukan marga huta subordinasi kekuasaan di huta. Akibat determinasi kultural itu ada kemungkinan kalangan bukan marga huta mengimbangi subordinasi dengan kelebihan ekonomi yang diperoleh di rantau. Bagi kalangan marga huta status dalam huta telah mencapai batas pagu tanpa harus mencari timbalan lain.

Dalam struktur kekerabatan *dalihan natolu* terdapat tiga unsur penyusun yang masing-masing mempunyai fungsi dan peran yang berbeda, yaitu *kahanggi*, *mora*, *anak boru*. Bila kekerabatan ini ditempatkan dalam suatu huta dan marga huta (*panusunan raja*) berposisi sebagai *kahanggi*, maka *anak boru* yang langsung menikahi gadis marga huta dikenal dengan gelar *orang kaya*. Makna gelar itu sebagian tercermin bahwa *anak boru* harus berusaha memperoleh posisi yang menguntungkan dalam tawar-menawar hubungan sosial dengan kalangan *moranya* (*panusunan raja* atau *kahangginya*).

Umumnya tradisional mengatakan *anak boru* berperan "sisuhat nalobi sitambai nahu-rang" (*mengerus yang lebih, menambah yang kurang*) dalam bermasyarakat dan lebih nyata pada kegiatan kolektif adat. Untuk memperoleh memperoleh status dihadapan kalangan *moranya* seorang *orang kaya* atau *anak boru* tentunya harus bertindak "menambah yang kurang" sesuai dengan gelar adat itu, bukan sebaliknya "menggerus yang lebih". Terjemahan yang aktual dalam hal ini adalah termasuk tawar-menawar dalam ekonomi. Seorang *anak boru* yang senantiasa bertindak "menggerus yang lebih" dari *moranya* akan kehilangan maknanya dari gelar dan status *orang kaya* yang disandangnya.. Salah satu upaya untuk dapat bertindak seimbang dan mempertahankan status *anak boru* dalam huta adalah memiliki status ekonomi yang tinggi agar tetap sinkron dengan gelar *orang kaya*. Dikaitkan dengan perantauan, perhatian dicurahkan kepada perantau bukan marga huta. Perolehan harta di rantau menguntungkan secara sosial bila ingin kembali ke kampung halaman, tetapi tidak mungkin memiliki otoritas setinggi marga huta. Sedangkan kehidupan di rantau terbuka baginya untuk memperoleh status ekonomi dan sosial secara bersama-sama. Keberhasilan seseorang kalangan bukan marga huta membangun huta di rantau (*sahala harajaon*) yang kemudian diikuti oleh kalangan marga huta si kerajaan merantau itu, kalangan marga huta itu tidak lagi memegang otoritas seperti halnya di huta asal. Sebaliknya pembangun rantau tadi bertindak sebagai pemegang tongkat kerajaan baru membawahi kalangan marga hutanya di daerah asal. Dengan kata lain posisinya dalam struktur kekerabatan *dalihan natolu* tetap berjalan, tetapi berubah dalam otoritas rantau. Di bawah ini dapat diperhatikan bagaimana keinginan pulang migran menurut status marga dalam huta di daerah asal.

Dari Tabel 64 terlihat kalangan marga huta lebih banyak yang berkeinginan untuk pulang (53 persen), sedangkan kalangan bukan marga huta lebih kecil (27 persen), dan tidak tercatat lebih kecil lagi (13 persen).

Tabel 64. Hubungan Status Marga Migran Dalam Huta Asal Dengan Keinginan Untuk Pulang Ke Kampung Halaman.

Keinginan Untuk Pulang (Kembali)	Status Marga Migran Dalam Huta					
	Kalangan Marga Huta		Bukan Marga Huta		Tidak Tercatat	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1 Ya	16	53	6	27	1	13
2 Ragu-ragu	3	10	2	9	0	0
3 Tidak	11	37	14	64	7	87
Jumlah	30	100	22	100	8	100

Sumber : Data Primer, 1993

Dengan mengabaikan kolom tidak tercatat dalam perhitungan statistik X^2 diperoleh kesimpulan tidak terdapat perbedaan yang nyata pada $\alpha = 0.05$ tetapi kecenderungan perbedaan masih dapat diperhatikan pada $\alpha=0.10$ ($X^2_{hitung,db=1} = 2.86$; $X^2_{tabel,db=1,\alpha=0.10} = 2.71$). Dengan kata lain pada derajat kepercayaan 90 persen dapat dipercaya sikap keinginan untuk pulang dipengaruhi oleh status marga migran dalam huta. Bila kolom kalangan bukan marga huta digabung dengan kolom tidak tercatat yang tampak lebih condong pada kalangan bukan marga huta, maka kecenderungan perbedaan akan menjadi lebih nyata, ($X^2_{hitung,db=1} = 5.81$; $X^2_{tabel,db=1,\alpha=0.01} = 3.84$). Kesimpulan akhir dari pembicaraan ini adalah migran yang bukan marga huta lebih sedikit yang berkeinginan untuk pulang dan menetap di daerah asal. Kecenderungan ini menandakan pilihan yang diambil oleh kalangan bukan marga huta dalam mendapatkan status sosial adalah mencari tempat lain yang memungkinkan dirinya menumpuk status sosial, yaitu rantau. Sebuah kasus akan diangkat sehubungan dengan fenomena ini pada bagian akhir sub bab ini.

Memperhatikan pengujian-pengujian statistik di atas, ada dua faktor yang berhubungan erat dengan keinginan migran untuk pulang, *umur* dan sikap terhadap budaya *out-group* Sunda. Faktor yang cenderung berpengaruh mengurangi minat kembali adalah jumlah tanggungan, income, masa domisili, setting, marga huta.

Faktor lain tampak tidak membedakan keinginan migran untuk pulang.

Dari segi umur, keinginan migran berumur tua secara lebih kecil keinginannya untuk menyisakan waktu hidupnya tinggal di kampung halaman. Hal ini tampaknya selaras jumlah tanggungan, setting migrasi, tingkat pendapatan, masa domisili yang cenderung berpengaruh negatif terhadap keinginan pulang. Dengan kata lain, jika pendapatan seseorang telah meningkat, jumlah tanggungan membesar, dan dengan masa domisili yang semakin lama maka keinginannya untuk pulang semakin berkurang.

Sikap terhadap *out-group* dapat dijelaskan bila semakin kuat pengidealan terhadap budaya *out group* Sunda maka semakin besar pula keinginan untuk mereka untuk pulang ke kampung ke kampung halaman. Hubungan ini tampaknya kontradiktif, dimana menurut kerangka berfikir logis seseorang yang telah terpengaruhi sikapnya oleh budaya-budaya selain budaya *in-group* maka semakin memungkinkan baginya untuk tetap berada di wilayah budaya *out group* tersebut. Dengan kata lain bila seseorang migran mengidealkan budaya Sunda maka semakin betah pula dia di tengah-tengah orang Sunda sehingga tidak perlu kembali ke kampung halaman. Kemungkinan lain yang dapat menjawab fenomena ini adalah sikap kuat yang dimiliki oleh migran terhadap budaya *out-group* tidak benar-benar mengidealkan budaya Sunda tetapi hanya sebatas empati, sehingga sikap kuat yang muncul tidak dapat menjelaskan keinginan mereka yang sesungguhnya untuk menetap di Kota.

Faktor pendidikan tidak terlihat sebagai penghalang atau pelancar keinginan pulang. Hal ini tampak kurang meyakinkan dan ada *ketertutupan* peran akibat penggabungan kolom-kolom dalam pengujian statistik. Seperti uraian sebelumnya sebenarnya migran berpendidikan tinggi hanya satu (14 persen) dari tujuh orang yang ingin pulang. Ini dapat dibandingkan dengan persentase migran yang ingin pulang sebesar 38 persen. Alasan-alasan migran yang berpendidikan tinggi untuk tidak pulang umumnya berkisar pada ketidaksesuaian pekerjaan dan status sosial yang mereka miliki. Keadaan ini didukung pula oleh keberadaan orang lain seperti anak-anak di sekitarnya.

Hubungan jumlah tanggungan dengan keinginan pulang cenderung negatif,

artinya semakin tinggi jumlah tanggungan (jumlah orang disekitarnya), maka semakin kecil minat migran untuk kembali ke kampung halaman. Sebuah keluarga kecil, keluarga prokreasi ditambah saudara-saudara terdekat dan di kelilingi oleh sejumlah kerabat jauh yang saling kenal di daerah asal maupun yang di rantau, merupakan unsur penyusun kerajaan rantau (*kerajaan pribadi*). Kerajaan pribadi lebih bermakna keluarga dimana urusan domestik menjadi tanggungan migran atau secara sosial merupakan tanggung jawab migran sebagai kepala keluarga. Jarak geografis antar rumah sesama migran berjauhan dan terbukti hubungan tetangga tetangga jarang terjadi. Layaknya hubungan antar "huta-huta" di daerah asal yang menempatkan marga sebagai pemegang otoritas di atas wilayah teritorialnya, di *kerajaan pribadi* seorang migran inti menjadi penguasa dan cenderung melepaskan anggotanya keluarga yang telah tiba masa kemandiriannya. Akhir dari sebuah proses adalah sistem pembiakan yang berantai dimana keluarga-keluarga, kerajaan-kerajaan menemukan jati dirinya secara terpaksa atau mapan.

Konflik dalam keluarga senantiasa ditekan, kekhasan masing-masing pribadi dieliminir sedemikian kecil oleh adanya perasaan minoritas. Pendatang baru tidak hanya mempertimbangkan keasingan di luar keluarga, tetapi juga ketidakpastian "karir" yang diharapkan dari figur/inti keluarga. Harmoni kepentingan antara inti dan pendatang baru menjaadi tolak ukur kejayaan keluarga dan berikutnya keluarga-keluarga yang lahir dari proses pembelahan.

Tanggungjawab sosial migran inti terhadap orang-orang di desa menjadi salah satu pertimbangan dalam membina pendatang baru. Disharmoni hubungan sosial migran inti dengan kerabatnya di kota dengan tersebar ke kampung. Jika hal ini berlangsung maka dia akan mendapat pengesahan dari masyarakat sebagai kerabat yang kurang etis, apalagi kedatangan keluarga atau kerabat diprakarsai oleh migran inti.

Penting diperhatikan bahwa minat saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa migran benar-benar ingin menyisahkan masa hidupnya di kampung halaman. Minat tidak selalu *immanen*, tetapi dia bisa berubah sesuai dengan pencapaian tujuan-tujuan

hidup di kota. Dalam kaitan inilah tampak masa domisili dan setting migrasi cenderung berperan mengurangi dengan keinginan pulang.

Kasus 2.

Kasus ini diangkat untuk memperlihatkan terjadinya transformasi struktur sosial *huta* di daerah asal menjadi "*huta*" di daerah tujuan, dimana kalangan bukan marga *huta* di daerah asal dapat membangun *kerajaan* di rantau. Disamping itu kasus ini dapat dijadikan sebagai pembandingan uraian-uraian terdahulu, mengenai proses okupasional, serta sikap dan tindakan migran terhadap daerah asalnya. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa *huta* dalam arti sistem sosial totalitas orang Batak hanya dapat terjadi pada jaman *spelled isolation*, adapun *huta* yang terdefenisi sekarang ini lebih merupakan assilimilasi dari *huta spelled isolation* dengan sistem pemerintahan desa moderen. Selanjutnya, *huta* dalam konteks rantau bukan ditunjukkan oleh *enclave* pemukiman yang homogen dihuni migran, tetapi *huta* dalam pengertian yang lebih khusus berupa kelompok atau paguyuban etnis atau teritorial daerah asal tempat migran-migran melakukan interaksi sosial. Kelompok-kelompok migran adalah sistem sosial yang tertutup dari sistem sosial rantau yang lebih luas. Sistem sosial yang lebih kecil dari kelompok adalah rumahtangga yang terdiri dari seperangkat keluarga prokreasi migran ditambah beberapa anggota keluarga orientasi, atau kerabat jauh.

X1, seorang migran bermarga x, belum menikah, 25 tahun, SMP, berangkat dari sebuah *huta* yang secara historis merupakan *huta kerabatnya* yang bermarga y pada awal tahun 1978. Desa itu berada di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi X1 dan keluarganya serta orang yang semarga dengannya dalam sistem kekerabatan *dalihan natolu* umumnya¹ *anak boru* (pihak pengambil gadis marga). Setelah menetap di Jakarta selama kurang setahun, muncul keinginan untuk berjualan kaki lima di Bogor dan enam bulan kemudian membuka kedai kelontong di Bogor Selatan (Tahun 1979). Karena usahanya cepat berkembang pada tahun yang sama x1 menyuruh adik kandungnya (X2) menyusul ke Bogor untuk membantu berjualan. Setahun kemudian (1980) X1 meminta adiknya (X3) untuk berangkat ke Bogor karena

1. Di wilayah kebudayaan Mandailing marga-marga penyusun komunitas *huta* lebih heterogen ketimbang Angkola, *mixing population* berlangsung intensif tercatat dalam sejarah tetapi konsep marga *huta* tetap eksis. (Parlindungan, 1964.) Orang-orang semarga dapat mempunyai posisi ganda dalam kekerabatan *dalihan natolu* karena perkawinan internal *huta*. Dalam penelitian ini bahkan ditemukan beberapa orang migran yang menikah dengan wanita semarga.

dia akan membuka kedai baru dan dua tahun kemudian (akhir tahun 1982) menampung abangnya (X4) yang sudah menikah dan membawa istrinya. X4 menikah dengan salah seorang gadis marga huta, yaitu marga y. Sampai saat ini belum ada orang sedesa yang mendiami Bogor, kecuali di Jakarta dan Bekasi.

Lebaran tahun 1983 X1 untuk pertama kalinya pulang ke kampung halaman sekaligus melangsungkan pernikahannya dengan gadis luar desa. Ini mengakibatkan X1 menghabiskan waktu satu bulan di desa. Selama di desa X1 banyak mendapat pertanyaan dari orang-orang desa tentang resep khusus usahanya di kota. X1 menceritakan pengalamannya selama hampir lima tahun merantau. Informasi tersebut ternyata menggugah minat orang desa untuk mengikuti jalan X1. Pada tahun pertama (1984) setelah pernikahannya, menurut X1 ada 4 orang warga desa yang menyusulnya ke Bogor, 2 orang langsung membawa modal usaha yaitu Y1 dan Y2 sama-sama bermarga y atau kalangan marga huta, tetapi ada 2 orang yang sekedar melihat-lihat keadaan dan memastikan kebenaran informasi, yaitu Z bermarga z dan X5 semarga dengan X1. Keempat orang ini semua menginap dan ditampung beberapa hari (sementara) oleh X1, kecuali X5 yang sampai 4 bulan.

Tahun tahun berikutnya hingga tahun 1993 ada 5 orang lagi yang datang menemui X1 dengan maksud yang sama mencari kesempatan untuk berusaha. Jika digabung dengan yang ditampung oleh saudaranya (X2, X3, X4) yang masing-masing sudah berkeluarga, serta Z, Y1, Y2, dan X5, jumlah orang sekampung yang tinggal di Bogor sudah berbilangan puluhan. Kehadiran mereka tidak terdeteksi lagi waktu kedatangannya oleh X1.

Sampai Tahun 1989 X1 dan warga kampung S ikut serta aktif pada organisasi HIKTAS dimana anggotanya berasal dari puluhan desa di Tapanuli Selatan. Nama organisasi itu sendiri mengatasnamakan Tapanuli Selatan sebagai wilayah asal anggotanya. Tetapi aktifitas kelompok informal khusus warga kampung S telah berlangsung sejak Tahun 1987, misalnya arisan dan pengajian.

Jumlah migran warga kampung S yang terus berkembang memunculkan keinginan mereka untuk membentuk kelompok atas nama *hutanya* dan pada akhir tahun 1989 kelompok "formal" itupun terbentuk dengan Nama Ikatan Masyarakat S (IMS). Sebagian besar anggotanya berasal dari huta S dan selebihnya dari desa-desa yang berdekatan. Secara aklamasi X1 terpilih sebagai Ketua kelompok, X2 sebagai sekretaris, Y2 sebagai bendahara. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga IMS tertulis pemilihan ketua dilakukan sekali dalam 3 tahun. Pada tahun 1993 bulan suksesi berjalan dan Ketua IMS dipegang oleh X2 (adik X1) sedang X1 dan Y2 bertindak sebagai penasehat.

X1, mengatakan sudah kecil kemungkinannya untuk kembali ke kampung halaman. Tidak ada yang tertinggal di kampung halaman, kecuali kuburan orangtua (Ayah) dan sebidang tanah. Sementara ibunya menginap di tempat abangnya (X4), telah dibawa ke kota "disini ibu lebih mudah diurus, bisa berganti-ganti dari anak yang satu ke yang lain". Tetapi menurut penuturan X1, ibunya sering memperlihatkan ketidakbetahan di kota, dia ingin tinggal di kampung saja. X1, pernah berembug dengan adik-adiknya serta abangnya (X4) untuk membicarakan keinginan ibunya dengan pertimbangan agar bisa *marpondok* (kebiasaan orangtua jompo mengakhiri masa hidupnya di pondok-pondok pengajian). Tetapi kemudian rembulan terbentur karena tidak ada lagi saudara laki-laki yang menjaga ibunya, seandainya si ibu pulang ke desa.

Adapun saudara disana adalah saudara perempuan yang bertempat tinggal kira-kira 200 Km dari desa mereka. Sementara menurut X1, dua orang adiknya serta seorang abangnya tidak ada yang berniat mendampingi ibunya tinggal di desa, karena usaha masing-masing sudah cukup mapan. Perantauan X1 tergolong berhasil, saat ini dia telah memiliki dua buah rumah, sebidang tanah di luar kota, dua mini bus angkutan kota, dan tiga buah kedai, dimana satu

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



diantaranya sudah termasuk grosir. X1 menuturkan "Sudah susah usaha ini ditinggalkan, di kita sana tidak ada yang seperti ini, disini sudah lebih enak. Di kita sana yang ada hanya bersawah, tidak terpikirkan lagi oleh saya itu (pulang kampung)".

Kesan X1 dalam bermasyarakat diterjemahkan seperti ini "sudah seperti kampung kita rasanya di sini, sudah banyak saudara, apalagi ?!. Di sini pun cukup enak bermasyarakat, ramahnya mereka sama kita. Cuma... kalau ada sifat-sifat mereka yang kurang baik, itu bukan urusan kita. Yang penting mereka menghargai kita. Dimana yang cocok di situlah kita ikut. Saya sekarang ikut sebagai pengurus mesjid (DKM), di sebelah rumah kita ini.

Kunci keberhasilan usaha menurut X1; "memang orang sini sangat royal jajan, banyak sekali keperluan mereka. Kayaknya orang di sini lebih banyak makan di luar ketimbang makan di rumah. Sekarang kita menampung segala macam keperluan harian mereka, beras dari kita, sabun belinya ke kita, jajan anak-anaknya pun ke kita. Harga barang kita pun agak direndahkan dan diupayakan ramah sama mereka. Anggota kita itu (*saudaranya yang berjualan di kedainya*), pun saya ajari supaya berlaku ramah bila berjualan.

Kesan masyarakat yang ditangkap oleh X1 tentang keberadaannya ditengah masyarakat : "awalnya kita memang perlu sabar, sebab bagaimanalah... kadang-kadang mereka takut bergaul sama kita, mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi itu perlu agar mereka tidak mengganggu kita. Saya punya teman akrab orang sini... kalau hari minggu suka mancing bersama dan kadang-kadang main bola di lapangan sana. Sekarang saya dengan dia sudah tidak ada rahasaan lagi. Masih banyak lagi teman orang sini"

Kesan X1 tentang migran sederaah umumnya: "Dimana saja pun sangat susah mengatur orang kita, jadi kita harus pintar-pintar menyiasati mereka, agar bisa diatur. Orang kita di sini kan banyak, jadi sudah sulit bertemu secara bersama-sama, paling mungkin *halal bi halal* seperti yang kita adakan beberapa waktu lalu. Saya dengar banyak juga orang kita yang *hebat-hebat* di sini tapi saya belum pernah bertemu dengan mereka.

Bila kelompok ini dipandang sebagai sistem sosial yang merupakan media interaksi sesama migran yang *sehuta*, tampaknya di rantau terjadi pergeseran kepemimpinan atau otoritas yang mendasar dari *huta asal*. Di *huta asal* pemegang kendali masyarakat senantiasa berada ditangan marga *huta* yaitu marga y, di sini tampak bergeser ke tangan X1 yang bermarga x. Sedangkan tata hubungan *dalihan natolu* tidak berubah dan tidak akan pernah berubah jika tidak terjadi perkawinan *sambar bulung*¹. Dalam prinsip kekerabatan *dalihan natolu* di desa asal X1 dan keluarganya berposisi sebagai *anak boru* atau *Orang Kaya huta* terhadap marga *huta*, yaitu marga y.

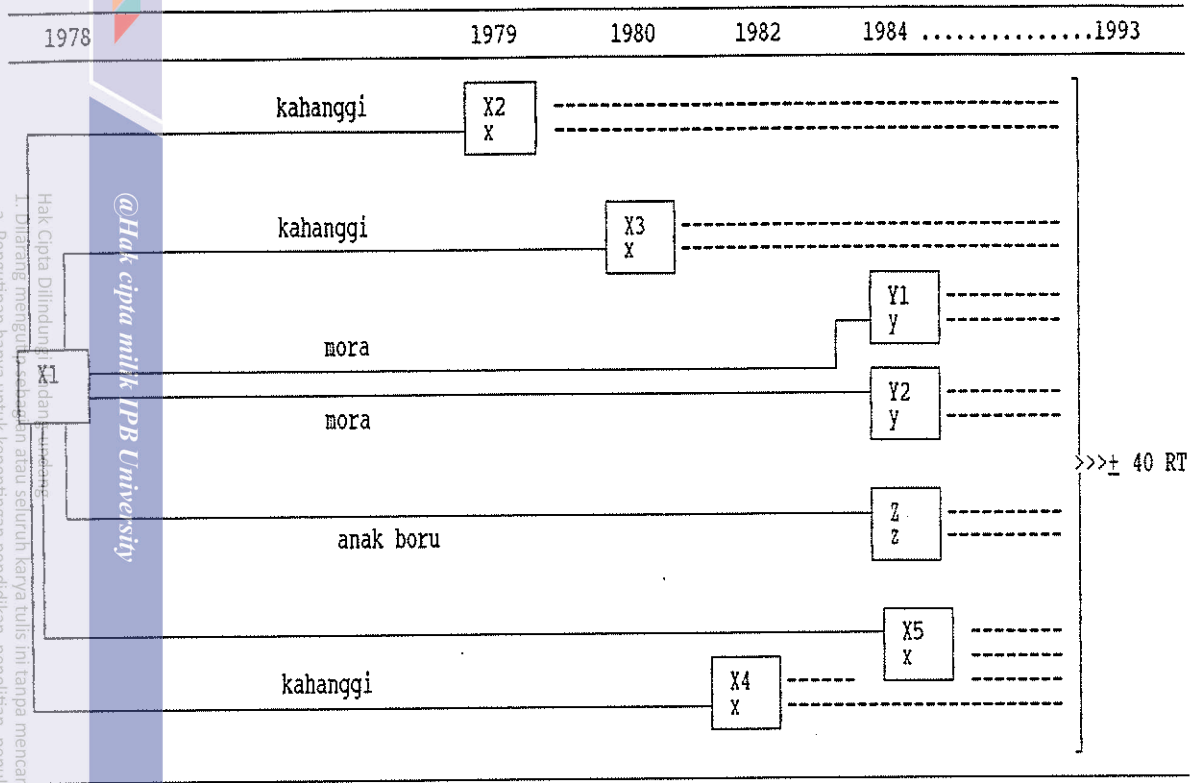
1. Sambar bulung adalah fungsi kebalikan dari perkawinan manyunduti (Angkola-Mandailing; marpariban, Toba) suatu pernikahan yang ideal menurut kebudayaan Batak tradisional, yaitu seorang lelaki menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Sedangkan sambar bulung berlaku sebaliknya, yaitu seorang lelaki menikahi anak perempuan dari saudara perempuan ayahnya. Sambar bulung sudah sering terjadi di Mandailing khususnya, yang kuat dipengaruhi sistem nilai Islam. Wawancara bebas.

Dengan posisi tersebut X1 berperan *sitambai na hurang*, *sihorus nalobi* (menambahi yang kurang, menggerus yang lebih) atau *somba-somba marmora* (hormat bermora). Ketika kepemimpinan bergeser prinsip *dalihan natolu* senantiasa eksis sebagai pengatur tata hubungan sesama migran. Artinya status sosial mereka yang bukan marga huta bisa berubah melalui peristiwa migrasi.

Hak Cipta milik IPB University

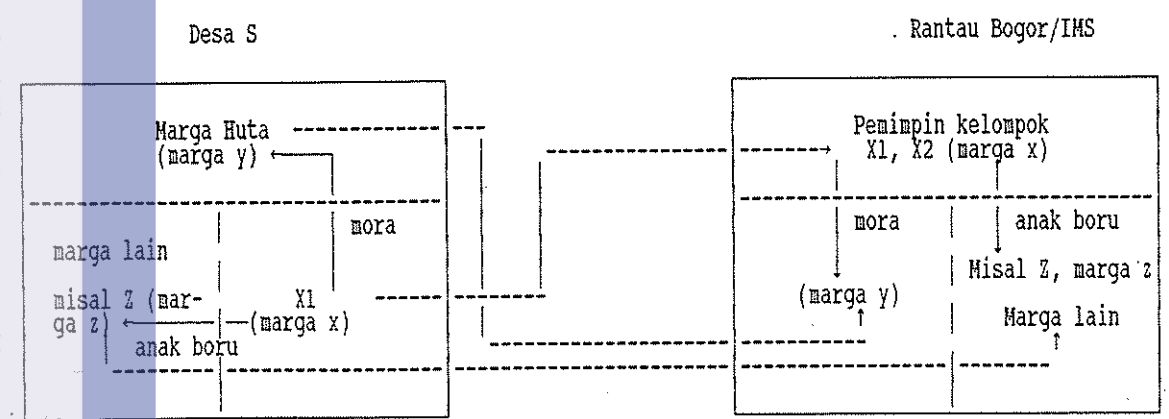
IPB University





Keterangan : ————— : terdeteksi
 - - - - - : tidak terdeteksi kedatangannya
 X, Y, Z : marga
 X, Y, Z : Migran

Gambar 3. Bagan Pemiakan Pedagang Kelontong Desa S di Kota Bogor Tahun 1979-1993.



Keterangan : — Status menurut kekerabatan dalihan natolu
 - - - Status dalam sistem sosial

Gambar 4. Transformasi Struktur Sosial Warga Desa S Menjadi Kelompok migran IMS di Kota Bogor.

Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Bagan 3 dan 4 menjelaskan bagaimana migrasi memungkinkan terbentuknya struktur sosial baru di rantau. Marga huta lebih bersifat teritori atau daerah kekuasaan lebih lunak ketimbang konsepsi *dalihan natolu*. Seorang migran yang berasal dari kalangan bukan marga huta dapat menjadi pemilik "huta" baru di rantau, berada di atas kalangan marga *huta* untuk melengkapi tujuan hidup 3H *hamoraon, hagabeon, hasangapon*. Di daerah asal orientasi nilai budaya itu lebih menekan orang-orang bukan marga huta. Makna lain dari uraian Bagan 3 dan 4 adalah proses okupasional. Pekerjaan pola pembiakan rantau berlangsung sangat cepat jika peluang untuk pembentukan okupasi tersedia. Migran *pioneer* senantiasa menjadi pemandu bagi pendatang baru untuk memadati suatu jenis pekerjaan.

Kasus 3

Peristiwa kawin silang (*amalgamasi*) hanya 5.0 persen dari keseluruhan responden. Hambatan kultural dalam pembentukan amalgamasi tidak hanya sekedar etnosentrisme murni, tetapi juga penilaian subjektif individu yang bersumber dari pengalaman selama menetap. Pilihan amalgamasi mengantarkan pelakunya kepada konsekuensi sosial dan akan terlihat jelas ketika interaksi sesama migran berlangsung. Sebuah kasus berikut diangkat untuk memperoleh gambaran konsekuensi sosial. Disamping itu, kasus sama seperti kasus 2, diketengahkan sebagai perbandingan atas uraian-uraian terdahulu:

HR, umur 28 tahun, pendidikan SMA, bekerja sebagai serviser foto studio di salah satu sudut pemukiman Kota Bogor. HR berasal dari desa AB, Kecamatan Padang Sidempuan Timur--- sisi barat dari daerah Padang Lawas---, sebuah desa pertanian yang gersang, berbukit-bukit dan miskin air. Sebagai anak pertama dari 5 bersaudara (2 laki-laki, 3 perempuan) dia merupakan tumpuan harapan keluarga setelah ayahnya meninggal tidak lama berselang setelah dia menamatkan sekolah SMA. Dengan ijazah yang dimilikinya HR berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan pegawai negeri, tetapi untuk bisa lolos perlu *uang masuk*. HR mengurungkan niatnya mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang sulit. HR kemudian bekerja sebagai karyawan Kilang Getah/ Pengolahan Karet di Padang Sidempuan, tetapi kemudian berhenti karena gajinya tidak memadai. Kegagalan mendapatkan pekerjaan yang layak membuka pikiran HR untuk mencoba-coba merantau. HR sering melihat orang-orang perantau pulang ke kampungnya, meski banyak yang *tampaknya* berhasil tetapi ada juga gagal. Mereka yang gagal menurut HR mudah diamati dari tingkah lakunya

sering pulang, gaya bicara *serba tahu* dan tidak mau diatur tetapi tidak mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Pengamatan ini membuat HR ragu-ragu untuk merantau. Akhirnya HR jadi juga merantau karena tidak punya pilihan untuk bertahan hidup di desa. Kecuali itu, HR juga bosan mendengar sindiran orang-orang tua di desa yang yang mengisyaratkan merantau itu lebih berarti daripada *luntang-lantung*, tidak punya pekerjaan. HR memulai migrasi tahun 1985 setelah berembug dengan Ibunya. Ibunya memberi saran agar HR menuju Jakarta (Depok, Jawa Barat) menemui *tulang* (saudara laki-laki ibu) yang bekerja sebagai pemilik foto studio. Mulanya HR masih berfikir untuk mencari pekerjaan lain sambil melanjutkan sekolah ke perguruan Tinggi---di desa sering terdengar berita bila perantau ada yang bekerja sambil kuliah dan itu sangat dibanggakan--- untuk memperoleh gelar Insinyur Pertanian, cita-citanya sewaktu duduk dibangku SMA. Setelah tiga bulan hidup di kota, HR merasa kecewa, cita-cita itu ternyata sulit diwujudkan, tidak seperti cerita orang-orang desa. Pilihan pekerjaan terakhir, tinggal dan berusaha dengan *tulang* tompangannya. Pengetahuan dan keterampilan HR di bidang foto memoto sangat minim dan tidak pernah pernah terbayangkan oleh untuk bergelut di bidang itu. Dengan setengah hati selama kurang lebih enam bulan HR belajar *magang* di studio *tulang*nya. Lama-lama HR menjadi terampil dan merasakan bahwa pekerjaan itu ternyata menarik, tetapi untuk berusaha sendiri tidak memungkinkan karena terbentur modal. Atas inisiatif *tulang*nya kemudian dicari lokasi baru bagi HR di Kota Bogor. Di tempat yang baru itu HR bertindak sebagai pekerja pengelola dengan modal sepenuhnya berasal dari *tulang*nya. Dua tahun lamanya HR bekerja dengan sistem setoran penuh perdua hari kepada *tulang*nya. Setelah fase itu berakhir, sistem hubungan berganti dengan kontrak dengan pembayaran bulanan selama 1 tahun. Setelah fase kontrak habis hubungan ekonomi berganti lagi dengan fase pencicilan modal selama setahun. Sejak tahun 1989 hingga sekarang telah mandiri dan lepas dari *tulang*nya.

Sejalan dengan berkembangnya usaha, HR memerlukan tambahan tenaga. Kerena adiknya laki-laki (A) yang baru lulus SMA belum mendapat pekerjaan di desa, HR meminta A untuk datang ke Bogor. Dengan sistem magang yang sama A sudah mandiri dan memiliki foto studio sendiri. Sedangkan untuk membantu usaha sekarang HR mempekerjakan (B), *berenya* (anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki ayahnya). Hubungan kekerabatan ini masih tergolong dekat pada orang Angkola Mandailing.

HR menikah dengan gadis Sunda, bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi studionya. *Wanita itu dimana-mana sama, tergantung bagaimana menempatkannya diantara keluarga kita*, tutur HR tentang alasan memilih amalgamasi. Istrinya bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan jasa di bilangan Sawangan, Jawa Barat. Prosesi pernikahan berlangsung menggunakan adat perka-winan Sunda. Pada pelaksanaan pernikahan ibunya disuruh datang dari kampung bersama seorang adiknya perempuan untuk mendampingi kerabat-kerabat dekat sedaerah (migran) yang berada di sekitar Bogor. Kebiasaan adat Angkola-Mandaling, undangan pernikahan dilakukan dengan cara *mandohoni*, bentuk penyampaian undangan secara langsung (organik) atau menyuruh utusan, dalam perkawinan ini undangan yang melibatkan kerabat jauh sedearah (migran) diberikan dalam bentuk surat undangan juga. Belakangan diketahui ternyata ada kerabat yang tidak datang karena cara mengundangnya dilakukan seperti itu.

@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Hal ini terekam ketika beberapa orang kerabat mengunjungi HR untuk membicarakan pembentukan kelompok/paguyuban dan penulis sedang melakukan wawancara bebas dengan HR.

Kerabat itu mengatakan dengan gaya *pur-pur* dan terbuka khas Padang Lawas tentang ketidakhadirannya, "*Anggo au puang inda bisa hutarimo i, sampe au tu bagas adong huida surat undangan di ginjang meja, tai inda huboto sanga ise pasampena. Haranna huboto undangan i ro na sian hamu ma inda suman hurasa. On pe anggria mangido maaf mada muda inda ro au dompaki*".

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan : "Saya tidak bisa menerima cara mengundang seperti itu, ketika saya sampai di rumah, saya menemukan undangan di atas meja tapi saya tidak tahu siapa yang menyampaikannya. Setelah dia baca, karena saya tahu dari kamulah maka saya anggap tidak pantas. Ini pun saya minta maaf anggria (panggilan akrab pada orang yang berstatus sejajar) karena saya tidak hadir waktu itu".

Berbicara dengan istri, HR menggunakan Bahasa Indonesia, meskipun dia fasih menggunakan Bahasa Sunda teramati ketika HR melayani konsumen. Sedangkan bahasa yang digunakan berbicara dengan *berenya* adalah Bahasa Batak, sama seperti bahasa berbicara dengan kerabat sedaerah. Meskipun rumah mertua berdekatan dengan studionya, HR memilih untuk mengotrak rumah tidak jauh dari rumah mertua, 10 hari setelah hari pernikahan. *kurang pantas berlama-lama di rumah mertua*, alasan HR.

Tampaknya selain faktor ekonomi yang sudah agak mapan, budaya Batak tetap mengilhami keburu-buruan HR meninggalkan rumah mertuanya. Bertempat tinggal menetap di rumah mertua adalah tercela bagi orang Batak di sebut dengan *samondo*¹, kecuali untuk alasan-alasan khusus. Bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri (laki-laki) lebih pantas, tetapi setiap orang berupaya untuk secepatnya *manjae* (membentuk keluarga inti sendiri, pindah dari rumah orang tua).

"perbedaan kita dengan orang-orang sini memang banyak, tapi kalau mengurus seorang kan lebih gampang. Apa yang baik dari mereka ya kita ambil saja, dan cara hidup kita pun tentunya tidak semua baik. Lama-lama memang perbedaan cara-cara hidup itu agak sulit disesuaikan, apalagi *tulang* (mertua) saya tempat tinggalnya dekat. Saya pikir *Marboru sileban* (menikah dengan orang tidak sesuku), akan ada akibat yang akan diterima. Saya sudah memikirkan itu dulu". *Keinginan HR untuk kembali ke daerah*. "kalau diikutkan kata hati sebenarnya saya ingin tinggal di daerah, di ibukota kabupatenlah Cuma, di sini usaha

1. Kemungkinan berkaitan dengan praktek *samondo* yang berlaku pada Orang Minangkabau yang *matrilineal*.

sudah agak enak. Nantilah kalau uang sudah banyak, di sana juga bisa berusaha, tapi mungkin tidak sebaik di sini. Dan yang terberat sebenarnya kesediaan istri saya dan keluarganya. Orang sini kan agak sulit diajak kemana-mana"

Kasus 4.

Sebuah kasus lagi akan diutarakan untuk menambah bahan perbandingan dengan kasus-kasus dan uraian terdahulu.

KS, SMA, 33 tahun (kini), menikah, 3 orang anak, istri Batak. Ketika masih SMP KS sudah terbiasa bekerja sambilan sebagai kondektur *tulangny* (saudara laki-laki dari ibunya) yang memiliki sebuah minibus jarak pendek. Menginjak SMA, KS telah terampil menyetir; jika liburan malah menyetir sendiri untuk menambah uang jajan. "*Manarik* (menyetir) memang menarik", hingga kegiatan sekolah KS asal-asalan. KS tamat dari salah satu SMA swasta di ibukota kabupaten tahun 1980. Tahun 1981-1983 KS ikut sebagai sopir ekspedisi Sumatera bagian utara-Sumatera bagian tengah, awalnya hanya sopir serap. Tahun 1984 berpindah menjadi sopir serap bus angkutan penumpang Sumatera-Jawa yang saat itu masih sulit. Pada tahun 1985 KS menikah dengan seorang wanita sedesa yang ketika itu telah berdiam di Jakarta dan mereka tinggal di Jakarta. Setelah beberapa bulan menikah, KS memutuskan untuk nyetir di Jakarta tidak ikut lagi jalur panjang Sumatera-Jawa. Berkat saran seorang teman pada tahun yang sama KS memilih Bogor sebagai tempat tinggal, KS juga mendapat kesempatan menyetir Bus Jakarta-Bogor. Tiga tahun terakhir KS berpindah ke Angkutan Dalam Kota.

Masa-masa awal tinggal di Bogor keluarga KS masih kesulitan ekonomi. Akhirnya istri KS mengusulkan untuk membuka usaha berdagang kelontong yang dikelolanya sendiri. Dengan menjual perhiasan ditambah sedikit tabungan penghasilan KS, tidak lama keadaan ekonomi KS membaik. "Kalau mengandalkan sopir ini bagaimana saya menyekolahkan anak?". Sekarang putra pertama KS telah memasuki kelas I SD. "Ibunya anak-anak juga lebih senang punya kesibukan, sekarang malah penghasilan dia lebih banyak dari saya".

Niat KS untuk kembali ke daerah asal. "Dulu waktu saya masih bawa bus berjalan di Sumatera-Jawa pun saya sudah jarang ke kampung, rasanya tidak pas lagi hidup dikampung. Sekarang anak-anak sudah menanjak besar, ini pun teman kita sudah cukup"

Pengalaman KS sebelum bekerja tetap. "Hampir semua kota di Sumatera saya jelajahi, cuma tidak lama-lama. Jalan raya itu panas, uangnya juga panas, mudah didapat tapi tak jelas ke mana perginya. Ketika anak-anak mulai besar saya berfikir bekerja mentap saja di suatu kota. ya... Kota Bogor inilah yang pas.

Sekarang KS telah memiliki sebuah minibus Angkutan Kota (line 03) yang disetirnya sendiri. Tetapi minibus miliknya masih status kredit. Sebagian besar uang muka pembelian diperoleh dari hasil dagang istrinya. Selain ketiga anaknya, ada dua orang lagi yang tinggal di rumah kontrakan KS. "kalau ada tanah yang sesuai, saya berkeinginan membeli. sebenarnya lebih enak beli rumah yang jadi, yang memberatkan bayaran musti kontan, tak sanggup saya".

B. Tindakan

1. Arus Uang.

Ketimpangan arus uang terjadi dalam peristiwa migrasi orang Batak. Jumlah uang yang ke luar dari Tapanuli lebih besar dari pada uang yang dikirim oleh perantau ke sana. Inilah yang disinyalir sebagai salah satu penyebab kemiskinan Tapanuli.

Dalam penelitian ini ditemukan ada dua saluran utama aliran keluar-masuk dari dan oleh migran ke daerah asalnya, yaitu arus uang melalui jasa pos dan kiriman, dan melalui keterlibatan migran migran pulang ke kampung halaman. Kedua saluran ini dalam analisisnya dipisahkan untuk memperoleh gambaran yang lebih pasti tentang "kebiasaan" mereka melakukan pengiriman uang atau menarik uang dari daerah.

Belajar dari sejarah migrasi individu, dapat disebutkan tidak semua dari mereka langsung produktif ketika pertama kali melakukan migrasi. Kelompok migran yang langsung produktif biasanya terdiri dari mereka yang berada di luar selang usia sekolah (sampai Perguruan Tinggi) atau migran yang putus sekolah yang langsung bekerja. Sedangkan migran yang tergolong konsumtif adalah mereka yang bertujuan utama melanjutkan pendidikan.

Sebagian besar dari migran ketika melakukan migrasi pertama kali mendapatkan biaya merantau dari desa, wessel bulanan bagi migran yang sekolah atau permodalan bagi mereka yang berusaha sendiri seperti tukang foto, dan pedagang. Tarikan pertama modal usaha dari daerah asal umumnya tergolong besar, adakalanya diperoleh dengan cara menjual sawah, tegalan atau benda-benda berharga di desa, dan bagi mereka yang telah menikah memanfaatkan perhiasan istrinya. Tarikan dana lanjutan sering pula terjadi untuk menambah modal, memperluas usaha atau membeli rumah (termasuk modal usaha bagi pedagang dan tukang foto). Wessel bulanan bagi mereka yang melanjutkan sekolah mengalir ke rantau *tidak menghayutkan*, tetapi berlangsung selama studi, sebelum mendapatkan pekerjaan. Jika tarikan dana ini ditotal mungkin jumlah lebih besar dari tarikan migran produktif. Meskipun demikian tidak jarang migran yang mendapat subsidi atau malah mengandalkan biaya sekolah dari saudaranya

di kota, sehingga tidak banyak menarik uang dari desa atau tidak ada sama sekali.

Semua migran yang tercakup dalam penelitian sudah berumahtangga dan sudah bekerja. Oleh karenanya sudah dapat diduga, mereka semua termasuk dalam migran produktif dengan tanggungan utama berada di Kota Bogor. Keluarga yang ditinggalkan di daerah asal terdiri dari anggota keluarga anggota keluarga.

Dalam waktu enam bulan sebagian besar migran (70 persen) terlibat dalam pengiriman uang ke kampung halaman minimal sekali, dan hanya sebagian kecil (13 persen) yang menarik uang dari desa untuk keperluannya di kota.

Tabel 65. Tindakan Migran Menerima-Mengirim Uang dari dan ke Desa (Setting Enam Bulan).

	Menarik/Menerima				Mengirim			
	Orang	Frek	Total Uang (Rupiah)	Jumlah Rata-rata diterima	Orang	Frek	Total uang (Rupiah)	Jumlah rata-rata dikirim
1. Terlibat	8	8	4.800.000	600.000	42	81	11.155.000	137.000
2. Tidak terlibat	52	-	-	-	18	-	-	-
	- Rata-rata uang ditarik dari kampung (Rp/bulan/60 migran) sebesar Rp. 8.000. - Rata-rata uang ditarik dari kampung (Rp/bulan/8 migran) sebesar Rp. 100.000				- Rata-rata Uang dikirim ke kampung (Rp/bulan/60 migran) sebesar Rp. 31.000. - Rata-rata Uang dikirim ke kampung (Rp/bulan/42 migran) sebesar Rp. 44.000.			

Sumber : Data Primer, 1993.

Tabel 65 di atas menunjukkan jumlah uang dikirim maupun jumlah migran pengirim lebih banyak dari jumlah uang ditarik dan jumlah migran penarik. Selisih uang dikirim dengan uang diterima bersifat negatif untuk rantau sebesar Rp. 23.000/ migran kepala rumahtangga/bulan.

Dari delapan orang migran yang menarik uang dari desa separuh dari mereka (4 orang) bertujuan untuk menambah modal dan menyerap 71 persen total uang tertarik. Seorang memperuntukkan dana itu menambah biaya pembangunan rumah di Kota menyerap 16 persen dana tertarik. Selebihnya, seorang mempergunakan uang tarikannya untuk biaya berobat dan kemalangan keluarga 8 persen dari total dana, dan dua orang untuk

kepentingan adiknya yang sekolah di Bogor 5 persen dari total dana.

Migran yang terlibat mengirim uang ke desa umumnya tidak bersifat rutin, artinya hanya sedikit yang memiliki waktu dalam pola waktu yang tetap sekali sebulan atau sekali dua bulan.

Tabel 66. Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Mengirim Uang Ke Desa Dalam Waktu 6 Bulan.

Frekuensi Pengiriman	Jumlah Migran	Persentase
1. Satu kali	21	35.0
2. Dua kali	12	20.0
3. Tiga kali	5	10.0
4. Empat kali	2	3.3
5. Lima kali	0	0.0
6. Enam kali	2	3.3
Tidak Mengirim	18	30.0
Jumlah	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Dengan perincian seperti tertuang dalam Tabel 66 tampaknya mengirim uang ke kampung halaman bukan kebiasaan pada mereka, walaupun secara keseluruhan uang yang dikirim lebih besar dari uang ditarik. Sebagian besar migran hanya satu sampai dua kali mengirim uang ke kampung halaman dalam jumlah yang bervariasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi ada tidak pengiriman uang ke kampung halaman akan ditinjau dari aspek-aspek karakteristik individu migran kepala rumah-tangga antara lain umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, daerah asal, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan ikatan keluarga berupa ada tidaknya orang tua migran di daerah asal.

Hubungan umur migran dengan ada tidaknya migran mengirim uang ke kampung halaman dapat dilihat pada Tabel 67. berikut.

Tabel.67 Hubungan Karakteristik Individu Dengan Ada-Tidaknya Pengiriman Uang Ke Kampung Halaman (Settling 6 bulan)

Pengiriman Uang	Umur			Jlh Tanggungan			Pkt Pendidikan		Pkt Pendapatan		Daerah Asal		Jenis Pekerjaan		Keberadaan Orang Tua			
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	A	M	D	ND	Ada	Tdk	
1. Ya	15	18	9	18	18	6	11	26	5	5	32	9	33	33	9	25	17	
	65	78	64	67	86	55	79	67	71	63	70	82	68	70	66	63	85	
2. Tidak	8	5	5	9	3	6	3	13	2	3	14	1	4	14	17	15	3	
	35	22	36	33	14	45	21	33	29	38	30	18	32	30	34	38	15	
Jumlah	23	23	14	27	21	12	14	39	7	8	46	6	13	47	50	10	40	20

Sumber : Data Primer, 1993

Keterangan: 1. Muda (Rendah); 2. Menengah (Sedang); 3. Tinggi (Besar)
A. Angkola; M. Mandailing; D. Dagang; ND. Non Dagang.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Tabel diatas memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang menyolok dalam pengiriman uang menurut perbedaan tingkat umur migran. Walaupun kelompok migran berumur menengah sedikit diatas kelompok umur lain, tetapi perbandingan jumlah responden, berbeda sekitar 10 persen tidak cukup mantap untuk mengatakan adanya perbedaan yang benar-benar jelas. Nilai $X^2_{hitung,db=2} = 1.22$ jauh dibawah kemungkinan menolak H_0 pada $\alpha = 0.05$, atau $\alpha = 0.2$. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa faktor umur tidak membedakan ada tidaknya pengiriman uang oleh ke kampung halaman dalam 6 bulan.

Jumlah tanggungan di kota adalah faktor yang mempengaruhi seberapa besar surplus ekonomi rumah tangga migran dalam jumlah pendapatan tertentu. Jika dipandang bahwa semakin sedikit surplus keluarga, maka semakin sulit untuk memberikan bantuan ke desa. Hubungan jumlah tanggungan dengan ada tidaknya migran ke desa dapat diamati pada Tabel 67.

Jumlah tanggungan yang besar tampaknya mengurangi kemungkinan untuk melakukan pengiriman uang ke kampung/desa. Hal ini dimungkinkan peruntukkan darimana diberikan kepada sejumlah tanggungan, dimana sebagian bukan anak-anaknya, tetapi saudara-saudara dari kampung. Nilai $X^2_{Hitung,db=2} = 4.96$ berada dalam selang kepercayaan 80 persen atau dapat disebut jumlah tanggungan cenderung berpengaruh pada pengiriman uang ke kampung halaman.

Diduga daerah asal migran akan membedakan pola pengiriman uang ke kampung halaman. Hubungan daerah asal dengan pengiriman uang dapat dilihat pada Tabel 67. Melihat pada Tabel diatas, tampak bahwa peran migran orang Angkola dengan orang Mandailing untuk pengiriman uang ke kampung hampir sama persis yaitu 69.2 persen berbanding 70.2 persen. Dengan kondisi seperti itu, tanpa pengujian perbedaan proporsi sudah dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengiriman uang antara orang Mandailing dengan orang Angkola.

Perbedaan tingkat pendidikan diantara migran kemungkinan mempengaruhi sifat pemurah kepada keluarga mereka di kampung halaman. Hubungan pendidikan dan keinginan pulang ke kampung halaman dapat diperhatikan pada Tabel 67♦

Tabel memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang menyolok dalam pola pengiriman uang ke kampung halaman. Mereka yang berpendidikan rendah terlihat sedikit lebih besar proporsi keterlibatan. Pengiriman sedikit menurun pada kelompok berpendidikan sedang dan menanjak sedikit pada migran berpendidikan tinggi. Uji $X^2_{db=1}$ setelah menggabungkan kelompok pendidikan tinggi ke sedang, diperoleh nilai $X^2_{Hitung, db=1}$ sebesar 0.22. Artinya sangat jauh kemungkinan untuk menolak H_0 , tidak ada perbedaan proporsi tingkat pendidikan dengan keterlibatan pengiriman uang ke kampung halaman dalam jangka waktu 6 bulan lalu.

Seperti uraian sebelumnya, tingkat pendapatan menempati posisi strategis dalam membuka kemungkinan peluang untuk mengirim sebagian pendapatan ke desa. Dalam hal ini nilai Rupiah bermakna untuk menjelaskan besaran uang yang dikirim. Meskipun itu penting, yang paling mendasar untuk diketahui adalah *kebiasaan* mengirim bukan semata-mata pada jumlah uang terkirim. Hubungan tingkat pendapatan dengan pengiriman uang ke kampung halaman tercantum dalam Tabel 67.

Dari Tabel dapat diamati adanya kecenderungan keterlibatan migran untuk mengirim uang ke kampung halaman. Hanya saja ukurannya kurang memenuhi syarat pengujian statistik X^2 , sehingga kesimpulan maksimal yang dapat ditarik mengacu pada hasil pengamatan seperti dalam Tabel diatas.

Hubungan jenis pekerjaan dengan keterlibatan individu dalam pengiriman uang dapat diperhatikan dalam Tabel. Dari Tabel terlihat proporsi migran agak berbeda dalam berperan mengirim uang ke kampung yaitu sebesar 90.0 persen berbanding 66.0 persen. Namun demikian pendugaan itu akan lebih menyakinkan seandainya jumlah responden diperoleh berimbang. Nilai $X^2_{db=1}$ adalah yang diperoleh pada pengujian perbedaan proporsi yakni sebesar 1.22. Nilai sebesar itu berada di luar selang signifik-

asi yang digunakan untuk menolak H_0 , atau tidak ada perbedaan proporsi pengiriman uang ke kampung halaman menurut jenis pekerjaan dari para migran.

Tujuan yang paling hakiki dari pengiriman uang adalah membantu keluarga orientasi, membalas budi orang tua, sebelum mensyaratkan di luar lembaga itu. Oleh sebab itu keberadaan orang tua yang bertempat tinggal di daerah asal digunakan sebagai variabel penduga adanya pengiriman uang dari migran. Artinya migran yang memiliki orang tua (hidup salah satu atau keduanya) di desa maka intensitas pengiriman uang ke desa akan lebih besar ketimbang migran yang tidak orang tua lagi. Hubungan keberadaan orang tua dengan ada tidaknya pengiriman uang ke kampung halaman dapat dilihat pada Tabel 67.

Memperhatikan Tabel diatas, terlihat mereka yang melakukan pengiriman uang ke desa lebih besar pada migran yang tidak memiliki orang tua (meninggal) atau menempati ruang di luar Tapanuli Selatan lebih banyak (85 persen). Sedangkan migran yang masih memiliki orang tua bertempat tinggal di Tapanuli Selatan justru lebih kecil yang melakukan pengiriman uang. Suatu gambaran yang jauh di luar dugaan sebelumnya bahwa keberadaan orang tua di daerah asal merupakan motivasi utama arus balik. Nilai $X^2_{db=1}$ sebesar 2.23, artinya tidak terdapat perbedaan pengiriman uang ke kampung halaman menurut ada tidaknya orangtua. Tetapi nilai sebesar itu masih masuk dalam batas kecenderungan beda proporsi ($X^2_{tabel,db=1,\alpha=0.20} = 1.64$).

Bila dikaji lebih jauh hubungan diatas menjadi bersifat logis ketika dihadapkan pada kenyataan : (1) Arus remittens migrasi Orang Batak sangat kecil dibanding suku bangsa lain misalnya Minangkabau, Jawa atau Sunda. (2) Hubungan yang independen antara urusan domestik orang tua dengan anak terpola dalam kebiasaan *Manjae*. Jadi, membantu orang tua saat dia masih tegar dan mampu mencari sendiri bukan kewajiban anak, tetapi kewajiban orang tua lah mengangkat status sosial ekonomi anak yang berfungsi status bagi dia, *anakanki do hamoraon diahu*, anakku adalah kekayaanku.

Saat orang tua sudah memasuki usia lanjut barulah kewajiban itu disadari pen-

ting oleh anak (migran) secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kemudian pelimpahan tanggung jawab keluarga (suksesi) akan terjadi bila orang tua meninggal, bagaimana membiayai anggota keluarga yang berada dalam usia konsumtif dan bagaimana mengurus semua asset peninggalan orang tua seperti tanah, rumah, maupun benda-benda lain milik keluarga. Tanah adalah lambang status, dan tanah peninggalan orang tua harus tetap dijaga sebagai warisan yang paling berharga dipandang dari segi nilai *ritus* walaupun secara ekonomi nilai kurang. Oleh sebab itu setiap anak *berkewajiban* menjaga kehormatan warisan tersebut, termasuk anak yang tinggal di rantau. Orang Toba atau Batak lainnya, ritus itu diterjemahkan dalam bentuk pembangunan tugu-tugu, sedang pada Batak Angkola Mandailing sejak masuknya Islam mengalami reorientasi kedalam bentuk-bentuk lain seperti perbaikan rumah dan pekarangan orang tua, meskipun perawatan kuburan tetap berlangsung.

Sebelumnya telah diulas bahwa lebih dari 40 persen saudara kandung migran untuk semua golongan umur masih berada di Tapanuli Selatan. Jadi kemungkinan uang yang dikirim oleh migran yang orangtuanya telah tiada bertujuan untuk menutupi kebutuhan saudara-saudaranya yang sekolah, atau sekedar sumbangan terhadap peninggalan orang tuanya. Orang tua, khususnya ayah menjadi figur yang meyakinkan pada masyarakat Batak paternalistik dan aristokratis. Prinsip paternalisme yang kental terlihat pada rentang masa sosialisasi anak dalam keluarga. Orang tua mendidik anak sesuai dengan keinginannya, sedikit memberikan penghargaan kepada anak. Ekspresi kebanggaannya terhadap anak ditunjukkan kepada orang lain dalam pergaulannya di masyarakat, karena pada dasarnya anak-anak bagi dirinya merupakan status. Keadaan ini sering mengakibatkan renggangnya jarak ayah dengan anak lelaki, seperti dalam komunikasi verbal.

Demikian juga ketika anak merantau, *suara rantau* lebih berarti bagi orang tua, *memekarkan daun telinga* daripada status ekonomi anak yang mungkin teralirkan kepadanya. Oleh sebab itu seorang jendral atau pejabat tinggi negara lebih harum

namanya ketimbang seorang konglomerat yang punya kekayaan materi.

Status oriented merupakan faktor pengaruh lain dari kecilnya pengiriman uang melalui pos atau titipan ke kampung halaman. Rata-rata jumlah uang yang dikirim melalui pos atau titipan jauh lebih kecil daripada rata-rata uang yang dihabiskan pada kesempatan berkunjung atau pulang ke kampung. Keduanya belum proporsional karena biaya berkunjung termasuk biaya-biaya antara seperti ongkos perjalanan, biaya hidup di desa, dan standar hidup individu, sehingga tidak dapat diperoleh angka yang pasti jumlah uang yang ditinggalkan di desa. Tetapi dengan perkiraan kasar diduga pulang kampung selain memberikan bantuan kepada keluarga, juga sekaligus memperlihatkan jati diri perantau di mata kerabat. Keabsahan pulang kampung justru pada individu yang terboboti uang rantau--- efek demonstrasi---ingin disemati status bahwa dia telah berhasil di rantau. Bila dia seorang yang berpangkat atau berkedudukan tinggi dan terdengar para kerabat, pada dirinya terdapat pula konsekuensi ekonomi yang besar. Sedangkan seorang pedagang kelontong atau tukang foto yang status pekerjaannya kurang tinggi, juga ingin diakui sebagai perantau berhasil, yang hanya ditolelir dengan *membayar semeja* di kedai kopi, menyajikan rokok *mahal* di *Sopo Godang* tempat orang-orang desa berkumpul.

2. Berkunjung ke Kampung Halaman

Sekali terjadi perpindahan dari kampung halaman sedikit sekali kemungkinan bagi migran untuk kembali ke sana. Kedatangan migran ke desa lebih banyak bersifat kunjungan silaturahmi, kemalangan (*siluluton*), pernikahan atau selamatan lain (*siriaon*) yang tergolong jarang. Dari 60 orang migran hanya sepertiga (33.3 persen) yang pulang ke kampung halaman dalam jangka waktu 6 bulan yang lalu, dan dari 21 orang hanya satu orang yang khusus mengambil modal ke kampung halaman. Selebihnya bertujuan untuk silaturahmi (42.9 persen), pernikahan dan selamatan (28.6 persen), kemalangan 4orang (19.0 persen), dan 4.8 persen lain-lain. Nilai rupiah yang disebutkan di atas merupakan keseluruhan biaya yang dibawa dari kota, termasuk biaya perjalanan pulang dan pergi. Jika data ini dapat diterima sebagai kecenderungan untuk

semua migran maka dapat diperkirakan rata-rata kunjungan migran ke kampung halaman berlangsung sekali dalam satu setengah tahun.

Tabel 68. Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Pulang Atau Berkunjung Ke Kampung Halaman Dan Jumlah Uang Yang Dikeluarkan (6 Bulan) Dan Tujuan Pulang.

Frekuensi Pengiriman	Jumlah Migran	Persentase
Keterlibatan Berkunjung/Pulang		
1. Pulang		
- Satu kali	19	33.3
- Dua kali	1	1.7
2. Tidak Pulang	39	65.0
Biaya		
- Biaya Dikeluarkan	Rp 25.680.000	100.0
- Biaya Diperoleh/Ditarik Dari Desa	Rp 750.000	100.0
	Rp 24.930.000	
Tujuan		
- Silaturahmi	9	42.8
- Pernikahan, Selamatan (Siriaon)	6	28.6
- Musibah, Kemalangan (Siluluton)	4	19.0
- Mengambil Modal	1	4.8
- Lain-lain	1	4.8

Sumber : Data Primer, 1993.

Aliran dana ini dipisahkan dari bagian sebelumnya, (titipan atau wesel) karena penggunaan alokasi dana sendiri termasuk biaya akomodasi migran, dan tidak diperoleh angka yang pasti tentang peruntukannya. Disamping itu uang yang dimaksud disini bukan merupakan titik pokok perhatian, tetapi lebih meninjau dari segi intensitas migran berkunjung dan tujuannya. Meskipun demikian, arus uang ini penting dibandingkan dengan aliran dana melalui pos maupun titipan. Tabel di atas memperlihatkan jumlah uang yang dibawa pulang ke kampung relatif lebih besar ketimbang jumlah uang

melalui wesel atau titipan. Sebagian dari dana itu kemungkinan teralokasikan di perjalan (biaya transportasi) baik darat maupun udara, sehingga total uang yang tersisa/sampai ke desa berada di bawah jumlah diatas.

Waktu migran berkunjung ke desa umumnya bersifat sementara sampai urusan atau keperluan terselesaikan, dan migran tidak berusaha untuk meluangkan waktu berlama-lama di desa. Seorang responden mengatakan :

Sattokkin maiya dabo natagi di huta, muda lelung-lelung bahatma masalah ni halak natarbege, tilako niuda niba, amang buru pokokna bahatma disi, kadang-kadang iba pe dihobari halak apalagi inda adong usaho niba sanga hepeng niba. Tu saba losok roha, inda cocok be irasa dabo karejoi.

Cuma sebentar yang enak di desa, kalau lama-lama banyak saja masalah orang yang terdengar, aib *uda*, *amang boru*, pokoknya banyaklah di sana, kadang-kadang kita pun jadi bahan omongan orang apalagi kita tidak punya usaha atau tidak punya uang. Ke sawah rasanya malas, tidak cocok lagi pekerjaan itu¹.

3. Menampung Keluarga Di Kota

Menampung kerabat adalah peristiwa yang lazim dilakukan oleh migran. Sebaliknya arus orang dari rantau ke kampung halaman sangat sedikit terjadi terutama pada pendatang yang bertujuan merantau. Adapun orang yang kembali ke kampung umumnya terjadi pada pendatang yang bersifat kunjungan ke kaota. Jumlah migran yang terlibat menampung pendatang baru dari desa sebanyak 35 orang dan jumlah orang yang ditampung dan berniat menetap di kota sebanyak 41 orang. Dengan kata lain dua per tiga dari migran terlibat menampung seorang pendatang baru dari desa dalam jangka waktu enam bulan. Di luar yang tidak berniat menetap tidak diperhitungkan dalam survei, sehingga pendatang yang berniat menetap tersebut kurang lebih sama dengan arus netto manusia yang mesuki kota Bogor. Keadaan ini cukup menyakinkan, tampak dari perkembangan migran yang melonjak pada setting III.

1. Wawancara bebas dengan seorang responden Tanggal 28 Nopember, 1993.

Tabel 69 • Jumlah Pendatang Baru yang Ditampung atau Diterima Oleh Migran Menurut Status Kedatangannya ke Kota Bogor (Enam Bulan)

Status Kedatangan yang Ditampung	Frekuensi	Persentase
1. Datang sendiri ke kota	23	56.1
2. Diminta atau disuruh migran	18	43.9
Jumlah	41	100

Sumber : Data Primer, 1993.

Dari 41 orang migran yang menampung pendatang baru 78.2 persen berasal dari kalangan saudara kandung, selebihnya berasal dari kerabat anggota keluarga orientasi, seperti paman, ipar, lae, dan anak paman (kahanggi).

Apa yang terlihat pada Tabel diatas adalah kenyataan yang memperjelas perkembangan migran Batak Angkola-Mandailing di kota Bogor. Menampung, baik yang disuruh maupun yang datang sendiri merupakan tanggungjawab moral bagi setiap migran untuk membuka peluang kerja bagi sejumlah pendatang baru itu. Kedatangan dalam paruh tahun cukup memungkinkan pembengkakan mereka di kota, sehingga terjadi peluberan migran ke tempat-tempat dimana tersedia peluang berusaha. Kehadiran pendatang baru tidak tampak menyolok karena tempat tinggal mereka tersebar.

Wajah terminal-terminal seperti Terminal Merdeka, Baranangsiang Bogor hanyalah sebagian dari sub-sistem perantauan Batak Angkola-Mandailing di Kota Bogor. Volume migran yang jauh lebih besar tersembunyi di *Warung si Abang* di sudut-sudut kota. Ini tidak seperti yang ditemukan Wariso (1987) tentang *enclave* atau *pondok boro* sirkuler atau komuter yang menempati kota ini.

4. Arus Informasi

Saluran utama komunikasi informasi rantau dan desa asal adalah jasa pos baik pengiriman uang atau surat. Hal ini sangat meyakinkan karena jarak Kota Bogor

dengan Tapanuli Selatan terpaut 2-3 hari perjalanan darat. Selain komunikasi melalui surat, migran juga sering melakukan pengiriman informasi melalui salah seorang kerabat atau kenalan yang pulang sementara ke desa untuk kemudian memperoleh informasi balik dari desa setelah orang tadi kembali ke kota.

Tabel 70.. Distribusi Frekuensi Migran Angkola-Mandailing Mengirim Dan Menerima Surat Selama Enam Bulan.

Frekuensi Pengiriman	Mengirim		Menerima	
	Σ	%	Σ	%
1. Satu kali	34	56.7	25	41.7
2. Dua kali	6	10.0	7	11.7
3. Tiga kali	4	6.7	3	5.0
4. Empat kali	1	1.6	0	0.0
6. Tidak Pernah	15	25.0	25	41.6
Jumlah	60	100.1	60	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Biasanya pengiriman informasi seperti ini terbatas pada migran sedesa atau berdekatan desa, jika tidak berkerabat dekat. Pengiriman informasi melalui perantara tampaknya tidak ada keraguan pada merek sehubungan dengan sampai tidaknya suatu pesan ke tujuan. Terdapat semacam etika resiprositas, seseorang akan mengharapkan bantuan yang sama dari orang lain. Disamping itu, perasaan saling percaya mereka junjung tinggi karena adanya hubungan kekerabatan.

Kegiatan kelompok merupakan media pertukaran dan penitipan informasi sesama migran; seseorang yang berniat pulang pulang ke desa adakalanya sengaja memberitahukan atas rencananya pulang untuk menjaring kemungkinan adanya anggota yang ingin menitip pesan yang bersifat khusus, oleh-oleh, atau uang kepada keluarga di desa. Seseorang yang pulang ke kampung tetapi lupa atau tidak sempat menaymapaikan pesan dari rantau akan merasa bersalah dan orang yang berkepentingan biasanya juga mengemukakan kekesalannya.

Komunikasi bertahap dan bersifat organik sesungguhnya menampakkan

keinginan yang dari migran untuk memperoleh informasi desa sebanyak-banyaknya.

Orang yang pulang ibarat seorang perwakilan yang menyuarakan bagaimana kondisi desa mereka, dan sebaliknya menyampaikan informasi kota kepada orang-orang

desa. Secara informal dalam kegiatan, seseorang yang pulang ke kampung banyak mendapat pertanyaan mulai dari masalah musim hujan-musim sawah, pergantian kepala desa, pembangunan jalan desa, kemalangan, dan informasi-informasi lain tentang keadaan desa atau luar desa.

Pola komunikasi organik memberikan efek-efek negatif di desa. Seorang migran yang membawa pesan dari kota, terlibat dari ulasan panjang lebar tentang kehidupan yang ditempuh di kota. Ada semacam kode etik solidaritas perantau diantara migran untuk tidak membocorkan rahasia *kegagalan* perantaun seseorang di kota kepada kerabat di desa. Membocorkan rahasia seseorang di desa sama artinya dengan membuka aib sendiri karena bagi orang desa yang berkerabat itu. Mereka memandang orang-orang sedesa di rantau sama seperti kehidupan desa saling bertanggung jawab satu dengan yang lain dan seorang migran tidak ingin dianggap keluar dari etika itu. Dengan demikian informasi kegagalan perantauan seseorang lebih tersembunyi ketimbang keberhasilan seseorang di pihak lain.

Pulang ke desa dengan sendirinya tidak hanya memperkenalkan diri tetapi juga menularkan informasi tentang orang lain. Pada gilirannya, keberhasilan relatif lebih tersuarakan ke telinga masyarakat desa. Kalangan orang tua di luar selang umur optimal migrasi, cukup dengan merasakan daun telinganya *mengembang*, bangga atas prestasi anak, *bere, tulang, angginya* yang suatu saat mungkin dapat dikunjungi. Tetapi bagi lapisan masyarakat yang berpotensi melakukan migrasi akan terpancing untuk mengikuti jejak pendahulunya. Data umur migrasi terdahulu memperlihatkan partisipasi migran berumur tua sudah pada tahun 1980-an, suatu indikasi suara rantau telah memancing mereka disamping faktor seleksi lainnya. Fakta yang cukup meyakinkan terlihat pula dari alasan melakukan migrasi yang berlangsung konstan sejak lama.

Kepercayaan akan mendapat hidup yang lebih baik di rantau masuk dalam kategori kuat mempengaruhi pengambilan keputusan migrasi.

Orang-orang terdahulu merupakan tempat menaruh sejumlah harapan akan peningkatan status ekonomi yang kemudian diikuti oleh peningkatan status sosial. Pendatang baru menganggap merantau tidak akan melarat dalam kehidupan kota selama tersedia kerabat apalagi saudara. Hal ini terjadi karena tidak transparannya keadaan empiris kota oleh komunikasi oraganik dan mekanik ke desa. Migran potensial lebih melihat apa yang sesungguhnya teramati dari tingkah laku perantau serta cerita-cerita keberhasilan kota daripada *kemelaratan* di emperan terminal yang kadang-kadang mengantarakan mereka jauh ke luar batas pekerjaan sebagai awak bis. Nyayian di terminal yang melankolis mengisyaratkan kejamnya perantauan, mengadu dan meratap kepada sang ibu yang jauh di *huta* akan kegalauan kota, tidak terang sampai ke desa karena penampilan mereka akan berubah menjadi profil yang meyakinkan *serba memiliki* ketika hadir di desa.

Kedatangan pendatang baru di kota, jika mendapat tompangan yang berhasil dan mengikuti proses magang tidak akan kehilangan arah dalam perantauan. Berbeda dengan mereka yang tidak memperoleh tompangan yang kurang berhasil, kemungkinan untuk menaklukkan kehidupan rantau terbatas sesuai jalur ekonomi tompangannya. Meskipun peluang terbuka, kapasitas individu serta peluang di bidang lain lebih menentukan daripada binaan tompangan sendiri.

Suatu kecenderungan diantara pendatang baru dari desa, datang ke kota dengan sendiri-sendiri tanpa diminta atau disuruh oleh migran yang dituju. Bagi migran kedatangan kerabat diminta atau tidak adalah tanggung jawab moral bukan saja kepada pendatang itu, tetapi juga kepada kerabat-kerabat dan lingkungan sosial di desa. Jenis pekerjaan, status ekonomi, tanggungan keluarga menjadi faktor penentu seberapa jauh aspirasi pendatang baru itu tersalurkan. Jika dia seorang pedagang kelontong, tukang foto atau sopir, pendatang baru itu paling memungkinkan tertampung dalam peker-

jaannya. Kelompok migran yang berada di luar enterprener seperti pegawai negeri atau karyawan swasta meskipun terbuka peluang untuk diikuti pendatang baru, sifatnya terbatas oleh formalitas pekerjaan.

Kecenderungan lain yang teramati adalah adalah seorang migran aktif berperan meminta atau menyuruh saudara dari desa ke kota. Ini merupakan indikasi sudah ada kemampuan untuk memberi jalan kepada pendatang baru. Penarikan saudara atau kerabat berdampak ganda. Di satu sisi penarikan itu merupakan manifestasi dari sikap migran untuk membantu ekonomi pendatang baru dan keluarga di desa dan di sisi lain terdapat kepentingan migran berupa tenaga kerja untuk membantu usaha atau rumah-tangga rumahtangga di kota. Pola semacam itu sesungguhnya hanya merupakan penye-derhanaan dari simbiotik mutualisme yang rumit dan berproses panjang. Bagi keluarga di desa penarikan salah seorang anggota memberi dampak positif meringankan tang-gungan keluarga dan oleh karenanya memberikan penghargaan kepada migran penarik.

Sejauh uraian ini adalah tepat untuk mengambil simpul kecil dampak bahwa :

(1) Peran migran terdahulu tidak hanya sebagai faktor pelancar dalam peristiwa migrasi, tetapi lebih berarti sebagai faktor penarik; (2) Defenisi dan sikap migran membantu kampung halaman tidak semata-mata dalam bentuk materi tetapi memberi peluang *kail* dan mendidik pendatang baru dalam menaklukkan rantau yang secara fungsional pengaruh-mempengaruhi status migran di dalamnya.

Migran menganggap membantu keluarga yang datang menyusul ke perantauan adalah suatu keharusan. Wujud bantuan tergantung pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang tercermin dari defenisi mereka tentang apa itu bantuan. Dalam berbagai peneli-tian tercatat uang, barang, dan informasi merupakan indikator yang sering digunakan. Dalam beberapa penelitian pula, arus balik migran ke daerah asal di pandang positif terhadap keterbukaan desa.



VIII. MIGRASI DAN GPDT *MARSIPATURE HUTANA BE*

Relevansi migrasi dan pembangunan sejajar tesis yang diangkat dalam Program GPDT-MHB bahwa migrasi penduduk Sumatera Utara, terutama dari daerah miskin Tapanuli, mengakibatkan pengkurusan sumber daya lokal. Wilayah Tapanuli menanggung lebih dari 60 persen desa miskin di Sumatera Utara (BPS, 1990), dengan tingkat migrasi yang tinggi serta pola migrasi penduduknya yang khas (Pelly, 1991; Naim, 1971).

Dalam penelitian ini ditemukan, dari seluruh selang waktu perpindahan, hampir separoh (43 persen) dari migran asal Tapanuli Selatan mempunyai saudara kandung berada di luar Sumatera Utara. Bila digabung dengan mereka yang tinggal di luar Tapanuli Selatan tetapi masih dalam wilayah Sumatera Utara, maka lebih dari separuh saudara kandung migran berada di luar Tapanuli. Penemuan ini menandakan tingkat migrasi Orang Tapanuli Selatan tergolong tinggi. Penekanan dari sisi kekhasan pola migrasi orang Batak, disebutkan : *pertama*, kesenjangan aliran masuk dan keluar uang *dari dan ke* Tapanuli Selatan menempatkan daerah ini harus menanggung devisa. Migran Batak kurang pemurah dan kurang peduli dengan daerah asalnya, dibandingkan dengan perantau asal Minangkabau yang bersifat intensif menyisihkan hasil usahanya ke kampung halaman. Kondisi aliran uang yang devisa dapat diterima sebagai dampak negatif migrasi penduduk, walaupun bukan satu-satunya faktor penyebab; *kedua*, sifat migrasi orang Batak yang permanen (Pasaribu, 1992). Pandangan kosmologis orang Batak yang menganggap rantau dan perantauan itu merupakan upaya untuk memperluas kampung halaman (Pelly, 1992). Proporsi kemiskinan yang tercantum selain bergandengan tingkat migrasi juga merupakan indikasi adanya ketimpangan regional intra Sumatera Utara antara wilayah pantai timur dan wilayah pantai barat (Tapanuli dan Nias).

Ketimpangan arus uang berhubungan erat dengan migrasi peralihan (Pasaribu, 1992). Migrasi peralihan berlaku pada perpindahan penduduk dengan tujuan utama menyelesaikan pendidikan. Perantauan mereka bersifat tidak produktif tetapi konsum-

tif. Alasan migrasi secara makro berkaitan dengan kelangkaan fasilitas pendidikan yang tersedia di daerah menurut kualitas dan kuantitasnya. Oleh sebab itu upaya menekan arus keluar uang bukan penyelesaian dalam pengentasan kemiskinan.

Arus keluar masuk uang seringkali menonjolkan perbedaan jumlah uang tanpa memperhatikan struktur partisipan pengirim (Pasaribu, 1993). Akibatnya faktor-faktor lain kurang tersingkap secara proporsional. Sebagian besar uang yang keluar dari Tapanuli bertujuan untuk biaya pendidikan (Pelly, 1992). Sedangkan uang yang masuk hampir dapat dipastikan semuanya berasal dari migran yang telah berhasil berusaha di rantau. Akan tetapi tidak relevan untuk mengatakan bahwa semua biaya pendidikan migran usia sekolah berasal dari Tapanuli. Banyak diantara migran yang berupaya membiayai pendidikan saudara-saudaranya di kota untuk menutupi kemungkinan arus uang yang lebih besar dari keluarga yang berdiam Tapanuli. Dengan kata lain secara proporsional uang yang keluar dari Tapanuli Selatan lebih kecil daripada uang yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan orang-orang terdidik asal Tapanuli Selatan yang ada saat ini.

Bagian berikut akan mengkaji relevansi migrasi dan GPDT-MHB dalam tiga bagian yaitu : (1) Pengenalan migran terhadap program, dan sikap migran terhadap dasar pemikiran program GPDT-MHB, yaitu kemiskinan ; (2) Partisipasi riil migran Dalam GPDT-MHB. (3) Sikap migran terhadap program, muuat potensi partisipasi migran dari berbagai lapisan, serta saluran, cara dan wujud partisipasi yang dianggap migran tepat.

A. Pengenalan Program

GPDT-MHB adalah program pembangunan yang bersifat unik dimana partisipannya sebagian berada di luar wilayah operasi program, yaitu perantau atau migran Sumatera Utara yang tersebar di seluruh Indonesia. Model pembangunan yang sama telah diterapkan di Sumatera Barat melalui Porgram Gebu Minang. Menyebarnya perantau di luar wilayah operasi program mengisyaratkan pentingnya keomunikasi pembangunan untuk menarik partisipasi mereka.

Kampanye GPDT-MHB di lingkungan perantau secara nominal tergolong berhasil. Survei pertama penelitian ini memperlihatkan 98.0 persen migran telah mendengar adanya program GPDT-MHB di daerah asal. Nama program itu sendiri tidak asing bagi karena menggunakan Bahasa Batak (Tapanuli). Penggunaan nama program ---*marsipature hutana be*--- memancing migran untuk mengidentifikasi diri dengan program itu. Kenyataan di lapang para migran cenderung mengambil tiga kata dibelakang, yaitu MHB, sementara untuk kata bagian depan jarang digunakan, atau malah mereka tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keempat kata terdepan itu. Pemahaman migran yang demikian, dikhawatirkan akan mengakibatkan perbedaan persepsi tentang arti GPDT-MHB secara utuh, dan konsekuensinya berlanjut pada tindakan migran sebagai bagian dari program.

Dipusat-pusat informasi migran, seperti terminal-terminal, kegiatan kelompok, atau perbincangan beberapa orang migran sering terdengar perdebatan mereka sekitar GPDT-MHB, sama seperti yang mereka lakukan pada hari-hari yang lalu. Masing-masing memberikan pandangannya, ada juga yang dilengkapi dengan rujukan "menurut si Anu", yang pada akhirnya kembali seperti semula mereka membicarakan program itu, tidak ada kesimpulan. Keadaan seperti ini sesungguhnya memperlihatkan dua hal, yakni: (1) Informasi program yang diterima oleh migran tidak utuh sesuai dengan *blue print* GPDT-MHB. Inti pesan pada dasarnya sudah ditangkap, yaitu mengajak mereka untuk memberikan andil dalam GPDT-MHB, tetapi bagaimana bentuknya, siapa kelompok sasarannya, dengan cara atau saluran apa mereka akan mewujudkan peran serta sepenuhnya berada pada benak masing-masing. (2) Model komunikasi program, searah, ireversibel dan berantai, dicirikan oleh pemberian suatu pesan kepada penerima disengaja ataupun tidak, yang maknanya kemudian dapat ditangkap oleh penerima tidak dapat lagi mengirimkan umpan balik tentang maksudnya kepada pengirim (Porter dan Samovar, 1982).

Migran sebagai penerima pesan GPDT-MHB relatif terbatas untuk menjangkau sumber pesan (source) dan oleh karenanya proses komunikasi pembangunan menjadi

status quo perbedaan persepsi migran. Tanpa memperhatikan waktu penerimaannya hanya 5.0 persen migran yang menerima informasi GPDT-MHB langsung dari sumber pesan seperti audiensi dengan pemerintah daerah. Selebihnya 43.3 persen menerima informasi dari media massa (cetak, audio, dan audio visual), 28.3 persen dari orang-orang di desa, dan 23.3 persen dari sesama migran di kota. Sumber informasi yang dimaksud disini adalah sumber informasi yang membawa migran pada pemahamannya tentang GPDT-MHB saat dilakukan penelitian. Dengan demikian seorang migran bisa memperoleh informasi lebih dari satu sumber tetapi pemahamannya tentang GPDT-MHB yang dipercaya sebagai informasi yang memberikan pemahaman yang mendalam.

Sumber informasi diatas dapat ditempatkan dalam struktur ketepatan makna informasi. Validitas sumber informasi yang paling tinggi adalah pemerintah daerah. Sedangkan sumber informasi lainnya ditempatkan pada tingkatan validitas yang lebih rendah, walaupun masing-masing memiliki derajat validitas yang berbeda-beda.

Tabel 71. Struktur Sumber Informasi GPDT-MHB Yang Diperoleh Migran

Sumber Informasi	Jumlah	Persen
1. Lembaga/Pemerintah Daerah Sumut	5	5.0
2. - Media Massa	26	46.0
- Orang di Desa	17	30.0
- Sesama Migran di Kota	14	24.0
Jumlah	57	100.0

Sumber : Data Primer, 1993

Sumber informasi yang meliputi media masa, orang-orang di desa, sesama migran di kota ditempatkan pada lapisan kedua karena bentuk komunikasinya tidak langsung dan pemahaman yang ditimbulkan oleh komunikasi tersebut bervariasi dipengaruhi oleh siapa atau apa sumbernya, apa dan bagaimana derajat kedalaman pesannya dan bagaimana karakteristik penerimanya.

B. Sikap Migran Terhadap GPDT-MHB

Terlepas dari pernah tidaknya migran berperan dalam GPDT-MHB, sikap migran terhadap program itu penting untuk diketahui. Sikap migran yang dibangkitkan dalam penelitian ini berorientasi ke depan, sekitar potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kelanjutan program.

1. Kemiskinan sebagai latar belakang GPDT-MHB

Kemiskinan yang melanda sebagian pedesaan Sumatera Utara merupakan titik tolak pemikiran GPDT-MHB. Bagian awal tulisan ini telah menyinggung bahwa faktor ekonomi berperan dalam mendorong peristiwa migrasi, dan sebaliknya disinya-lir migrasi berperan dalam proses pemiskinan daerah itu. Berdasarkan catatan statistik tahun 1993 lebih dari 30 persen desa miskin Sumatera Utara berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan (BPS, 1993). Indikator lain, misalnya PDRB, juga menunjukkan hal yang sama. Peranan PDRB Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan terhadap PDRB Sumatera Utara hanya 6.5 persen tidak proporsional dengan jumlah penduduk (11 persen) dan luas wilayah (24 persen). Oleh sebab itu secara kuantitatif dapat diterima Tapanuli Selatan benar-benar miskin, atau paling tidak menunjukkan ketimpangan ekonomi regional di Sumatera Utara. Apa yang tergambar dalam data statistik pada dasarnya adalah kebutuhan dari perencanaan pembangunan, sedangkan definisi kemiskinan menurut migran adalah bagaimana mereka memandang suasana kehidupan daerah asalnya, setelah menjalani hidup sebentar atau lama di desa sebelum melakukan migrasi. Pengalaman itu akan melahirkan sikap dan definisi mereka tentang kemiskinan. Kecuali sebagai pemilik pengalaman hidup di daerah migran juga berpotensi sebagai pengamat pembandingan dari pengalamannya menjalani hidup sebentar atau lama disatu atau beberapa daerah yang dilewatinya.

Perbedaan pengalaman, riwayat migrasi dan karakteristik individu akan dijadikan penduga definisi dan persetujuan migran atas kemiskinan daerah asalnya. Hasil penelitian di lapang menunjukkan separuh migran (50.persen) setuju dengan adanya kemiskinan di daerah asalnya, 8.3 persen ragu-ragu dan selebihnya 41.7 persen

tidak setuju dengan adanya kemiskinan di daerah asalnya.

Persepsi migran tentang adanya kemiskinan di Tapanuli Selatan tampak berbeda menurut tingkat pendapatan. Migran berpendapatan rendah 75 persen setuju dengan kemiskinan di daerah asal, sedang migran berpendapatan menengah dan ting-gi masing-masing 45.6 persen dan 50 persen.

Memperhatikan ruang ekologis yang berbeda antara Angkola dan Mandailing, dimungkinkan untuk mendapatkan perbedaan persepsi diantara migran menurut daerah asal. Secara teoritis alam Angkola lebih keras dibanding dengan Mandailing dan oleh karena diduga pembenaran yang lebih besar akan ditemui pada orang-orang Angkola. Hasil pengumpulan data di lapang menunjukkan sebaliknya, orang-orang yang berasal dari Mandailing 57.7 persen yang setuju sedangkan yang berasal dari Angkola hanya 23.1 persen.

Ditinjau dari jenis pekerjaan (sekarang) sebagian besar migran yang bekerja sebagai pedagang menyatakan setuju daerah asalnya miskin (53.0 persen), dan tidak setuju sebesar 40.0 persen. Pada migran yang bekerja dibidang non dagang sedikit terbalik dimana 40.0 persen setuju.

Menurut tingkat pendidikan, migran berpendidikan tinggi memperlihatkan pandangan yang sama dengan pendidikan di bawahnya, masing-masing sebesar 42.7 persen pendidikan tinggi, dan 51.1 persen pendidikan menengah, serta 42.8 persen pendidikan rendah. Kecenderungan yang sama dengan persepsi menurut pendidikan ini terlihat pada persepsi menurut setting migrasi. Separoh dari migran (50.0 persen) perpindahan setting pertama mengatakan setuju dengan adanya kemiskinan di daerah asal, setting kedua sedikit lebih kecil (47.1 persen) dan setting ketiga meningkat sedikit menjadi 51.3 persen. Ini berarti tidak ada perbedaan persepsi migran tentang kemiskinan daerah asalnya menurut tingkat pendidikan dan setting pindah.

Latar belakang status pekerjaan sebelum migrasi menunjukkan derajat keterlibatan individu secara pribadi dalam berusaha menghasilkan pendapatan sendiri. Berbeda dengan mereka yang berstatus sebagai pekerja keluarga, migran yang bekerja sendiri

jelas memiliki pengalaman tersendiri dalam mengelola suatu jenis usaha. Dan pengalaman itu lebih relevan untuk dijadikan sebagai tolak ukur kemiskinan yang dimaksud. Hasil penelitian ini menunjukkan migran yang berstatus bekerja sendiri memberikan pembenaran yang lebih kuat daripada migran yang berstatus pekerja keluarga, yaitu 63.6 persen berbanding 37.8 persen.

Mengikuti pengujian beberapa faktor yang diduga berpengaruh persepsi terhadap kemiskinan, hanya ada satu yang tampak berperan yaitu status pekerjaan migran sebelum meninggalkan daerah asal. Faktor-faktor yang tampaknya tidak begitu kuat, tetapi cenderung berperan, misalnya tingkat pendapatan, dan daerah asal migran. Faktor yang tidak menunjukkan peran secara berarti adalah jenis pekerjaan migran, setting pindah, dan tingkat pendidikan. Dengan demikian tiga faktor yang terikat bersinggungan dengan persepsi kemiskinan dapat dicatat sebagai fokus perhatian. Untuk membentuk formulasi yang tepat tentang peta dan defenisi kemiskinan menurut migran adalah : (1) Mereka yang berstatus bekerja sendiri sebelum migrasi secara proposional lebih besar menyetujui adanya kemiskinan di daerah asal. (2) Orang yang berpindah dari wilayah kebudayaan Mandailing cenderung lebih besar menyetujui adanya kemiskinan di daerah asalnya. (3) Migran berpendapatan rendah cenderung lebih setuju daerah asalnya mengalami kemiskinan.

Alasan migran tentang persetujuannya atas keberadaan kemiskinan di Tapanuli Selatan dapat digolongkan pada empat aspek perhatian, yaitu ekonomi, alam-lingkungan, manusia, dan Pembangunan. Migran yang tidak menyetujui kemiskinan menemukan potensi sumberdaya alam dan outputnya sebagai indikator alasan. Di pihak lain migran yang tidak menyetujui kemiskinan lebih menyoroti ketidakdinamisan ekonomi, dan peluang usaha yang kurang. Disamping ada juga yang menunjukkan alasan-alasan sumberdaya manusia. Pada akhirnya meskipun alasan-alasan migran sangat bervariasi, setelah dikelompokkan dapat diamati faktor ekonomi menjadi alasan utama persetujuan keberadaan kemiskinan.

Tabel 72. Alasan-Alasan Migran tentang Keberadaan Kemiskinan di Daerah Asalnya.

Persetujuan	Alasan	Frekuensi	Persentase
Tidak Setuju	1. Lahan subur	4	6.7
	2. Hasil banyak dan bervariasi	3	5.5
	3. Lahan luas	3	5.5
	4. Banyak orang kaya	1	1.7
	5. Banyak orang yang pintar	2	3.3
	6. Hasil cukup	1	1.7
	7. Banyak hasil yang dikirim ke luar daerah	2	3.3
	8. Bukan miskin tapi malas	5	5.0
	9. Taraf hidup masyarakat tidak lebih rendah dari yang lain.	1	1.7
Setuju	1. Mata pencaharian kurang	8	13.3
	2. Gersang alamnya	1	1.3
	3. Keterampilan kurang	1	1.3
	4. Kurang giat berusaha	1	1.3
	5. Sulit mengembangkan usaha	5	8.3
	6. Ekonomi tidak lancar	9	15.0
	7. Menurut catatan statistik	1	1.7
	8. Karena memang miskin	2	3.3
	9. Karena pembangunan fasilitas kurang	2	3.3
Ragu-ragu	1. Lahan di kampung sangat luas, hasilnya cukup tapi tidak dapat dimanfaatkan agar kehidupan meningkat	2	3.3
	2. Miskin itu relatif.	3	5.0

Sumber : Data Primer, 1993.

Alasan-alasan migran pada dasarnya tidak saling meniadakan antara yang setuju dan tidak setuju, artinya alasan ekonomi pada mereka yang menyetujui kemiskinan tidak kontradiktif dengan alasan mereka yang tidak setuju. Adapun perbedaan itu lebih banyak disebabkan perbedaan sudut pandang. Ketika kelompok yang tidak setuju dengan kemiskinan percaya dengan potensi alam, kelompok migran yang setuju menempatkan alasan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu ekonomi riil. Perbedaan pendapat akan dapat diterima sebagai persepsi yang kontradiktif apabila alasan-alasan mereka sama semua menyoroti aspek yang kontekstual, misalnya ketiadaan sumberdaya alam atau keadaan tidak berkembang ekonomi riil.

2. Keinginan Berpartisipasi Dan Saluran Partisipasi

Setelah 5 tahun lebih MHB dicanangkan sebagai himbauan kultural, sebagian migran telah mewujudkan peransertanya secara langsung atau tidak langsung dalam program itu. Meskipun demikian penting diketahui seberapa besar keinginan migran

untuk berpartisipasi dalam GPDT-MHB. Antusias migran merupakan potensi partisipasi yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan program. Disamping itu pemahaman tentang aspirasi migran dapat dijadikan sebagai pembanding format GPDT-MHB yang sedang dan telah dijalankan.

Seperti uraian sebelumnya, survei pertama mencatat 98.0 persen migran telah mengetahui adanya GPDT-MHB, pada survei kedua diperoleh bahwa sebagian besar (88.3 persen) menyatakan antusiasnya untuk ikut berperan serta dalam MHB, sisanya 5.0 persen ragu-ragu dan 6.7 persen tidak ingin mengambil bagian di dalamnya. Migran yang tergolong ragu-ragu dan tidak ingin berperan serta umumnya lebih disebabkan oleh bias informasi yang sampai kepada mereka. Alasan-alasan yang paling menonjol dari mereka adalah adanya anggapan bahwa GPDT-MHB hanya untuk orang-orang yang telah berhasil di rantau, sehingga program itu bukan untuk mereka. Sikap ragu-ragu dan tidak ingin berpartisipasi tampak sesuai dengan ciri-ciri migran yaitu :

- (1). semua berpendapatan rendah sampai sedang ;
- (2) semua memiliki tingkat pendidikan rata-rata rendah dan menengah;
- (3) kebanyakan belum memiliki rumah di kota (71.4 persen);
- (4) kebanyakan berasal dari wilayah kebudayaan Mandailing (71.4 persen) dan 28.6 persen berasal dari Angkola. Secara proporsional baik Angkola maupun Mandailing berimbang, karena migran asal Angkola hanya 21.7 persen dan Mandailing 78.3 persen;
- (5) beristri istri sesuku. Amalgamasi tampaknya tidak menghambat keinginan untuk berpartisipasi dalam MHB;
- (6). berasal dari kelompok umur muda (42.9 persen) dan sedang (57.7 persen). Dengan demikian kelompok migran berumur tua memiliki potensi yang relatif lebih besar untuk berpartisipasi;
- (7) Jumlah tanggungan tampaknya tidak turut mempengaruhi keinginan untuk berperan, karena 57.7 persen memiliki jumlah tanggungan kecil, 7.0 persen memiliki jumlah tanggungan sedang, dan 28.6 persen mempunyai jumlah tanggungan besar.

Dengan mengabaikan migran yang termasuk dalam kategori ragu-ragu dan tidak ingin berpartisipasi, karena jumlahnya kecil, dapat disebutkan keinginan migran untuk

memberi andil dalam GPDT-MHB tergolong tinggi. Bagaimana saluran dan bentuk partisipasi yang dimaksud oleh migran dapat diperhatikan pada bagian berikut.

3. Opini Migran Tentang Bentuk Dan Saluran Partisipasi

Sebagian besar migran ingin memberikan partisipasi atau bantuan dalam dalam GPDT-MHB dalam bentuk dana 83.3 persen, selebihnya 16.7 persen ingin berpartisipasi melalui sumbangan pemikiran.

Tabel 73 Aspirasi Migran Tentang Bentuk Bantuan Partisipasinya Dalam GPDT-MHB

Bentuk-bentuk Bantuan	Jumlah	Persen
1. Sumbangan Dalam Bentuk Dana	48	90.6
2. Sumbangan Dana dan Pemikiran	5	9.4
Jumlah	53	100.0

Sumber : Data Primer, 1993

Komunikasi program yang diprogramkan selama ini tampaknya membentuk opini migran bahwa keterlibatan mereka dalam program itu lebih condong pada partisipasi yang bersifat parsial, yaitu menyumbang dana yang bersifat hibah. Hal ini sesuai dengan format *model of GPDT-MHB* yang berlangsung sampai saat ini.

Aspirasi migran tentang saluran atau cara memberikan bantuan dalam GPDT-MHB terlihat bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing migran (lampiran 5). Migran yang berkeinginan memberikan bantuan dengan caranya sendiri tanpa keterlibatan orang lain sebanyak 11.3 persen, sedangkan yang migran memilih menyalurkan bantuan secara bersama dengan teman-teman/saudara yang seide adalah 49.1 persen, dan 39.6 persen menyatakan ingin memberikan bantuan melalui lembaga/organisasi yang secara khusus menanganinya.

Tabel 74. Pendapat-pendapat Migran Tentang Cara Memberikan Bantuan dalam GPDT-MHB

Cara Memberikan Bantuan	Jumlah	Persen
• Secara Pribadi Tanpa Kerlibatan Orang Lain	6	11.3
• Bersama Beberapa Teman/Saudara seide	26	49.1
• Kepada Lembaga/Organisasi yang khusus menangani	21	39.6
Jumlah	53	100.0

Sumber : Data Primer, 1993

Kebersamaan dalam memberikan partisipasi lebih dominan ketimbang partisipasi yang bersifat individual atau sendiri-sendiri. Hal ini dapat dimengerti karena partisipasi yang individual relatif sulit dilakukan dari rantau. Alasan-alasan yang tercatat dari mereka yang ingin berpartisipasi secara bersama-sama dengan teman seide adalah wujud bantuan lebih kelihatan meski bantuan yang akan diberikan kecil jumlahnya dan jelas tujuannya. Sedangkan alasan-alasan mereka yang ingin memberi bantuan lewat lembaga khusus umumnya karena tidak ingin repot.

C. Partisipasi Migran Dalam GPDT-MHB

Mengacu kepada tinjauan teoritis sebelumnya, bahwa : (1) bila partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam tahap-tahap pembangunan, maka pendekatan rasional lebih utuh ketimbang pendekatan moral. Pendekatan rasional memungkinkan partisipan ikutserta dalam penentuan arah kebijakan pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan secara berkesinambungan; (2) Bila penggalian partisipasi menggunakan pendekatan moral atau kesadaran individu, maka partisipasi yang terwujud kemungkinan besar hanya bersifat parsial dari kesatuan partisipasi yang sesungguhnya.

Tabel 75. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Partisipasi Nominalnya Dalam GPDT-MHB.

Partisipasi Nominal	U m u x			Jumlah Tanggungan			Jenis Pekerjaan									
	M u d a	S e d a n g	T u a	M u d a	S e d a n g	T u a	Da g a n g	B u k a n D a g a n g								
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%						
1. Rda	3	13.0	14	60.9	4	28.6	7	13.0	11	52.4	9	25.0	6	60.0	15	30.0
2. Tidak Rda	20	87.0	9	39.1	10	71.4	20	87.0	10	47.6	9	75.0	4	40.0	35	70.0
Jumlah	23	100.0	23	100.0	14	100.0	27	100.0	21	100.0	12	100.0	10	100.0	50	100.0
	Tingkat Pendidikan						Tingkat Pendapatan						Daerah Asal			
Partisipasi Nominal	Renda h	Henengah	Tinggi	Pendab	Henengah	Tinggi	Henengah	Tinggi	Angkole	Hendalling						
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1. Rda	7	50.0	11	28.2	3	42.9	0	50.0	19	41.3	2	33.3	2	15.4	19	40.4
2. Tidak Rda	7	50.0	28	71.8	4	57.1	8	50.0	27	58.7	4	66.7	11	84.6	28	59.6
Jumlah	14	100.0	39	100.0	7	100.0	8	100.0	46	100.0	6	100.0	13	100.0	47	100.0

Sumber : Data Primer, 1993.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Sampai saat ini GPDT-MHB masih menganut *model of* dengan landasan berfikir mengacu kepada pendekatan moral (Pelly, 1992). Keadaan demikian akan mengalirkan partisipasi yang berlangsung sporadis, tanpa perkiraan skala prioritas, dan yang lebih penting adalah perbedaan definisi partisipasi oleh masing-masing partisipan. Pengukuran partisipasi dalam telaah ini mempergunakan definisi migran, yaitu wujud-wujud kegiatan yang mereka anggap sebagai keikutsertaan dalam GPDT-MHB. Dengan demikian partisipasi terukur lebih merupakan partisipasi nominal, *seseorang dikatakan telah berpartisipasi bila dia ikutserta pada satu atau lebih tahapan partisipasi.*

Hasil pengumpulan data menunjukkan, definisi migran tentang partisipasinya dalam GPDT-MHB umumnya berbentuk keikutsertaan dalam menyumbang dana, dan sebagian lagi berupa keikutsertaan mengikuti forum-forum pengkajian GPDT-MHB, seperti seminar atau simposium.

Hipotesis pokok yang disiapkan untuk menjawab partisipasi migran dalam GPDT-MHB yaitu ada hubungan karakteristik migran dengan partisipasinya dalam GPDT-MHB. Hipotesis ini bersifat majemuk di sisi variabel penduga, yaitu : Umur, Jumlah tanggungan, Daerah asal (wilayah sub kebudayaan), Tingkat pendidikan, Tingkat pendapatan, dan Jenis Pekerjaan.

Umur. Umur menampakkan derajat kematangan psikologis manusia secara umum. Kedewasaan, kemandirian dan pengalaman akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan umur.

Proporsi terbesar yang berpartisipasi dalam GPDT-MHB merupakan migran berumur sedang (60.9 persen), sedangkan migran berumur muda dan tua masing-masing 13.0 persen dan 28.6 persen. Rendahnya partisipasi migran kelompok umur tua kemungkinan terjadi karena sebagian dari mereka telah berusia lanjut, dua orang berumur di atas 60 tahun dan beberapa orang di atas 50 tahun. Pada kelompok umur ini diperkirakan minat dan produktifitasnya akan menurun, sehingga terbatas mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kemungkinan telah

diwakilkan kepada anak-anaknya. Sebaliknya pada kelompok umur muda yang umumnya baru memasuki usia pernikahan, peningkatan prestasi untuk mencapai tujuan-tujuan hidup di rantau masih menjadi pokok perhatian. Karena ekonomi keluarga merupakan prioritas, kepentingan lain seperti berpartisipasi dalam GPDT-MHB kurang banyak diikuti.

Kelompok usia sedang terlihat antusias berperan dalam GPDT-MHB, suatu pertanda selang usia tersebut merupakan selang usia pencarian status dalam masyarakat. Dalam beberapa kelompok/organisasi/paguyuban migran terlihat juga peran yang besar pada kelompok umur sedang, mereka memegang posisi kepengurusan mengendalikan migran kelompok umur muda, dan mendapat nasehat dari kelompok umur tua. Pengujian perbedaan proporsi terhadap Tabel 10.3. memperlihatkan perbedaan proporsi yang nyata pada $\alpha=0.01$. ($X^2_{Hitung, db=2} = 11.89$; $X^2_{Tabel, db=2; \alpha=0.01} = 10.83$). Dengan demikian faktor umur mempengaruhi partisipasi migran dalam GPDT-MHB.

Jumlah Tanggungan. Kecenderungan yang terlihat pada pengaruh usia, juga ditemui pada pengaruh jumlah tanggungan, dimana mereka yang mempunyai tanggungan sedang secara proporsional lebih banyak berperanserta dalam GPDT-MHB. Jumlah tanggungan yang kecil kemungkinan terjadi pada dua bentuk yaitu usia perkawinan muda sehingga jumlah tanggungan konsumtif masih sedikit atau migran tua yang sudah memiliki anak produktif, yang tidak termasuk dalam jumlah tanggungan. Di luar itu, saudara atau kerabat migran yang bertempat tinggal dalam rumahtangga migran juga termasuk dalam kesatuan jumlah tanggungannya. Hal ini menandakan bahwa jumlah tanggungan yang besar mengurangi partisipasi migran dalam kegiatan GPDT-MHB. Hakekat dari nilai *marsipature hutana Be* kemungkinan diwujudkan dalam bentuk membagi-bagi *rezeki* kepada saudara atau kerabat yang sebagian menyumbang jumlah migran tanggungan di kota. Hasil pengujian perbedaan proporsi X^2 menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi yang nyata pada $\alpha = 0.05$, tetapi memiliki peluang untuk menolak H_0 pada $\alpha = 0.13$ atau derajat kepercayaan 87.0 persen (X^2

Hitung, $db=2 = 4.29$; X^2 Tabel, $db=2; \alpha=0.05 = 4.60$). Nilai sebesar itu berada dalam selang kecenderungan perbedaan proporsi, $0.05 < \alpha < 0.20$. Dengan demikian dapat disimpulkan partisipasi migran dalam GPDT-MHB dipengaruhi oleh jumlah tanggungan, dengan jumlah terbesar berada pada mereka yang memiliki jumlah tanggungan sedang.

Daerah Asal (Wilayah Sub Kebudayaan). Salah satu faktor yang disinyalir akan memengaruhi tingkat keberhasilan GPDT-MHB secara merata, khususnya dalam kaitan partisipasi migran, adalah ketidakmerataan peristiwa migrasi dari beberapa daerah di Sumatera Utara menurut wilayah budaya dan sub-sub budaya. Intensitas migrasi yang tinggi dari suatu wilayah memungkinkan partisipasi yang besar pula dari migran ke daerah itu. Meskipun demikian satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah sikap dan tindakan migran dalam berpartisipasi. Meskipun suatu wilayah memiliki intensitas migrasi yang tinggi, jika tanpa adanya tindakan aktif migran untuk berpartisipasi, perbedaan intensitas migrasi tidak berarti banyak dalam volume peranserta migran.

Di Tapanuli Selatan, ada beberapa kecamatan yang lama terisolir baru belakangan terbuka, sehingga penduduknya terlambat mencapai rantau. Dalam penelitian ini misalnya terdapat 6 kecamatan yang tidak berperan menyumbang migran dan setelah diperhatikan ternyata daerah-daerah tersebut berada di pedalaman Tapanuli Selatan, di bagian luar Jalan Trans Sumatera yang merupakan urat nadi ekonomi masyarakat.

Pengukuran partisipasi migran menurut daerah asal dibentuk ke dalam dua kategori wilayah sub kebudayaan, yaitu Angkola dan Mandailing. Migran yang tercatat memiliki desa asal di Kecamatan Panyabungan dan Kotanopan (kecamatan lain tidak terambil/tercatat dalam migran sampel) dimasukkan dalam wilayah sub kebudayaan Mandailing, sedangkan 6 kecamatan di wilayah sub kebudayaan Angkola disatukan ke dalam kategori daerah asal Angkola. Data partisipasi nominal migran menurut daerah asal dapat diperhatikan pada Tabel 75 Mengamati Tabel tersebut, terlihat orang-orang Mandailing memiliki proporsi yang lebih besar berperanserta dalam GPDT-MHB, yaitu

40.4 persen berbanding 15.4 persen. Gambaran ini memunculkan dugaan lain bahwa migran asal Angkola memiliki sikap yang berbeda dalam merespon himbauan GPDT-MHB. Sikap merupakan potensi untuk berperan riil, akan dibahas pada bagian selanjutnya, khusus mengenai potensi peranserta migran dalam GPDT-MHB. Pengujian perbedaan proporsi terhadap Tabel. 75 diperoleh hasil, ternyata peranserta nominal migran Angkola dan Mandailing tidak berbeda nyata atau bahkan tidak masuk dalam selang kecenderungan. ($X^2_{\text{Hitung}, db=1} = 1.81$; $X^2_{\text{Tabel}, db=1; \alpha=0.05} = 3.84$). Nilai-nilai tersebut menjelaskan meskipun pengamatan empiris Tabel. 75 terlihat agak berbeda tetapi setelah dilakukan pengujian ternyata tidak menunjukkan perbedaan proporsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam partisipasi nominal riil migran asal Angkola dan Mandailing.

Jenis Pekerjaan. Jenis pekerjaan membentuk pola sikap dan kelakuan seseorang pelaku pekerjaan itu. Jenis pekerjaan menentukan, tingkat pendapatan, aksesibilitas dan konsumsi informasi, derajat keuangan waktu untuk kegiatan-kegiatan dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Pengaruh jenis pekerjaan diidentifikasi pada peran riil migran dalam GPDT-MHB, tertera pada Tabel '75

Jenis pekerjaan sesuai paparan Tabel 75 terlihat sedikit mempengaruhi partisipasi nominal migran. Bila migran bukan pedagang berperan 60.0 persen, migran pedagang hanya 30.0 persen. Melalui pengujian perbedaan proporsi diperoleh nilai X^2 sebesar 1.06, suatu petunjuk untuk menerima pernyataan H_0 bahwa tidak ada perbedaan partisipasi nominal menurut jenis pekerjaan. Nilai X^2 hitung sebesar itu juga tidak menampakkan adanya suatu kecenderungan perbedaan proporsi pada $0.05 < \alpha < 0.20$, malah jauh lebih kecil dari nilai $X^2_{\text{tabel}; db=1, \alpha=0.2} = 1.64$. Perbedaan yang begitu besar cukup untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan proporsi partisipasi menurut jenis pekerjaan.

Tingkat Pendidikan. Tabel 75 menjelaskan migran berpendidikan menengah relatif lebih sedikit yang berpartisipasi dalam kegiatan GPDT-MHB dibanding migran



yang memiliki pendidikan tinggi dan rendah. Migran berpendidikan menengah hanya berpartisipasi 28.2 persen, sedangkan migran berpendidikan rendah 50.0 persen dan berpendidikan tinggi sebesar 42.9 persen. Oleh karena keterbatasan data, maka dilakukan penggabungan kolom-kolom dengan asumsi hakekat data pendidikan bersifat nominal yang tidak memperhatikan urutan, migran berpendidikan tinggi dan rendah digabung, menjadi satu. Hasil pengujian dengan penggabungan seperti itu tetap saja tidak memperlihatkan adanya perbedaan proporsi partisipasi nominal menurut tingkat pendidikan migran. Nilai $X^2_{Hitung, db=1}$ sebesar 2.23 berada diluar selang batas kecenderungan $0.05 < \alpha < 0.20$. Dengan demikian diperoleh kesimpulan tidak ada perbedaan proporsi peranserta migran menurut tingkat pendidikan.

Tingkat Pendapatan. Tingkat pendapatan berperan strategis dalam mempengaruhi keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan diluar rumahtangga. Sikap ingin berpartisipasi tampaknya tidak menjadi syarat cukup berperan aktual dalam GPDT-MHB, batas pagu senantiasa berada dalam kemampuan ekonomi untuk memberikan peransertanya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Menurut pengamatan terhadap tingkat pendapatan rata-rata migran sebagian besar tergolong berpendapatan menengah dengan rata-rata pendapatan di atas Rp. 400 000 per bulan. Dengan tingkat pendapatan seperti ini, kemungkinan pengaruhnya bukan pada partisipasi nominal, tetapi pada tingkat partisipasinya. Meskipun demikian tingkat pendapatan tetap dijadikan sebagai parameter penduga partisipasi nominal untuk menyeragamkan pengukuran dengan bagian sebelumnya. Hubungan tingkat pendapatan dengan partisipasi nominal migran dapat diperhatikan pada Tabel 75 Proporsi yang lebih besar berpartisipasi secara nominal berada pada mereka yang memiliki tingkat pendapatan sedang (41.3 persen). Migran berpendapatan tinggi hanya 33.3 persen yang berpartisipasi, sedangkan migran berpendapatan tidak satu pun turut serta memberi partisipasinya dalam waktu enam bulan.

Jumlah migran kurang memenuhi syarat pengujian beda proporsi X^2 . Untuk memperingkas uraian, tanpa mengurangi makna hakekat dari tabel diambil keputusan

sesuai dengan kecenderungan yang ditunjukkan oleh Tabel 75, yaitu tingkat pendapatan cenderung mempengaruhi peranserta nominal migran dalam GPDT-MHB. Hal ini dapat pula dijadikan sebagai landasan untuk menduga adanya kaitan antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi.

Dari uraian di atas terlihat hanya ada satu faktor yang jelas membedakan partisipasi nominal migran dalam GPDT-MHB yaitu umur. Sedangkan yang cenderung menampakkan pengaruhnya adalah tingkat pendapatan dan jumlah tanggungan. Jenis pekerjaan, daerah asal dan tingkat pendidikan relatif tidak bertindak sebagai faktor pembeda peranserta nominal.

Bila diperhatikan lebih jauh, bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh migran umumnya adalah; (1) Sumbangan dana sebanyak 22 kejadian, dari 21 migran yang terlibat. (2) Seminar/diskusi/simposium dan sejenisnya sebanyak 5 kali dari tiga orang yang terlibat selama 6 bulan. Dengan demikian ada dua orang yang memberikan partisipasi dalam ke dua bentuk sekaligus dalam setting waktu yang ditetapkan.

Pengumpulan dana untuk GPDT-MHB umumnya diprakarsai oleh para migran dengan objek-objek pembangunan yang sudah biasa mereka lakukan sebelum GPDT-MHB, misalnya pembangunan mesjid, perbaikan sekolah/madrasah, sumbangan anak yatim piatu. Adapun partisipasi migran dalam bentuk pengkajian dalam seminar/simposium, diikuti memenuhi undangan dari lembaga-lembaga terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semua yang terlibat pada bentuk partisipasi yang kedua memiliki pendidikan tinggi dan memiliki kapasitas intelektual untuk mendukung GPDT-MHB.

Jika dibandingkan dengan besarnya keinginan migran untuk berpartisipasi dalam GPDT-MHB, dapat disebutkan masih terdapat potensi partisipasi yang tidak terwujud dalam waktu enam bulan. Jika migran yang berkeinginan berpartisipasi sebanyak 53 orang, partisipasi yang terwujud selama selang waktu itu hanya separuhnya yaitu 21 orang (50 persen).



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

IX. KESIMPULAN

Telaah pola migrasi dengan mengambil kasus migran Batak Angkola Mandailing di Kota Bogor tidak diperuntukkan mengeneralisasi pola migrasi Batak secara keseluruhan. Kesimpulan penelitian hanya berlaku untuk migran Batak Angkola Mandailing dengan tujuan Kota Bogor. Meskipun demikian telaah mikro ini diharapkan dapat memberikan sekelumit gambaran pola migrasi Suku Batak di beberapa daerah tujuan lain terutama yang memiliki karakteristik dan situasi yang sama dengan Kota Bogor.

Penutup, tulisan ini menampilkan kesimpulan sebagai kristalisasi uraian sebelumnya.

A. Batasan migrasi dan Implikasinya

Batasan-batasan migrasi, dimensi ruang dan waktu yang berimplikasi pada bentuk dan jenis migrasi sampai saat ini belum baku. Satu peneliti dengan yang lain masih terpaut dengan kondisi situasional subyek, sehingga memunculkan batasan migrasi yang bervariasi. Dimensi waktu melibatkan pengertian adanya selang waktu atau durasi perpindahan sebentar atau lama (tidak tak terhingga), sedangkan dimensi spasial menunjukkan terjadinya perpindahan fisik melewati batas geografis. Pada akhirnya kedua dimensi tidak bermakna dikotomi tetapi merupakan garis kontinum pada masing-masing dimensi dari relatif *kecil* (singkat dan pendek) sampai relatif *besar* (seumur hidup dan jauh). Artinya migrasi mungkin terbentuk dalam format: berpindah dalam jarak geografis relatif *kecil* tetapi terlibat dalam waktu yang *besar*; berpindah dalam jarak geografis *besar* tetapi terlibat dalam waktu yang *kecil*; kecil-kecil, dan besar-besar. Dengan demikian penempatan perpindahan penduduk dengan batasan utama waktu dan jarak penting, tetapi tidak menjadi alasan utama untuk membedakan perpindahan yang satu dengan yang lainnya. Sekalipun dimensi waktu dan ruang berfungsi mutlak, masih diperlukan syarat perlu lain untuk mendukung definisi migrasi.

Turunan pertama dari pergerakan relatif *kecil* menuju *besar* adalah konsekuensi-konsekuensi tertentu yang diterima oleh pelaku migrasi maupun sistem-sistem yang dilibatkan dalam peristiwa migrasi. Konsekuensi yang dimaksud tidak hanya menyang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

lut lingkungan fisik, tetapi juga menyangkut lingkungan sosial dan budaya dalam pengertian yang seluas-luasnya. Jika konsekuensi migrasi merupakan fungsi perbedaan lingkungan asal dan tujuan, maka batasan waktu dan jarak tidak dapat menjelaskan migrasi secara memuaskan. Hal ini lebih terasa jika migrasi ditelaah dalam konteks mikro dan berdimensi budaya.

B. Akar migrasi dan implikasinya

Telah banyak penelitian mengenai corak migrasi budaya bangsa (Hamid dan Ahmad, 1992; Cunningham, 1957; Naim, 1984).

Naim (1984) berkesimpulan bahwa pola migrasi *merantau* Minangkabau merupakan satu-satunya migrasi yang melembaga, terkait dengan mekanisme pengaturan sosial, posisi kekuasaan lelaki tidak kokoh dalam keluarganya. Artinya lembaga tradisional menjadi determinan kebiasaan *merantau*. Romantisme seperti ini melahirkan pemikiran baru---tidak sekedar mencari-cari---bahwa apakah asumsi tersebut telah ditempatkan secara kontekstual. Kekhasan masing-masing budaya suku bangsa, yang dengan sendirinya melahirkan budaya migrasi yang khas pula. Dalam Budaya Batak disebutkan tidak ada suatu pembenaran untuk menyebutkan migrasi suku bangsa ini mengakar dan melembaga. Adapun gejala migrasi pada *setting* tradisional seperti *marjajo* dan *marjalang* dipandang bukan kebiasaan yang mewarisi perilaku migrasi Batak hingga saat ini. Adalah mengundang tanda tanya, mengapa terbentuk intensitas migrasi yang tinggi pada orang Batak lebih dari satu abad terakhir dan mengapa migrasi mereka berpola *hanyut*. Hasil studi ini sebagian dapat menjelaskan pola migrasi *hanyut* itu, tetapi jauh lebih penting adalah memahami migrasi dari sudut sejarah untuk memperoleh akar budaya dan lembaga tradisional yang mencetak migrasi saat ini. Ada dua objek perhatian untuk sampai pada kesimpulan, yaitu konsep *huta* dan *manjae*.

Huta adalah komunitas kompleks bertumpu pada ikatan genealogis, sistem distribusi sumberdaya, fungsi-fungsi pertahanan, sistem status, dan kinerja yang bersifat *self sufficiency*, dahulu. Ketika itu, kelembagaan tradisional merupakan satu-satu acuan masyarakat dalam sikap dan tindakan, jauh dari tekanan eksternal yang bersifat destruk-

tif. *Bona bulu*, membatasi ruang gerak domain kognitif untuk mengidealkan jantung peradaban luar, suatu keadaan *splended isolation* yang lebih bermakna sikap penutupan diri, ketimbang hambatan-hambatan geografis empiris. Hulu sungai Sorkam, Sungai Asahan, Sungai Barumun, Batang Gadis merupakan lobang besar difusi nilai luar dan tepian yang landai dituruni peradaban gunung, untuk turut dalam pertukaran barang di Selat Malaka atau Samudera Hindia, bagian barat Sumatera sejak abad pertama masehi. Tetapi itupun tidak pernah melahirkan kebudayaan Batak yang berciri pelayar sungai, apalagi menjadi pengarang samudera sekaliber *pinishi* Bugis-Makasar, atau jadi pedagang antar pulau untuk menyebar kapur barus, kemenyan, dan hasil bumi pedalaman Tapanuli ke kepulauan Madagaskar atau Pantai Gading, Persia yang pernah dilalulangi masyarakat *liar* nusantara. Setting itu terlalu jauh untuk membolak-balik kemungkinan menemukan peradaban *migrasi* orang Batak.

Rantau Minangkabau menjorok kedalam dari pantai barat Sumatera dari Singkawang hingga perbatasan Gayo Alas di bagian tengah Aceh (Naim, 1971). Disana orang Minangkabau berperan sebagai pedagang pantai, perantara hasil bumi keluaran masyarakat hulu sungai, untuk dialihkan kepada pedagang-pedagang luar Persia, dan bangsa Asia Selatan. Di pantai timur (selat Malaka) jalur ekonomi terpadat, kala itu tidak banyak menyentuh kehidupan *huta*.

Setting sedalam ini pun masih terlalu kuno untuk menemukan referensi migrasi orang Batak keluar dari peradaban gunung, *huta*. Legenda *Si Raja Batak, Mulajadi Nabolon*, terpatri dalam sejarah kebudayaan Batak, tercatat kira-kira 3000 tahun yang lalu, suatu periode yang tidak banyak terisi oleh pergeseran pola kehidupan *huta*, kecuali konflik dan perebutan tanah marga. Pertambahan penduduk, manifestasi nilai "*maranak sappolu pitu, marboru sappolu onom*", memaksa peluberan dari bumi Toba, pulau Samosir, secara transendental. Hasilnya adalah diferensiasi Batak ke dalam sub-etnik baru, Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Pak-pak Angkola-Mandailing. Tetapi diferensiasi itu lebih karena determinan-determinan ekologis, tidak merusak akar budaya atau mengubah prinsip *the whole in the part* seperti sistem kekerabatan

dalihan natolu, huta, bona bulu. Jika demikian, diferensiasi Batak tradisional ke dalam sub-sub suku termasuk dalam bentuk migrasi primitif, nomaden ?. Migrasi primitif seperti didefinisikan adalah kegiatan berpindah melewati geografis tertentu tanpa adanya keinginan untuk menetap di satu tempat yang dilewati, nomaden misalnya. Migrasi Orang Batak primitif dalam konteks ini, mungkin berlangsung, tetapi hanya dapat diterangkan dengan kegiatan *marjajo* seperti yang diungkapkan (Cunningham, 1957).

Marjajo diartikan sebagai kebiasaan anak muda menjelajahi huta demi huta, sering kali tanpa tujuan. Di pihak lain konsep pembukaan huta, penanaman bambu --- di sekeliling pemukiman, pembuatan parit benteng pertahanan (menanam bambu = bona bulu lambang kampung halaman) mengurangi makna keprimitifan --- migrasi yang berkonotasi nomaden --- seperti orang-orang pengembara padang pasir Arab (Goldscheider, 1985). Praktek tebang - bakar - tanam dan berlalu (*shifting cultivation*) akan terjadi untuk sementara, jika tanah landai ditepi sungai tidak di peroleh, bergeser ke lahan marjinal bukit Barisan. Hutan di tebang, ditanami, diairi, menghasilkan sumber hidup, sebuah proses yang lama dan liar, tetapi mempunyai tujuan yang jelas menuju terbentuknya komunitas huta baru. Tapanuli sebuah pengecualian di "Indonesia Luar" yang berciri komunitas sawah, yang umumnya ditemui di "Indonesia dalam", Jawa (Geertz, 1983), kemudian terbentuk pula pada perpindahan Orang Batak ke Sumatera Timur belakangan (Cunningham, 1957). Pola bertani, sawah, menguatkan dugaan komunitas huta sawah berjalan seiring dengan diferensiasi Batak tradisional. Bertempat tinggal menetap telah terjadi sejak kebudayaan bersawah itu ada.

Lantas, apakah masih relevan untuk menyelaraskan kegi-atan *marjajo* dan *marjalang* sebagai "*rite de passage*" merantau dalam konteks kebudayaan Batak. Merantau suatu perilaku yang melembaga yaitu migrasi penduduk yang berkonotasi budaya, terkait dengan mekanisme pengaturan sosial (Naim, 1971). Atau apakah prosesi *mangarimba* atau membuka "huta" atau *manjae* tidak lebih memenuhi substansi lembaga yang sesungguhnya dalam budaya migrasi Batak. Pelembagaan merantau yang

berciri sirkulasi pada Orang Minangkabau bersumber dari ketidakkokohan posisi laki-laki dalam keluarga istrinya atau keluarga ibunya, dapat diterima perlunya tindakan mencari status melalui pengalihan hasil rantau ke kampung halaman. Orang Batak tidak pernah di kenal sebagai perantau sirkuler, kecuali *inang-inang*, *parrengge-rengge*; setelah memasuki peradaban moderen, dua abad lalu, tetapi tidak berarti harus keluar dari terminologi "melembaga" migrasi yang sesungguhnya, yaitu pola perpindahan masyarakat yang mengakar pada kebudayaan. Migrasi orang Batak berubah pola menjadi merantau yang berkonotasi sirkulasi, justru merupakan pola yang tidak melembaga, karena tidak pernah tercetak dalam orientasi nilai budaya Batak dulu dan sampai saat ini.

Ribuan huta di wilayah kebudayaan Batak hampir semua berawal dari "*rimba*" (*mangarimba*, membuka tanah) atau *jae* (*manjae*, ke hilir, menghilir; lawan kata hulu) dan bukan kebiasaan bagi pelaku *manjae* untuk menyongsong ke hulu (kampung asal). Tetapi secara immanen kekuatan spritual *huta* rantau ditempatkan harus pada kampung halaman *hulu*, karena *hululah* bakal dan keabsahan identitas hilir, yaitu marga. *Manjae* merupakan lembaga tradisonal yang mengatur lelaki yang baru menikah dalam proses kemandirian, meninggalkan rumah orangtua dan membangun rumahtangga sendiri dengan urusan domestik yang terlepas dari orang tua.

Dengan demikian adalah tepat jika migrasi Orang Batak disebut berpola *hanyut*. Secara terminologi *hanyut* berarti terbawanya suatu benda ke hilir atau ke tempat yang lebih rendah sesuai hukum-hukum zat cair. Zat cair selalu bergerak ke tempat yang lebih rendah. Ibarat sebutir padi yang terbawa arus ke hilir hampir tidak mungkin untuk kembali ke hulu. Ketika tersangkut di pinggiran sungai, padi tersebut tumbuh dan berkembang sama seperti rumpun padi tetuanya di hulu.

Rangkaian gejala alam tradisonal tampaknya tetap berjalan pada relnya hingga dewasa ini. Migrasi ke Bogor memang tidak diikuti pembentukan *enclaves* seperti migrasi Batak ke Pariaman dan Sumatera Timur dahulu, tetapi gejala itu tidak berarti menandakan diskoordinasi budaya *huta* dan *hanyut*. Letak perbedaan keduanya

terdapat pada periodesasi, atau *setting* dan pergeseran dasar material dan organisasi yang tanpa kehilangan dasar normatif dan pandangan kosmologisnya (Pelly, 1992). Kehadiran orang Batak dalam kancah migrasi internal bangsa sejalan dengan penguatan tekanan eksternal dan secara beruntun sejak Perang Padri tahun 1810, yang berakibat pada melemahnya daya ikat *huta* terhadap masyarakat. Jika *huta* tidak dapat diandalkan sebagai wadah mempertahankan kerajaan pribadi, atau minimal kerajaan bersama dalam, lapangan hidup lain menjadi alternatif yang perlu dicoba-coba. Alhasil terben-tuklah kerajaan kerani (*white collar dynasty*) pada perkebunan Belanda di Sumatera Timur. Pekerjaan itu akomodatif terhadap aspirasi perantauan mereka.

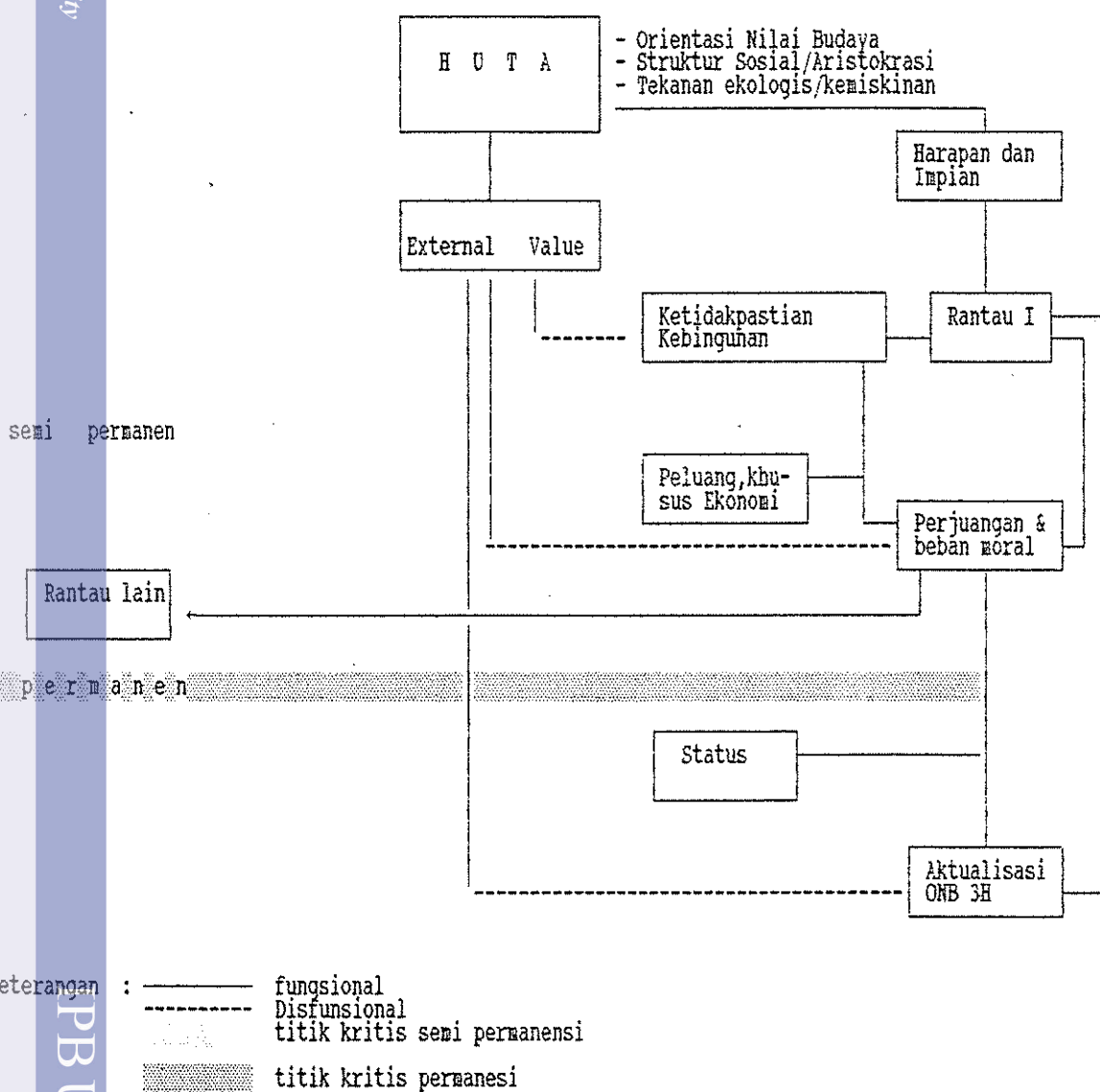
Dalam penelitian ini *pola hanyut* masih terlihat jelas. Keinginan kembali dan menetap di daerah asal berkurang sejalan dengan keberhasilan migran menaklukkan rantau. Umur, jumlah tanggungan, tingkat pendapatan, masa domisili berperan negatif diperjelas dengan setting migrasi bahwa keinginan pulang melewati proses tertentu hingga benar-benar migrasi seumur hidup.

Struktur ekonomi berciri dominasi agraris tidak akomodatif terhadap masyarakat aristokrasi, dalam keadaan nyata lebih tertangkap sebagai rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan meningkatkan status ekonomi. Ditambah dengan suasana diskoordinasi *huta* harapan dan impian untuk memperoleh kejayaan semakin terfokus pada rantau, meninggalkan peluang yang tersedia kampung halaman. Sikap meraja dan egaliter mereduksi keraguan menghadapi situasi kacau yang mungkin dihadapi di rantau.

Dunia rantau ternyata jauh dari harapan yang tercipta sebelum migrasi menciptakan suasana bingung dan tidak pasti bagi mereka, sehingga bersikap simpati terhadap masyarakat tujuan. Dengan ketidakpastian dan kebingungan akhirnya mereka keinginannya untuk pulang dan menetap di daerah asal. Begitupun sebenarnya mereka telah kehilangan daya untuk menetap di daerah asal (disfungsional). Perjalanan hidup di rantau telah membentuk pribadi migran berciri nilai luar.

Jika kebingungan dan ketidakpastian migran terjawab oleh tersedianya kesempatan khususnya ekonomi (kesempatan kerja), maka perantauan akan berubah menjadi

beban dan tanggung jawab moral bagi migran dan pada saat yang sama keinginan pulang semakin dangkal. Kesempatan ekonomi tidak serba sama dalam memperlancar pencapaian tujuan hidup 3H. Karakteristik sektor pekerjaan paling tidak harus memenuhi dua syarat utama, yaitu bebas dari hubungan produksi dominasi-subordinasi dan terbuka kesempatan untuk menyalurkan aspirasi meraja mereka. Terpenuhinya syarat itu akan mengantarkan migrasi pada akhir proses *hanyut* yaitu migrasi permanen seumur hidup dimana tujuan hidup 3H tercapai.



Gambar 5. Bagan Proses Migrasi Hanyut.

B. Migrasi dan Implikasi Kebijakan GPDT-MHB

Migrasi Orang Batak umumnya, Angkola-Mandailing khususnya, seyogyanya tidak hanya dipandang dari sudut perannya dalam proses pemiskinan daerah asal, tetapi juga penting untuk memahami migrasi sebagai peristiwa pembebasan dari kemiskinan. Migrasi bukan sekedar penyebab tetapi juga akibat dari suasana tertentu dalam sistem sosial *huta*. Oleh karena tekanan migrasi lebih besar pada golongan masyarakat berusia muda, maka dampak *ketidakhadirannya* di daerah asal berbentuk kekurangan sumberdaya manusia. Hal ini akan tetap berlangsung selama basis pengaman motivasi migrasi mereka tidak diakomodasikan di daerah asal. Upaya mengembalikan sumberdaya manusia perantau ke daerah asal adalah tindakan yang melawan arus budaya. Sekalipun mungkin dilakukan itu berarti membutuhkan proses reorientasi nilai budaya dan reorientasi pandangan kosmologis. Dalam kaitan inilah GPDT-MHB mendapat tantangan yang berat terutama jangka panjang.

GPDT-MHB dalam jangka pendek mampu memancing partisipasi perantau dalam bentuk *hibah*. Partisipasi tersebut lebih merupakan manifestasi emosi sesaat yang tidak menjanjikan kesinambungan partisipasi. Partisipasi perantau akan berkesinambungan jika format program memberi peluang partisipasi secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Di tingkat operasional bias informasi yang tertuju pada migran telah membiaskan pemahaman migran tentang keterlibatannya dalam program. Oleh sebab itu, komunikasi pembangunan GPDT-MHB kepada migran penting direvisi. Kelompok migran Batak Angkola Mandailing di perantauan merupakan wadah menyalurkan aspirasi *kehutaan* mereka. Lembaga rantau ini seyogyanya dimanfaatkan untuk menjembatani *bona bulu* dan *bona ni ranto*. Akhirnya lembaga khusus GPDT-MHB yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan masing-masing pihak perlu dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustam, M. I. 1987. Gerak Penduduk Komunitas Padi Sawah. Studi Kasus Di Tiga Daerah Pedesaan Sulawesi Selatan. Desertasi S3. Fakultas Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Adji, 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Pertanian Berencana. Orbha Sakti. Bandung.
- Anonimus. 1990. 1990. Marsipature Hutana Be. Penerbit Analisa. Medan.
- Attamini, 1985. Orang Kita Di Semenanjung. Tempo 19 Januari 1985. Jakarta.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Bogor. 1985. Recana Induk Kotamadya Bogor.
- Bangun, P. 1970. Kebudayaan Batak dalam Koentjaraningrat: Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Basri, H. 1988. Perpindahan Orang Banjar ke Surakarta. Kasus Migrasi Intern Suku Bangsa Di Indonesia. Prisma Nomor 3. 1989. LP3ES. Jakarta.
- Bennett, M.J. 1979. Overcoming The Golden Rule: Sympathy and Empathy Communication Year Book 3, New Jersey. Transaction Books.
- Biro Pusat Statistik. 1993. Daftar Nama Dan Indeks Peta Desa Miskin Menurut Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan di Pulau Sumatera. Jakarta.
- Bonaventura 1991. Desa Mandiri Beberapa Kendala dan Prospeknya. Rumusan Hasil Seminar Nasional Optimalisasi Peran Desa Sebagai Sumberdaya Dalam Pembangunan Nasional Khususnya Ditinjau Dari Aspek Pemerintahan Desa masyarakatnya. Universitas Merdeka Malang.
- Chandrakirana, K. 1988. Geertz Dan Masalah Kesukuan. Prisma Nomor 2. Tahun XVIII. LP3ES. Jakarta.
- Cohen dan Uphoff, 1977. Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design, Implementation and Evalutaion. Cornell Univesity. New York.
- Cunningham, C. E. 1957. The Postwar Migration Of The Toba Batak To East Suma-tera. Yale Univercity. Southeast Asia Studies. New Haven.
- Demi Masa. 1989. (Mingguan). Pengairan Tak Beres, Panen Gagal. Medan.
- Diapari, L. S. 1987. Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan, Suatu Tinjauan. Penerbit Kemajuan. Padang Sidempuan.
- Forbes, D. K. 1974. Meninjau Kembali Mobolitas Penduduk. Prisma Nomor 10, 1974. LP3ES. Jakarta.
- _____. 1986. Geografi Kemiskinan, Sebuah Tinjauan Kritis. LP3ES. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Garuda. 1988. (Harian) Harga Tanah di Padang Bolak Naik Drastis. Tgl 31-8-1989. Hal 4 kol-1. Medan.

Gee, T. G. 1976. Suatu Aspek Urbanisasi Di Asia Tenggara. (Terjemahan). Lembaga Kependudukan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian, Perubahan Ekologi Di Indonesia. Bharata. Yayasan Obor, Jakarta Bharata Karya Aksara, Jakarta.

Geutray, B.S. PT, 1992. Proyek Transmigrasi Rencana Teknis Pemukiman Tahap III A Dan Rencana Teknis Jalan (Pir-Trans). Deptrans-Jakarta.

Giatmo, S.H. 1992. Berikan Kail Atau Jala. Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Medan.

Goldscheider, C. 1985. Populasi, Modernisasi, Dan Perubahan Sosial. Diterbitkan Untuk Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.

Geode, W.J. 1991. Sosiologi Keluarga.

Goulliet, D. 1990. Partisipasi Dalam Pembangunan, Terobosan Baru. Analisis CSIS Tahun XIX, No 2, Jakarta.

Hall, E.T. and W. F. Whyte. 1974. Experiences In Communication. New York. Harcourt Brace Javanovich.

Harahap, B. R. 1988. Poda-Poda Nia Adat. Pustaka Rahmat. Padang Sidempuan.

Harahap dan Siahaan, 1987. Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak. Sinar Harapan. Jakarta.

Harris, P.R. and Moran, R.T. 1982. Intercultural Communicattion. A Reader, 3rd Belmonth Wadworth.

Hasibuan. L. P. 1988. Hukum Adat Agraria Menurut Adat Dalihan Natolu. Mitraco. Medan.

_____ 1991. Pangupa. Penerbit Mitraco. Medan.

Hamid, A dan Imam Ahmad, 1992. Perubahan Ekonomi Dan Resistensi Budaya. Studi Kasus Pada Pedagang Soto Taman Di Jakarta. Prisma Nomor. 1992. LP3ES. Jakarta.

Hugo, G.J. 1978. Popltaion Mobility In West Java. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Kantor Statistik Tapanuli Selatan. 1986. Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1985. Padang Sidempuan.

Kantor Statistik Tapanuli Selatan. 1986. Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka Tahun 1985. Padang Sidempuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak cipta milik IPB University

Kantor Statistik Kotamadya Bogor. 1992. Kotamadya Bogor Dalam Angka 1991. Bogor.

_____. 1991. Kotamadya Bogor Dalam Angka 1990. Bogor.

_____. 1986. Kotamadya Bogor Dalam Angka 1985. Bogor.

_____. 1981. Kotamadya Bogor Dalam Angka 1980. Bogor.

Kantor Statistik Kabupaten Bogor. 1991. Kabupaten Bogor Dalam Angka 1990. Bogor.

_____. 1986. Kabupaten Bogor Dalam Angka 1985. Bogor.

_____. 1981. Kabupaten Bogor Dalam Angka 1980. Bogor.

_____. 1980. Propinsi Jawa Barat. Potensi Desa Propinsi Jawa Barat.

Koentjaraningrat. 1977. Metoda Penelitian Masyarakat. Penerbit Gramedia. Jakarta.

_____. 1984. Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta.

_____. 1970. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia. Penerbit Djambatan. Jakarta.

_____. 1959. Skema Dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerabatan. Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.

Kleden, I. 1987. Masalah Kemiskinan Sosial Budaya Di Indonesia. Prisma Nomor 8 Tahun 1987. LP3ES. Jakarta.

_____. 1985^a. Pembaruan Kebudayaan, Mengatasi Transisi. Prisma Nomor. 8 tahun 1985. LP3ES. Jakarta.

_____. 1985^b. Kebudayaan: Agenda Buat Daya Cipta. Prisma Nomor. 8 tahun 1985. LP3ES. Jakarta.

Lee, E. S. 1966. Suatu Teori Migrasi. Lembaga kependudukan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Lubis, S. M. 1992. Persepsi Dan Apresiasi Terhadap Marsipature Hutana Be Dengan Tinjauan Sosiopolitis. Makalah Seminar Sehari GPDT-MHB. Yayasan Chairani, R.C. Fondation For Research, Education And Social Affairs. Convention Hall Tiara Hotel Medan, 10 September 1992. Medan Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



1992. MHB Tidak Perlu Diperdakan. Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Medan.

Lubis, E. H. 1993. Hubungan Lama Tinggal Dan Besar Pendapatan Dengan Pola Makan dan Konsumsi Zat Gizi Mahasiswa IPB Asal Tapanuli Selatan. Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Lubis, M.A. 1993. Sejarah Marga-Marga Asli Di Tanah Mandailing. Jakarta.

Marzuki. 1992. Cocok Bagi Negara Berkembang. Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Medan.

Maskun, S. 1976. Masalah Desa Dan Kota Dalam Perspektif Pembangunan (Dialog). Prisma Nomor 3, 1976. LP3ES. Jakarta.

Mantra, I. B. 1981. Population Mobility in West Rice Communities. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Mantra, I.B. dan Kasto, 1984. Analisa Migrasi Indonesia Berdasarkan Data Sensus Penduduk tahun 1972 dan 1980. Biro Pusat Statistik. Jakarta.

Mimbar Umum. (Harian) Penjualan Tanah Milik Rakyat di Kecamatan Sipirok Dolok Hole, Mbingungkan 25-8-1988. Halaman 3 kolom 4-7. Medan.

Mulyana, D. dan Rakhmat. J. 1990. Komunikasi Antar Budaya. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nasution, L.I. 1993. Aspek-Aspek Pembangunan Masyarakat Yang Menjadi Prioritas Dalam Marsipature Hutana Be. Simposium Gerakan Pembangunan Desa Terpadu marsipture Hutana Be, 15-16 Desember 1993. Medan. Sumatera Utara.

Navis, A.A. 1993. Gebu Minang Dengan Marsipature Hutana Be Kesamaan Dalam Program. Makalah Seminar Sehari GPDT-MHB Yayasan Chairani, R.C. Fondation For Research, Education And Social Affairs. Convention Hall Tiara Hotel Medan, 10 September 1992. Medan Sumatera Utara.

Naim, M. 1973. Besarnya Migrasi Suku Bangsa Minangkabau dan Suku Bangsa Lain Di Indonesia, Beberapa Perkiraan Statistik. *dalam Koentjaraningrat Ed..* 1982. Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi. LP3ES. Jakarta.

_____. 1984. Merantau : Migrasi Suku Minangkabau. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Ndraha, T. 1990. Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Tinggal Landas. Rineka Cipta Utama. Jakarta.

Oberg, K. 1972. Readings In Intercultural Communication, Vol. II. Washington DC, Society For Intercultural Education Training And Research.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merkelikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Wirosardjono, S. 1988. *Pertumbuhan Penduduk Indonesia, Catatan Analisa*. Prisma Nomor 3, 1988. LP3ES. Jakarta.

Wolf, E.R. 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. CV. Rajawali. Jakarta.

Zelinsky, W. 1971. *The Hypothesis Of Mobility Transition*, Geographical Reveiw.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Parlindungan, M.O. 1964. PongkinangoIngolana Sinambela Gelar Tuanku Rao. Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak (1816-1833). Tanjung Harapan. Jakarta.

Pasaribu, A. 1993. Semangat . Membangun Perantau Sumatera Utara. Simposium Gerakan Pembangunan Desa Terpadu marsipture Hutana Be, 15-16 Desember 1993. Medan. Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan. 1989. Rencana Pembangunan Lima Tahun 19881/1989-1993/1994. Padang Sidempuan.

Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara. 1986. Potensi Desa Sumatera Utara Tahun 1985. Medan.

Pelly U. 1990. Marsipature Hutana Be, Sebuah Perobahan Pandangan Kosmologis Sumatera Utara. Institut Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pengetahuan (IKIP) Medan. Medan.

_____. 1993. Model Dan Pelembagaan Unit Usaha GPDT-MHB. Simposium Gerakan Pembangunan Desa Terpadu marsipture Hutana Be, 15-16 Desember 1993. Medan. Sumatera Utara.

Prayitno, H. 1985. Pembangunan Ekonomi Pedesaan . Diterbitkan Untuk Yayasan Pengkajian Sosial Ekonomi Malang. Penerbit Liberti Yogyakarta

Porter, R.E. and L.A. Samovar. 1982. Intercultural Communication: A Reader, 3rd Belmonth Wadworth.

Rakhmat, A. 1994. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan Melalui Gerakan Pembangunan Mandiri Pakidulan. Jurusan Sosek. IPB. Bogor.

Ramto, B. 1976. Masalah Desa Dan Kota Dalam Perspektif Pembangunan (Dialog). Prisma Nomor 3, 1976. LP3ES. Jakarta.

Redfield, R. 1982. Masyarakat Petani dan Kebudayaan. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. CV. Rajawali. Jakarta.

Ritonga, J.T. 1989. Tesis Raja Inal Membangun Sumatera Utara. Waspada 31 Mei. Medan.

Rusli, S. 1983. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rusli, S. 1984. Gerak Penduduk dan Sirkulasi Tenaga Kerja Pedesaan. Prisma No:1. 1984. LP3ES. Jakarta.

Sandy, I.M. 1985. Geografi Indonesia. Jakarta.

Sayogyo dan Sayogyo, P. 1983. Sosiologi Pedesaan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

_____. 1990. Pokok-Pokok Penjelasan Gubernur Sumatera Utara Tentang Marsipature Hutana Be (II). Majalah Pembina Nomor 121 Tahun 1990, Kantor Departemen Agama Sumatera Utara. Medan.

Soedjatmoko. 1980. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Soemardjan, S. dan Soemardi, S. 1964. Setangkai Bunga Sosiologi. Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Swara, I.W.Y. 1988. Pola Migrasi Dan Sistem Kekerabatan (Kasus Masyarakat Desa Pandak Gede, Bali). Fakultas Pasca Sarjana. IPB. Bogor.

Tambunan. 1992. MHB Tidak Perlu Dilembagakan. Biro Humas Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Medan.

Tan, M. G. 1977. Penggunaan Data Kuantitatif, *dalam* Kontjaranigrat (Ed.). Metoda Penelitian Masyarakat. Penerbit Gramedia. Jakarta.

Tjokroamidjoyo, B. 1979. Perencanaan Pembangunan. PT. Gunung Agung. Jakarta.

Temple, G. 1976. Mundurnya Involusi Pertanian, Kerja Dan Pembagian Pendapatan Di Pedesaan Jawa. Prisma Nomor 3, 1976. LP3ES. Jakarta.

_____. 1979. Migration To Jakarta. Kumpulan Bacaan Ilmu Kependudukan Lanjutan. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tomagola, T. A. 1985. Perbedaan Ciri-Ciri Pendidikan Antara Migran Sumatera Barat Dengan Migran Jawa Barat Di Jakarta. Prisma Nomor 3. 1985. LP3ES. Jakarta.

Uhlig, Harald. 1980. Pemanfaatan Ruang Kehidupan Pedesaan Dan Bentuk-Bentuk Pemukiman dalam Sosiologi Pertanian, Ulrich Planck. 1993. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Usman. 1993. MHB Sebagai Sarana Trickle Down Effect. Harian Waspada 11-6-1993. Medan.

Wariso, G.Ram. 1989. Migrasi Sirkuler Dan Sektor Informal Di Kotamadya Bogor. Fakultas Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wigna, W. et. al. 1980. Comparison Of The Result Of The Allocation Research Using Two Diffrent Recall Periods. Working Paper For The AES-IRRI Joint Village Studies Review. Los Banos, August 1980. Bogor.

_____. 1987. Beberapa Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Pengumpulan Data Di Lapangan. Lokakarya, Latihan Nasional Pengguna Dan Penghasil Data Dan Indikator Kegiatan Ekonomis Produktif Wanita Di Sektor Formal Dan Informal. Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Dan Biro Pusat Statistik, 5 September 1987. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

L A M P I R A N

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

LAMPIRAN TABEL

1. Waktu dan Bentuk-Bentuk Gerak Penduduk di Dunia Ketiga

Tempat dan Tahun Penelitian	Komutasi	Sirkulasi *Osilasi*	Migrasi Sirkulasi	Migrasi	Selang Waktu
Indonesia, 1973 Desa: Jawa Barat (Hugo, 1978)	Perjalanan teratur (rutin) ke dan dari tempat bekerja atau sekolah (tidak perlu setiap hari)	-	Terus menerus meninggalkan desa sampai 6 bulan	Terus menerus meninggalkan desa sekurang-kurangnya 6 bulan	Tiap hari sampai sekurang-kurangnya 6 bulan
Indonesia, 1975-1976 Desa: Jawa Tengah (Mantra, 1981)	Meninggalkan dukuh selama 6 - 24 jam	-	Gerak ke luar sekurang-kurangnya sehari, tetapi kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun	Perpindahan tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 tahun	6 jam sampai sekurang-kurangnya 1 tahun
Malaysia, 1977 Desa: Kalantan Utara (Maude, 1981)	Secara teratur meninggalkan desa, tetapi kembali sekurangnya satu kali tiap minggu	-	Terus menerus meninggalkan desa sampai 12 bulan di samping tetap menjadi anggota rumah tangga di desa	Terus menerus meninggalkan desa sekurangnya 12 bulan, tetapi bisa kembali lagi ke desa	Tiap minggu sampai sekurang-kurangnya 1 tahun
Vanuatu, 1969-1970 Pulau Tongoa (Bedford, 1973)	-	Pergi secara teratur (rutin) untuk waktu 1 hari sampai kurang dari 1 bulan	Pergi untuk waktu sekurangnya 1 bulan tetapi dengan maksud untuk kembali	Gerak "permanen" tanpa ada maksud untuk kembali, tetapi hanya untuk kunjungan	Tiap hari rutin sampai migrasi "permanen"
Peru, 1971-1972 Komunitas Cuzeo (Skeldon, 1979)	-	("Pendular Migration") Meninggalkan komunitasnya sampai 3 bulan atau kurang	("Semi Permanen Migration" dan tetap kembali) Pergi untuk beberapa bulan	Secara pasti mengubah tempat tinggal, tidak kembali kecuali untuk kunjungan	Kurang dari 3 bulan secara pasti mengubah tempat tinggal



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel (lanjutan)

Tempat dan Tahun Penelitian	Komutasi	Sirkulasi *Osilasi*	Migrasi Sirkulasi	Migrasi	Selang Waktu
Libania, 1976 Desa: Nimba (Smith, 1977)	("Regular Circulation") Meninggalkan desa sampai 24 jam untuk bekerja, berdagang, subsistensi	-	Meninggalkan desa untuk waktu sekurangnya 24 jam dan tidak lebih dari 1 tahun	Mengubah tempat tinggal secara permanen	Tiap hari sampai mengubah tempat tinggal secara permanen
Hawaii, 1971 Desa: Puna (Mukherji, 1975)	Tiap hari meninggalkan desa untuk bekerja atau pendidikan	-	Meninggalkan desa sekurangnya 24 jam dengan maksimum kembali	Mengubah tempat tinggal secara permanen, maksimum 40 tahun	5-6 jam sampai 14 tahun
Papua New Guinea, 1974-1976 Desa: Simbu, Propinsi New Ireland (Young, 1977)	-	Gerak harian secara rutin untuk kunjungan-kunjungan singkat	Kembali setelah periode pergi dari desa	Tempat tinggal di luar desa selama survei	Tidak ada selang waktu yang khusus
Thailand, 1976-1977 Desa: Propinsi Chiang Mai (Singhantara dan Renard, 1981)	6 jam- 5 bulan pergi tiap hari/ tiap minggu untuk bekerja, sekolah, pergi musiman untuk bekerja, bisnis kerabat	-	Meninggalkan desa 1 minggu sampai 14 tahun tetapi tetap membiayai ru- mahtangga di desa dan secara berkala berkunjung ke desa	Secara pasti mengubah tempat tinggal dari sekurangnya 1 minggu sampai "perpindahan mutlak" (total displacement) melalui perkawinan, adopsi	Tidak ada selang waktu selama pengumpulan data. Rangkaian kesatuan waktu 6 jam sampai perpindahan mutlak, ditentukan dari catatan lapangan
Selang waktu	5-6 jam sampai 5 bulan	Tiap hari sampai kurang dari 3 bulan	1 hari sampai 14 tahun	1 minggu sampai migrasi permanen	5-6 jam sampai perpindahan mutlak

Sumber: Prothero, R Mansel dan Chapman, Murray, 1985, dalam Abustam M.I, 1989.



2. Skor-Skor Sikap Migran Terhadap Budaya Batak (In-group) Dan Budaya Sunda (Out-group)

Nomor Responden	Skor Sikap Migran Terhadap Budaya						Nomor Responden	Skor Sikap Migran Terhadap Budaya					
	Batak (In-group)			Sunda (Out-group)				Batak (In-group)			Sunda (Out-group)		
	Skor	Rata-rata	Kategori	Skor	Rata-rata	Kategori		Skor	Rata-rata	Kategori	Skor	Rata-rata	Kategori
1	75	3.95	4	53	2.79	3	31	65	3.42	3	55	2.89	3
2	82	4.32	4	79	4.16	4	32	61	3.21	3	50	2.63	3
3	77	4.05	4	59	3.11	3	33	50	2.63	3	64	3.37	3
4	71	3.74	4	52	2.74	3	34	78	4.10	4	65	3.42	3
5	61	3.21	3	56	2.95	3	35	66	3.47	3	56	2.95	3
6	75	3.95	4	61	3.21	3	36	72	3.79	4	44	2.32	2
7	67	3.54	4	57	3.00	3	37	68	3.58	4	71	3.74	4
8	70	3.68	4	55	2.89	3	38	92	4.84	5	63	3.31	3
9	66	3.47	3	67	3.53	4	39	73	3.84	4	56	2.95	3
10	67	3.54	4	53	2.79	3	40	69	3.63	4	54	2.84	3
11	78	4.10	4	55	2.89	3	41	72	3.79	4	71	3.74	4
12	64	3.37	3	58	3.05	3	42	74	3.89	4	59	3.10	3
13	56	2.95	3	61	3.21	3	43	63	3.34	3	62	3.26	3
14	70	3.68	4	48	2.53	3	44	72	3.79	4	44	2.32	2
15	79	4.16	4	68	3.58	4	45	66	3.47	3	69	3.63	4
16	71	3.74	4	55	2.89	3	46	79	4.16	4	41	2.15	2
17	68	3.58	4	75	3.95	4	47	70	3.68	4	48	2.52	3
18	77	4.05	3	67	3.53	4	48	75	3.98	4	41	2.16	2
19	69	3.63	4	64	3.37	3	49	65	3.42	3	58	3.05	3
20	66	3.47	3	58	3.05	3	50	75	3.98	4	56	2.95	3
21	67	3.54	4	57	3.00	3	51	73	3.84	4	55	2.89	3
22	68	3.58	4	62	3.26	3	52	68	3.58	4	50	2.63	3
23	66	3.47	3	63	3.31	3	53	63	3.34	3	67	3.52	4
24	69	3.63	4	49	2.57	3	54	71	3.74	4	45	3.37	3
25	71	3.74	4	61	3.21	3	55	47	2.47	2	58	3.05	3
26	59	3.10	4	58	3.05	3	56	57	3.00	3	45	2.37	2
27	80	4.21	4	60	3.16	3	57	74	3.89	4	45	2.36	2
28	64	3.37	3	66	3.47	3	58	75	3.98	4	70	3.68	4
29	80	4.21	4	73	3.84	4	59	72	3.79	4	67	3.53	4
30	72	3.79	4	60	3.15	3	60	79	4.16	4	50	2.63	3

Sumber : Data Primer, 1993.

Tabel Lampiran 2 Pola Bersikap Migran Terhadap Kebudayaan Batak (In-group) Dan Sunda (Out-group).

Kategori		Budaya Batak (In-group)		
		Kuat	Labil	Jumlah
Sunda Out-group	Lemah	3 (8.3)	3 (5.0)	6 (10.0)
	Labil	28 (46.7)	13 (21.7)	42 (70.0)
	Kuat	10 (13.3)	2 (3.3)	12 (20.0)
Jumlah		42 (68.3)	18 (30.0)	60 (100.0)

Sumber : Data Primer, 1993.

3. Hubungan Karakteristik Migran (Individu dan Keluarga) Dengan Penggunaan Bahasa Utama

Karakteristik Migran	Bahasa			Bahasa			
	Batak	Indonesia	Sunda	Batak	Indonesia	Sunda	
	Berbicara Dengan Istri			Berbicara Dengan Istri			
Suku Istri	1. Batak 2. Sunda	46 (76.7) 0	6 (10.0) 3 (5.0)	5 (8.3) 0	13 (22.8) 0 (0.0)	32 (56.1) 2 (3.5)	9 (15.8) 1 (1.8)
Status Rumah	1. Mlk Sendiri 2. Dinas 3. Kontrak	15 (25.0) 4 (6.7) 27 (45.0)	3 (5.0) 0 (0.0) 6 (10.0)	3 (5.0) 0 (0.0) 2 (3.3)	4 (7.0) 9 (15.8) 1 (1.8)	12 (21.1) 19 (33.3) 3 (5.3)	4 (7.0) 6 (10.5) 0 (0.0)
Lama Domisili	1. Lama 2. Sedang 3. Singkat	17 (28.3) 14 (23.3) 15 (25.0)	4 (6.7) 2 (3.3) 3 (5.0)	0 (0.0) 3 (5.0) 2 (3.3)	3 (5.3) 2 (3.5) 8 (14.0)	15 (6.7) 10 (17.5) 9 (15.8)	2 (3.5) 5 (8.8) 3 (5.3)
Umur	1. Muda 2. Sedang 3. Tua	15 (25.0) 19 (31.7) 12 (20.0)	6 (10.0) 1 (1.7) 2 (3.3)	2 (3.3) 3 (5.0) 0 (0.0)	6 (10.5) 4 (7.0) 3 (5.3)	11 (19.3) 12 (21.1) 11 (19.3)	6 (10.5) 4 (7.0) 0 (0.0)
Tkt Pendidikan	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	5 (8.3) 30 (50.0) 11 (18.3)	2 (3.3) 6 (10.0) 1 (1.7)	0 (0.0) 4 (6.7) 1 (1.7)	1 (1.8) 8 (14.0) 4 (7.0)	6 (10.5) 22 (8.3) 6 (10.5)	0 (0.0) 10 (17.5) 0 (1.0)
Jns Pekerjaan	1. Dagang 2. Non Dagang	42 (71.0) 4 (6.7)	4 (6.7) 5 (8.3)	4 (6.7) 1 (1.7)	1 (1.8) 12 (21.1)	8 (14.0) 26 (45.6)	1 (1.8) 9 (15.8)
		Berbicara Dengan Kerabat			Berbicara Dengan Masyarakat Lokal		
Suku Istri	1. Batak 2. Sunda	54 (22.8) 3 (0.0)	3 (5.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0)	41 (68.3) 3 (5.0)	16 (26.7) 0 (0.0)
Status Rumah	1. Mlk Sendiri 3. Kontrak 2. Dinas	19 (31.7) 35 (58.3) 3 (5.0)	2 (3.3) 0 (0.0) 1 (1.7)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	13 (21.7) 28 (46.7) 3 (5.0)	8 (13.3) 7 (11.7) 1 (1.7)
Lama Domisili	1. Lama 2. Sedang 3. Singkat	18 (30.0) 19 (31.7) 20 (33.3)	3 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	14 (23.3) 15 (25.0) 15 (25.0)	7 (11.7) 4 (6.7) 5 (8.3)
Umur	1. Muda 2. Sedang 3. Tua	23 (38.3) 23 (38.3) 11 (18.3)	0 (0.0) 0 (0.0) 3 (5.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	17 (28.3) 18 (30.0) 9 (15.0)	6 (10.0) 5 (8.3) 5 (8.3)
Tkt Pendidikan	1. Tinggi 2. Sedang 3. Rendah	4 (6.7) 40 (66.7) 13 (21.7)	3 (5.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)	6 (10.0) 29 (48.3) 9 (15.0)	1 (1.7) 11 (18.3) 4 (6.7)
Jns Pekerjaan	1. Non Dagang 2. Dagang	7 (11.7) 50 (83.3)	3 (5.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0)	0 (0.0) 0 (0.0)	7 (11.7) 37 (68.3)	3 (5.0) 13 (21.6)

Sumber : Data Primer, 1993.

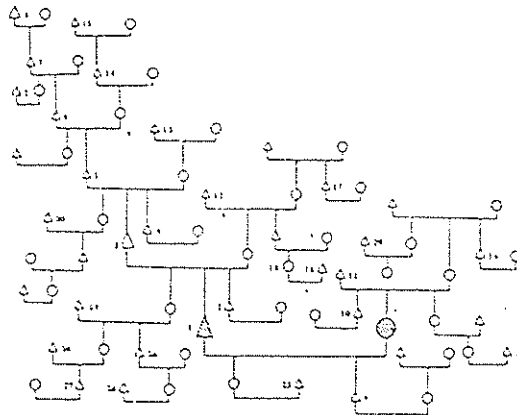
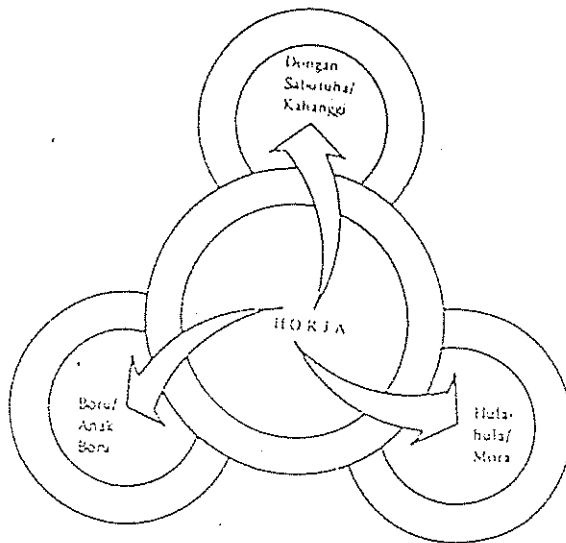
4. Hubungan Karakteristik Migran Dengan Saluran Partisipasi Yang Diinginkan Dalam GPDT-MHB

Cara/Saluran Bantuan/Partisipasi Yang Diinginkan	Umur						Jumlah Tanggungan					
	Muda		Sedang		Tua		Kecil		Sedang		Besar	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sendiri	3	15	1	5	2	14	3	13	1	5	2	20
Beberapa Orang	17	85	8	42	1	7	16	70	8	40	2	20
Lembaga khusus	0	0	10	53	11	79	4	17	11	55	6	60
Jumlah	20	100	19	100	14	100	23	100	20	100	10	100
Cara/Saluran Bantuan/Partisipasi Yang Diinginkan	Tingkat Pendidikan						Masa Domisili					
	Rendah		Sedang		Tinggi		Singkat		Sedang		Lama	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sendiri	1	9	3	9	2	29	3	50	1	3	2	11
Beberapa Orang	3	27	23	66	0	0	1	17	24	83	1	6
Lembaga Khusus	7	64	9	25	5	71	2	33	4	14	15	83
Jumlah	11	100	35	100	7	100	6	100	29	100	18	100
Cara/Saluran Bantuan/Partisipasi Yang Diinginkan	Tingkat Pendapatan						Jenis Pekerjaan					
	Rendah		Sedang		Tinggi		Dagang		Non Dagang			
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Sendiri	1	13	4	10	1	17	4	9	2	20		
Beberapa Orang	7	87	19	49	0	0	23	53	3	30		
Lembaga Khusus	0	0	16	41	5	83	16	38	5	50		
Jumlah	8	100	39	100	6	100	43	100	10	100		
Cara/Saluran Bantuan/Partisipasi Yang Diinginkan	Daerah Asal				Suku Istri							
	Mandailing		Angkola		Batak		Sunda					
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%				
Sendiri	5	12	1	9	5	10	1	33				
Beberapa Orang	19	45	7	64	24	48	2	67				
Lembaga Khusus	18	43	3	27	21	42	0	0				
Jumlah	42	100	11	100	50	100	3	100				

Sumber : Data Primer, 1993.

LAMPIRAN GAMBAR

1. Konsepsi Dalihan Natolu Dan Silsilah Kekerabatan Dalihan Natolu



KETERANGAN:

- 1 : Hubungan Sinden
- 2 : Hubungan Perkawinan
- 3 : Nis. II : Marga pengambilan gado dari pihak Epi

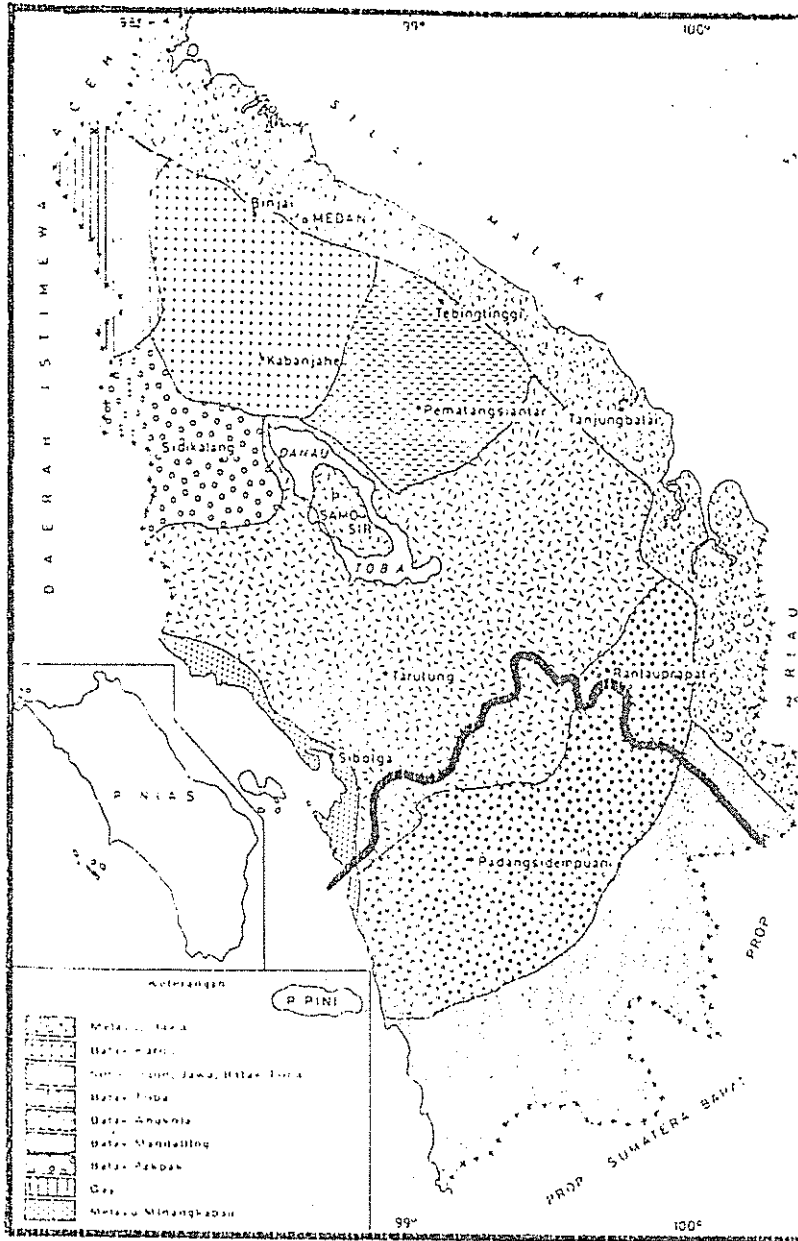
Sumber : 2a : Harahap dan Siahaan, 1985
 2b : Siahaan, 1972

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

2. Penyebaran Suku Bangsa Di Sumatera Utara

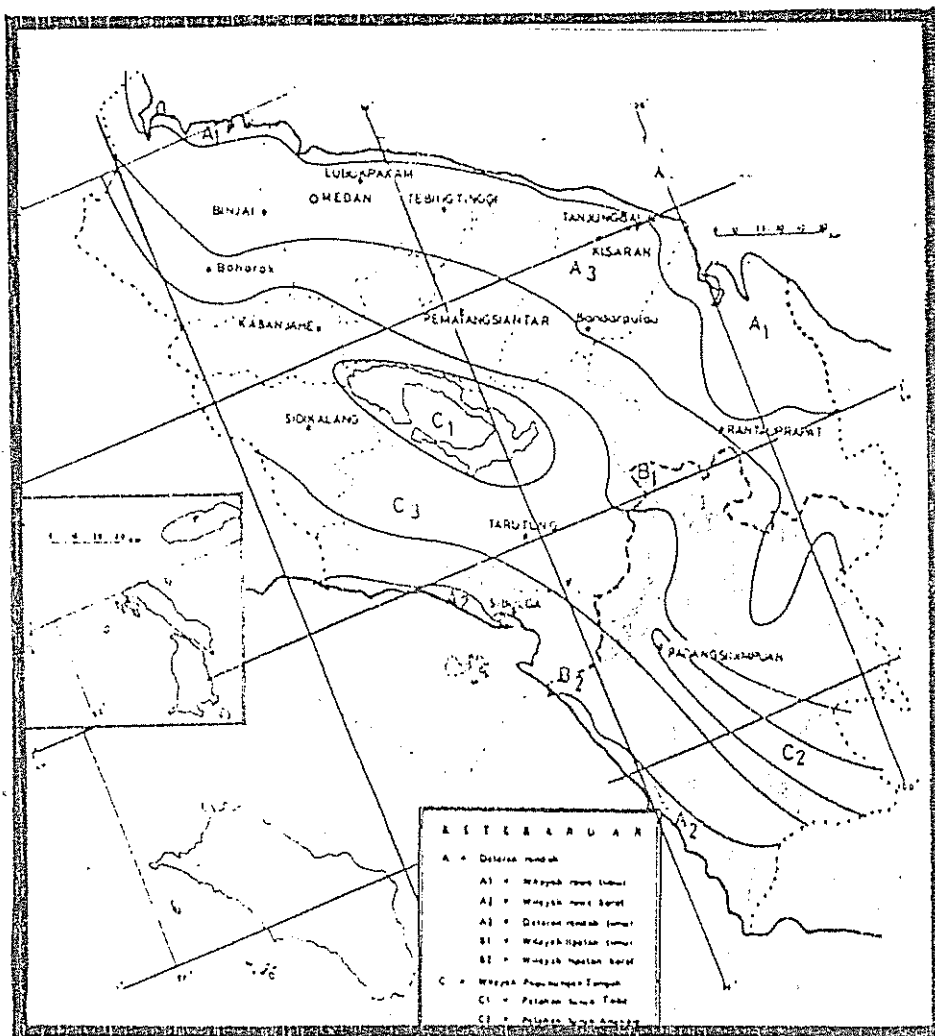


Sumber : Bangun, 1970.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

4. Wilayah Fisiografi Propinsi Sumatera Utara



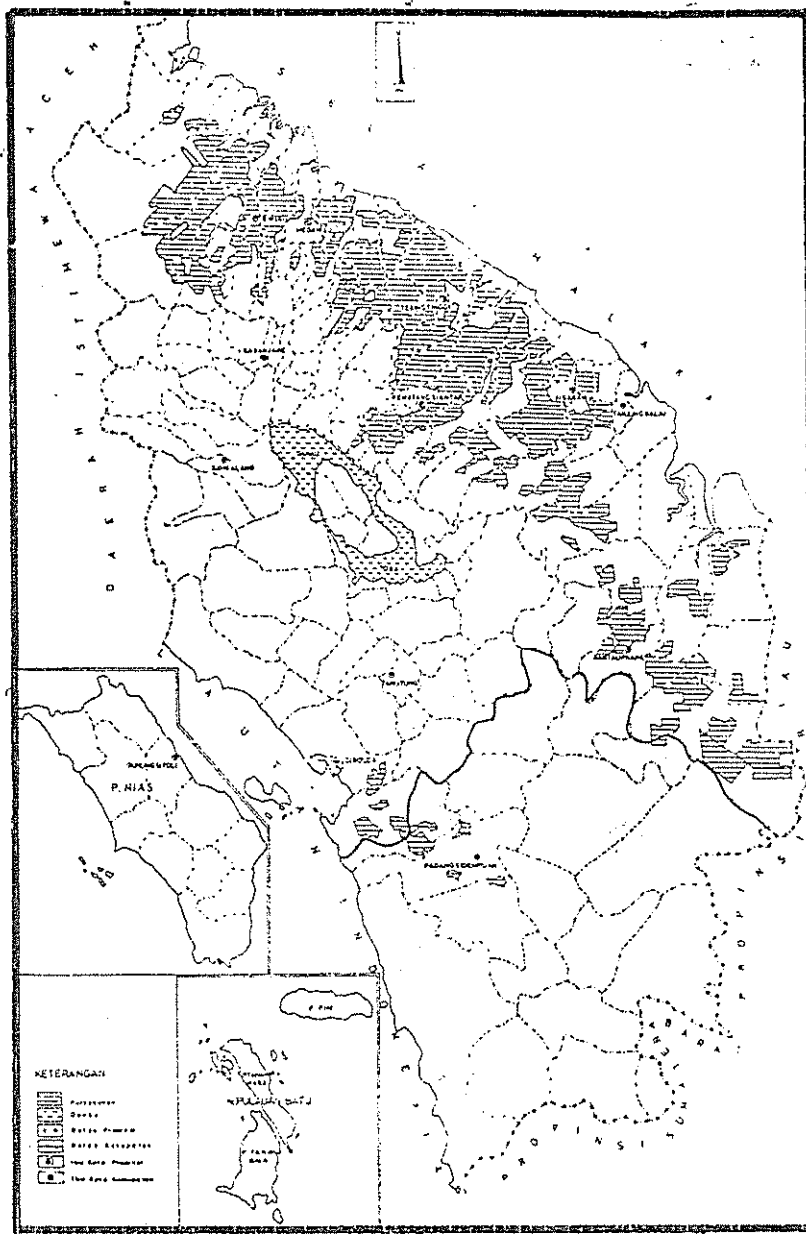
Sumber : Sandi, 1985.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

I 6. Propinsi Sumatera Utara: Peta Perkebunan Besar



Sumber : Silalahi, 1982.

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.